



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No.17 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21058-21208, Fax (0414) 21058

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 274/100.3.3/XII/TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025-2029**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Grand Design Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan untuk pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dipandang perlu menyusun Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 140 tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326).

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 815).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung; dan
- b. Proses Bisnis Level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis Level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0.

KETIGA : Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Benteng
pada tanggal 22 Desember 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS,**



Ir. AL AMIN, S.Pi., M.M

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19771014 201501 1 001



Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; dan
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 274/100.3.3/XII/TAHUN 2025
TANGGAL 22 DESEMBER 2025
TENTANG
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025-2029

PETA PROSES BISNIS PADA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 bahwa visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 adalah ""Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera"

1. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif,
 - b. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,
 - c. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah,
 - d. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan,
 - e. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah,
 - f. Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama,
 - g. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Pelaksanaan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh perangkat daerah, salah satunya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah bahwa peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan

tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

II. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan peta proses bisnis ini bertujuan agar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan :

1. mampu melaksanakan tugas dan fungsi tugas secara efektif dan efisien,
2. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan, dan
3. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah :

1. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan
2. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

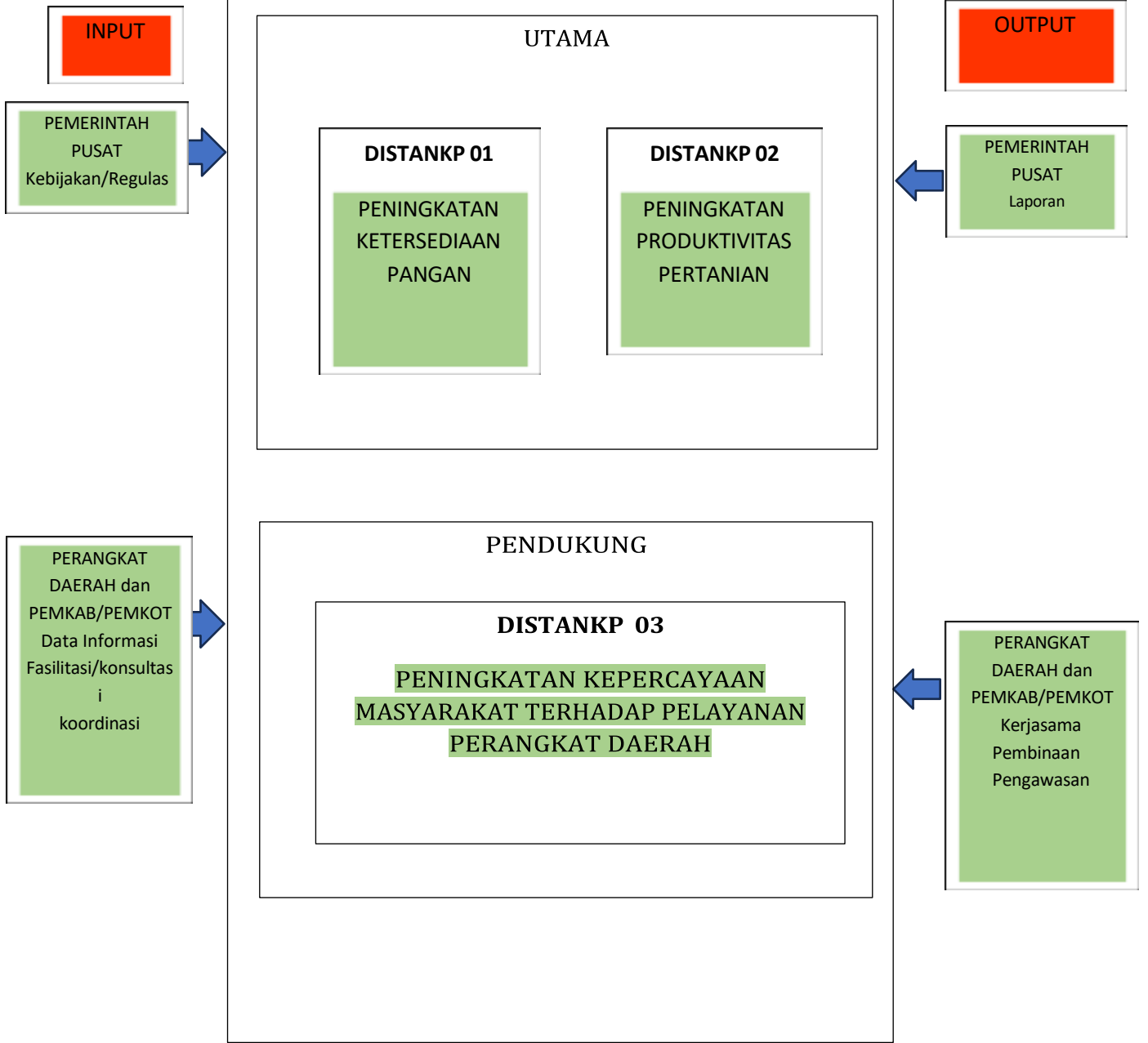
- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 6. Undang-Undang Nomor 140 tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326).
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);

10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 747).

IV. Peta Proses Bisnis

Merujuk pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029, terdapat 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemerintahan kedepan sebagai upaya mendukung visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar periode Tahun 2025-2029. Ketiga sasaran tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu 2 sasaran utama dan 1sasaran pendukung. Sasaran utama merupakan hal teknis yang akan dicapai oleh seluruh bidang yang ada dalam lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sedangkan Sasaran Pendukung terdiri dari program dan kegiatan yang sifatnya rutin untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran utama. Adapun Peta Proses Bisnis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

**PETA PROSES BISNIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2025-2029**



PETA UTAMA



SASARAN UTAMA 1

DISTANKP 01 PENINGKATAN KETERSEDIAAN PANGAN



DISTANKP 01.01 PENGELOLAAN
SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK
KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN



DISTANKP 01.02 PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT



DISTANKP 01.03 PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN



DISTANKP 01.04 PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN

SASARAN UTAMA 2

DISTANKP 02 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN



DISTANKP 02.01 PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN



DISTANKP 02.02 PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN



DISTANKP 02.03 PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER



DISTANKP 02.04 PENGENDALIAN
DAN PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN



DISTANKP 02.05 PERIZINAN
USAHA PERTANIAN



DISTANKP 02.06 PENYULUHAN
PERTANIAN

SASARAN PENUNJANG

DISTANKP 03 PENINGKATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



DISTANKP 03.01 PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEG.01.01

**DISTANKP 0 1.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK
KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**



DISTANKP 01.01.01 PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DAN SULURUH
PENDUKUNG KEMANDIRIAN
PANGAN SESUAI KEWENANGAN
DAERAH

SUBKEG 01.01.01

**DISTANKP 01.01.01 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN
SULURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI
KEWENANGAN DAERAH**



DISTANKP 01.01.01.01
PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
PENDUKUNG
KEMANDIRIAN PANGAN
LAINNYA

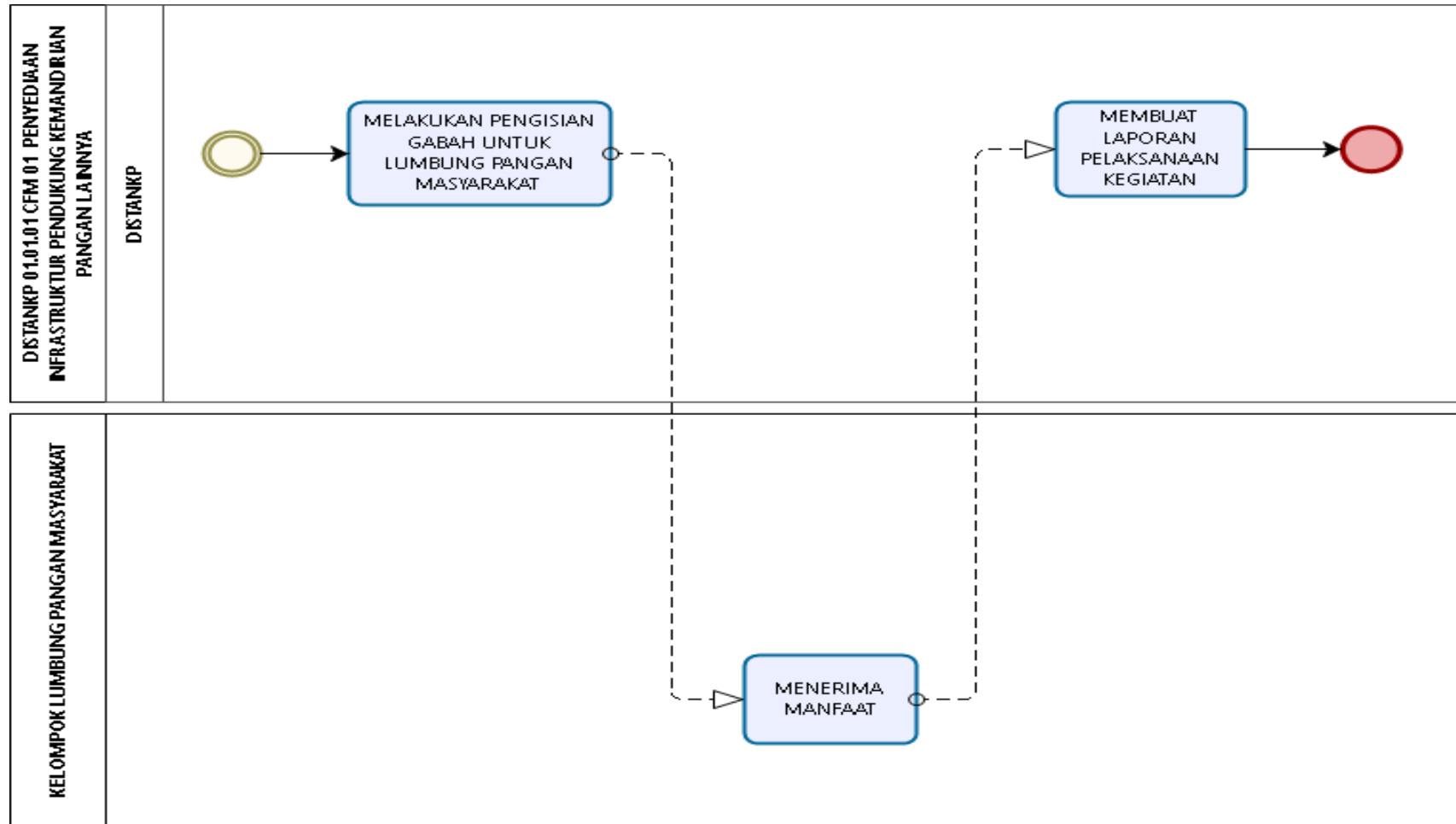


DISTANKP 01.01.01.02
PENGKOORDINASIAN
DAN SINKRONISASI
PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
LOGISTIK

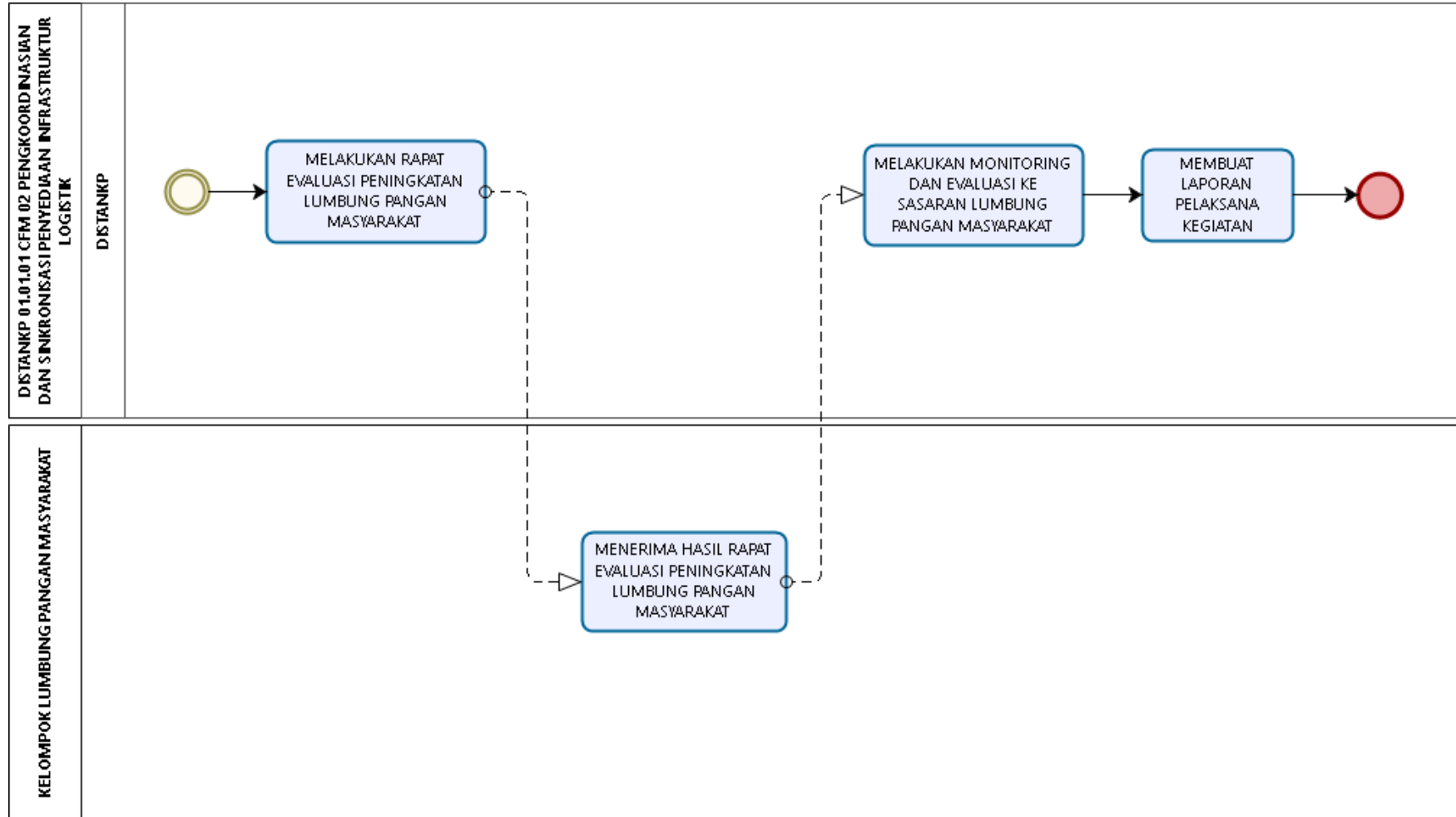


DISTANKP 01.01.01.03
PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KAB/KOTA

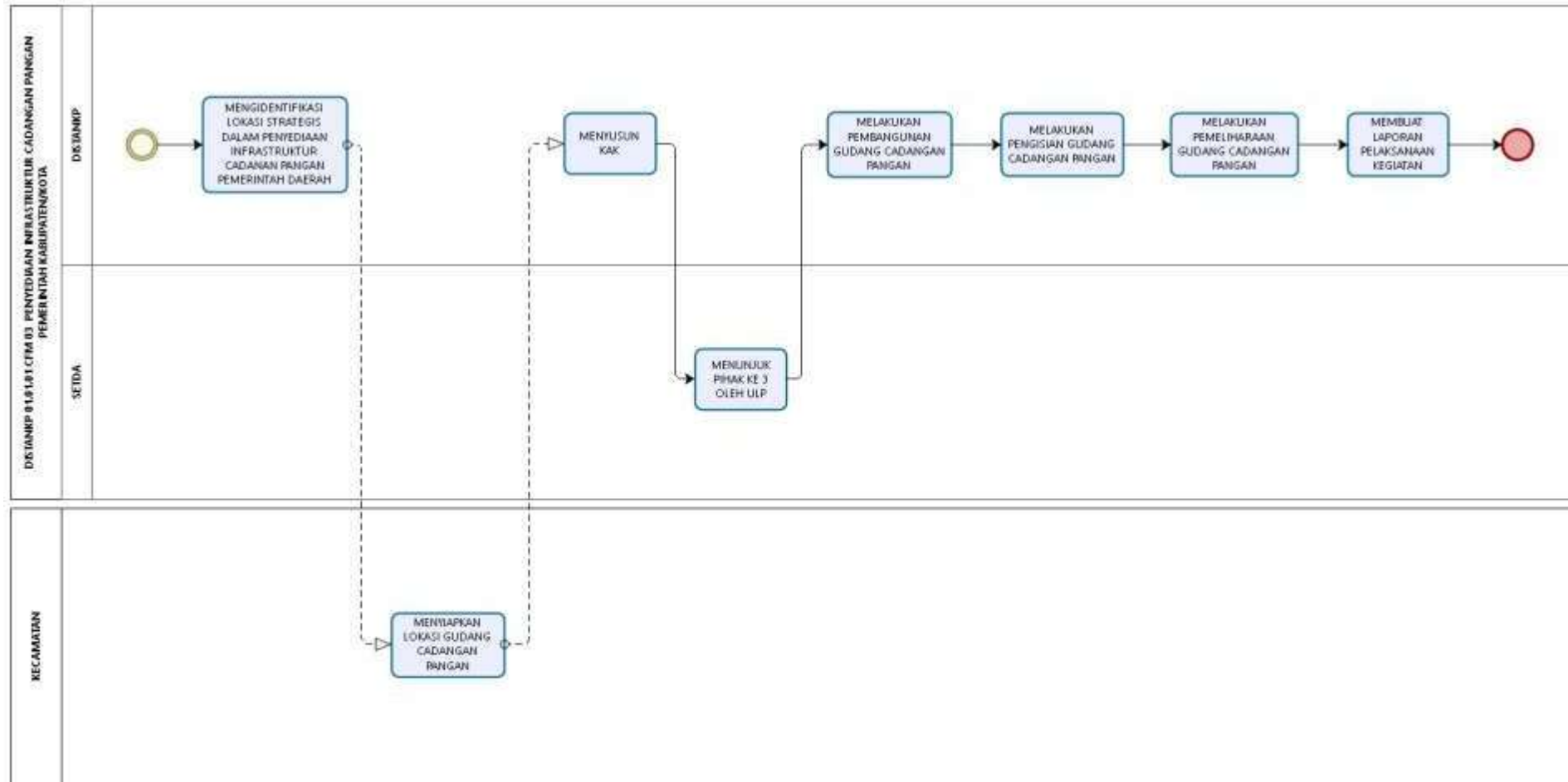
01.01.01 CFM 01



01.01.01 CFM 02



01.01.01 CFM 03



KEG 01.02

DISTANKP 01.02 PENINGKATAN DIVERSIFIKASIDAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT



DISTANKP 01.02.01 PENYEDIAAN & PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DGN KEBUT DAERAH KAB/KOTA DLM RANGKA STABILISASI PASOKAN & HARGA PANGAN



DISTANKP 01.02.02 PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KAB.KOTA



DISTANKP 01.02.03 PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL YANG TIDAK DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH PROPINSI



DISTANKP 01.02.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DGN ANGKA KECUKUPAN GIZI

SUBKEG 01.02.01

DISTANKP 01.02.01 PENYEDIAAN & PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DGN KEBUT DAERAH KAB/KOTA DLM RANGKA STABIL KASIPASOKAN & HARGA PANGAN



DISTANKP 01.02.01.01
PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS
SUMBER DAYA LOKAL



DISTANKP 01.02.01.02
KOORDINASI, SINKRONISASI &
PELAKS DISTRIBUSI PANGAN
POKOK & PANGAN LAINNYA



DISTANKP 01.02.01.03
PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN KELUARGA



DISTANKP 01.02.01.04
PENSTABILISASIAN PASOKAN &
HARGA PANGAN TINGKAT
PRODUSEN DAN KONSUMEN DI
KAB/KOTA



DISTANKP 01.02.01.05
PENGEMBANGAN USAHA
PENGOLAHAN PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL



DISTANKP 01.02.01.06
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
DISTRIBUSI PANGAN KAB/KOTA



DISTANKP 01.02.01.07
PEMANTAUAN STOK PANGAN



DISTANKP 01.02.01.08
PENYEDIAAN INFORMASI HARGA
PANGAN TINGKAT PRODUSEN
DAN KONSUMEN WILAYAH
KAB/KOTA



DISTANKP 01.02.01.09
PENKOORDINASIAN &
SINKRONISASI PEMANTAUAN
STOK, PASOKAN & HARGA
PANGAN POKOK STRATEGIS

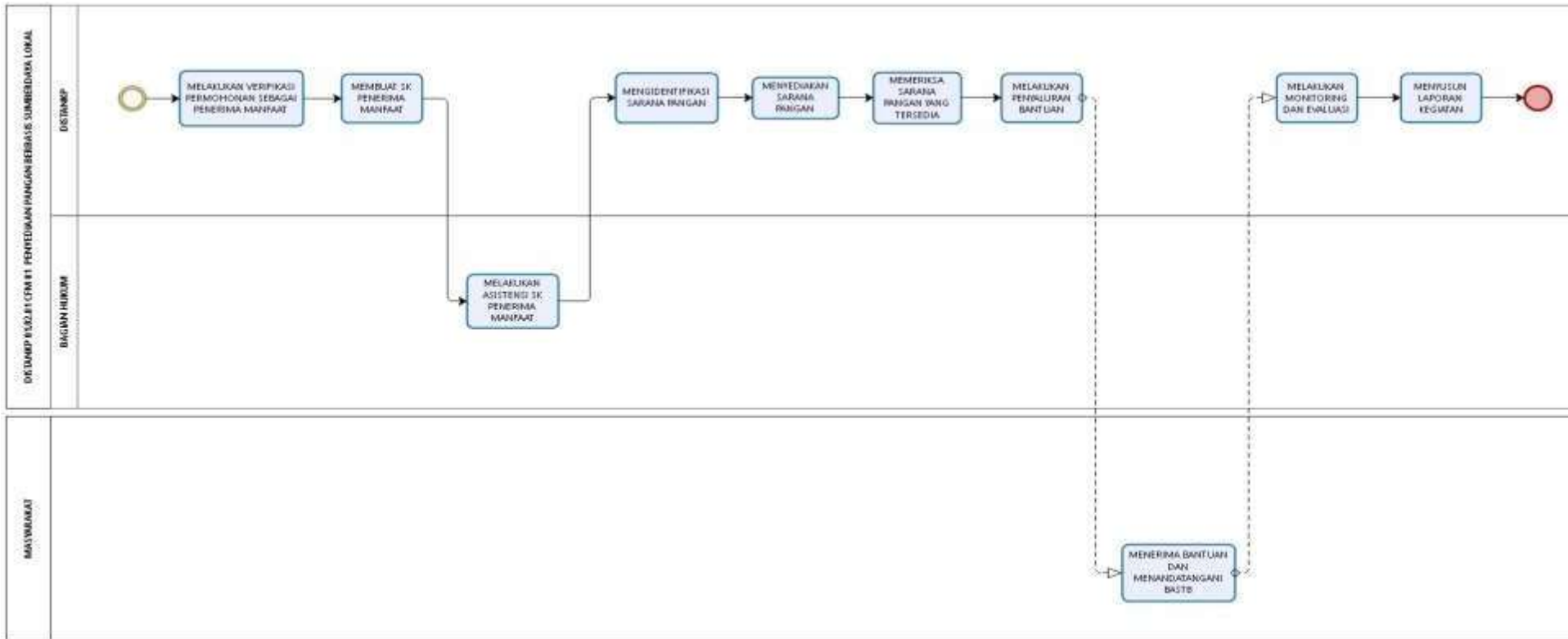


DISTANKP 01.02.01.10
PENYUSUNAN NERACA BAHAN
MAKANAN (NBM)

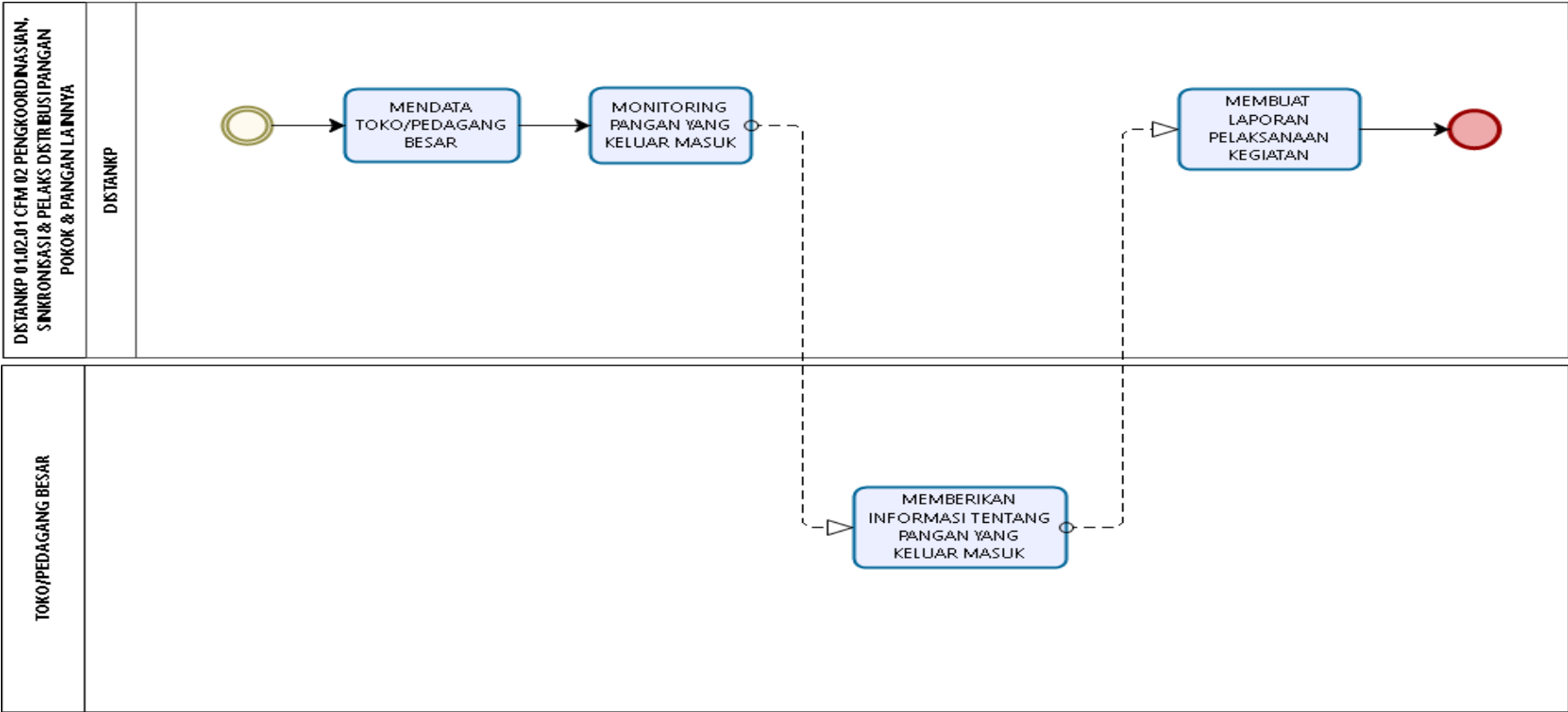


DISTANKP 01.02.01.11
PENYUSUNAN PROYEKSI
NERACA PANGAN WILAYAH
KAB/KOTA

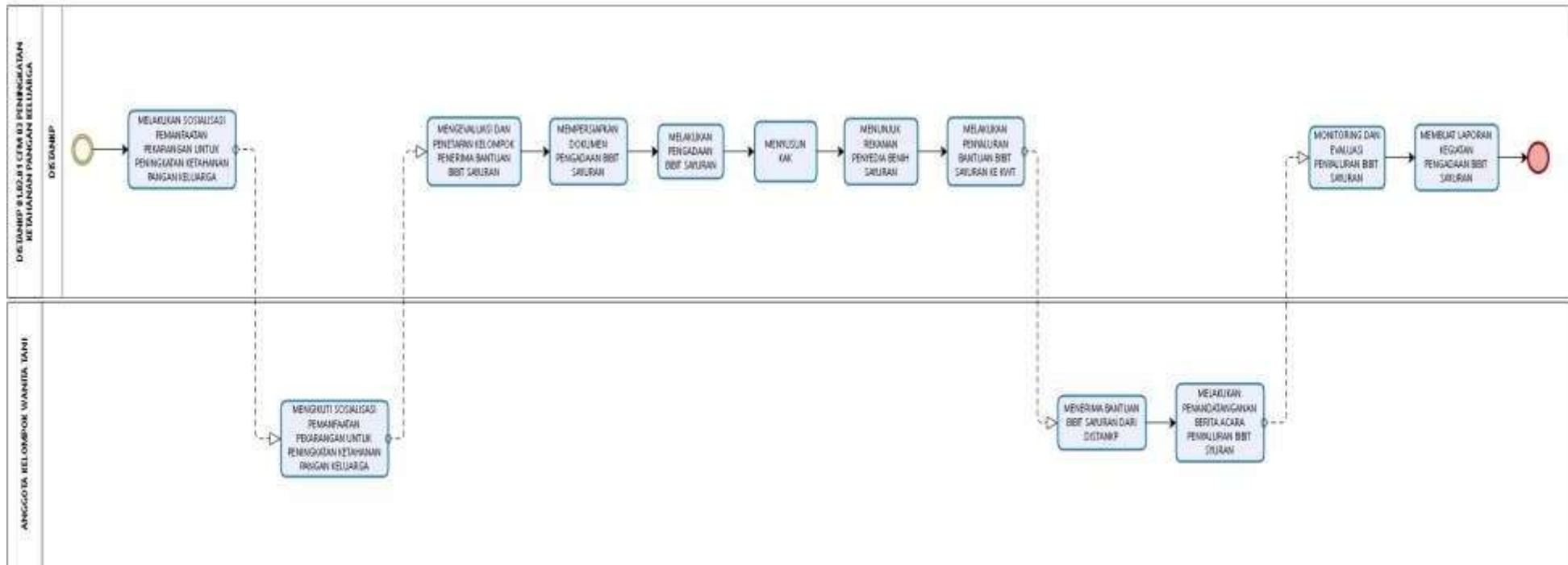
01.02.01 CFM 01



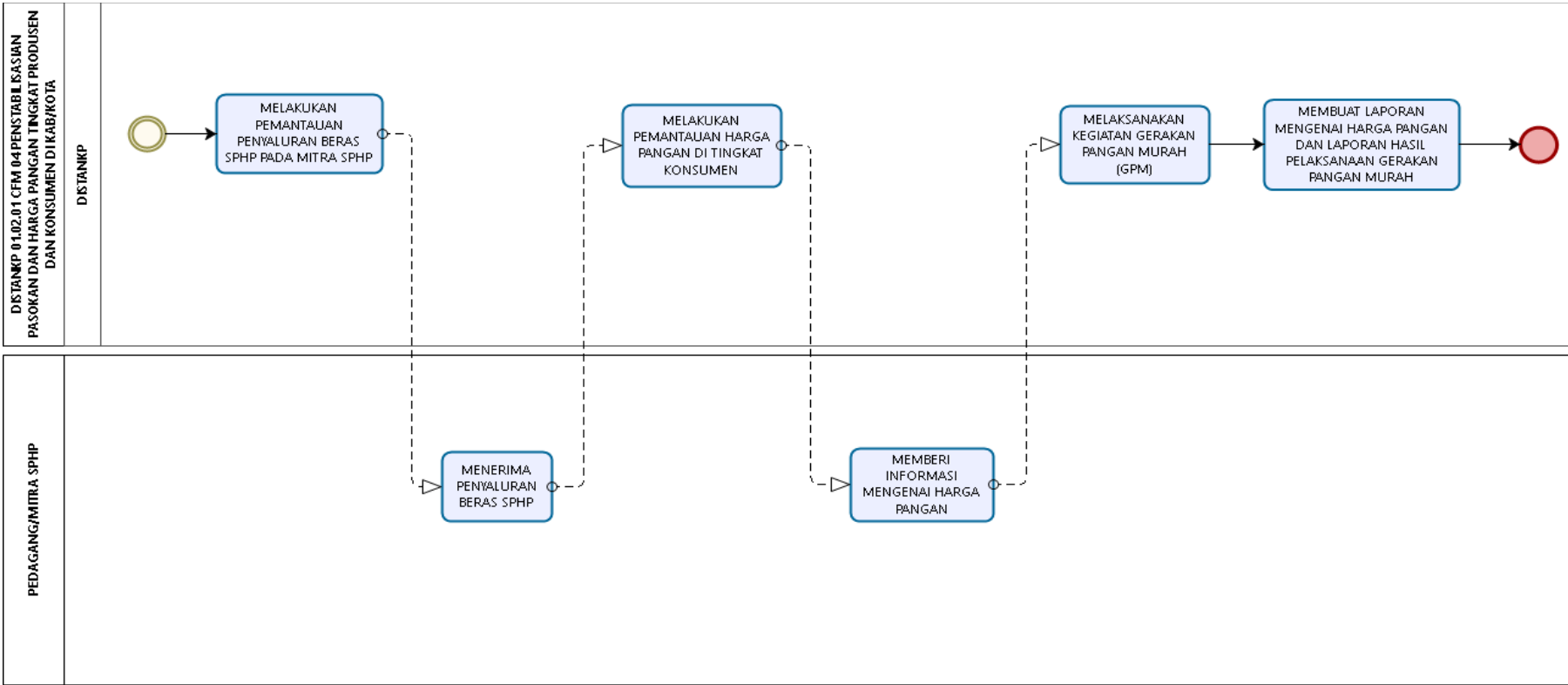
01.02.01 CFM 02



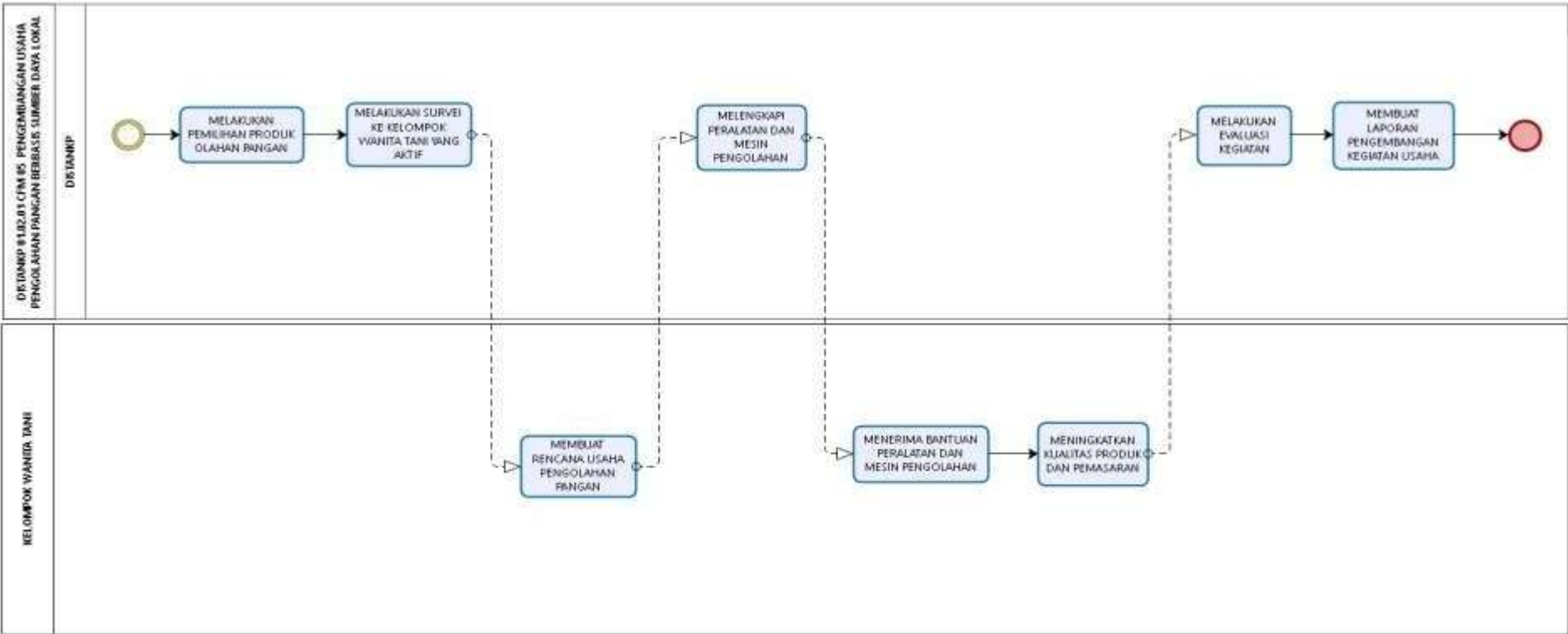
01.02.01 CFM 03



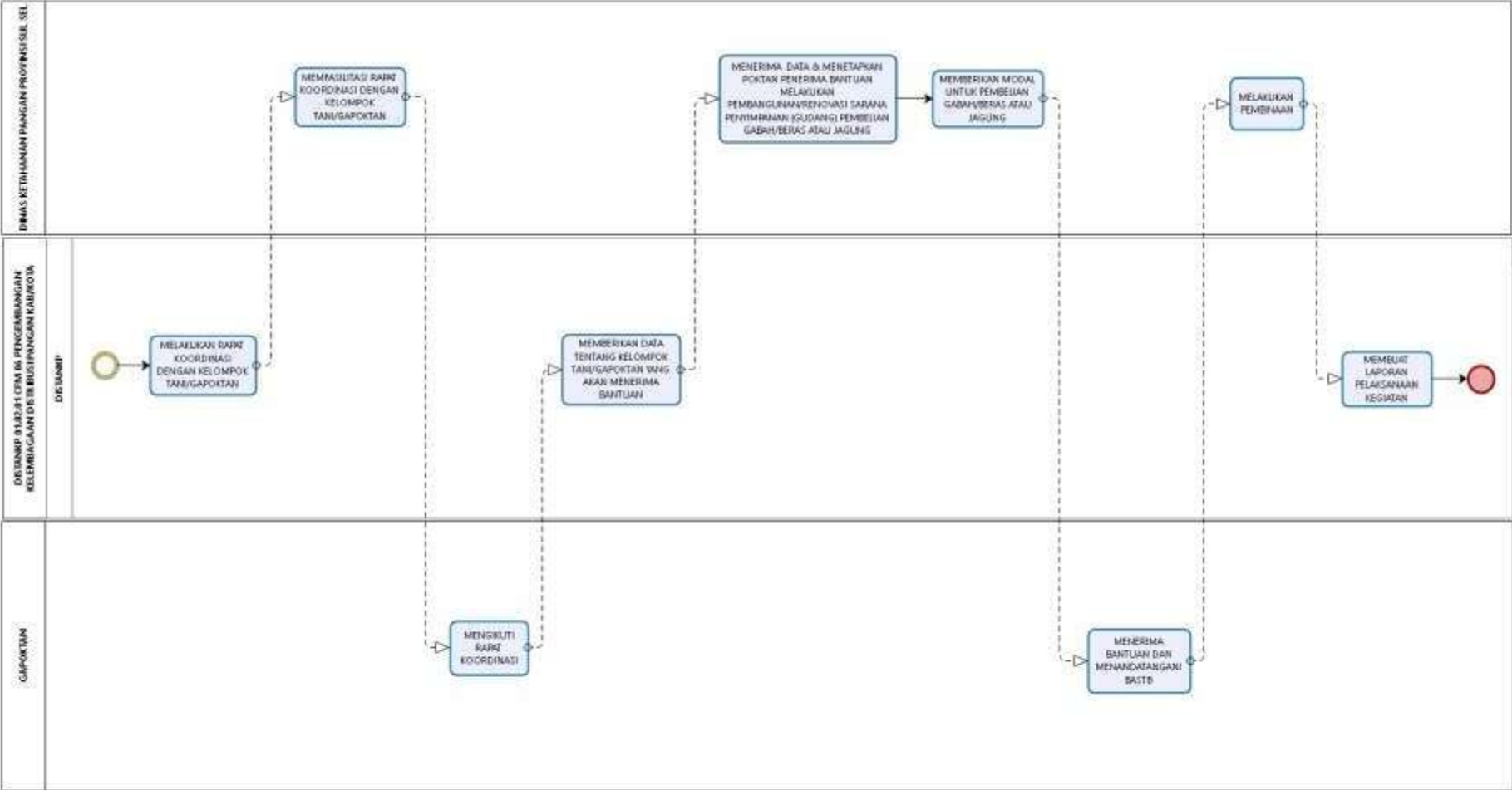
01.02.01 CFM 04



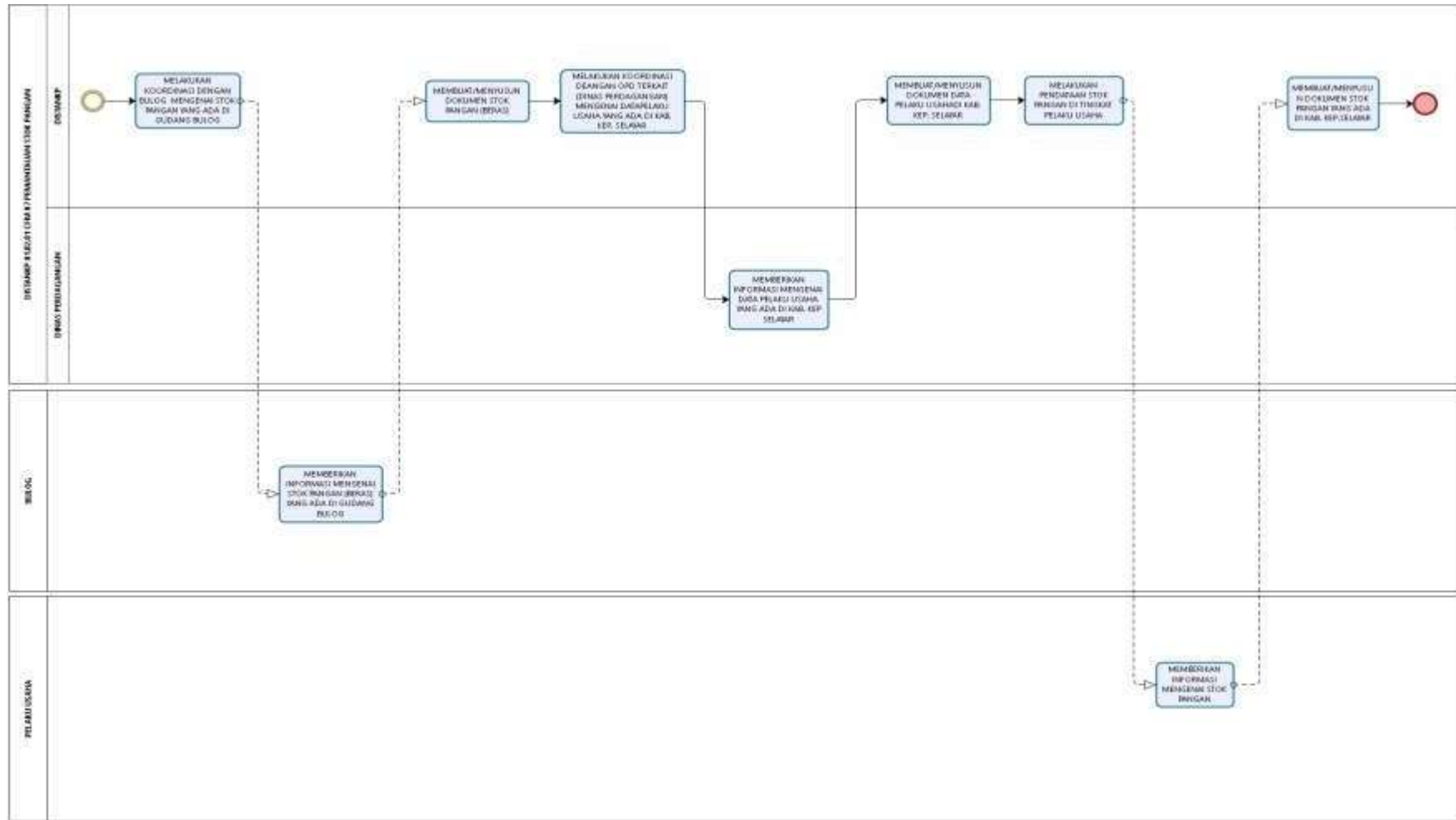
01.02.01 CFM 05



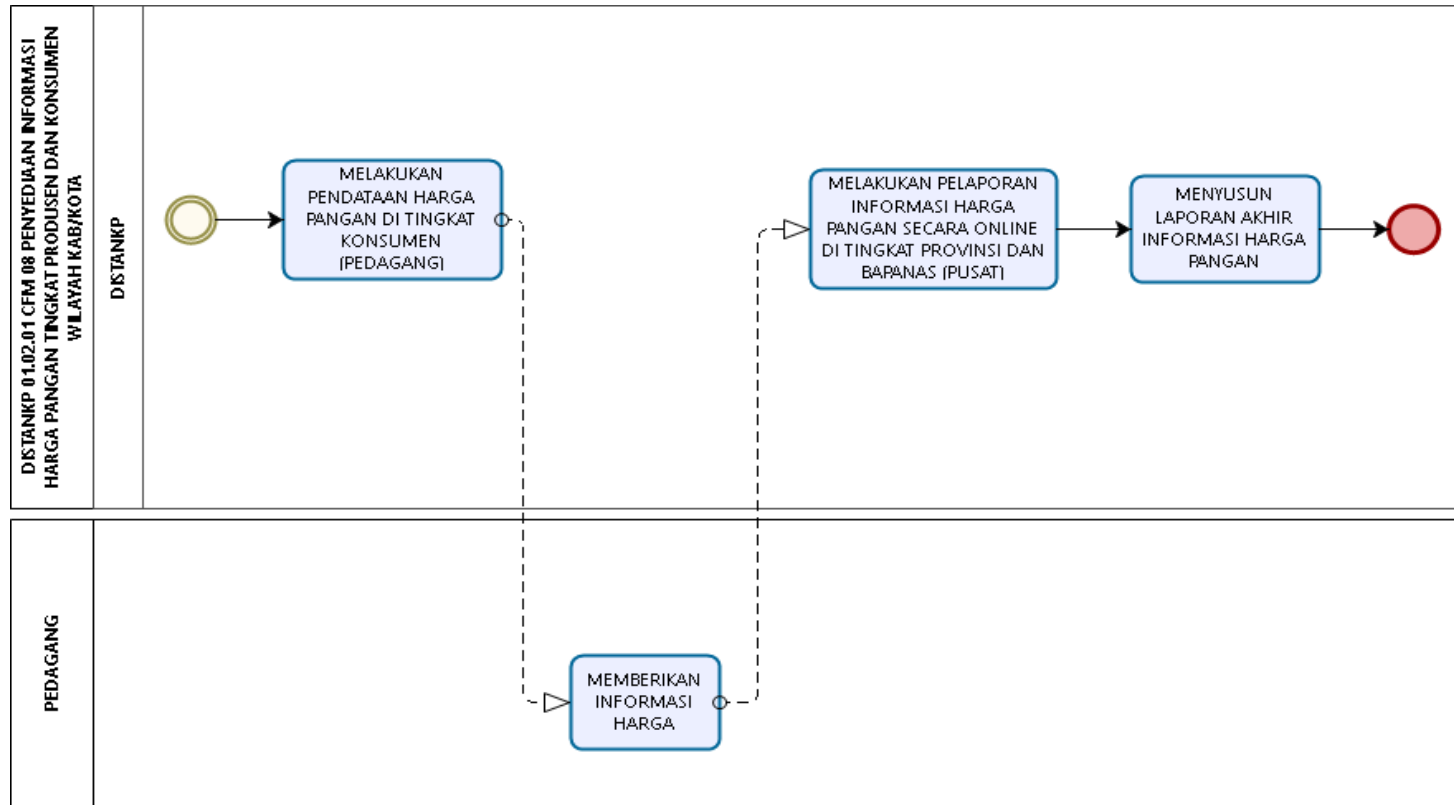
01.02.01 CFM 06



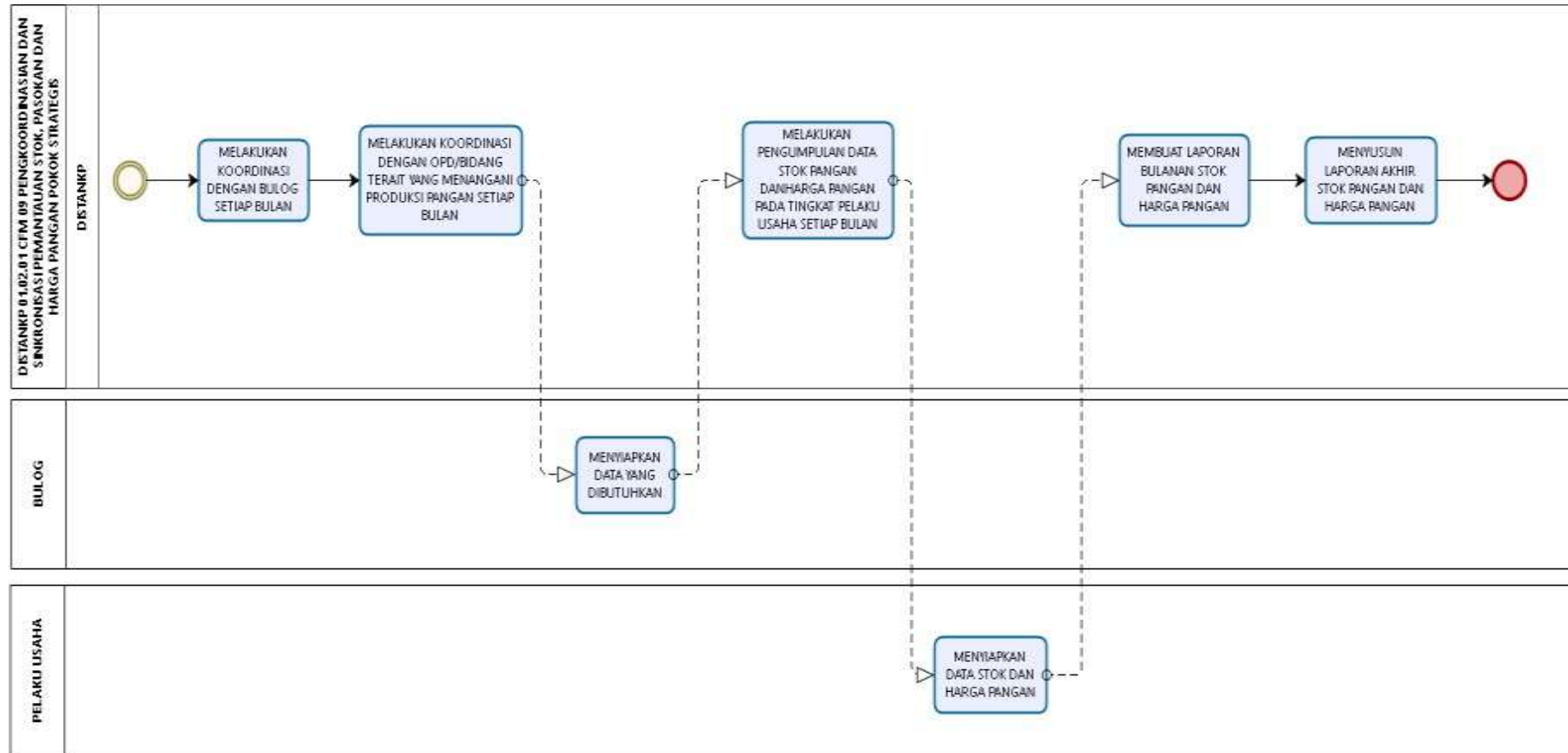
01.02.01 CFM 07



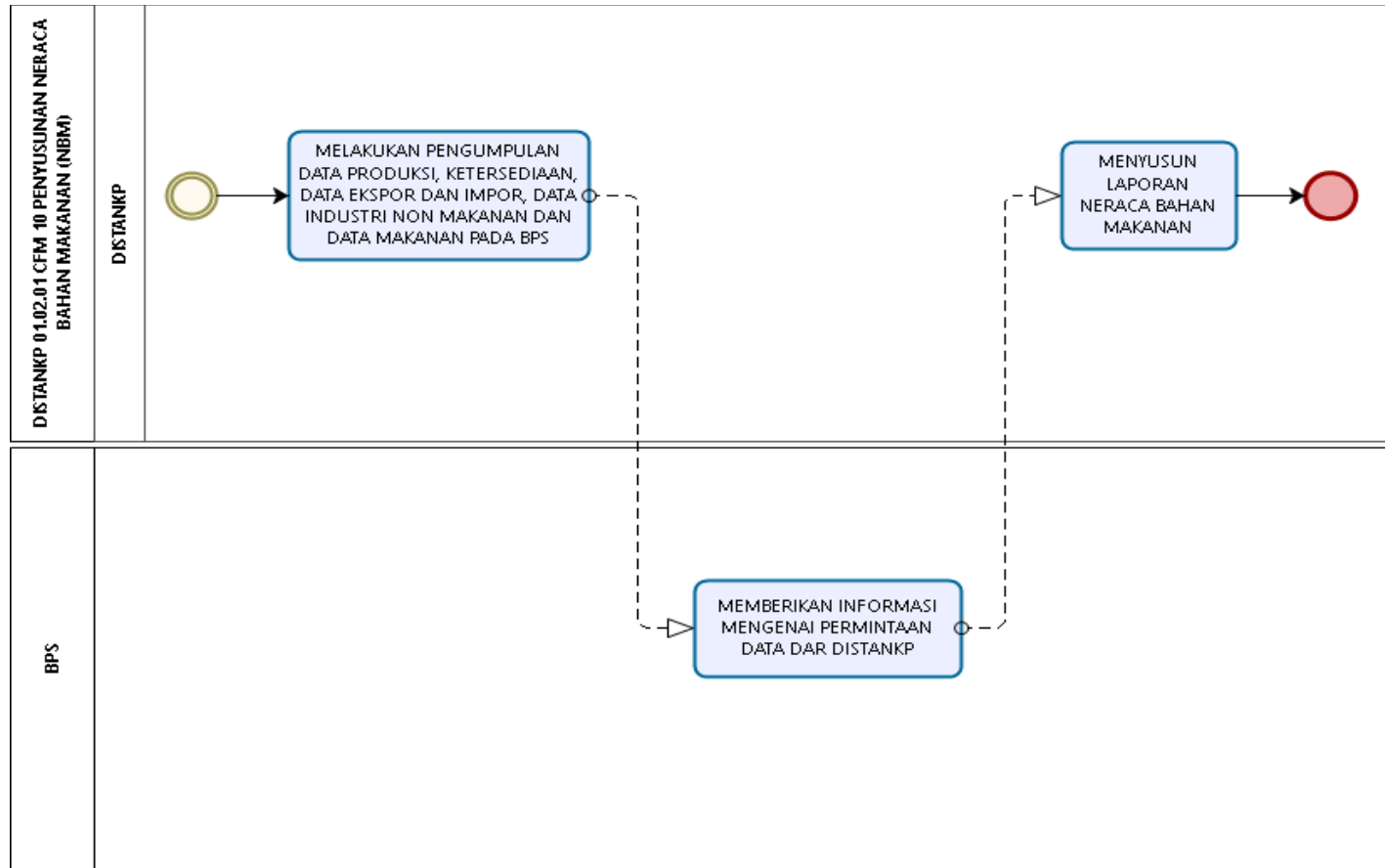
01.02.01 CFM 08



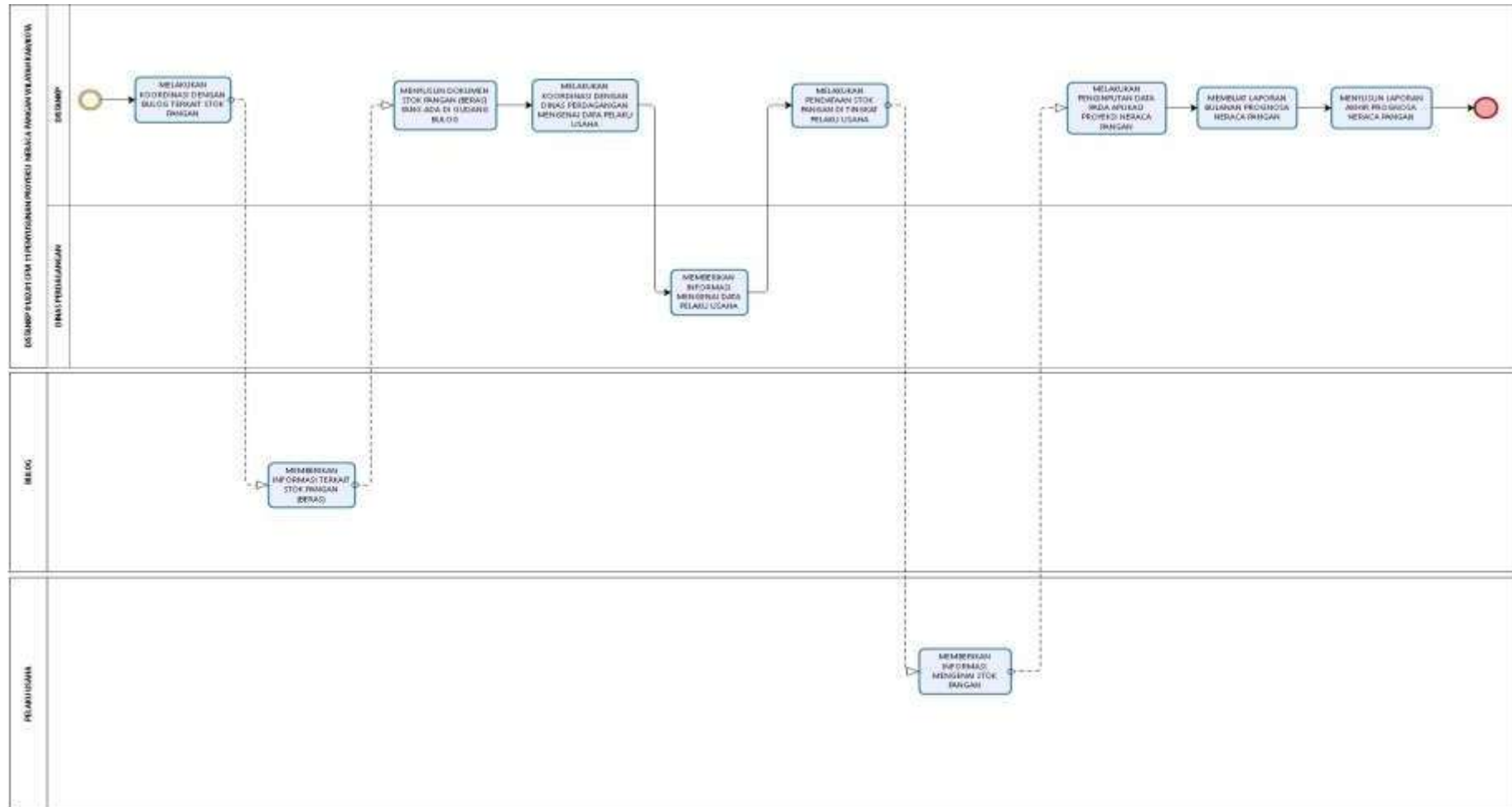
01.02.01 CFM 09



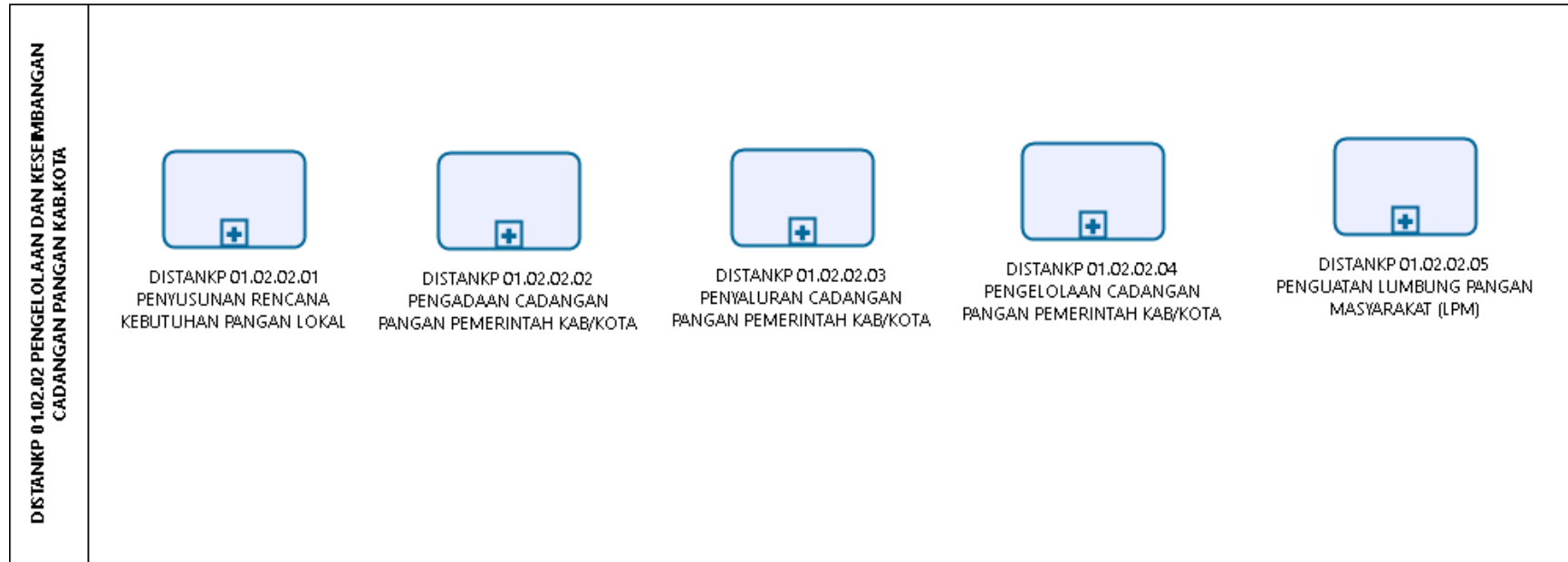
01.02.01 CFM 10



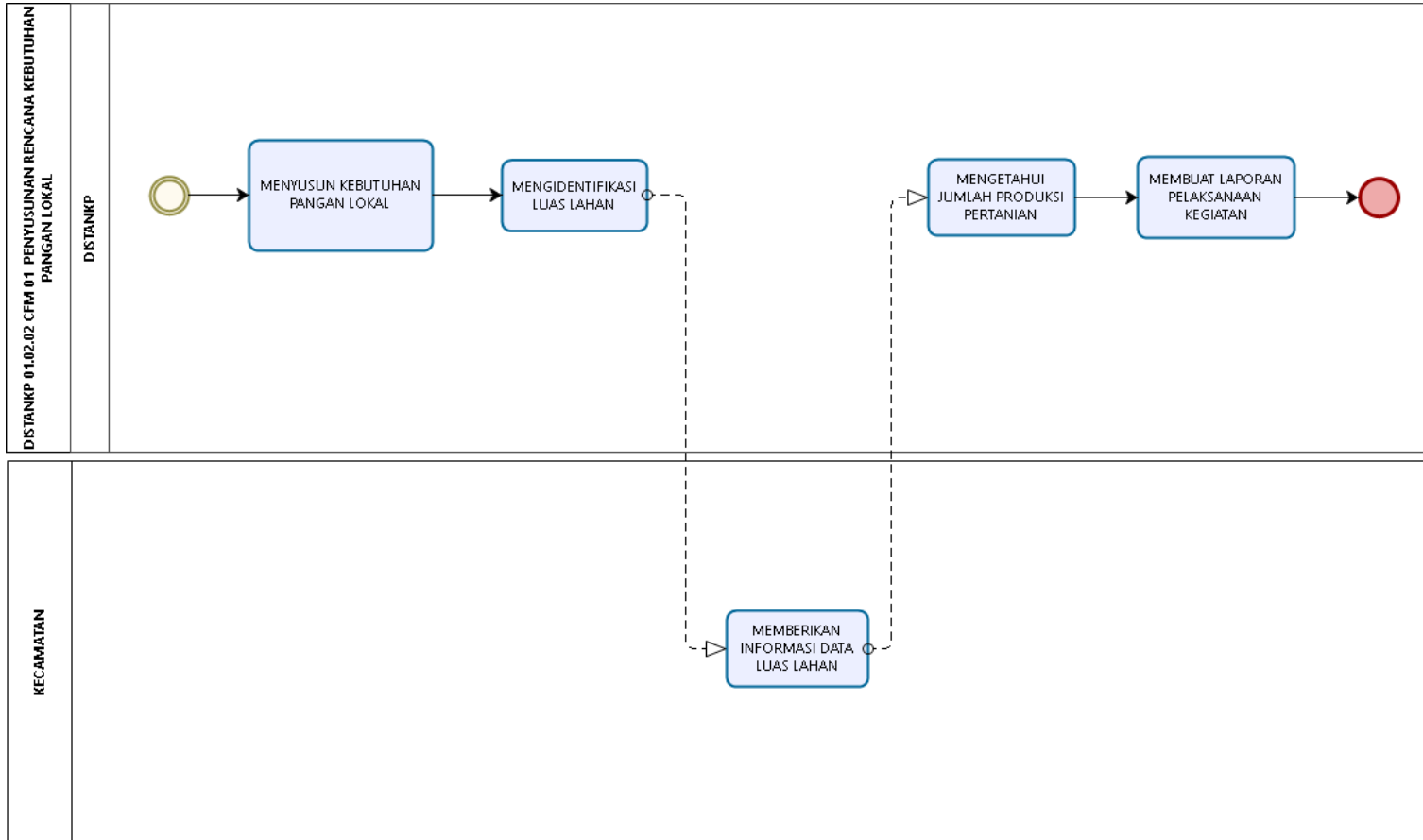
01.02.01 CFM 11



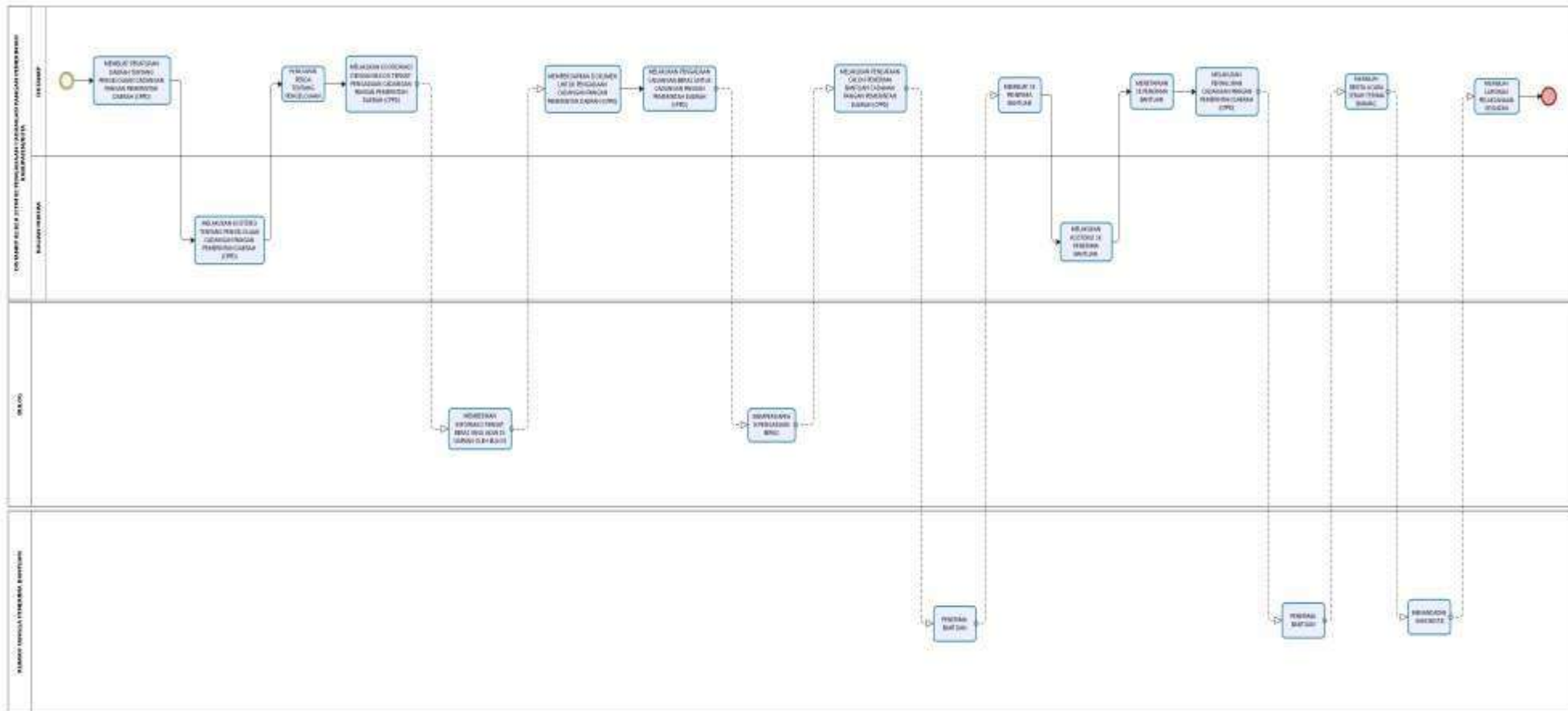
SUBKEG 01.02.02



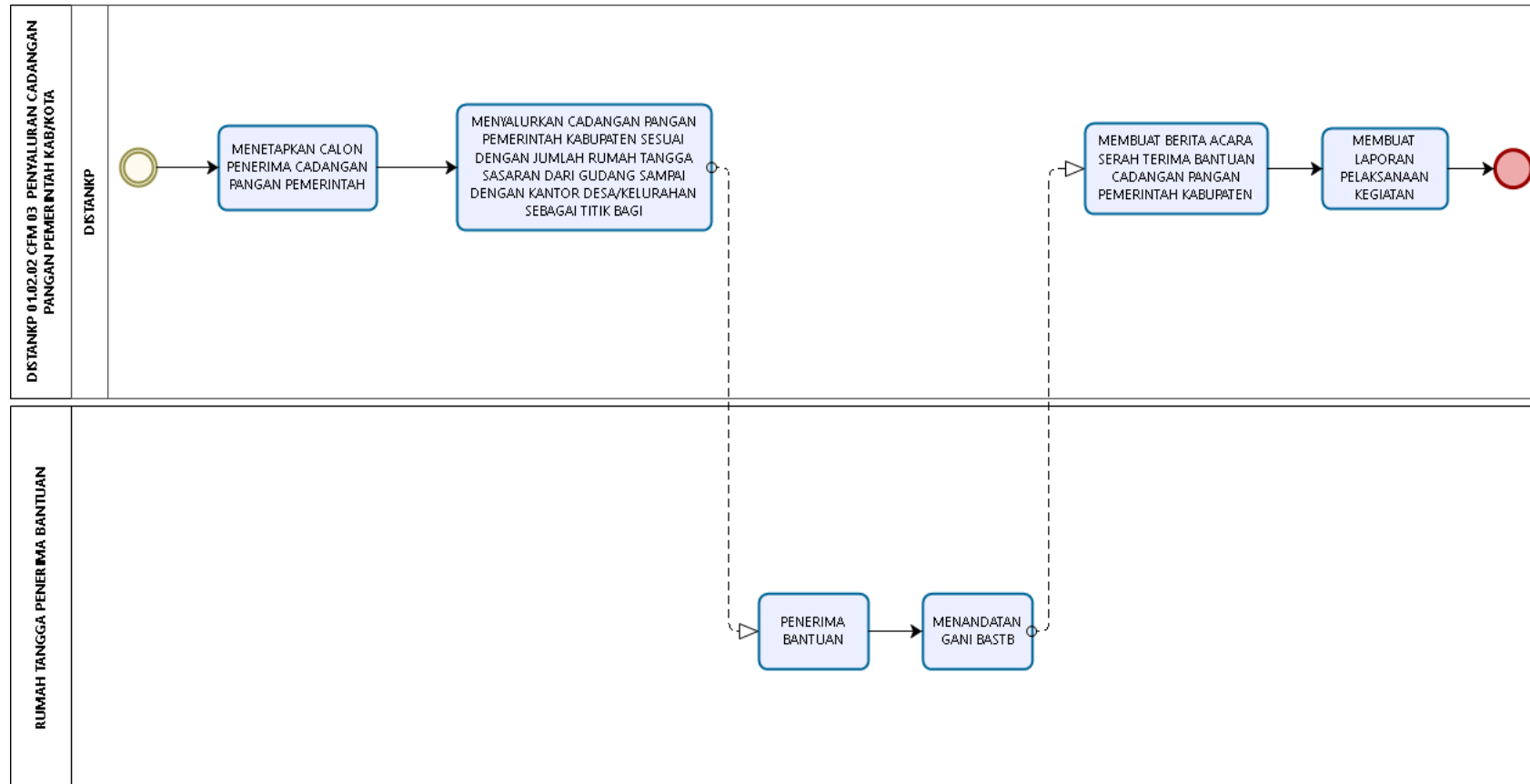
01.02.02 CFM 01



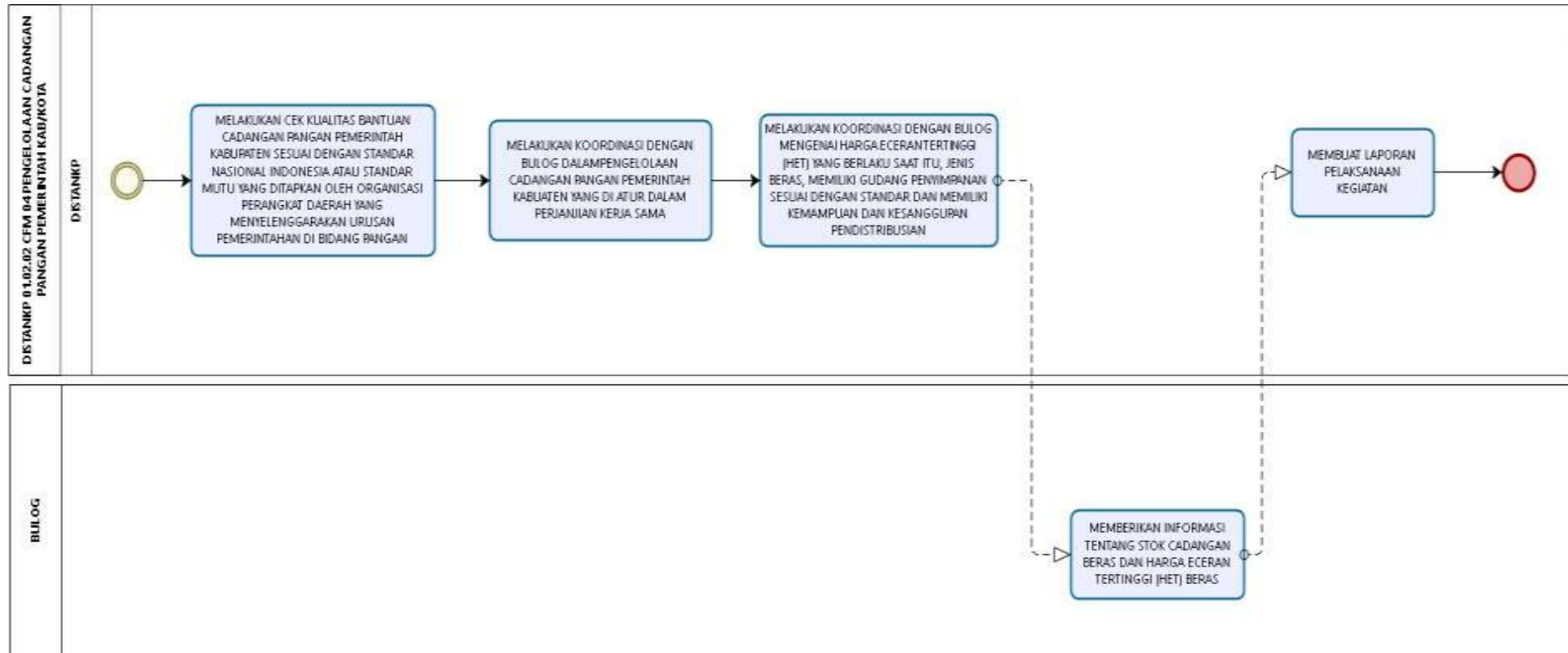
01.02.02 CFM 02



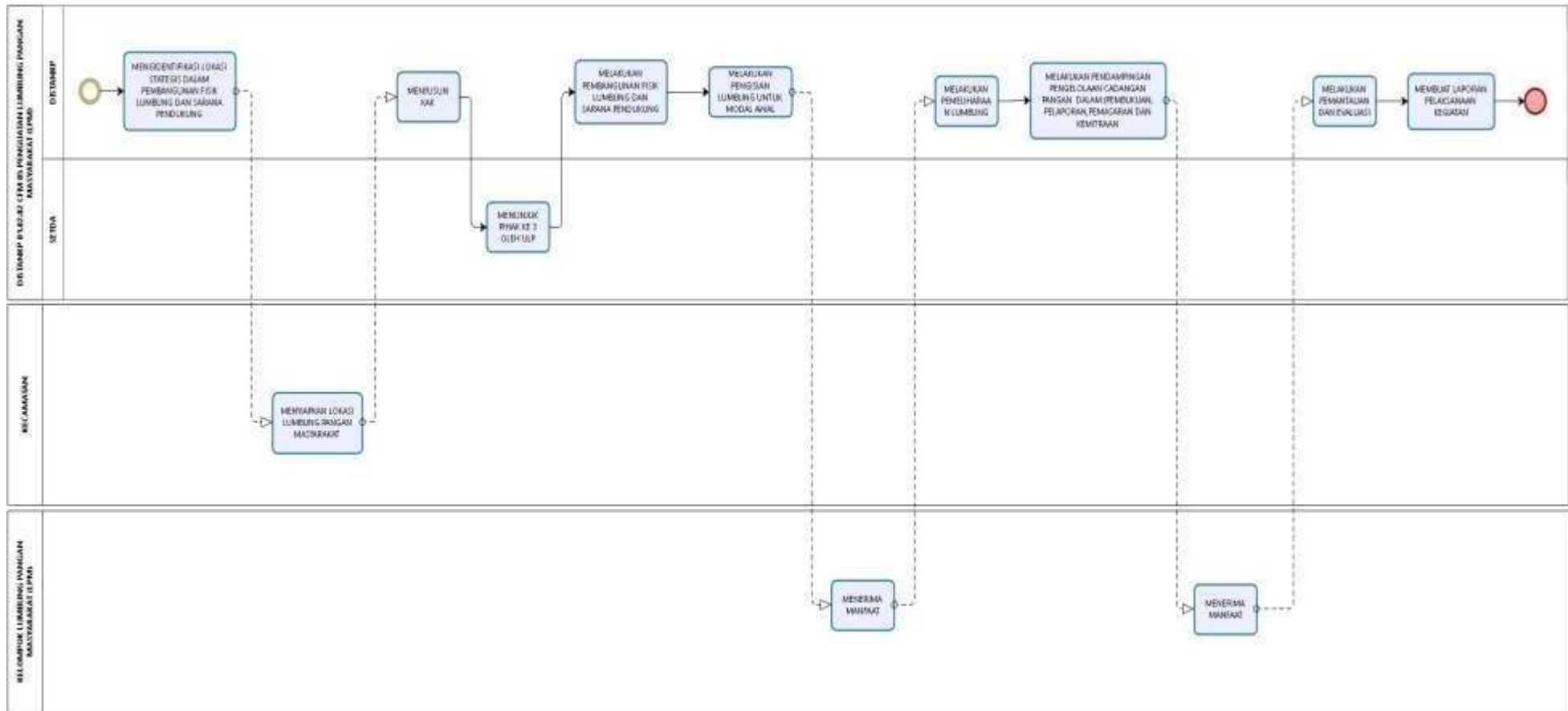
01.02.02 CFM 03



01.02.02 CFM 04



01.02.02 CFM 05



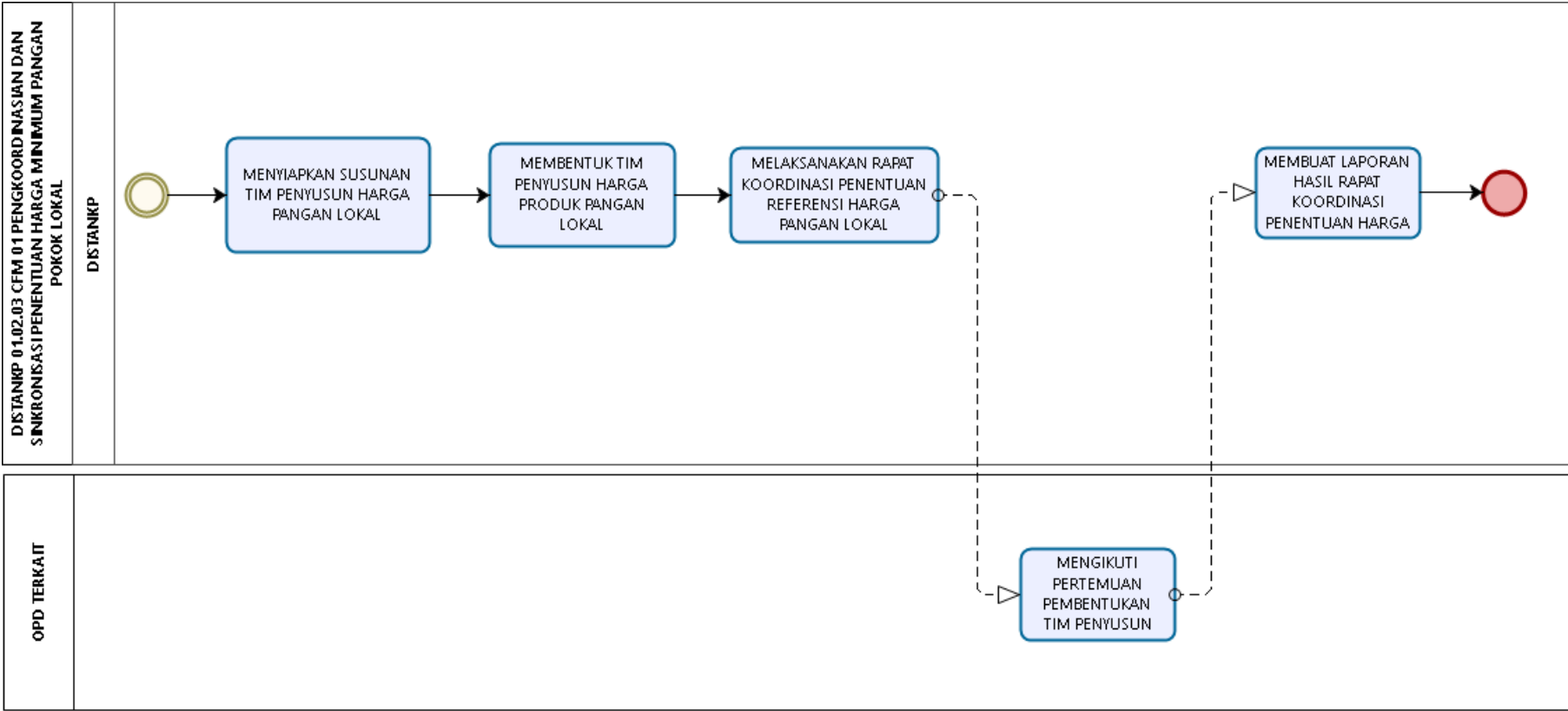
SUBKEG 01.02.03

**DISTANKP 01.02.03 PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH
UNTUK PANGAN LOKAL YANG TIDAK DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH PROPINSI**



DISTANKP 01.02.03.01
PENGKOORDINASIAN DAN
SINKRONISASI PENENTUAN
HARGA MINIMUM PANGAN
POKOK LOKAL

01.02.03 CFM 01



SUBKEG 01.02.04

**DISTANKP 01.02.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET
KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DGN ANGKA
KECUKUPAN GIZI**



DISTANKP 01.02.04.01
PENYUSUNAN & PENETAPAN
TARGET KONSUMSI PANGAN
PERKAPITA PER THN



DISTANKP 01.02.04.02
PEMBERDAYAAN MASY DLM
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBERDAYA LOKAL

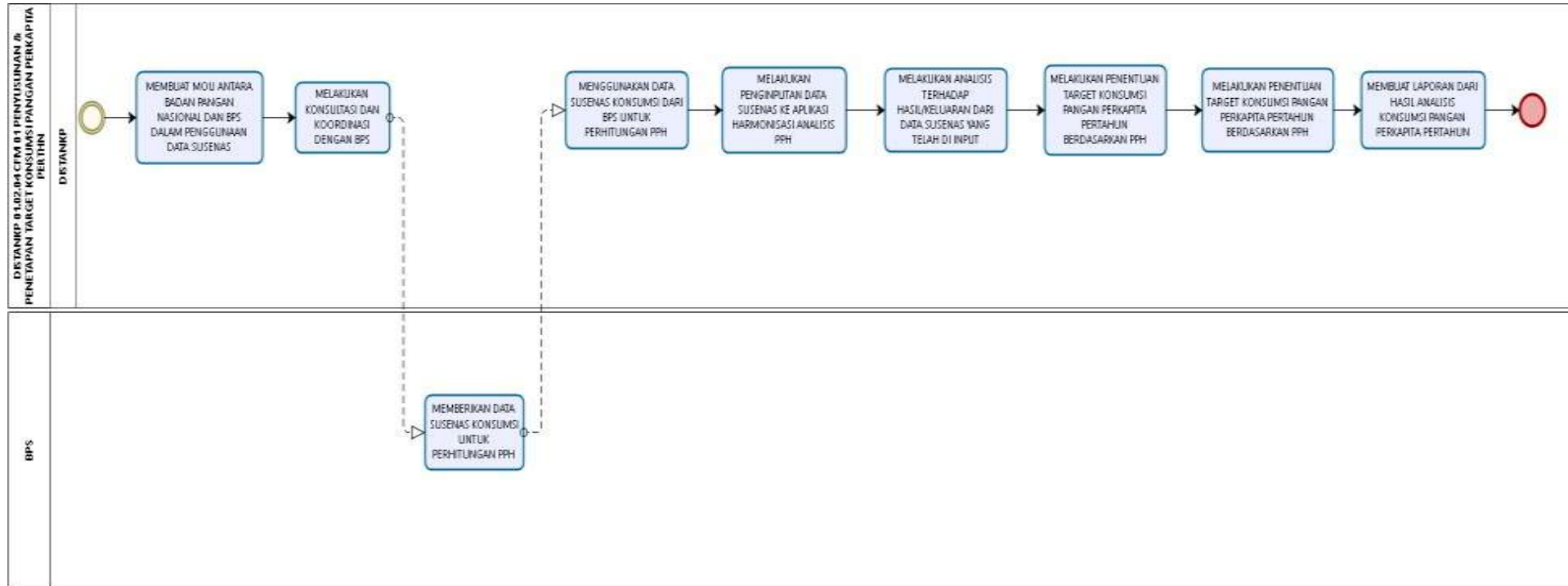


DISTANKP 01.02.04.03
PENGKOORDINASIAN &
SINKRONISASI PEMANTAUAN &
EVALUASI KONSUMSI PERKAPITA
PER THN

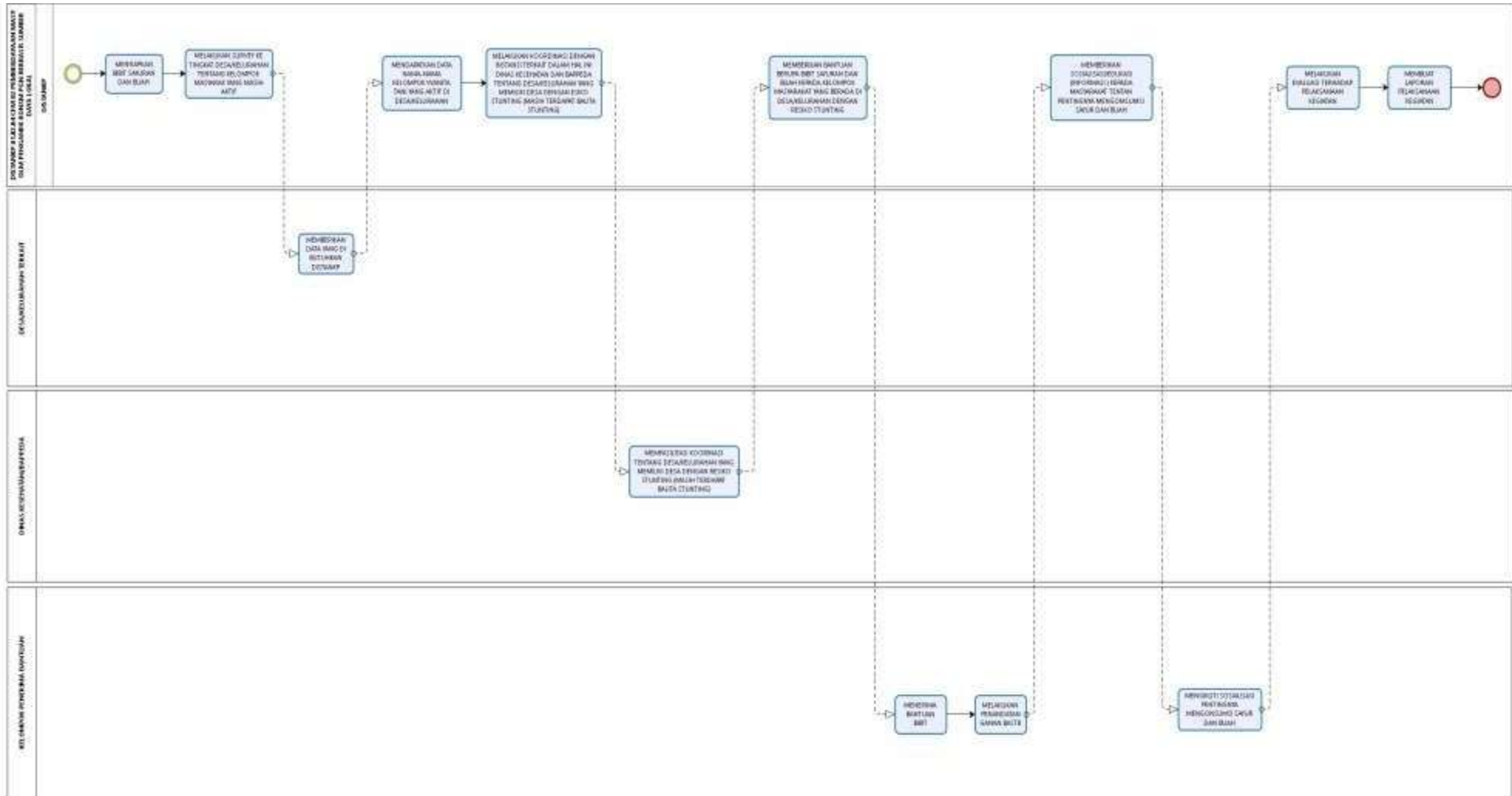


DISTANKP 01.02.04.04
PELAKSANAAN PROMOSI
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBERDAYA LOKAL

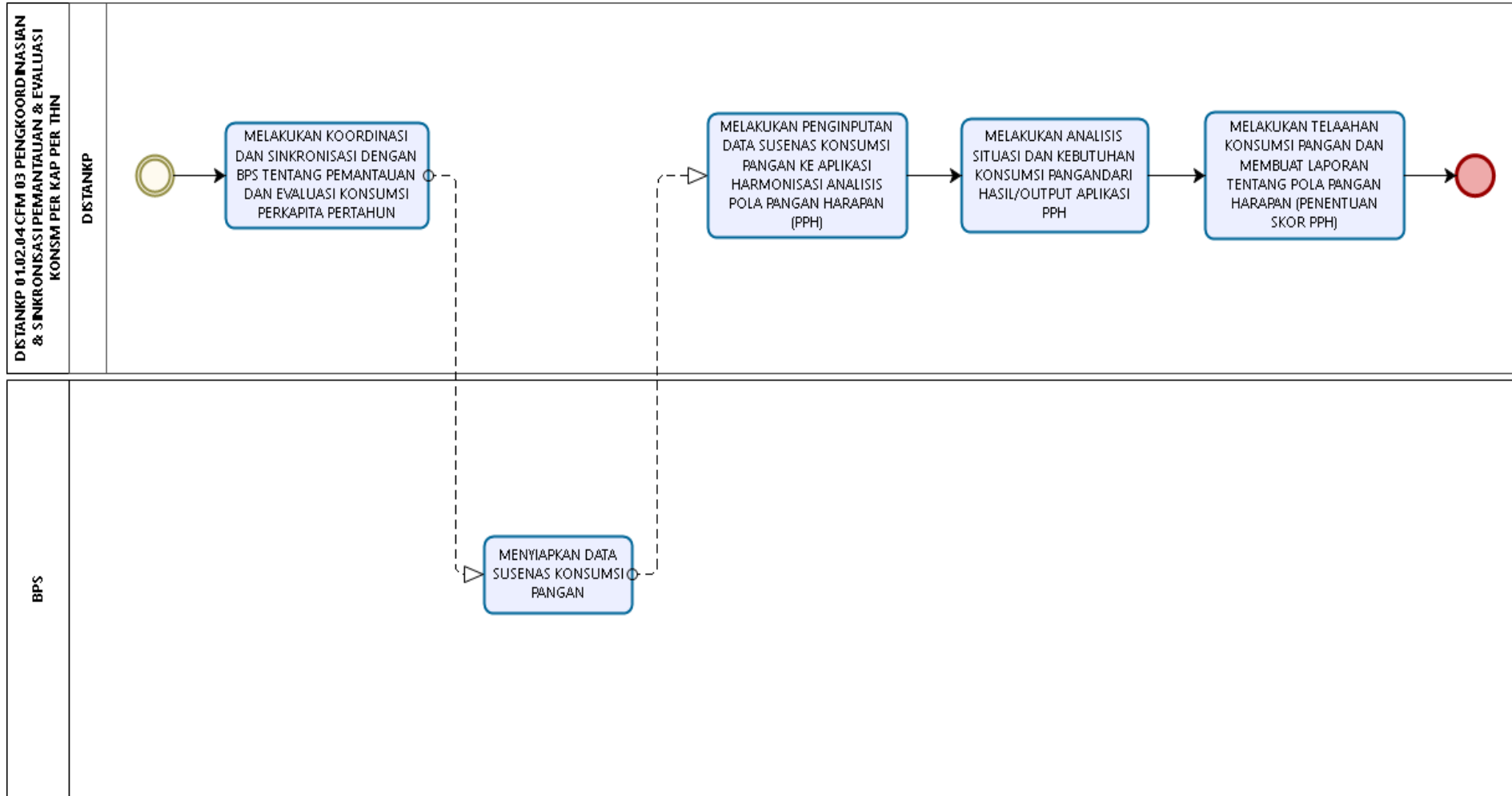
01.02.04 CFM 01



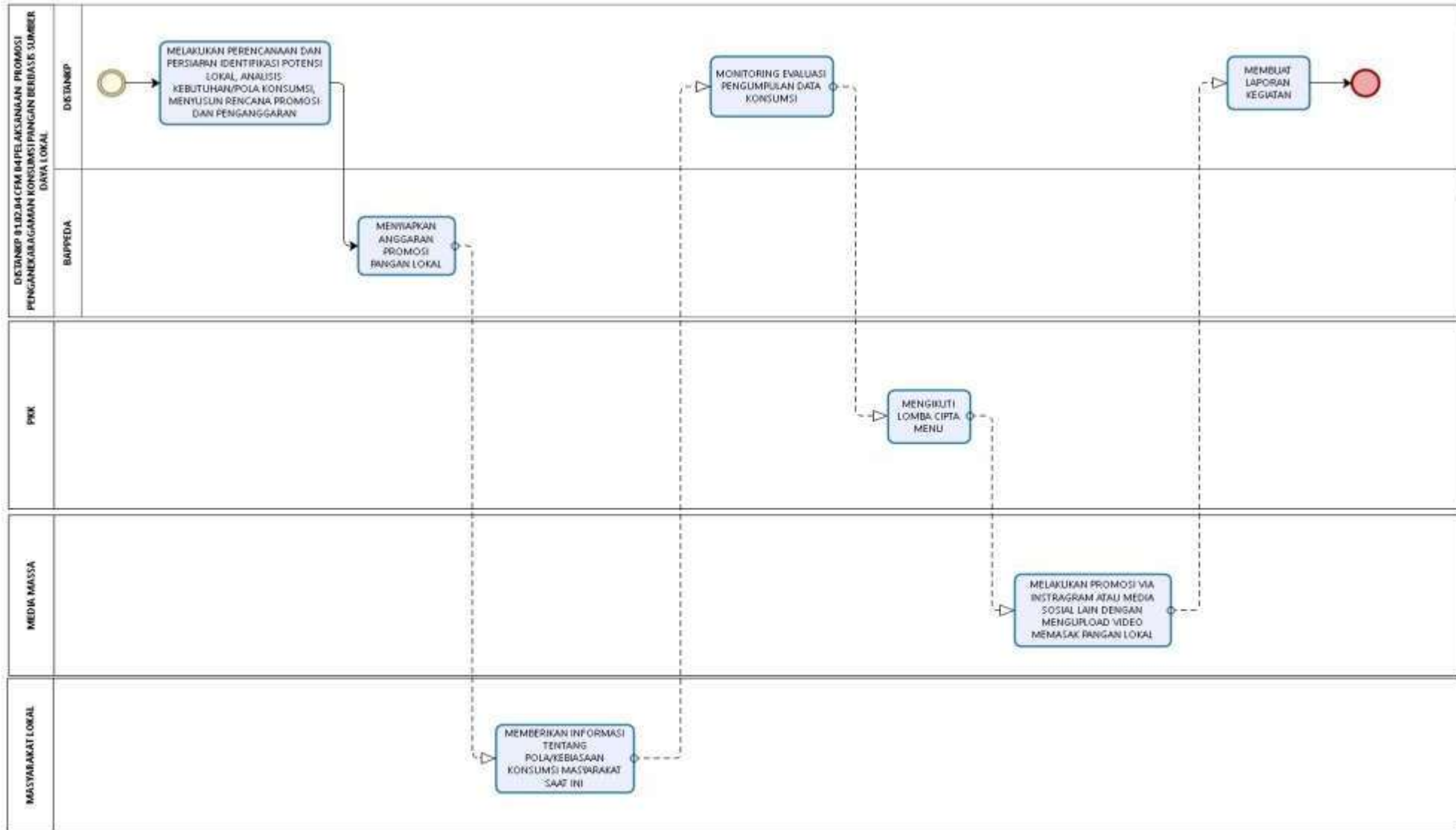
01.02.04 CFM 02



01.02.04 CFM 03



01.02.04 CFM 04



KEG 01.03

DISTANKP 01.03 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN



DISTANKP 01.03.01 PENYUSUNAN
PETA KERENTANAN &
KETAHANAN PANGAN
KECAMATAN



DISTANKP 01.03.02
PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN KEWENANGAN
KAB/KOTA

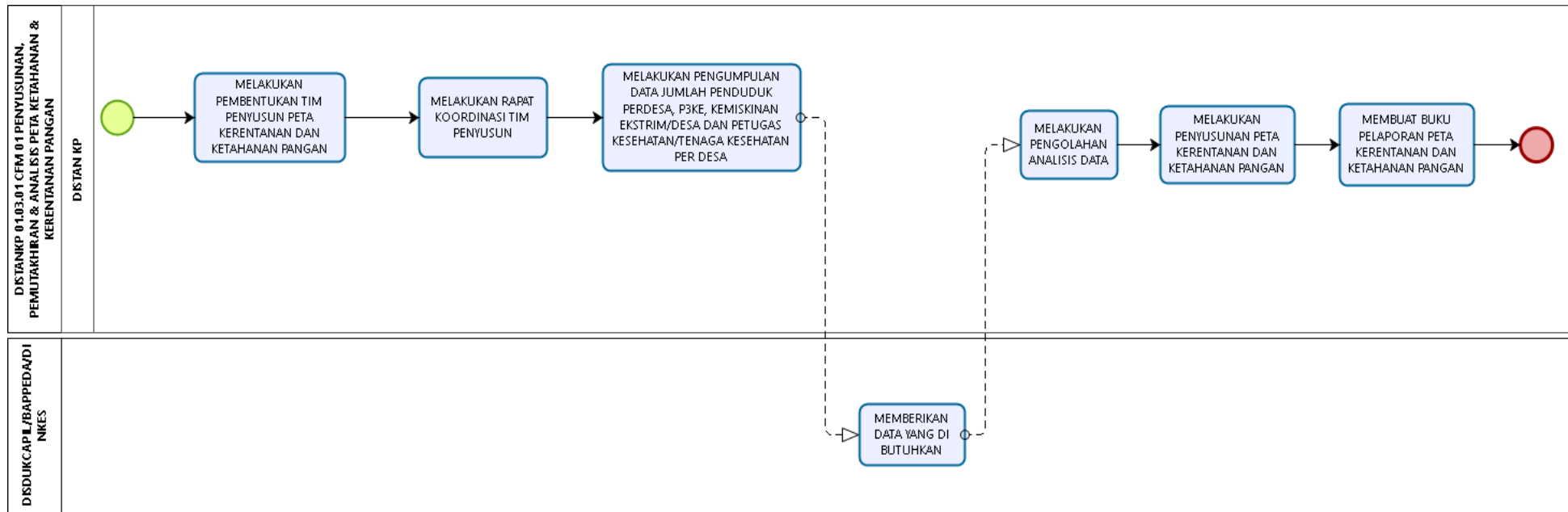
SUBKEG 01.03.01

**DISTANKP 01.03.01 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN &
KETAHANAN PANGAN KECAMATAN**



DISTANKP 01.03.01.01
PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN
& ANALISIS PETA KETAHANAN &
KERENTANAN PANGAN

01.03.01 CFM 01



SUBKEG 01.03.02

DISTANKP 01.03.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENAMINGAN
KAB/KOTA



DISTANKP 01.03.02.01 PELAKS
PENGDN PENGELOLAAN &
PENYALURAN CAD PANGAN PD
KERAWANAN PANGAN YG
MENCAKUP DLM 1 DAERAH
KAB/KOTA



DISTANKP 01.03.02.02
PENGKOORDINASIAN &
SINKRONISASI PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN KAB/KOTA



DISTANKP 01.03.02.03
PELAKSANAAN INTERVENSI
KEWASPADAAN PANGAN & GIZI

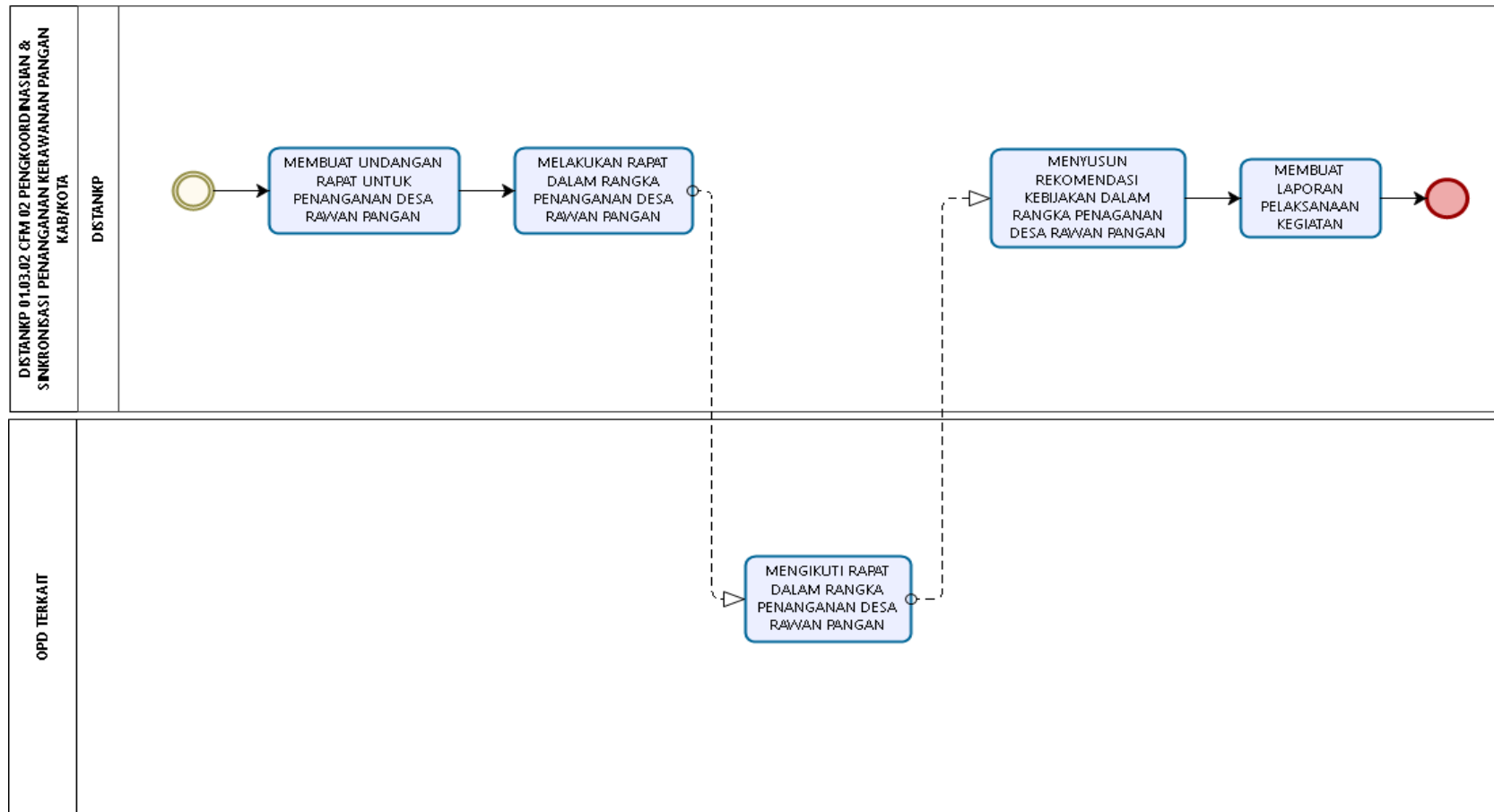


DISTANKP 01.03.02.04
PENYUSUNAN PETA SITUASI
KEWASPADAAN PANGAN & GIZI
KAB/KOTA

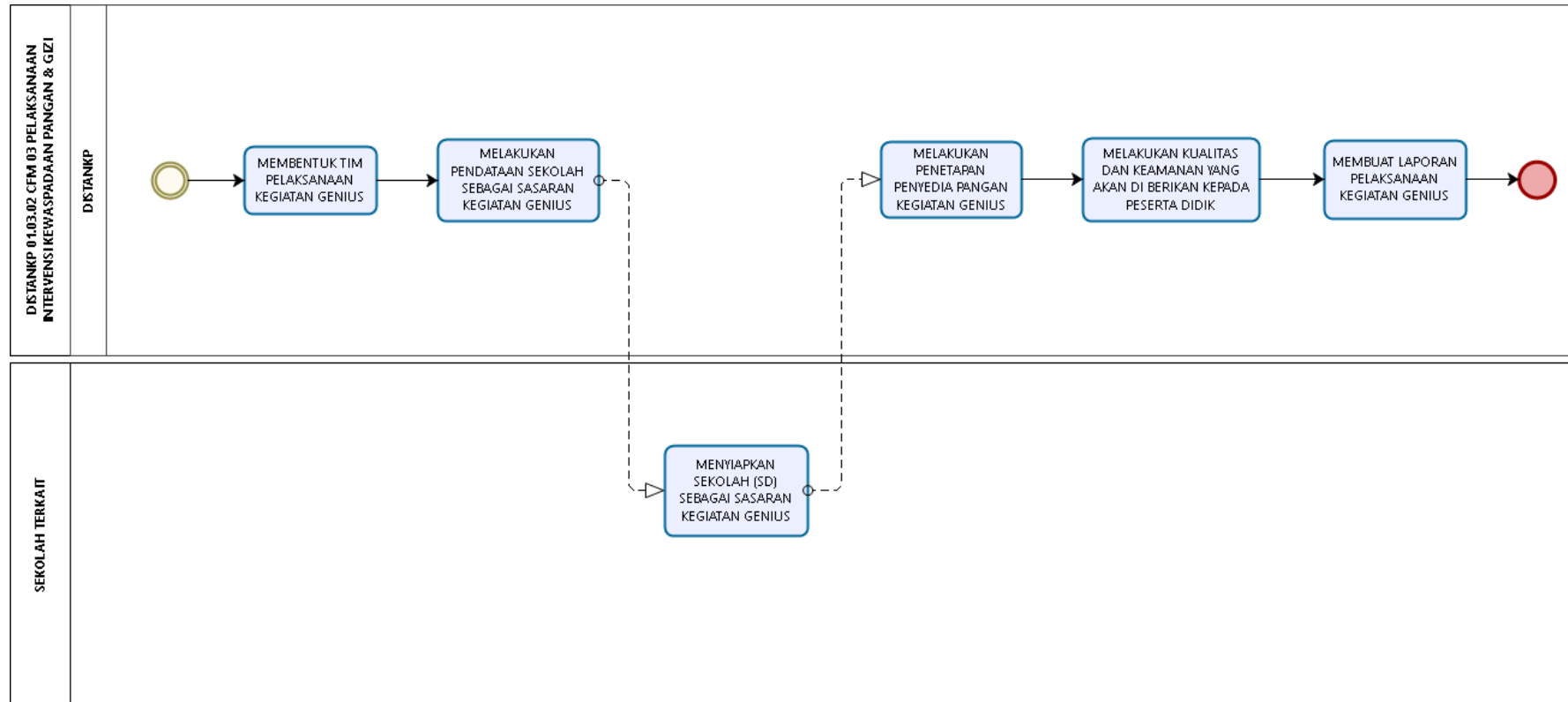


DISTANKP 01.03.02.05
PENGAJIAN KESIAPSIAGAAN
KRISIS PANGAN

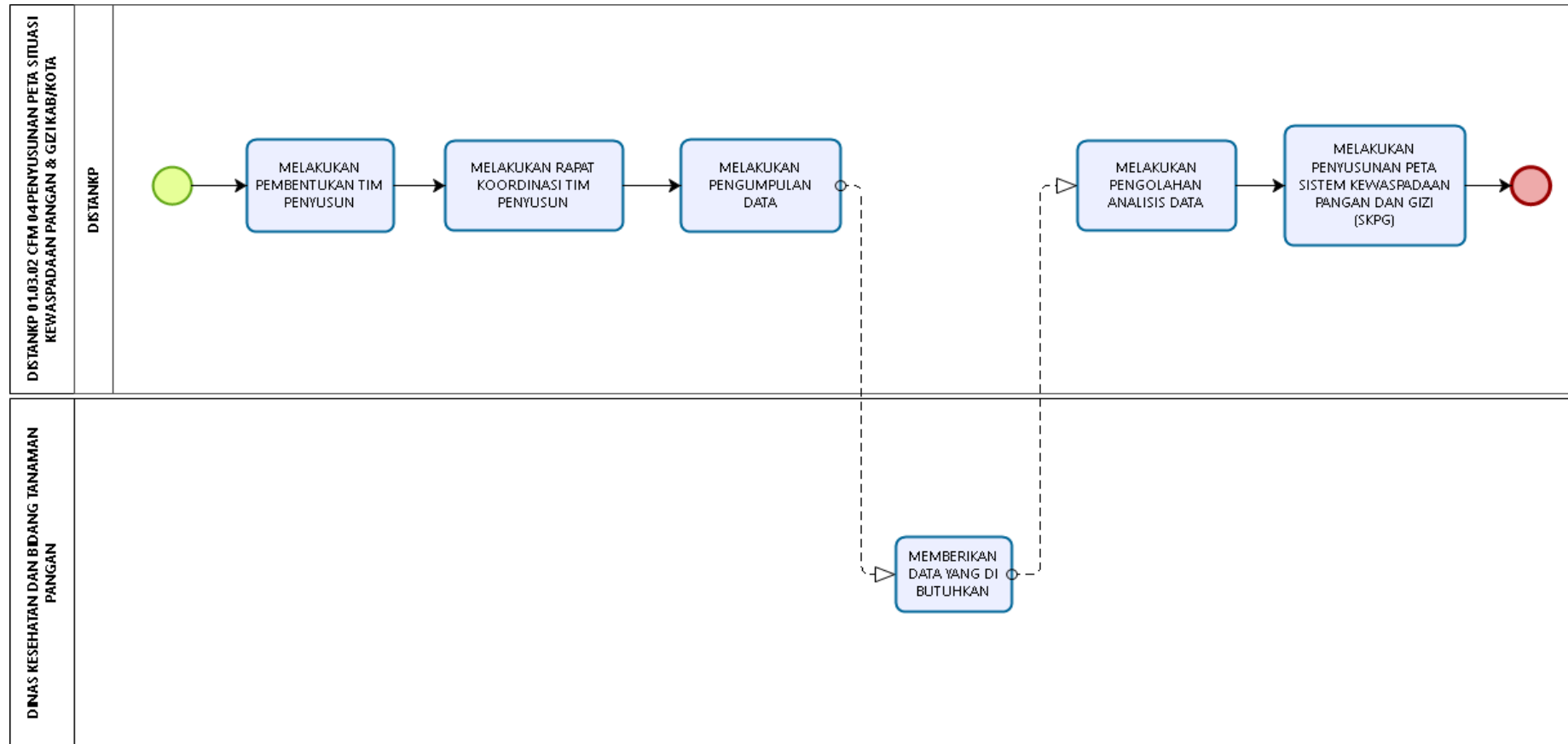
01.03.02 CFM 02



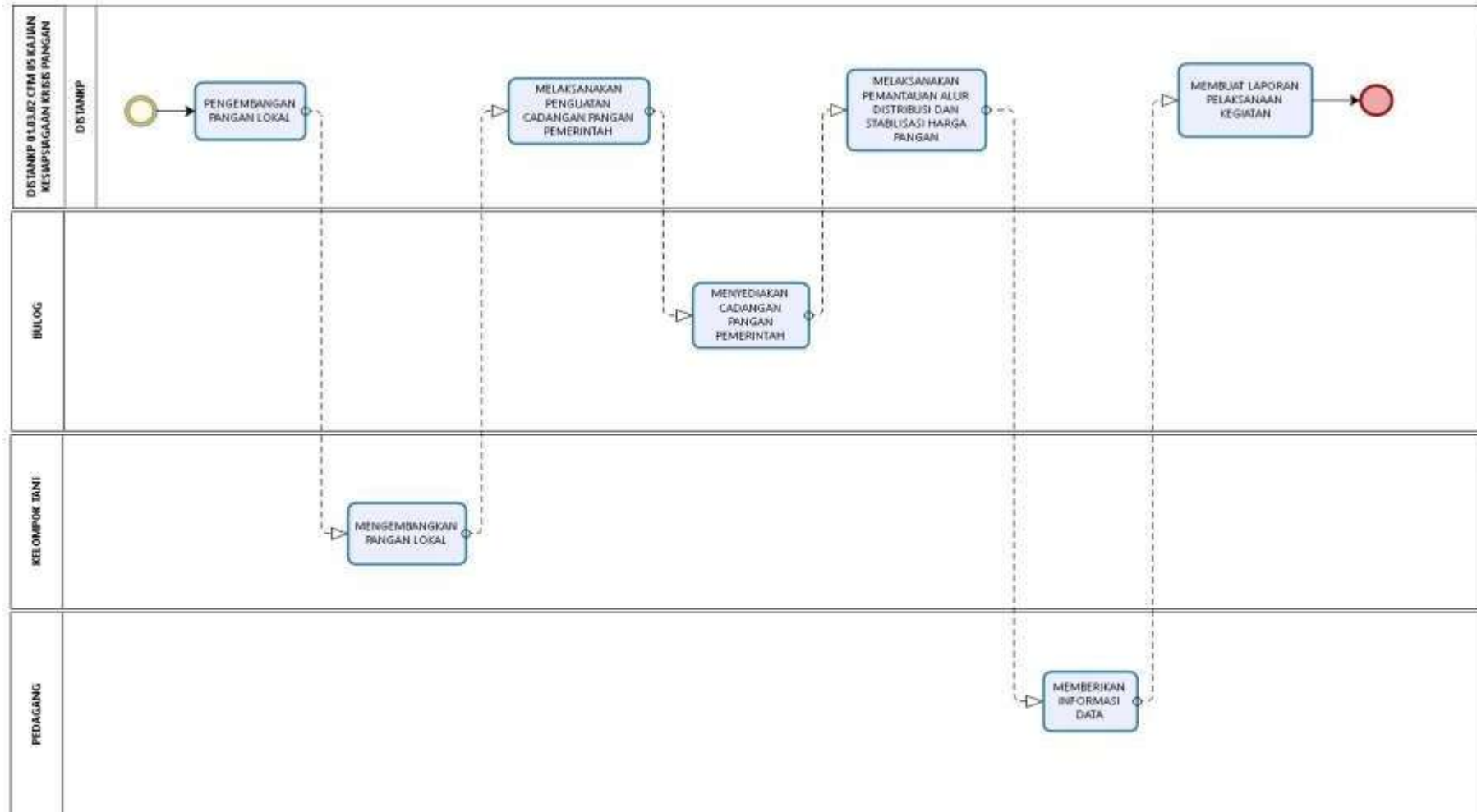
01.03.02 CFM 03



01.03.02.CFM 04



01.03.02 CFM 05



KEG 01.04

DISTANKP 0 1.04 PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN



DISTANKP 01.04.01
PELAKSANAAN PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR
DAERAH KAB/KOTA

SUBKEG 01.04.01

**DISTANKP 01.04.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
SEGAR DAERAH KAB/KOTA**



DISTANKP 01.04.01.01
PEREKOMENDASIAN
KEAMANAN PANGAN
SEGAR ASAL TUMB
DAERAH KAB/KOTA



DISTANKP 01.04.01.02
PEREKOMENDASIAN PERIZINAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR
ASAL TUMB DAERAH KAB/KOTA



DISTANKP 01.04.01.03
PENYEDIAAN SARANA
PENGUJIAN KEAMANAN DAN
MUTU PANGAN SEGAR ASAL
TUMB DAERAH KAB/KOTA

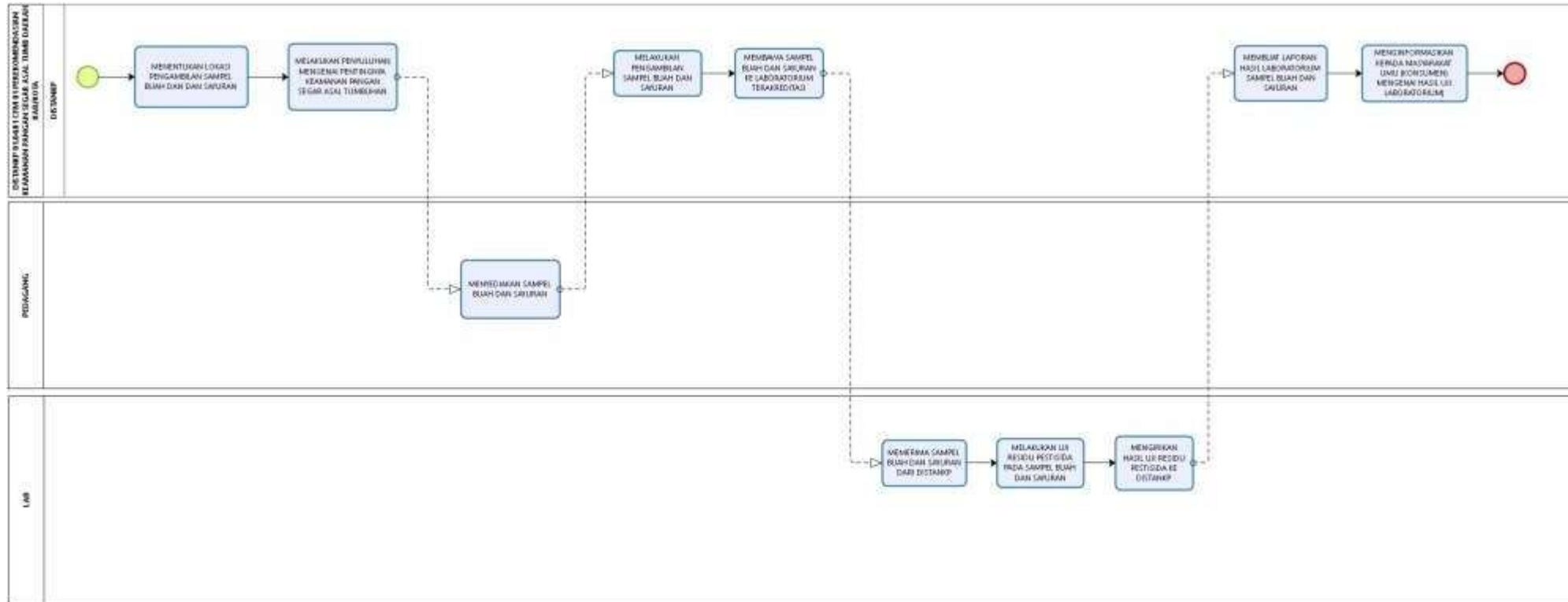


DISTANKP 01.04.01.04
PENGKOORDINASIAN &
SINKRONISASI KEAMANAN &
MUTU PANGAN SEGAR ASAL
TUMB DAERAH KAB/KOTA

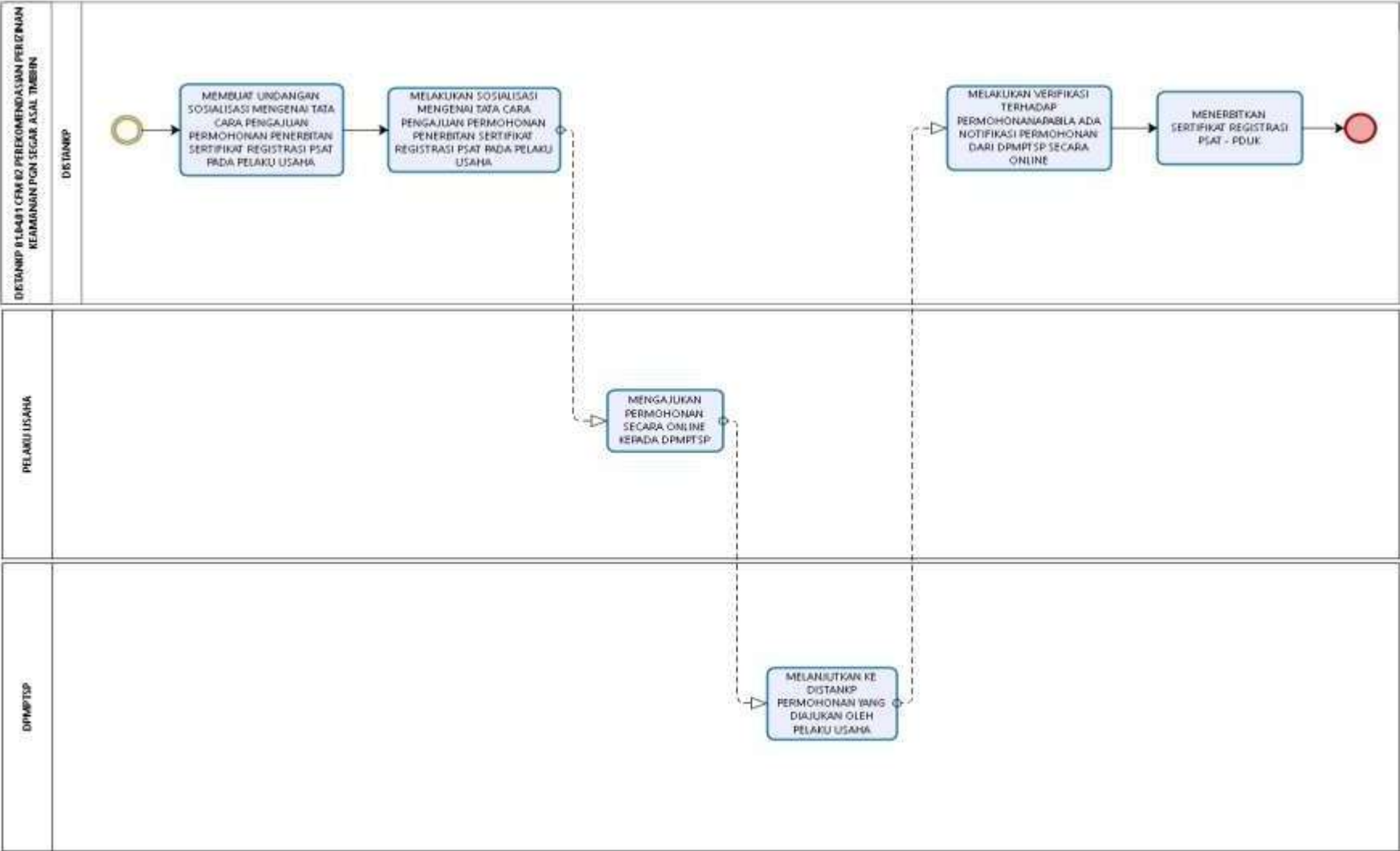


DISTANKP 01.04.01.05
PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGAWAS KEAMANAN DAN
MUTU PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN

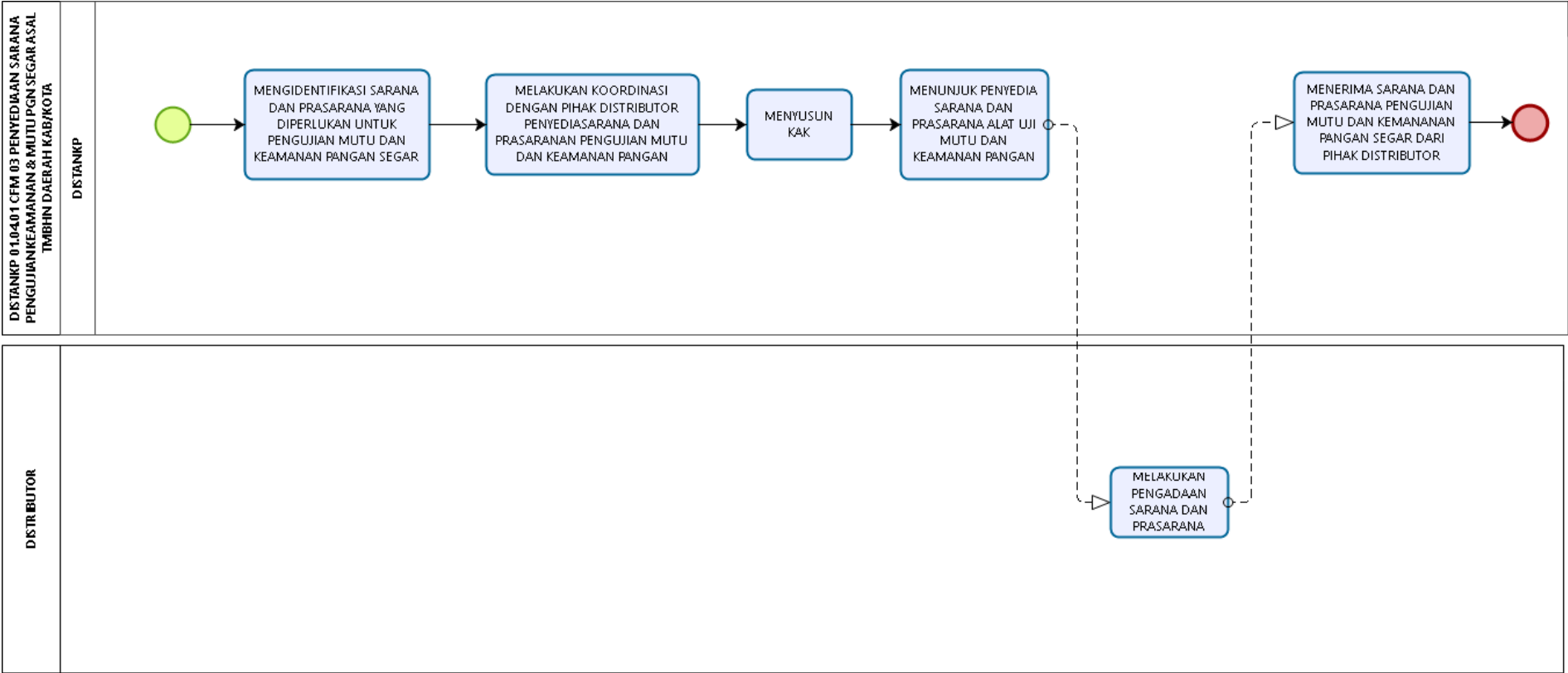
01.04.01 CFM 01



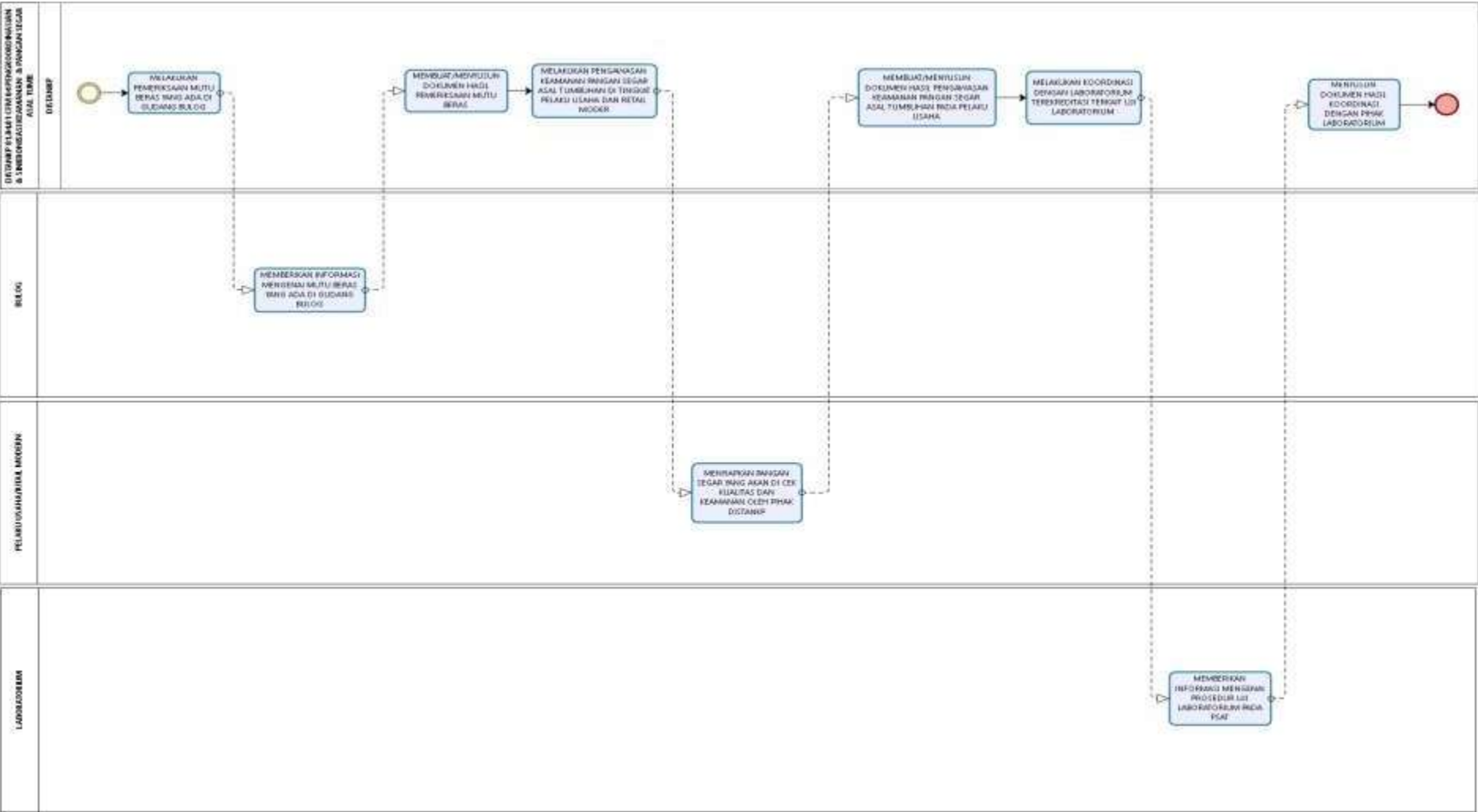
01.04.01 CFM 02



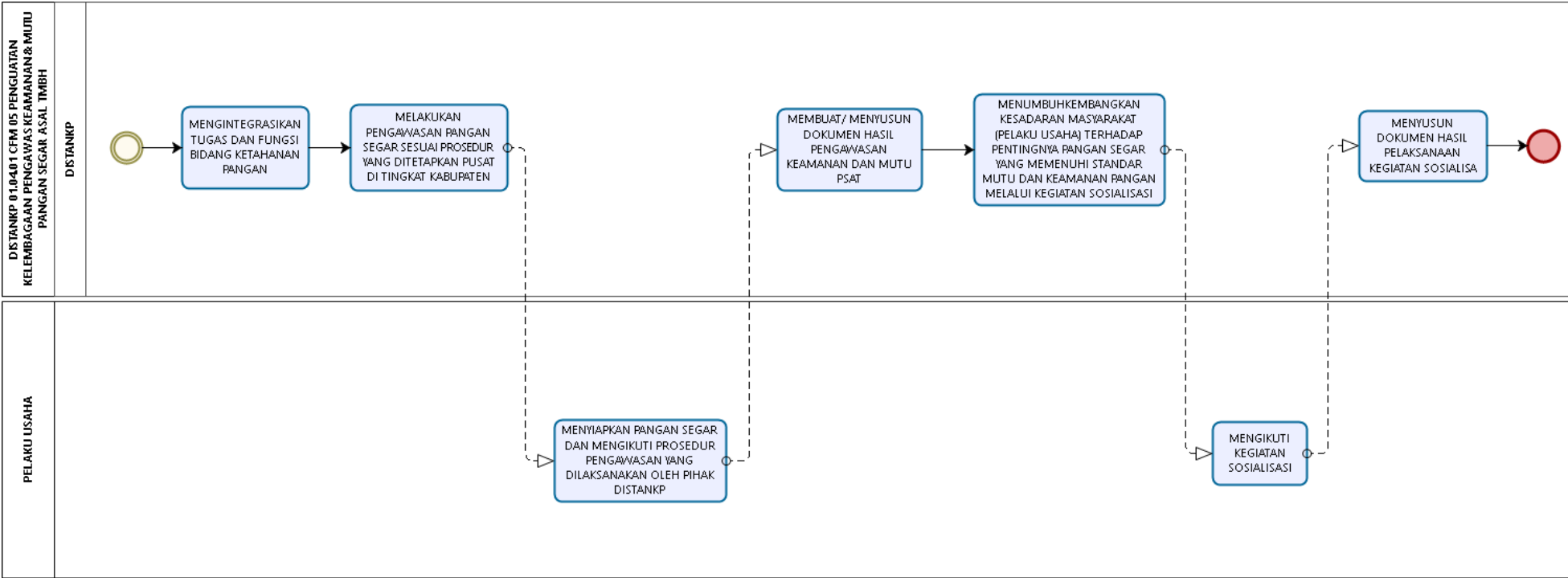
01.04.01 CFM 03



01.04.01 CFM 04



01.04.01 CFM 05



KEG 02.01



SUB KEG..02..01..01

DISTANKP 02.01.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN



DISTANKP 02.01.01.01
PENGAWASAN PENGGUNAAN
SARANA PENDUKUNG
PERTANIAN SESUAI DENGAN
KOMODITAS, TEKNOLOGI &
SPESIFIK LOKASI



DISTANKP 02.01.01.02
PENDAMPINGAN PENGGUNAAN
SARANA PENDUKUNG
PERTANIAN



DISTANKP 02.01.01.03
PERBANYAKAN BENIH
BERSERTIFIKAT TAN
PANGAN BERBENTUK
BUJI/BENIH



DISTANKP 02.01.01.04
PERBANYAKAN BENIH
BERSERTIFIKAT TAN PANGAN
BERBENTUK SETEK



DISTANKP 02.01.01.05
PENGAWASAN PENGGUNAAN
SARANA PENGOLAHAN HASIL
TAN PANGAN



DISTANKP 02.01.01.06
PENGAWASAN PENGGUNAAN
SARANA PASCAPANEN
PERKEBUNAN



DISTANKP 02.01.01.07
PENGAWASAN PENGGUNAAN
SARANA PENGOLAHAN HASIL
HORTIKULTURA



DISTANKP 02.01.01.08
PERBANYAKAN BENIH
BERSERTIFIKAT PERKEBUNAN
BERBENTUK BATANG



DISTANKP 02.01.01.09
PERBANYAKAN BENIH
BERSERTIFIKAT HORTIKULTURA
BERBENTUK BATANG



DISTANKP 02.01.01.10
PERBANYAKAN BENIH
BERSERTIFIKAT PERKEBUNAN
BERBENTUK MATA TUMBUH



DISTANKP 02.01.01.11
PERBANYAKAN BENIH
BERSERTIFIKAT PERKEBUNAN
BERBENTUK BIJI



DISTANKP 02.01.01.12
PENGAWASAN
PENGGUNAAN SARANA
PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN



DISTANKP 02.01.01.13
PERBANYAKAN BENIH
BERSERTIFIKAT PERKEBUNAN
BERBENTUK SETEK



DISTANKP 02.01.01.14
PENGAWASAN
PENGGUNAAN SARANA
PASCAPANEN TAN PANGA



DISTANKP 02.01.01.15
PERBANYAKAN BENIH
BERSERTIFIKAT HORTIKULTURA
BERBENTUK UMBI

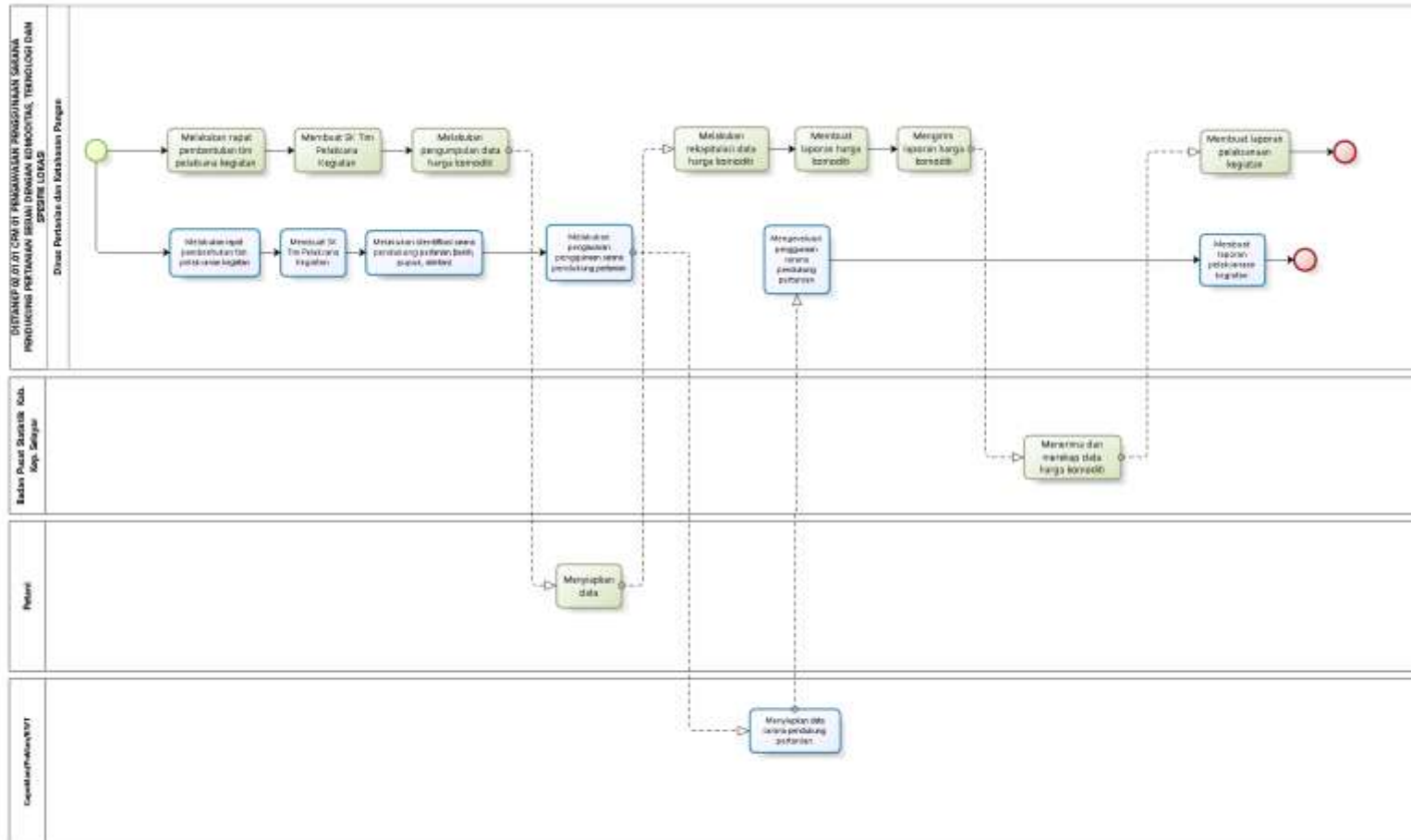


DISTANKP 02.01.01.16
PENGAWASAN PENGGUNAAN
SARANA PASCAPANEN
HORTIKULTURA

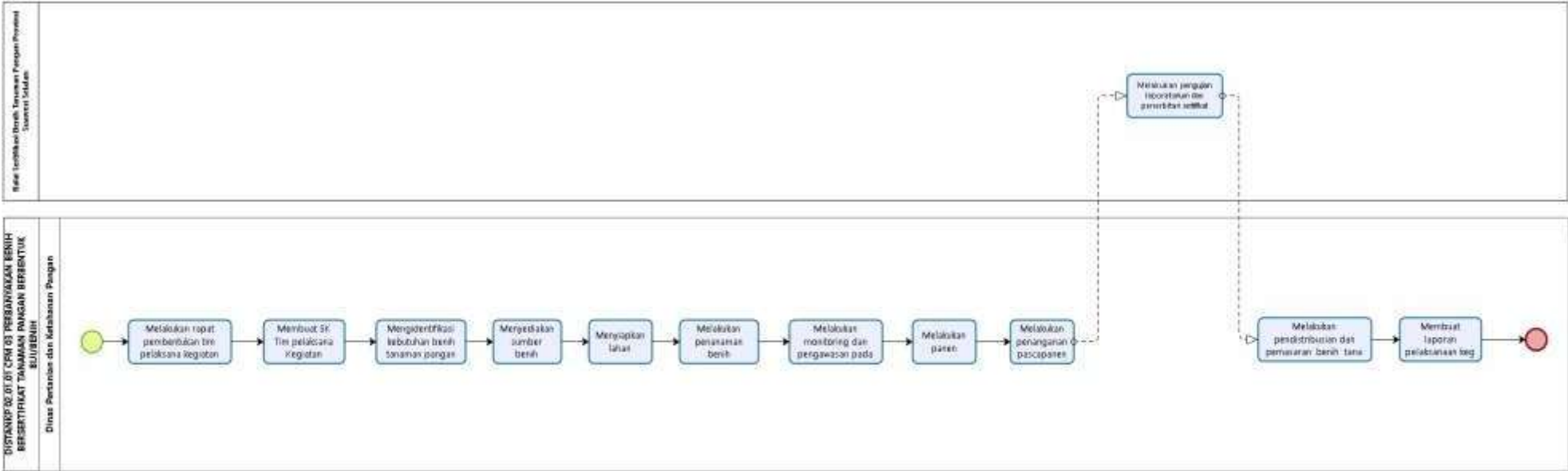


DISTANKP 02.01.01.17
PERBANYAKAN BENIH
BERSERTIFIKAT PERKEBUNAN
BERBENTUK ANAKAN

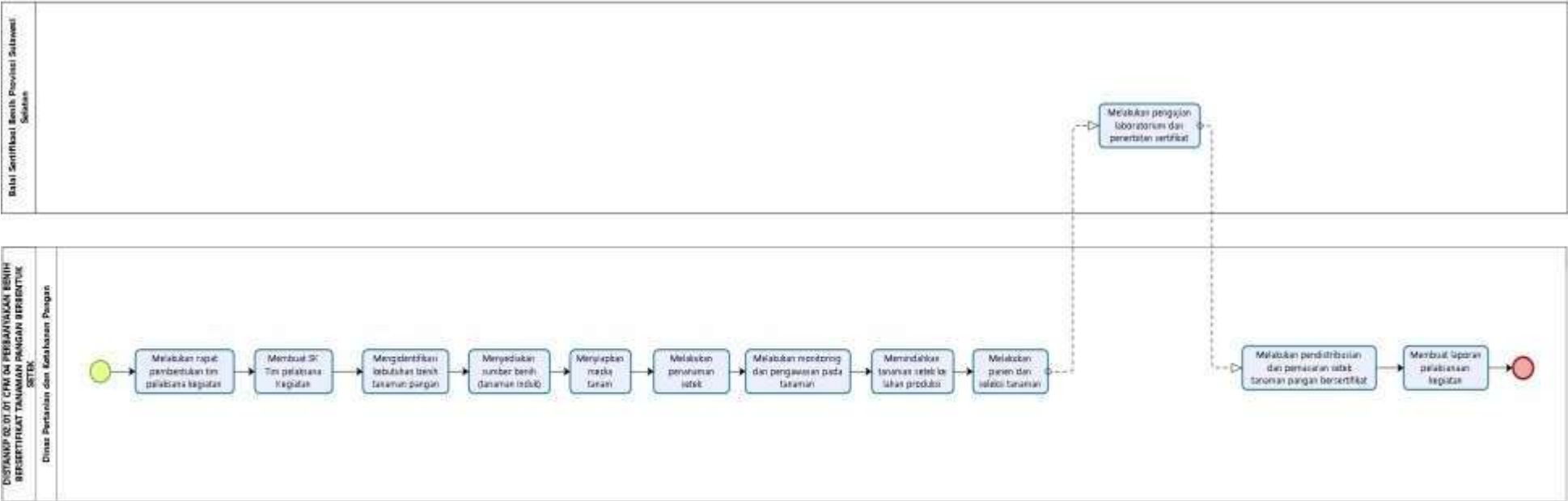
02.01.01 CFM 01



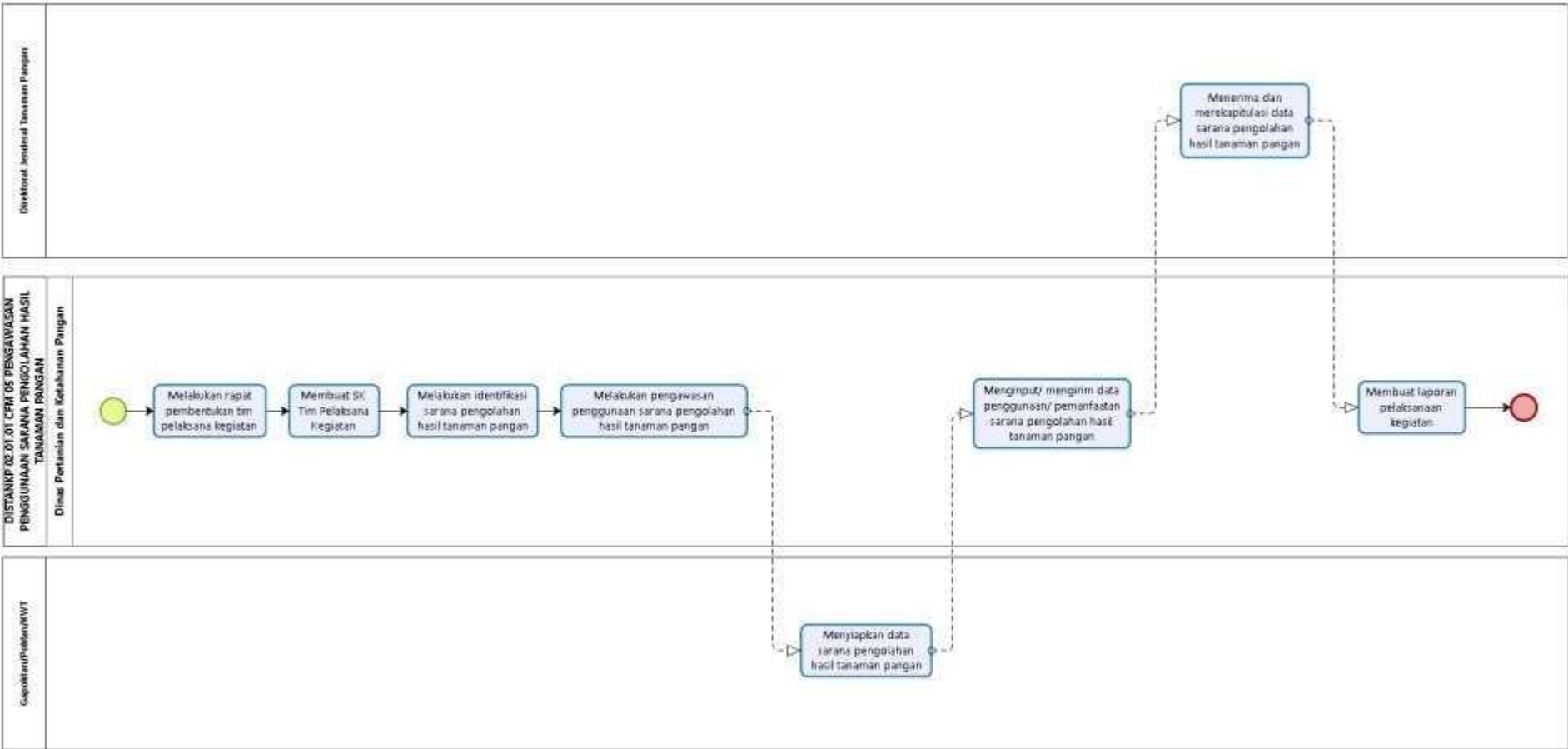
02.01.01 CFM 03



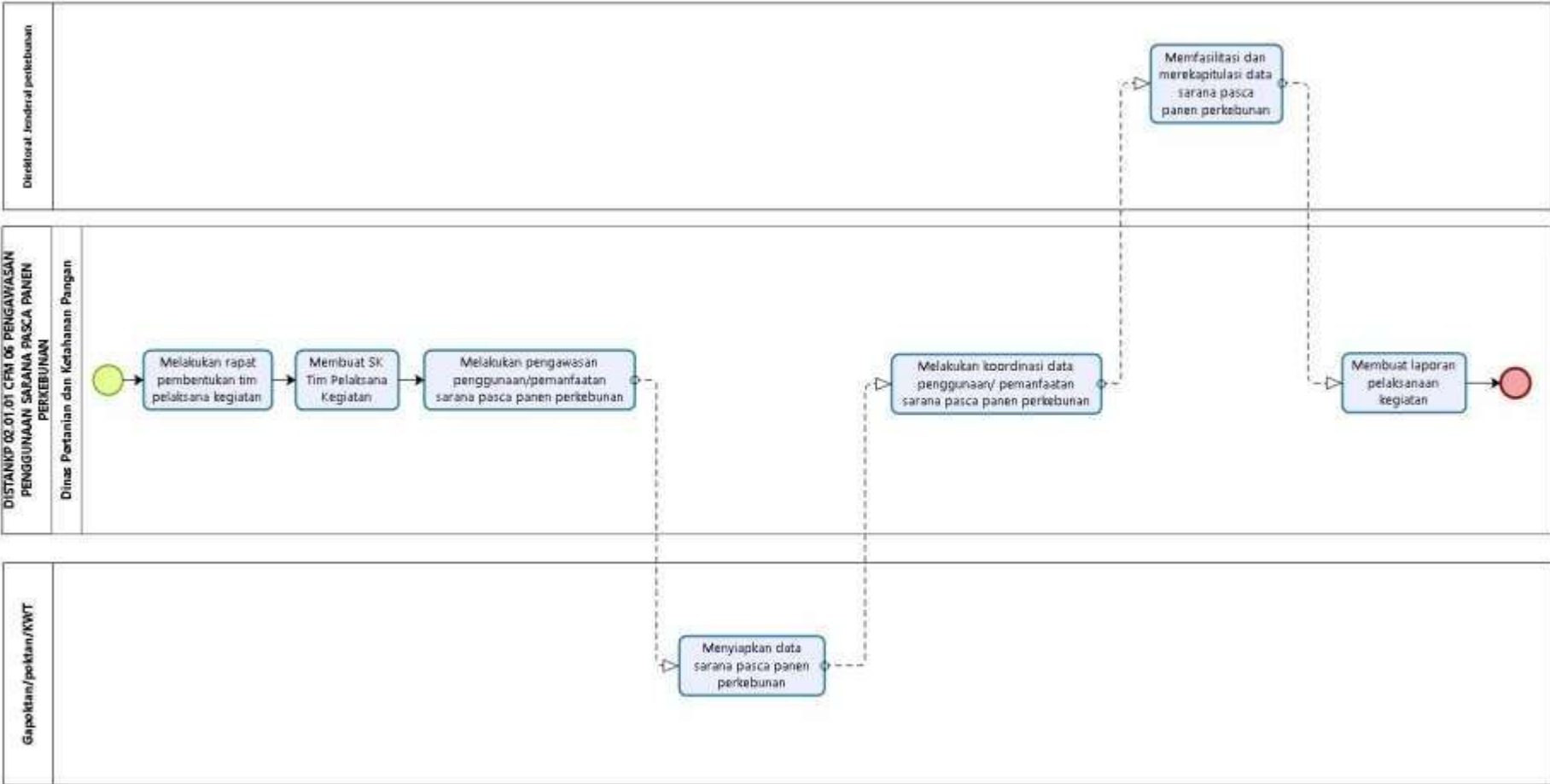
02.01.01 CFM 04



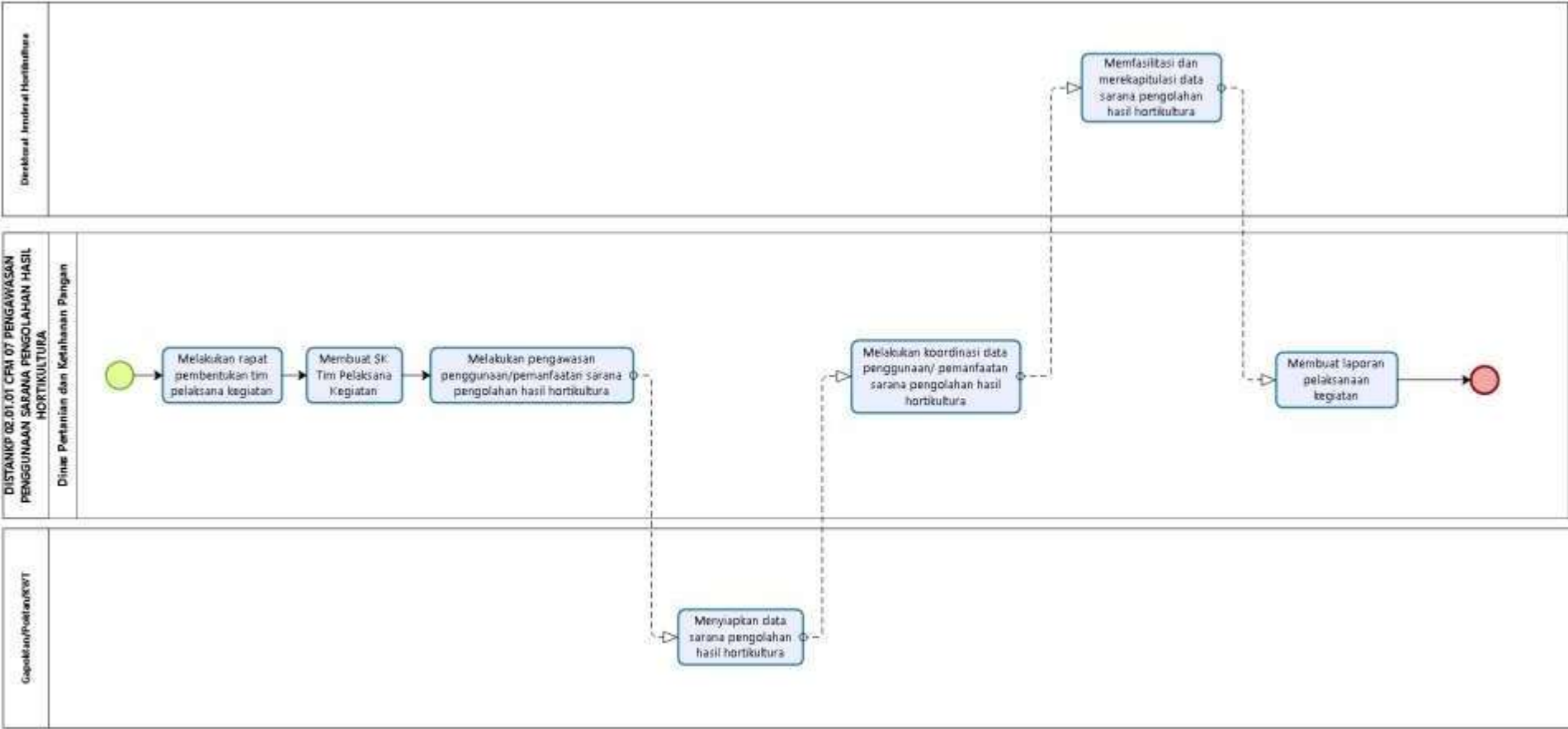
02.01.01 CFM 05



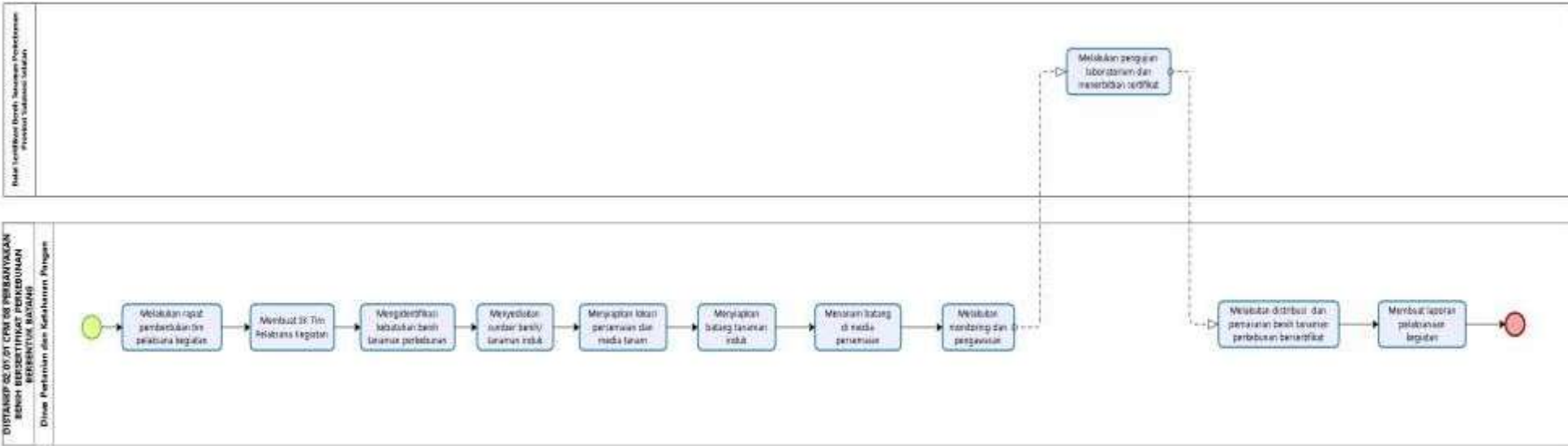
02.01.01 CFM 06



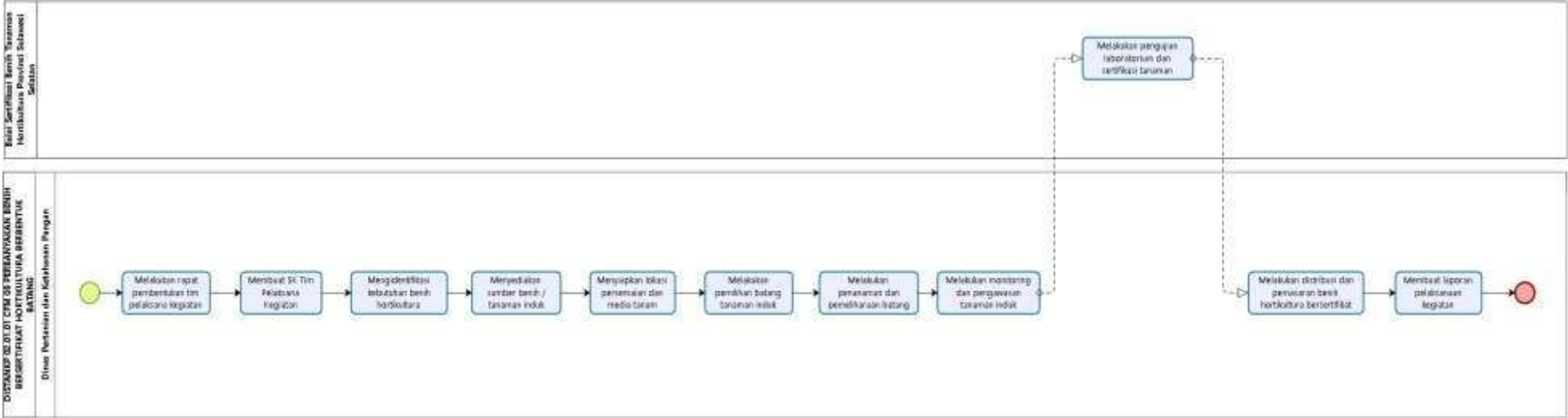
02.01.01 CFM 07



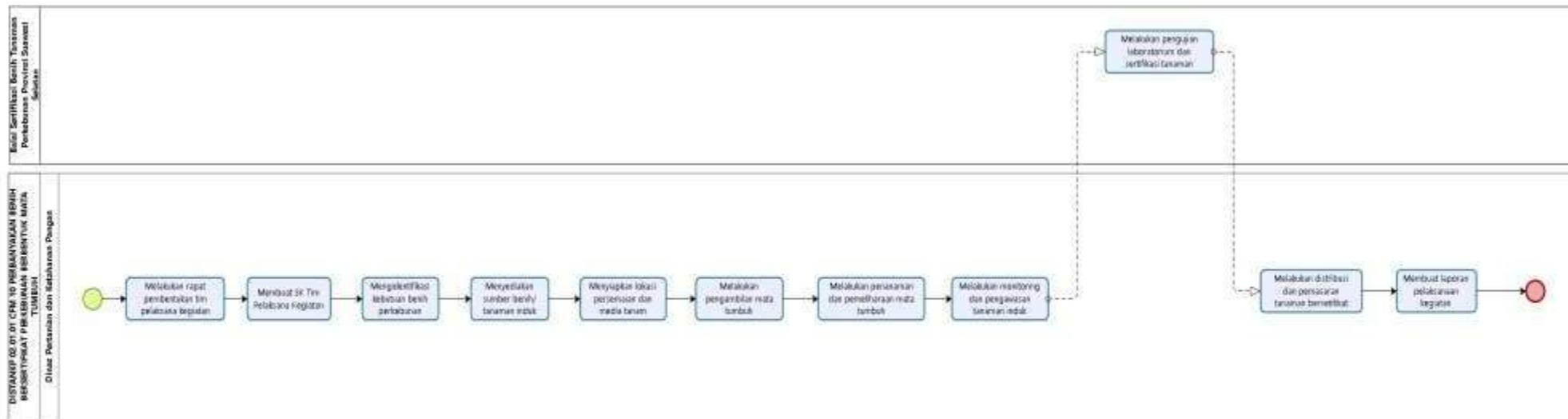
02.01.01 CFM 08



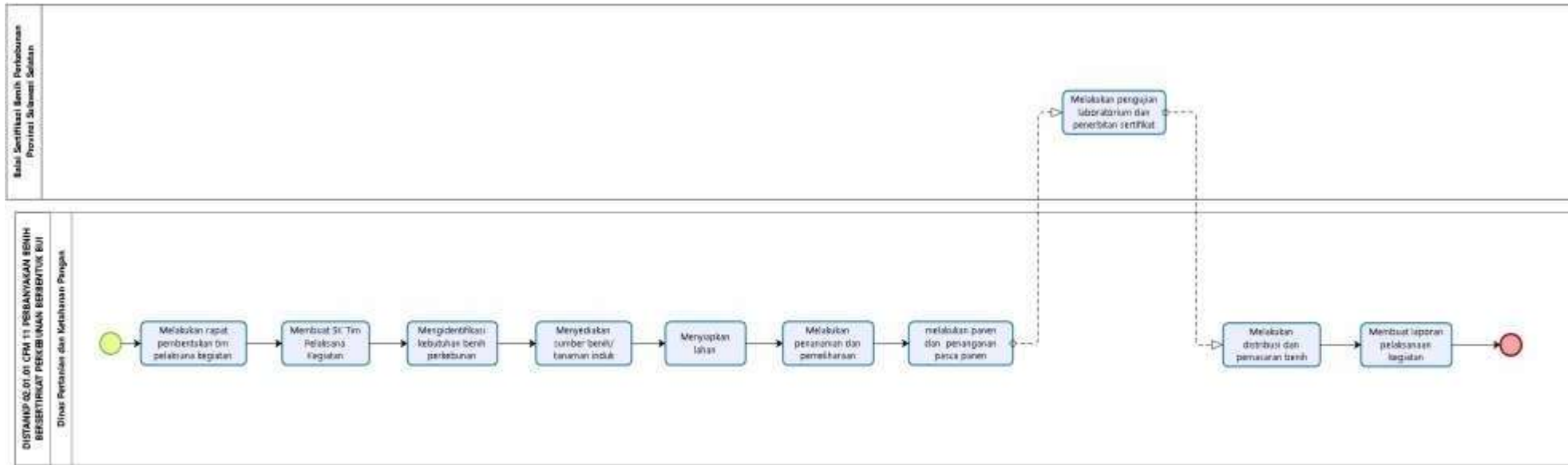
02.01.01 CFM 09



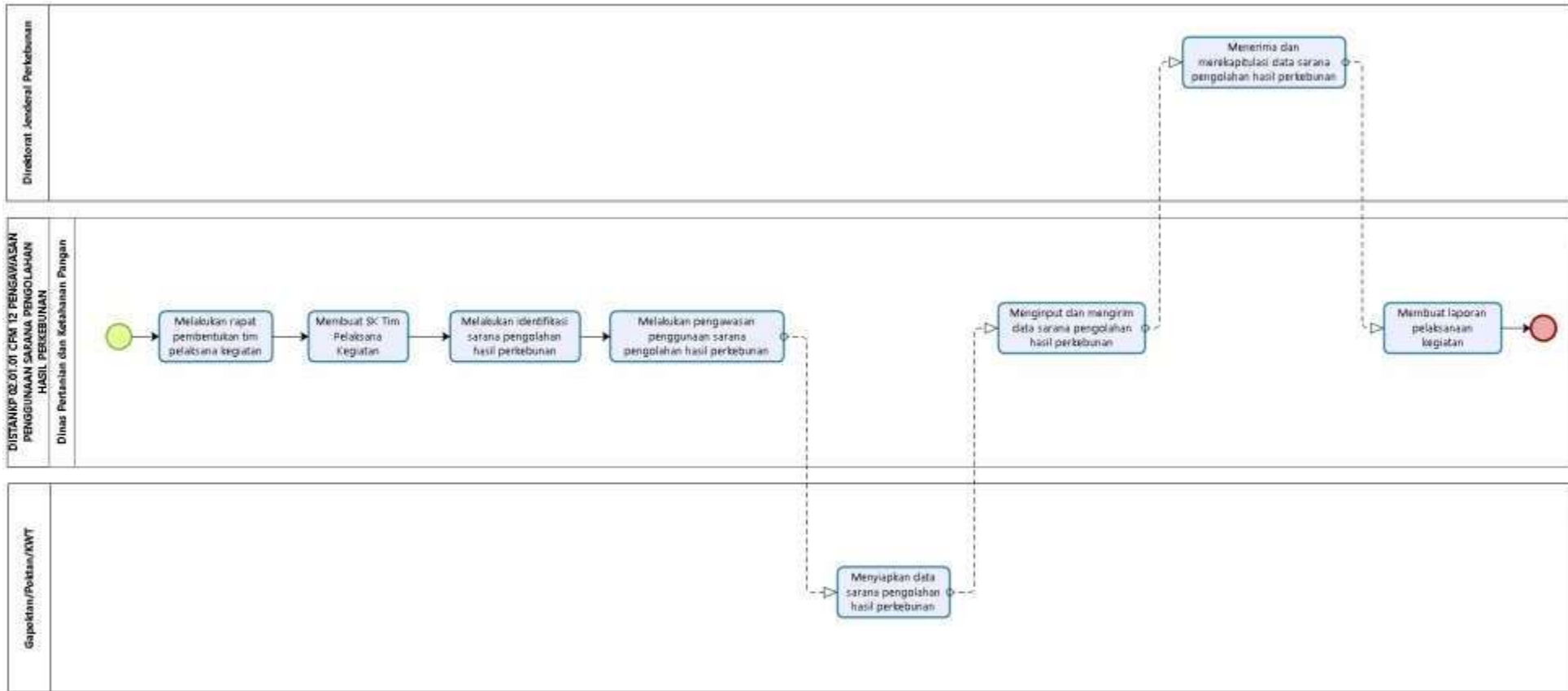
02.01.01 CFM 10



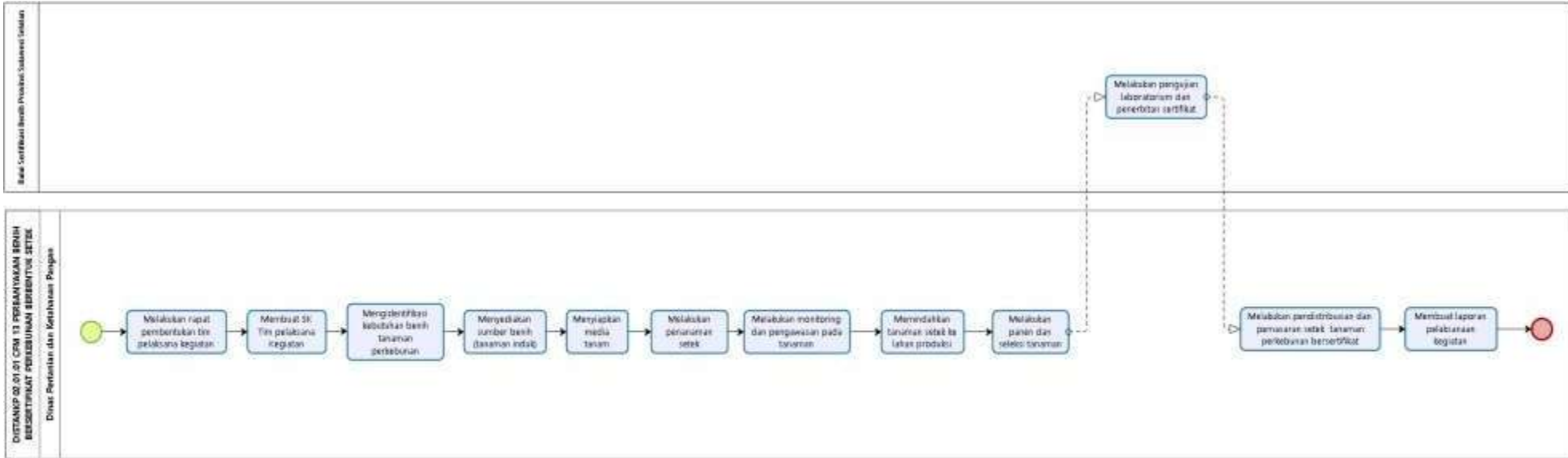
02.01.01 CFM 11



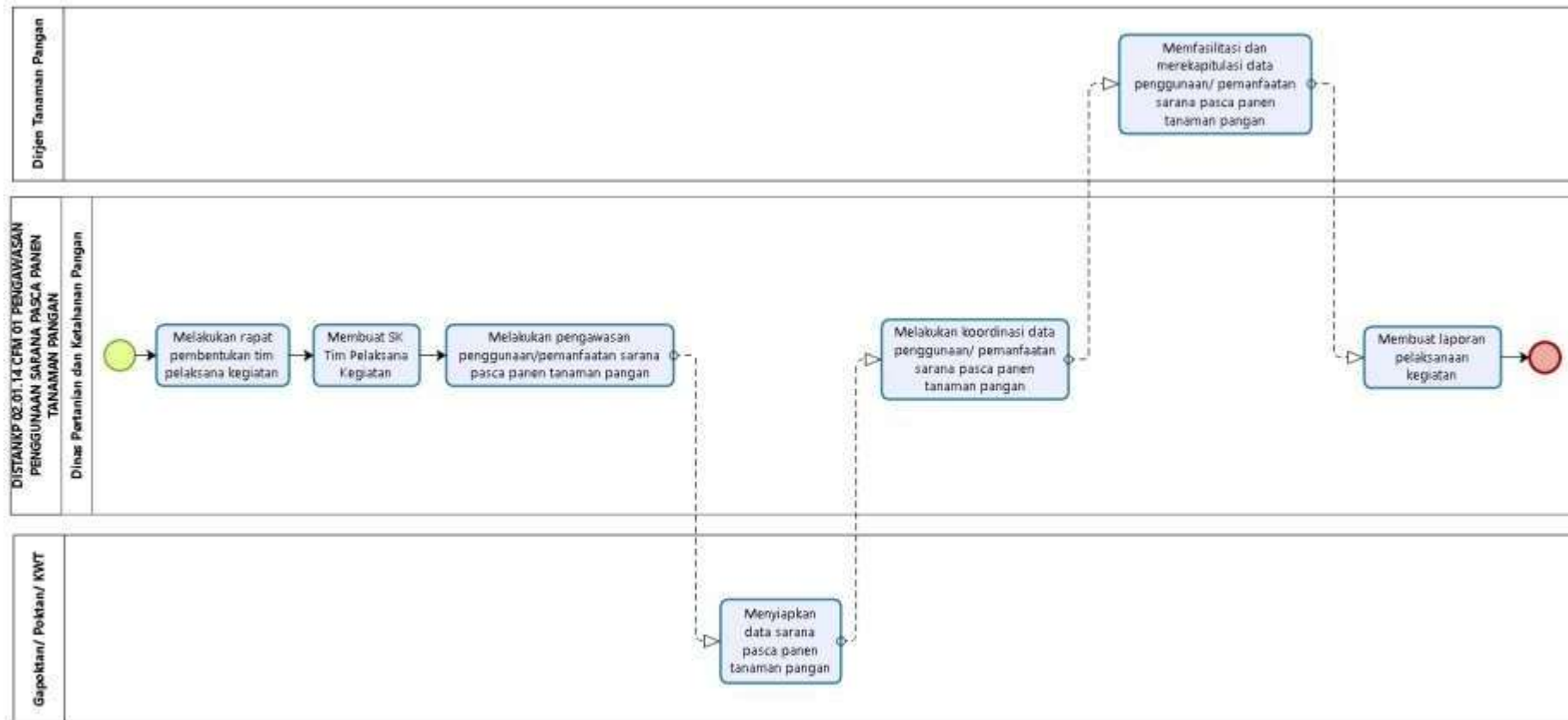
02.01.01 CFM 12



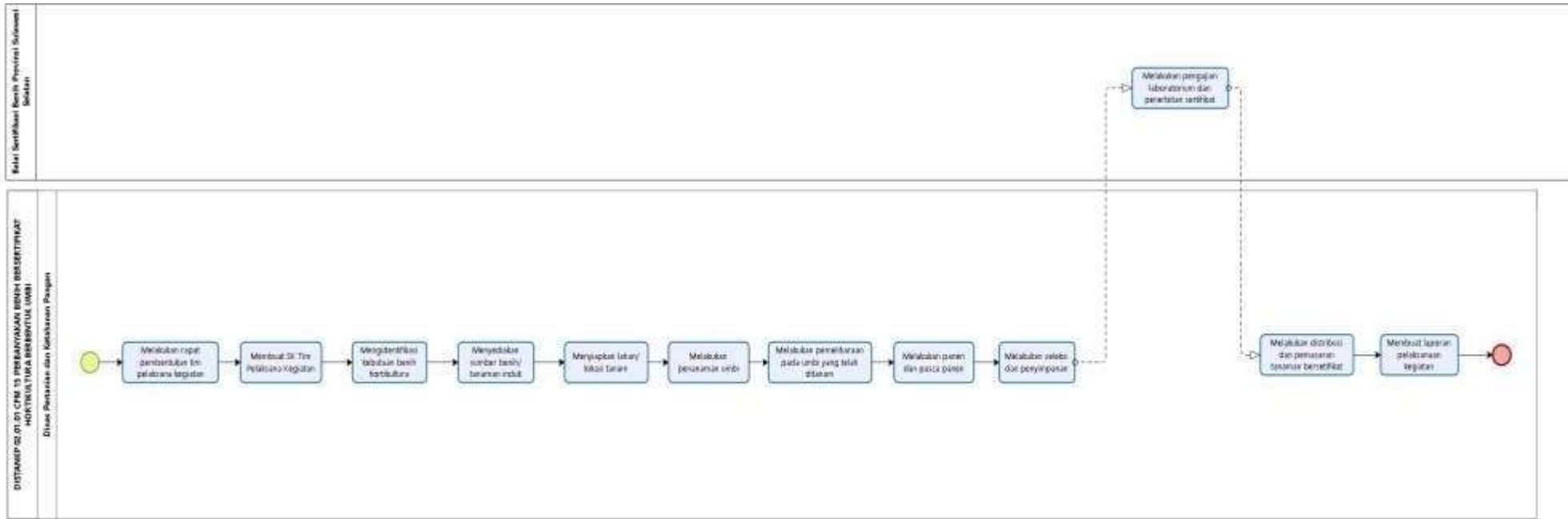
02.01.01 CFM 13



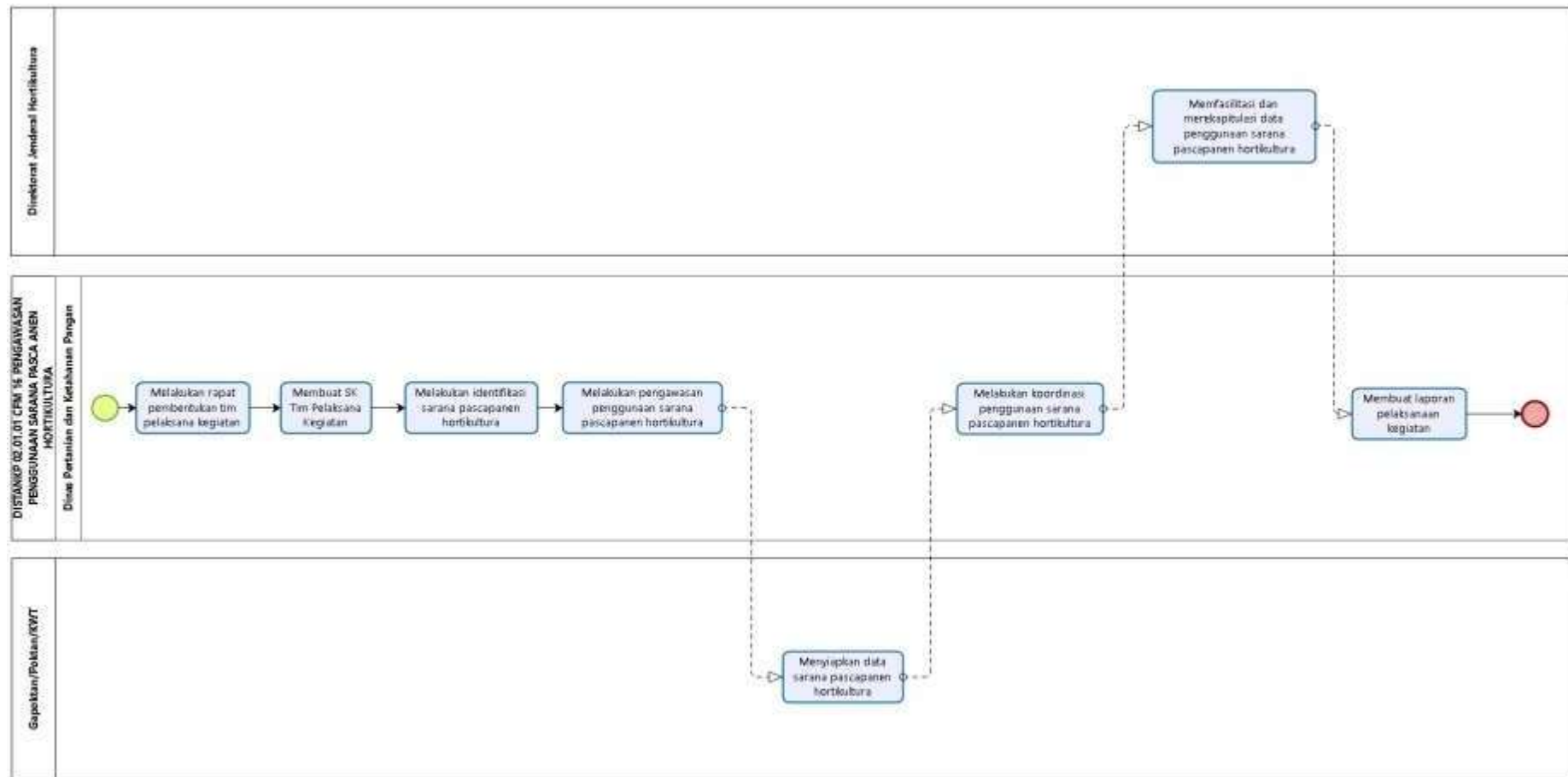
02.01.01 CFM 14



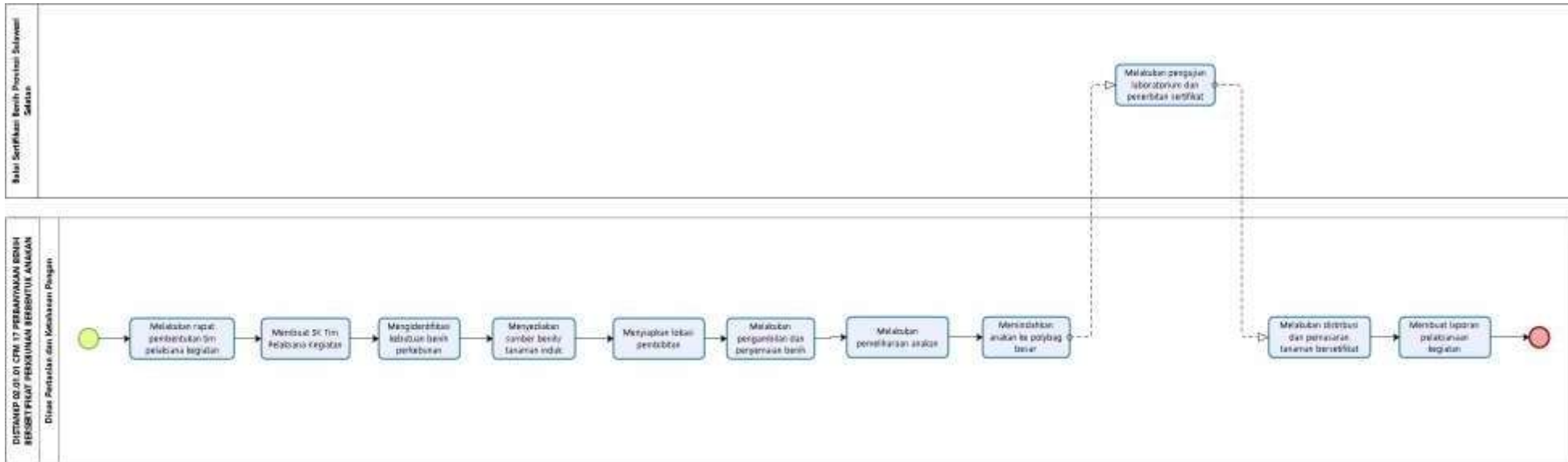
02.01.01 CFM 15



02.01.01 CFM 16



02.01.01 CFM 17



SUB KEG.02.01.02

DISTANKP 02.01.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG)
HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA



DISTANKP 02.01.02.01
PENINGKATAN KUALITAS SDG
HEWAN/TANAMAN



DISTANKP 02.01.02.02
PEMANFAATAN SDG
HEWAN/TANAMAN

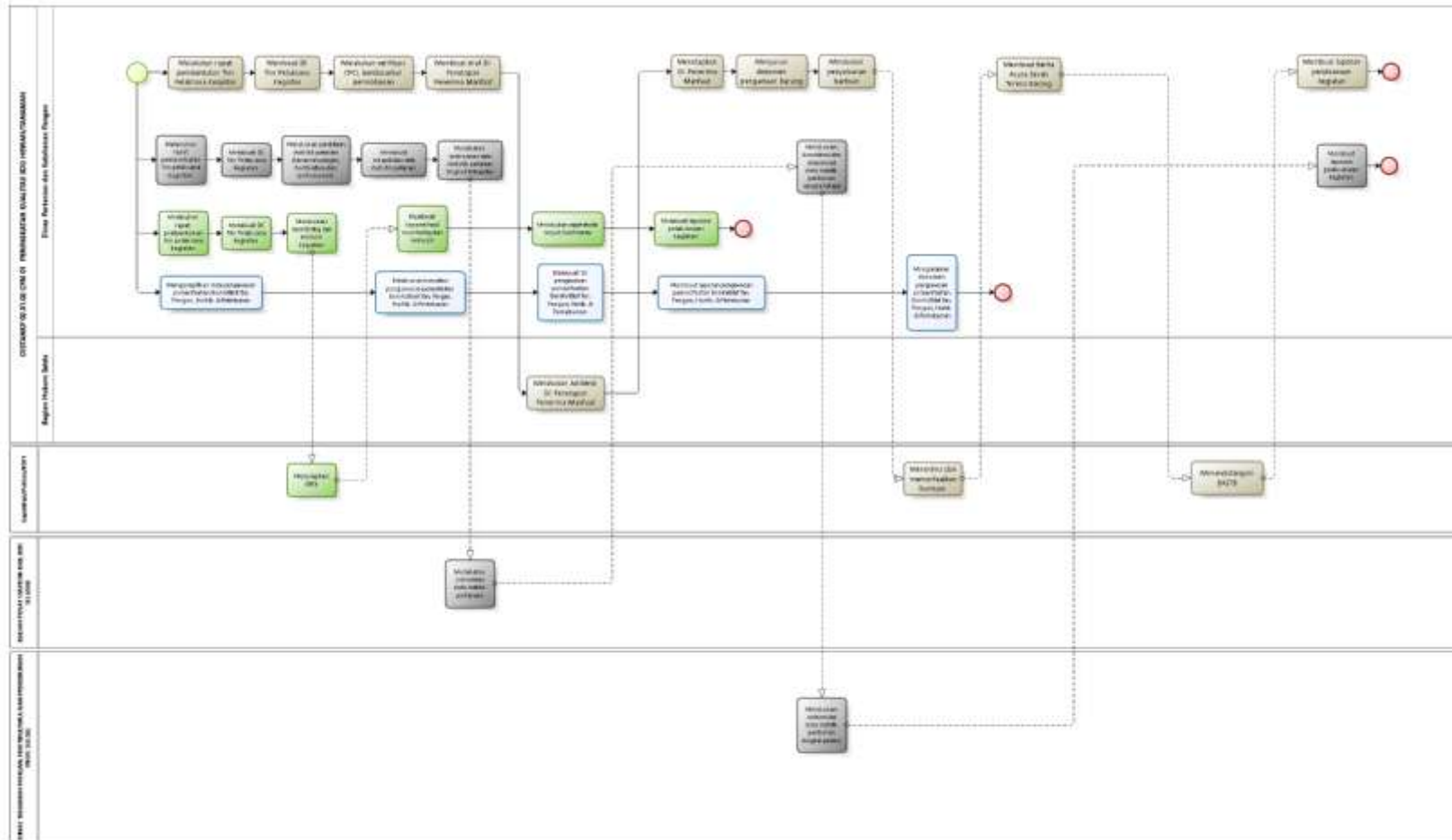


DISTANKP 02.01.02.03
PENJAMINAN KEMURNIAN DAN
KELESTARIAN SDG TANAMAN

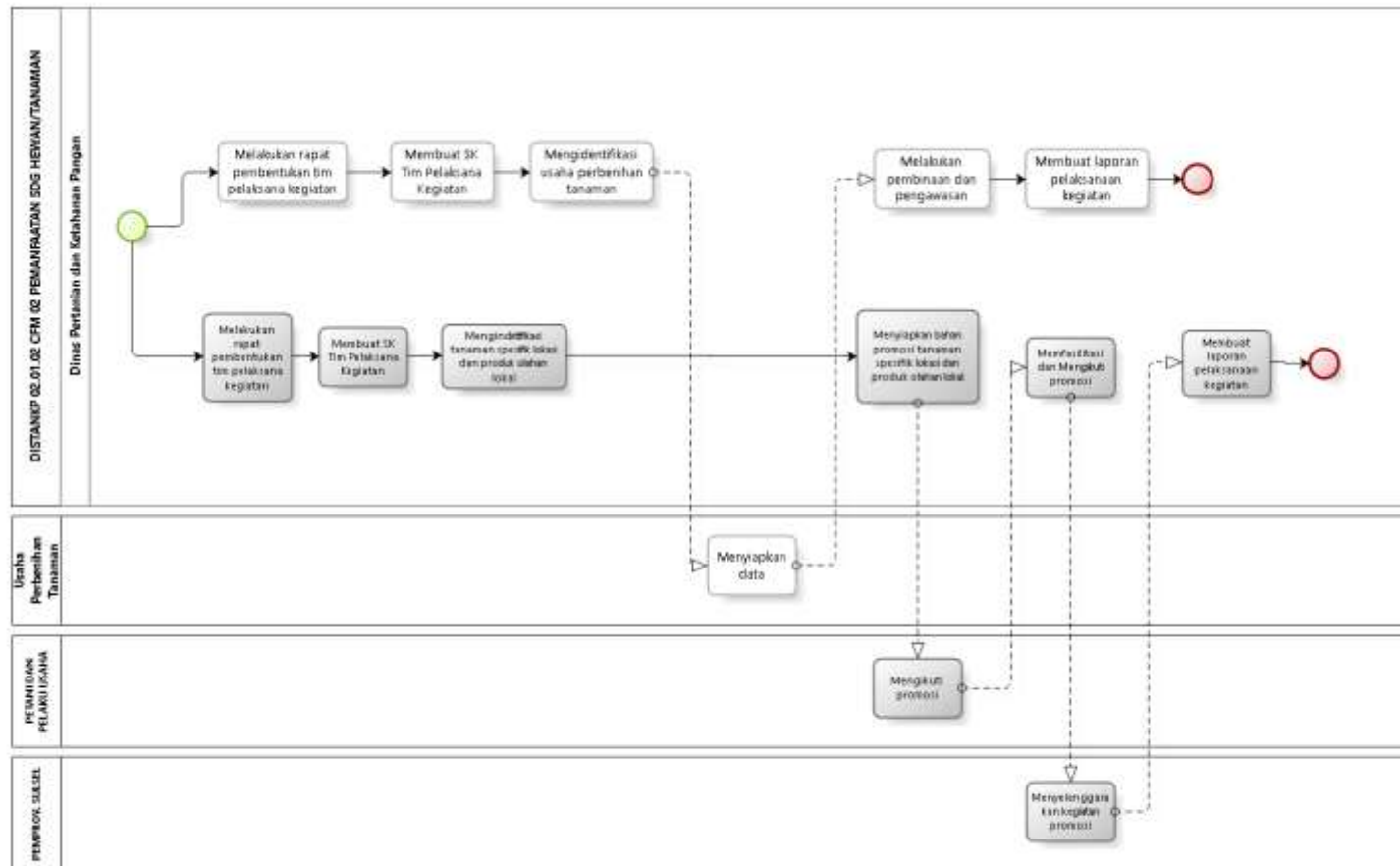


DISTANKP 02.01.02.04
PENJAMINAN KEMURNIAN DAN
KELESTARIAN SDG HEWAN

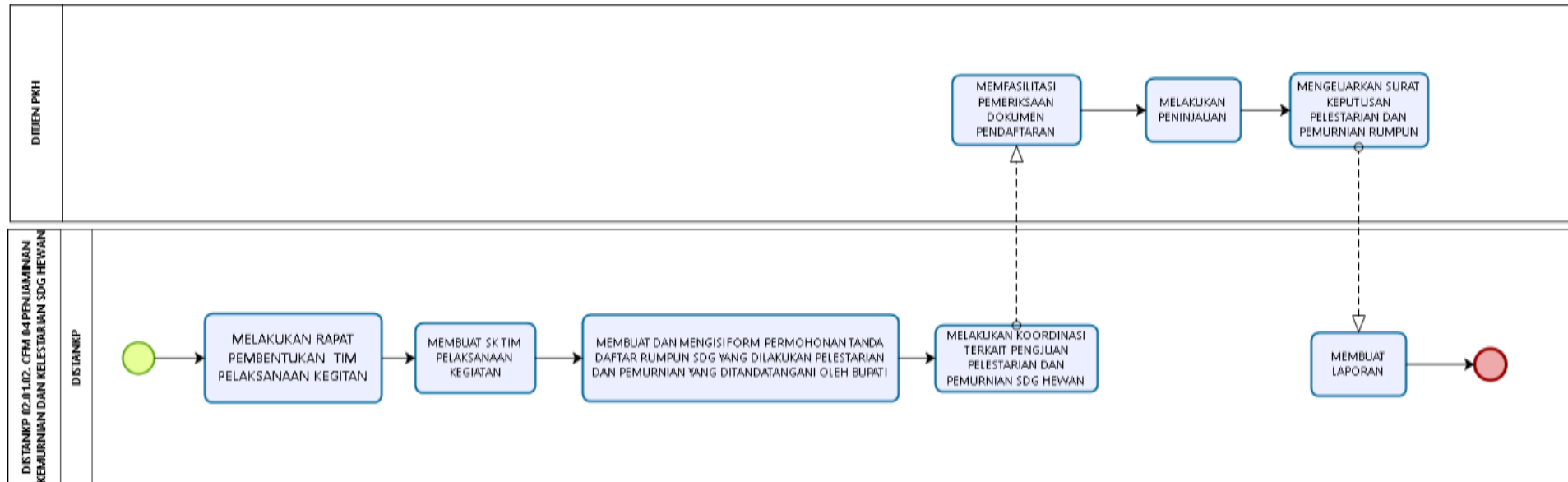
02.01.02 CFM 01



02.01.02 CFM 02



02.01.02 CFM 04

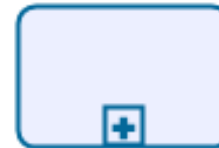


SUB KEG.02.01.03

DISTANKP 02.01.03 PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN
BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA
PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

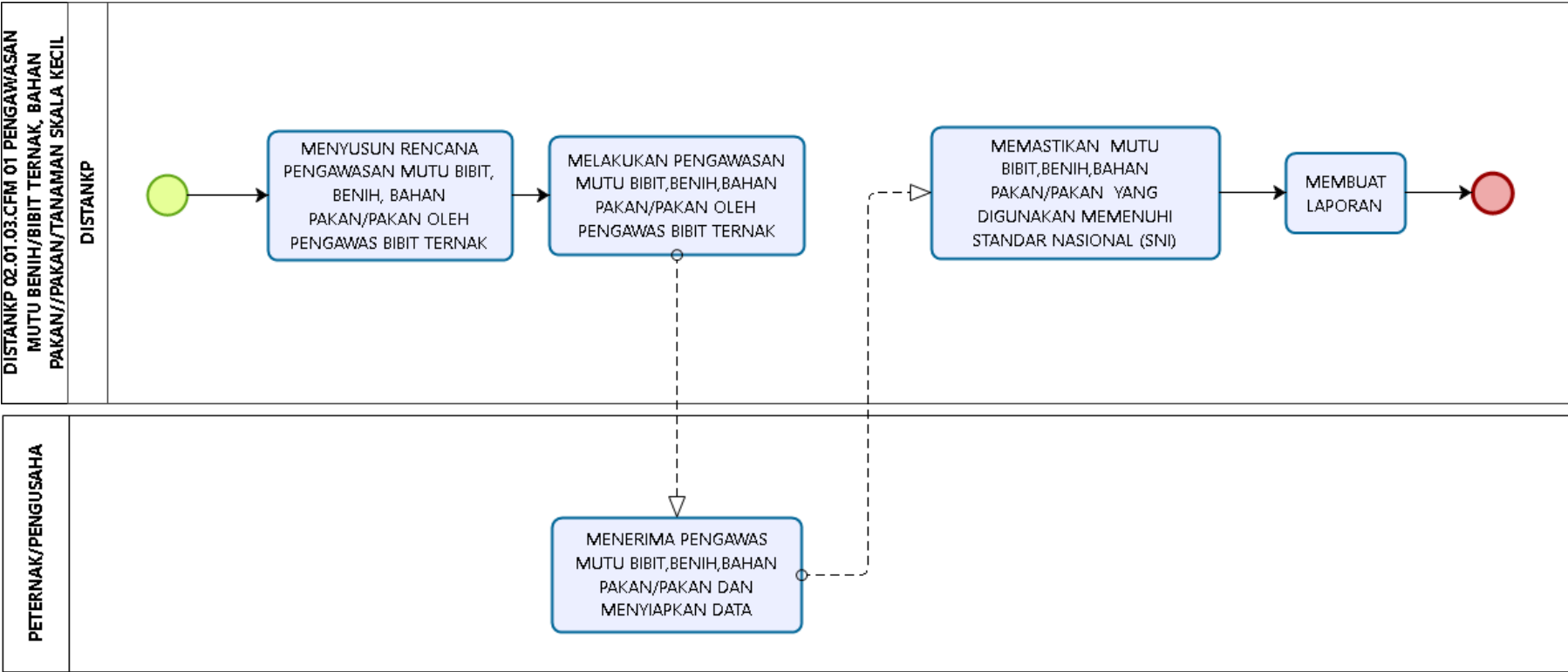


DISTANKP 02.01.03.01
PENGAWASAN MUTU
BENIH/BIBIT TERNAK, BAHAN
PAKAN//PAKAN/TANAMAN
SKALA KECIL

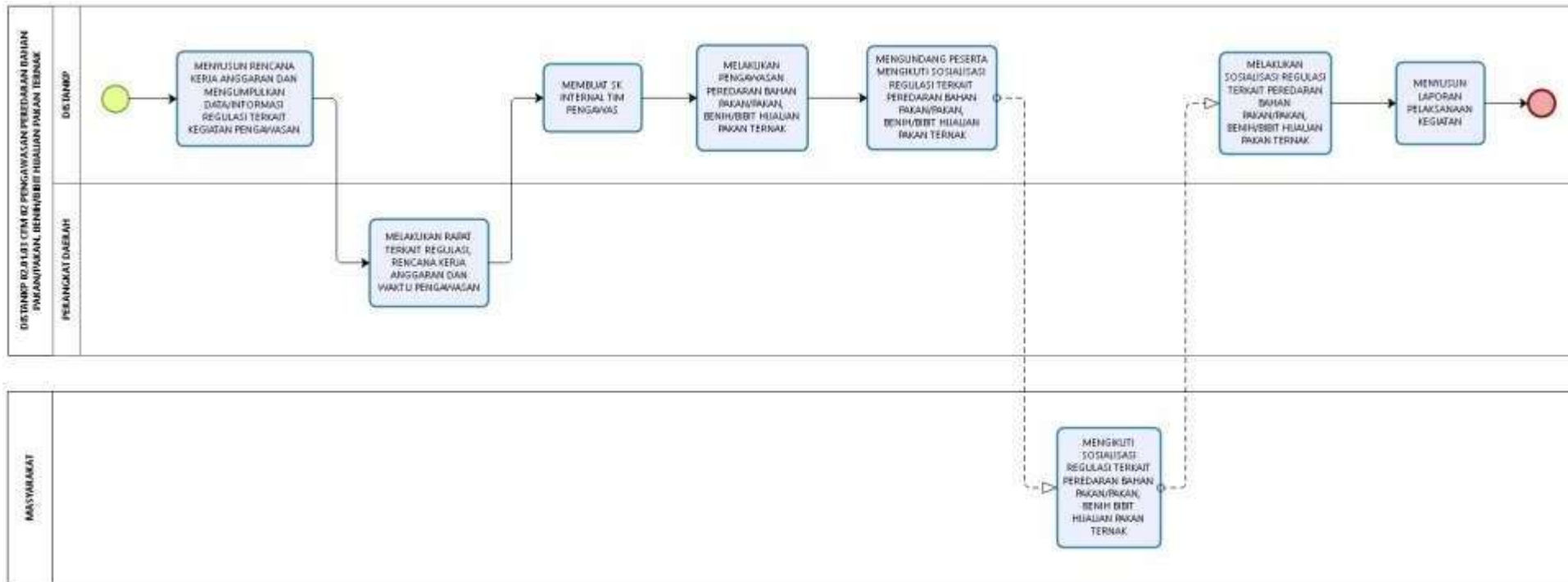


DISTANKP 02.01.03.02
PENGAWASAN PEREDARAN
BAHAN PAKAN/PAKAN,
BENIH/BIBIT HIJAUAN PAKAN
TERNAK

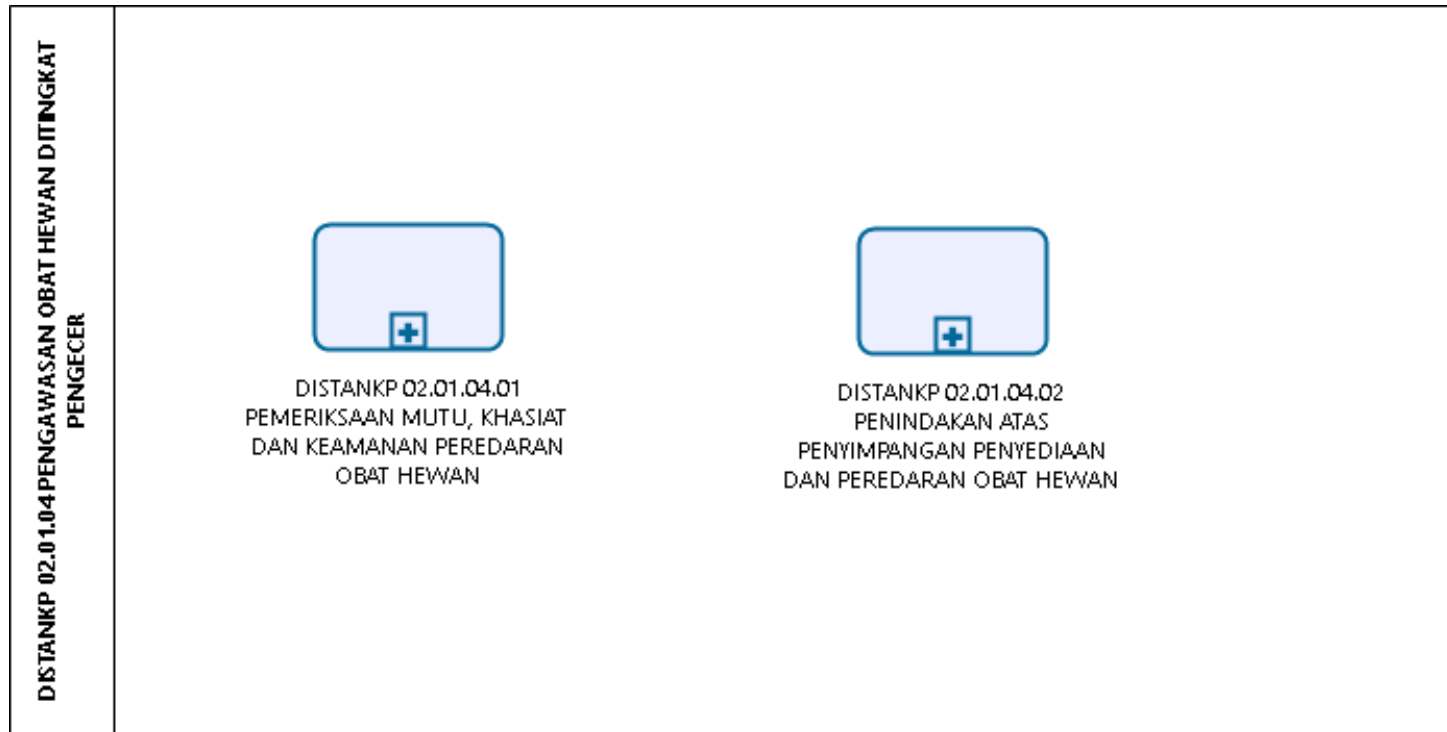
02.01.03 CFM 01



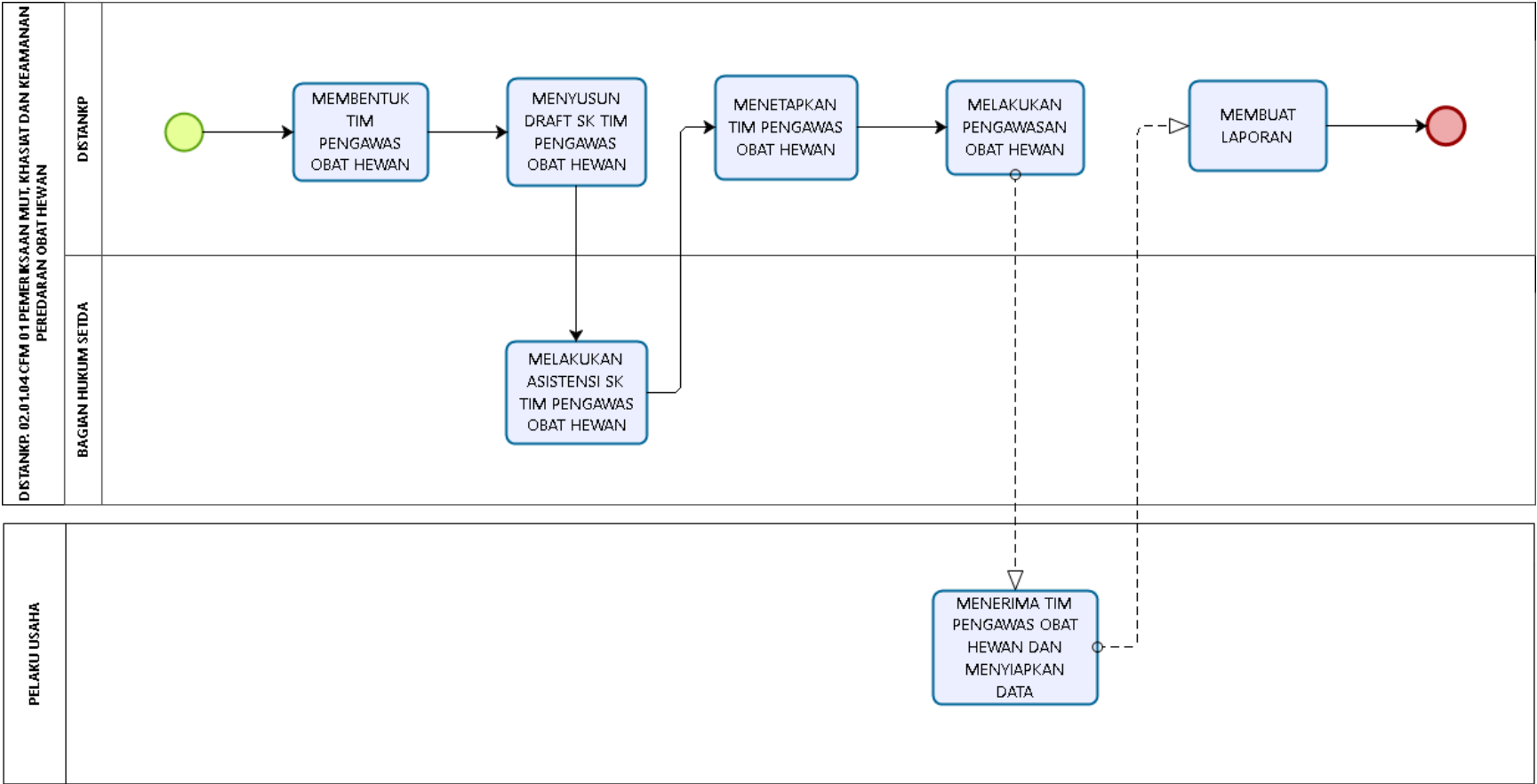
02.01.03 CFM 02



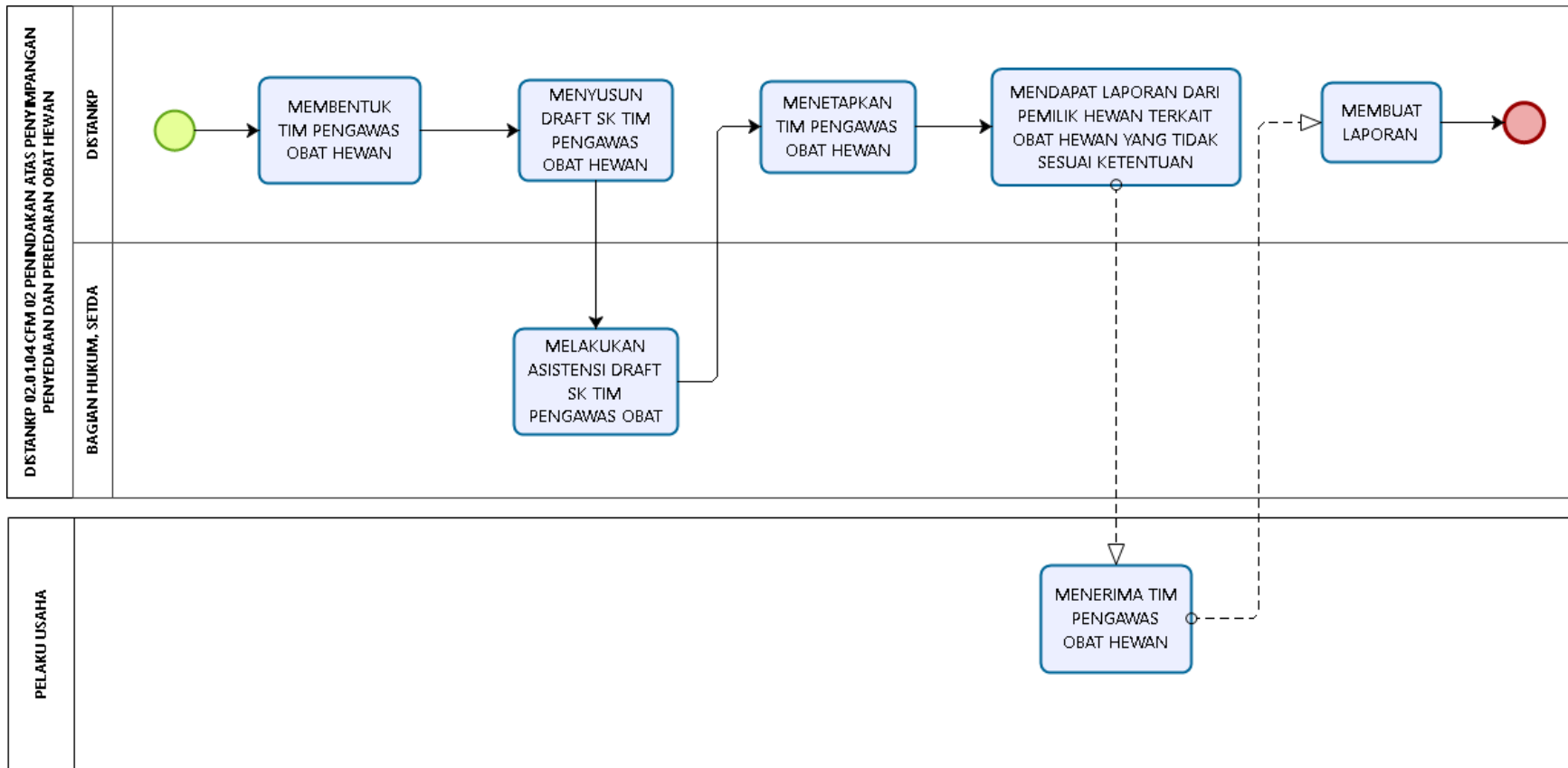
SUB KEG.02.01.04



02.01.04 CFM 01



02.01.04 CFM 02



SUB KEG.02.01.05

**DISTANKP 02.01.05 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN
DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIDAUAN PAKAN TERNAK
DALAM DAERAH**



DISTANKP 02.01.05.01
PENGUJIAN MUTU BENIH DAN
BIBIT TERNAK



DISTANKP 02.01.05.02
PENJAMINAN PEREDARAN HPT,
BAHAN PAKAN/PAKAN



DISTANKP 02.01.05.03
PENGAWASAN PRODUKSI
BENIH/BIBIT TERNAK DAN HPT,
BAHAN PAKAN/PAKAN



DISTANKP 02.01.05.04
PENGAWASAN PEREDARAN DAN
SERTIFIKASI BENIH/BIBIT TERNAK

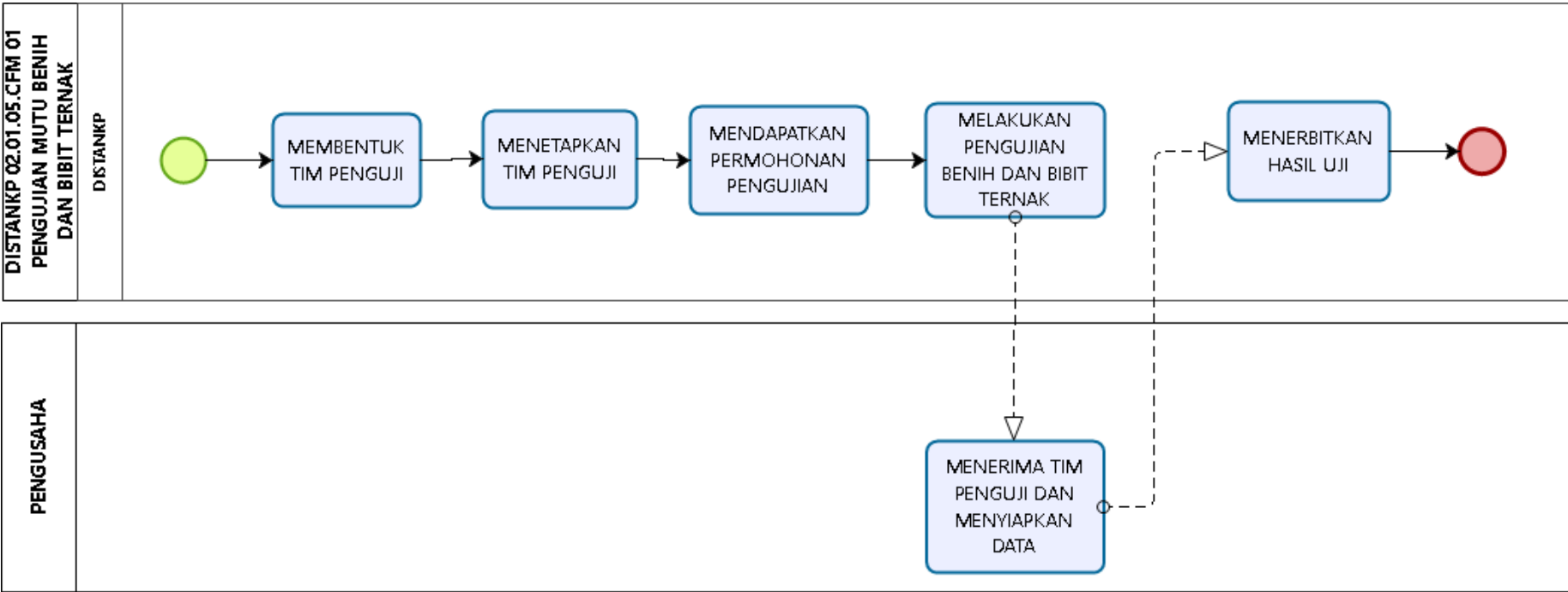


DISTANKP 02.01.05.05
PENJAMINAN PEREDARAN
BENIH/BIBIT TERNAK

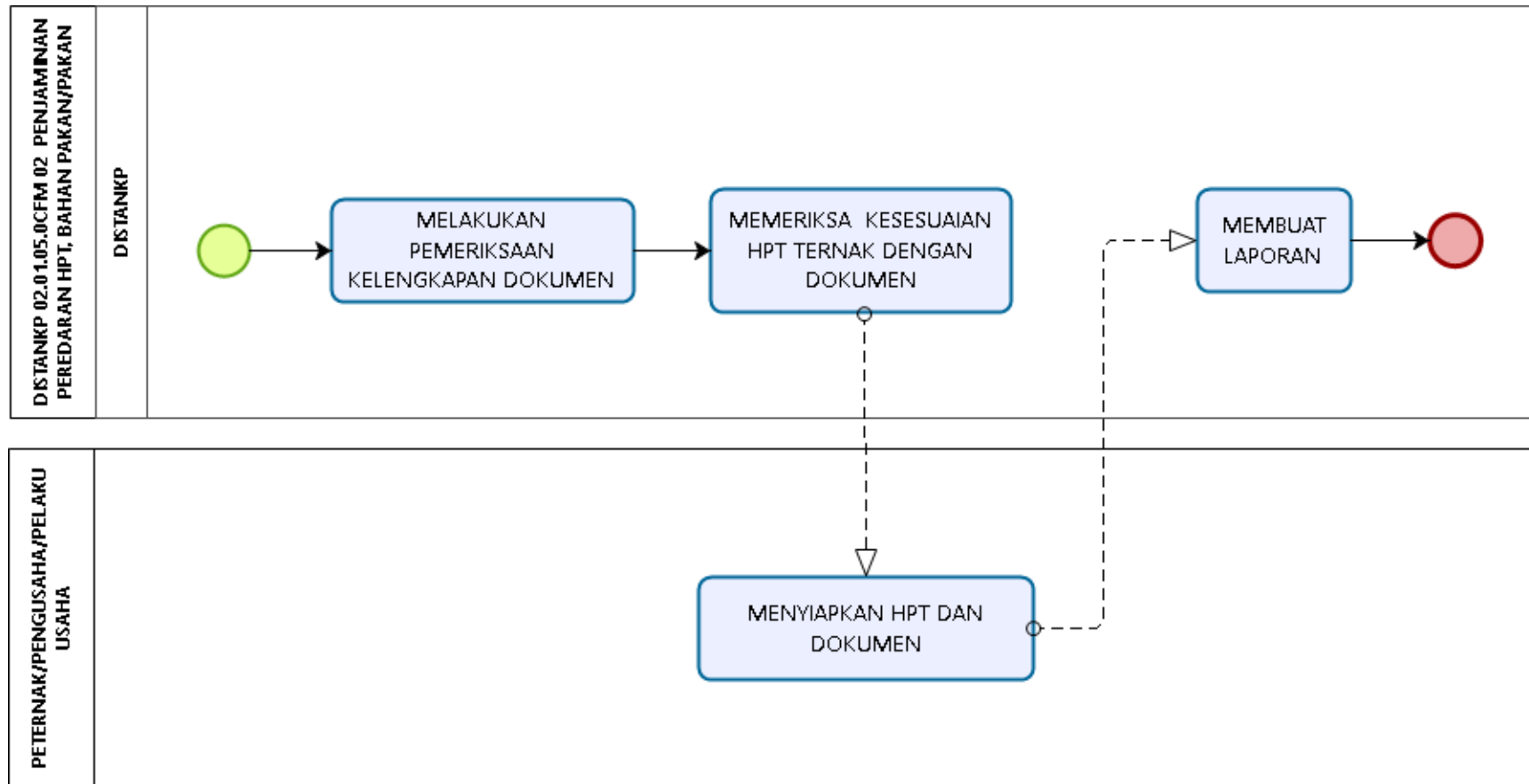


DISTANKP 02.01.05.06
PENGENDALIAN PENYEDIAAN
BENIH/BIBIT TERNAK DAN HPT

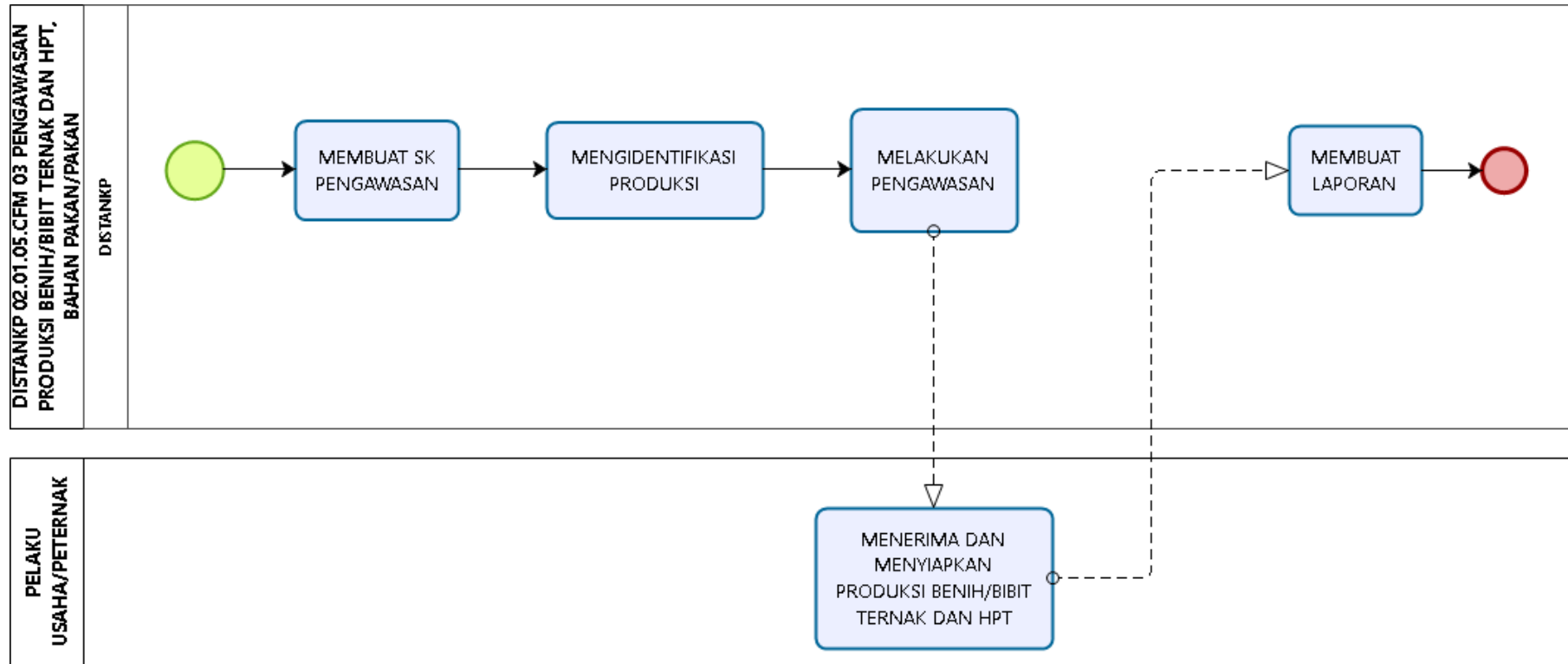
02.01.05 CFM 01



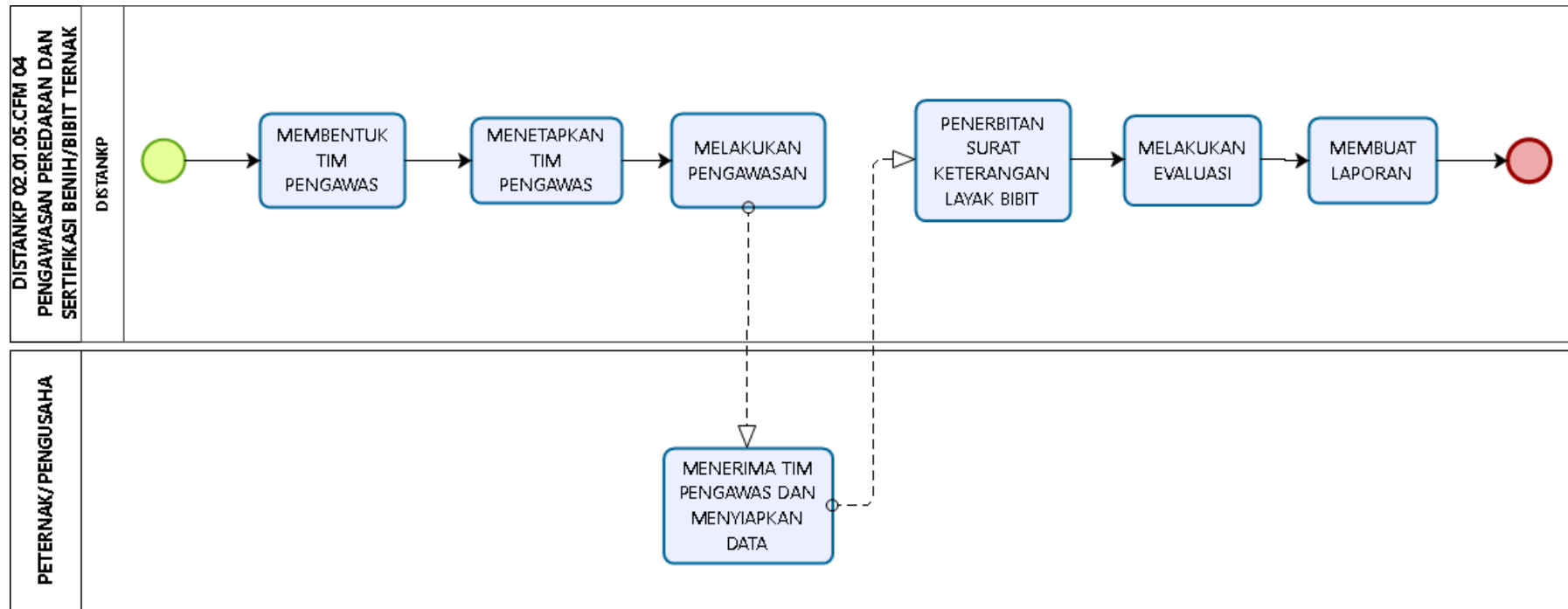
02.01.05 CFM 02



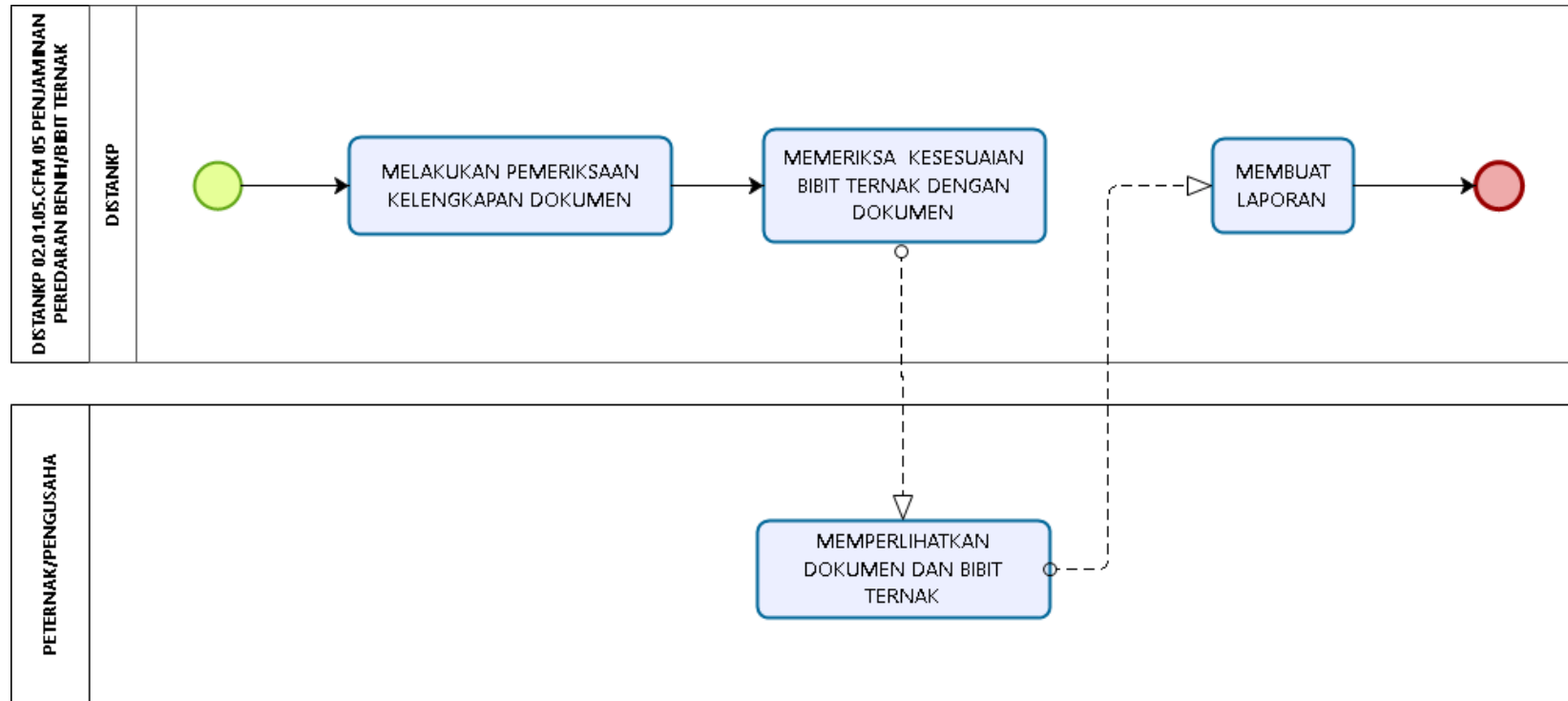
02.01.05 CFM 03



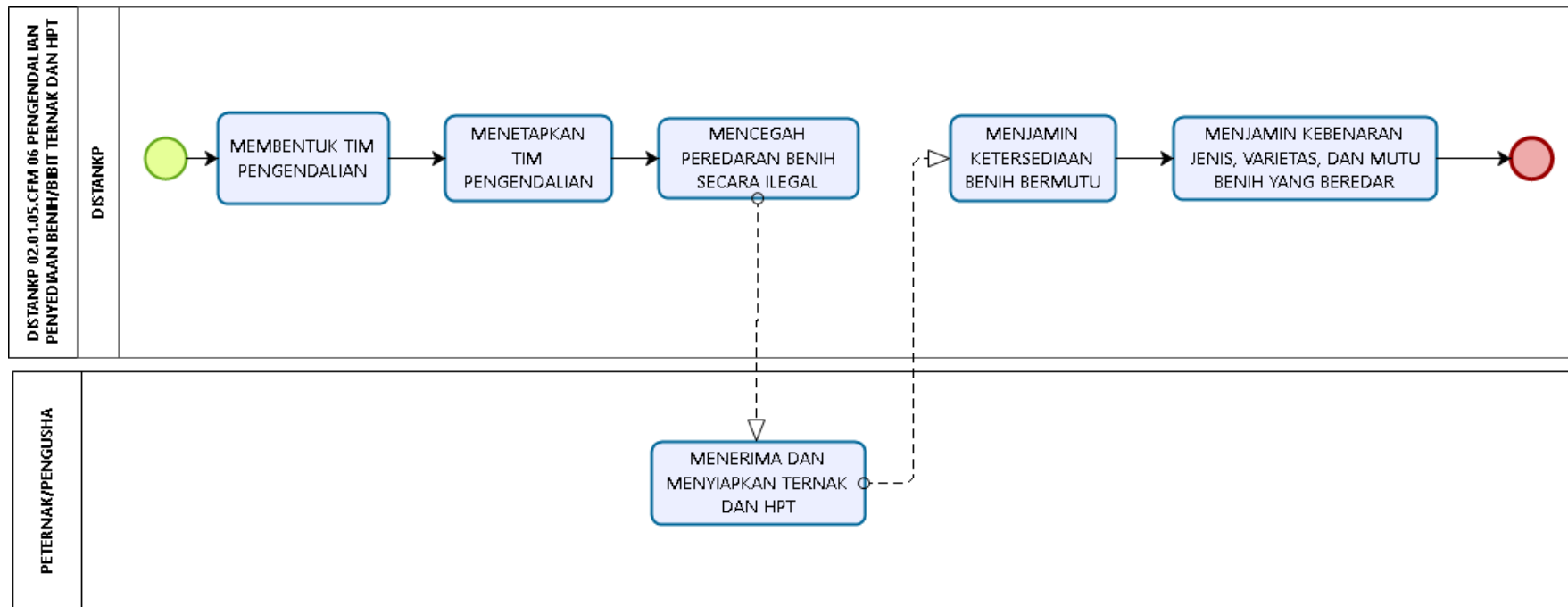
02.01.05 CFM 04



02.01.05 CFM 05



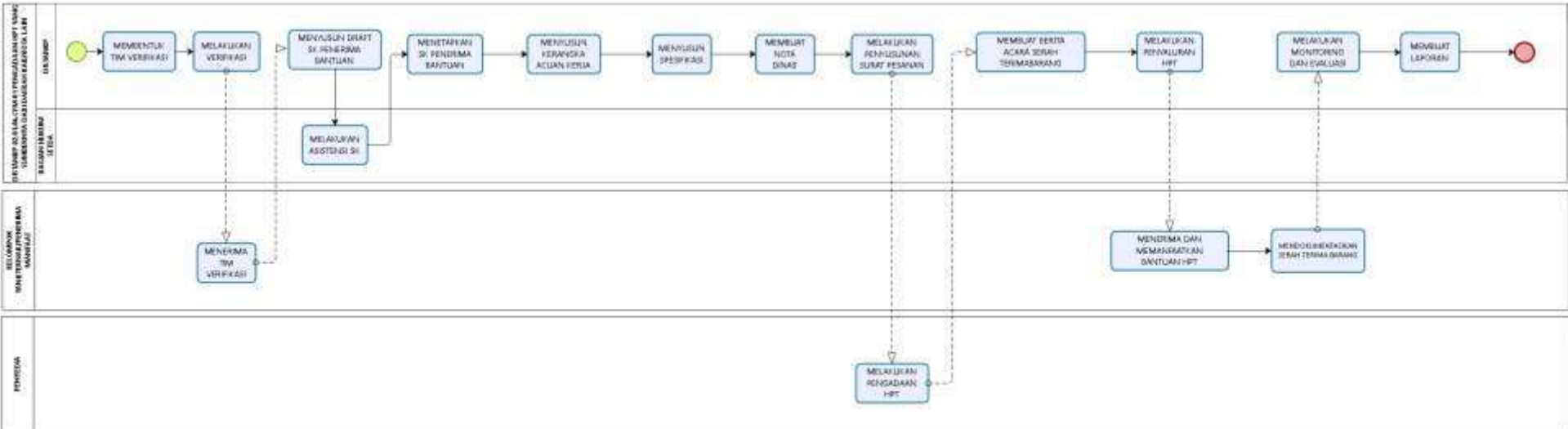
02.01.05 CFM 06



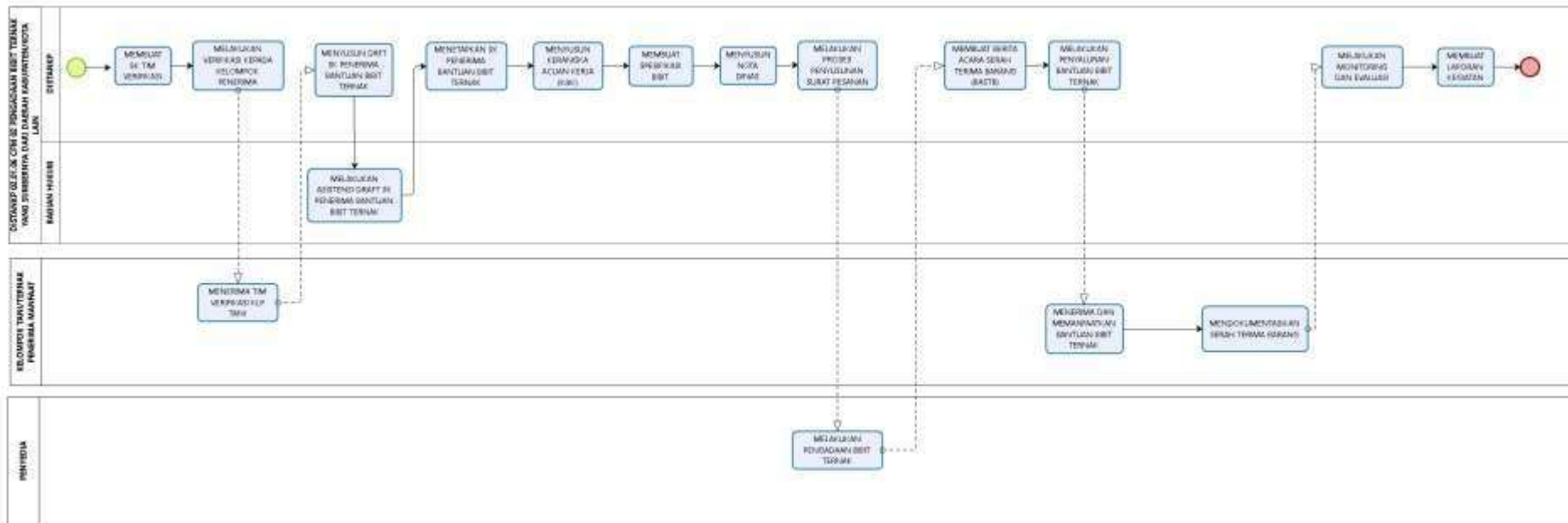
SUB KEG.02.01.06

<p>DISTANKP 02.01.06 PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HUJUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM SATU DAERAH</p>	<div data-bbox="630 480 842 624"></div> <div data-bbox="583 651 893 767"><p>DISTANKP 02.01.06.01 PENGADAAN HPT YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KAB/KOTA LAIN</p></div> <div data-bbox="1091 472 1303 616"></div> <div data-bbox="1006 639 1382 756"><p>DISTANKP 02.01.06.02 PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KAB/KOTA LAIN</p></div> <div data-bbox="1542 472 1754 616"></div> <div data-bbox="1460 639 1836 756"><p>DISTANKP 02.01.06.03 PENGADAAN BENIH TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KAB/KOTA LAIN</p></div>
--	---

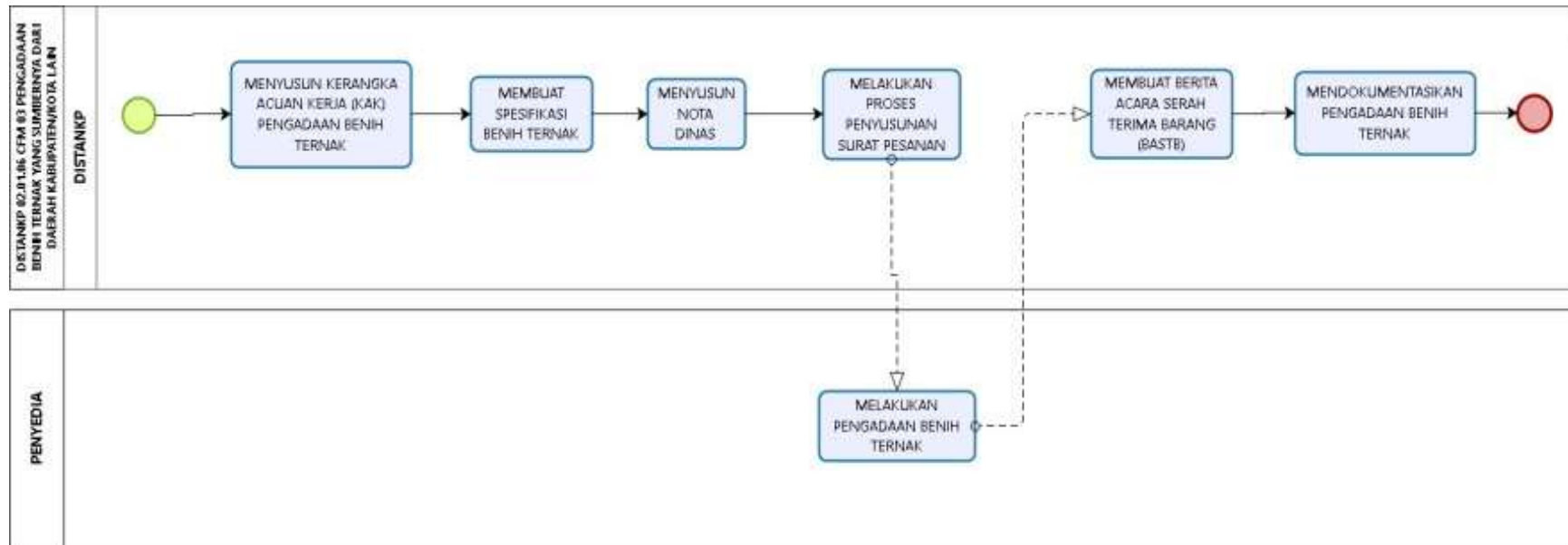
02.01.06 CFM 01



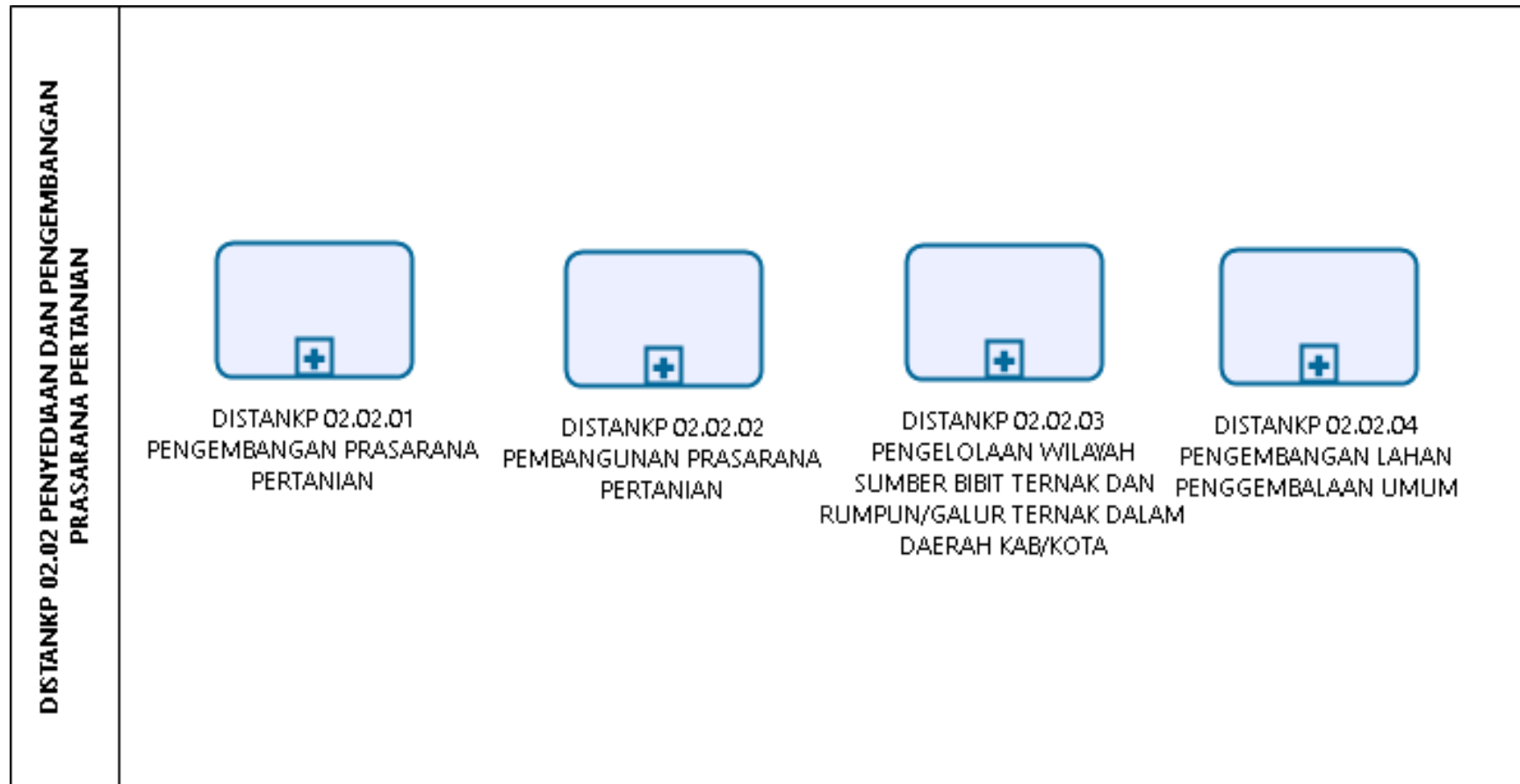
02.01.06 CFM 02



02.01.06 CFM 03



KEG 02..02



SUB KEG 02.02.01

DISTANKP 02.02.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN



DISTANKP 02.02.01.01
PENGKOORDINASIAN &
SINKRONISASI PRASARANA
PENDUKUNG PERTANIAN
LAINNYA



DISTANKP 02.02.01.02
PENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN KAWASAN
PERTANIAN



DISTANKP 02.02.01.03
PENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN PRASARANA
PASCAPANEN TAN PANGAN



DISTANKP 02.02.01.04
PENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN PRASARANA
PASCAPANEN PERKEBUNAN



DISTANKP 02.02.01.05
PENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN PRASARANA
PASCAPANEN HORTIKULTURA



DISTANKP 02.02.01.06
PENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN PRASARANA
PASCAPANEN PETERNAKAN



DISTANKP 02.02.01.07
PENINGKATAN PASCAPANEN
DAN PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN



DISTANKP 02.02.01.08
PENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN PRASARANA
PENGOLAHAN HASIL
HORTIKULTURA



DISTANKP 02.02.01.09
PENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN PRASARANA
PENGOLAHAN HASIL TAN
PANGAN



DISTANKP 02.02.01.10
PENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN PRASARANA
PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN



DISTANKP 02.02.01.11
PENETAPAN KAWASAN LAHAN
DAN LAHAN CAD PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN
SECARA NUMERIK & SPASIAL DI
KAB/KOTA



DISTANKP 02.02.01.12
PENGELOLAAN LAHAN PERT
PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B,
KAWASAN PERT PANGAN
BERKELANJUTAN/KP2B & LCP2B
DI KAB/KOTA

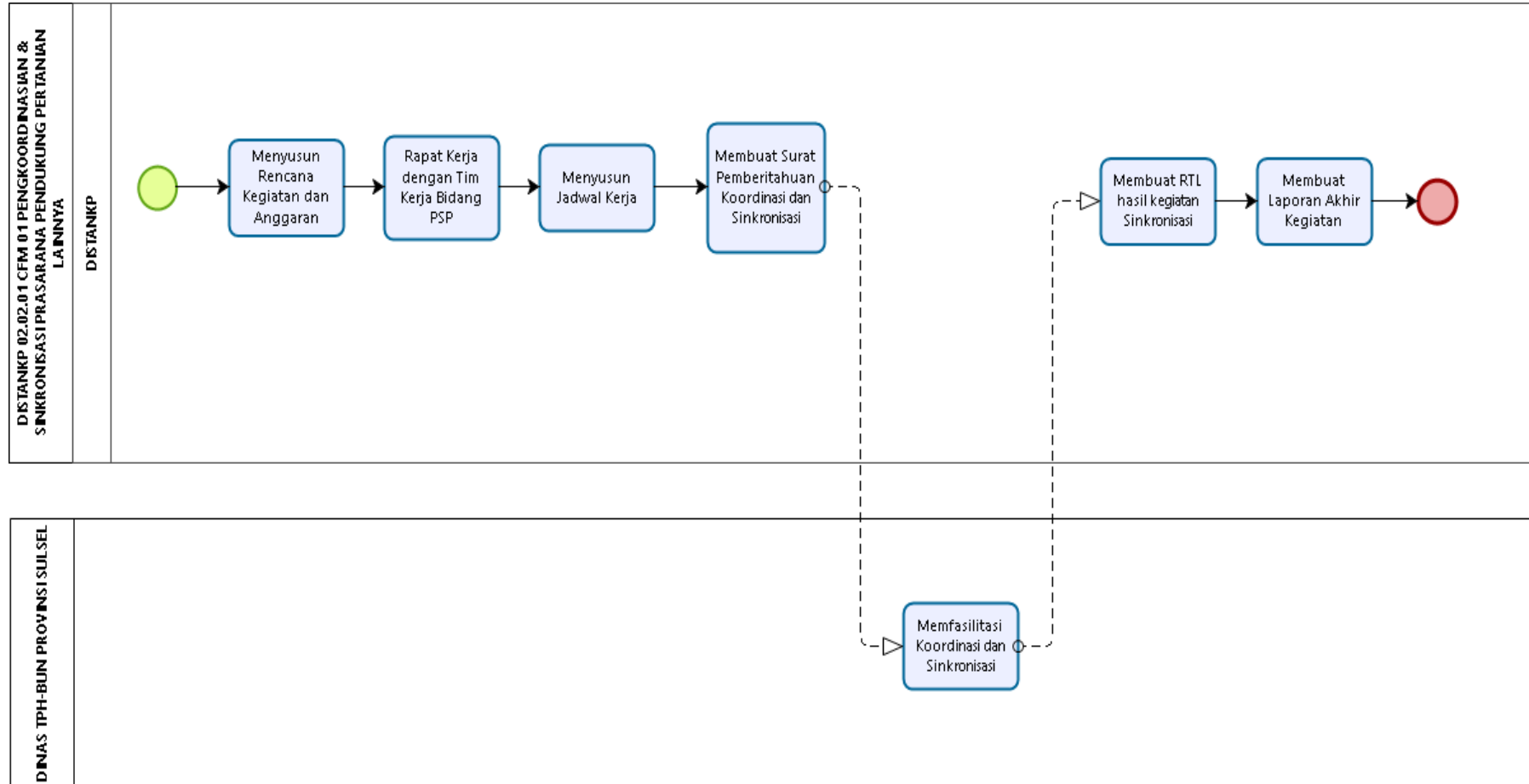


DISTANKP 02.02.01.13
PENYUSUNAN PETA KAW LAHAN
& LAHAN CADANGAN PERT
PANGAN BERKELANJUTAN DI
KAB/KOTA

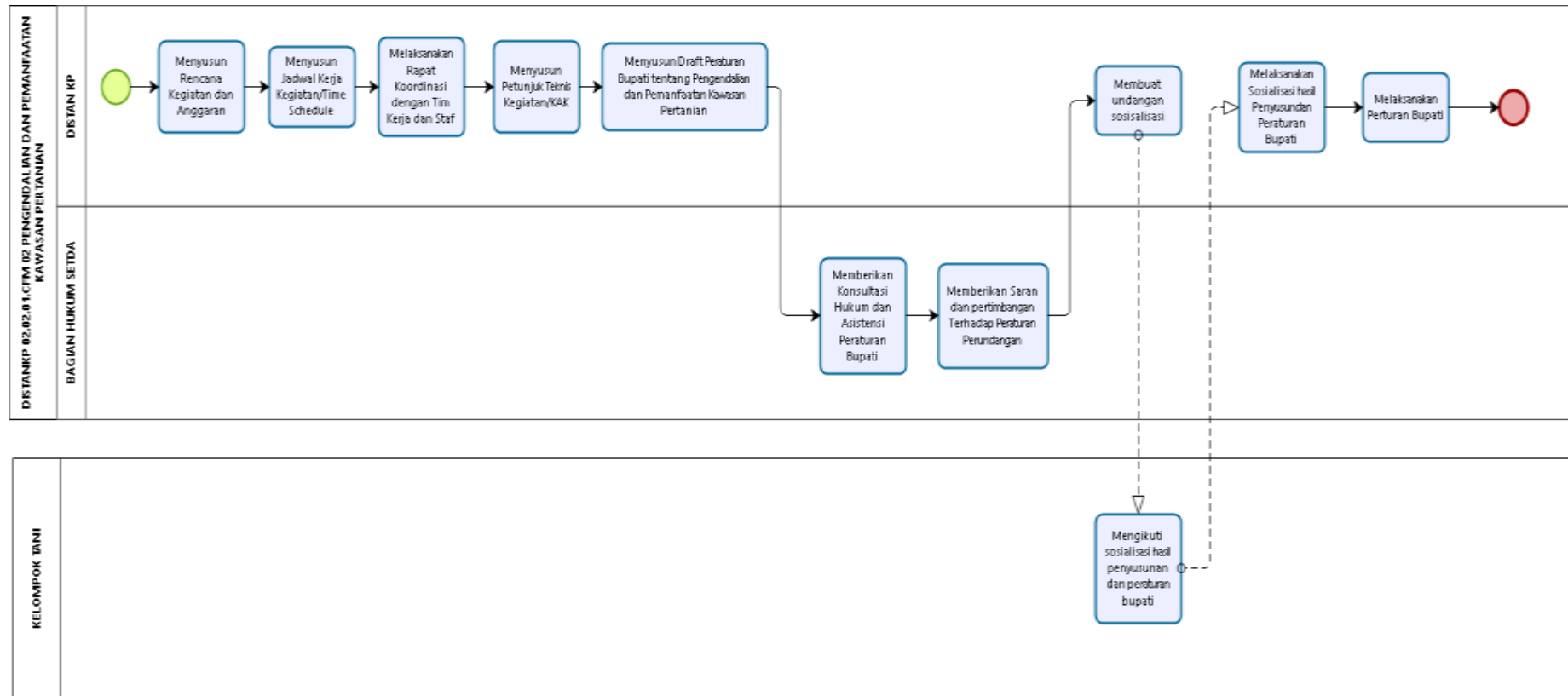


DISTANKP 02.02.01.14
PENYUSUNAN ACTION PLAN
PENGEMBANGAN PRASARANA,
SARANA, KAWASAN PERTANIAN

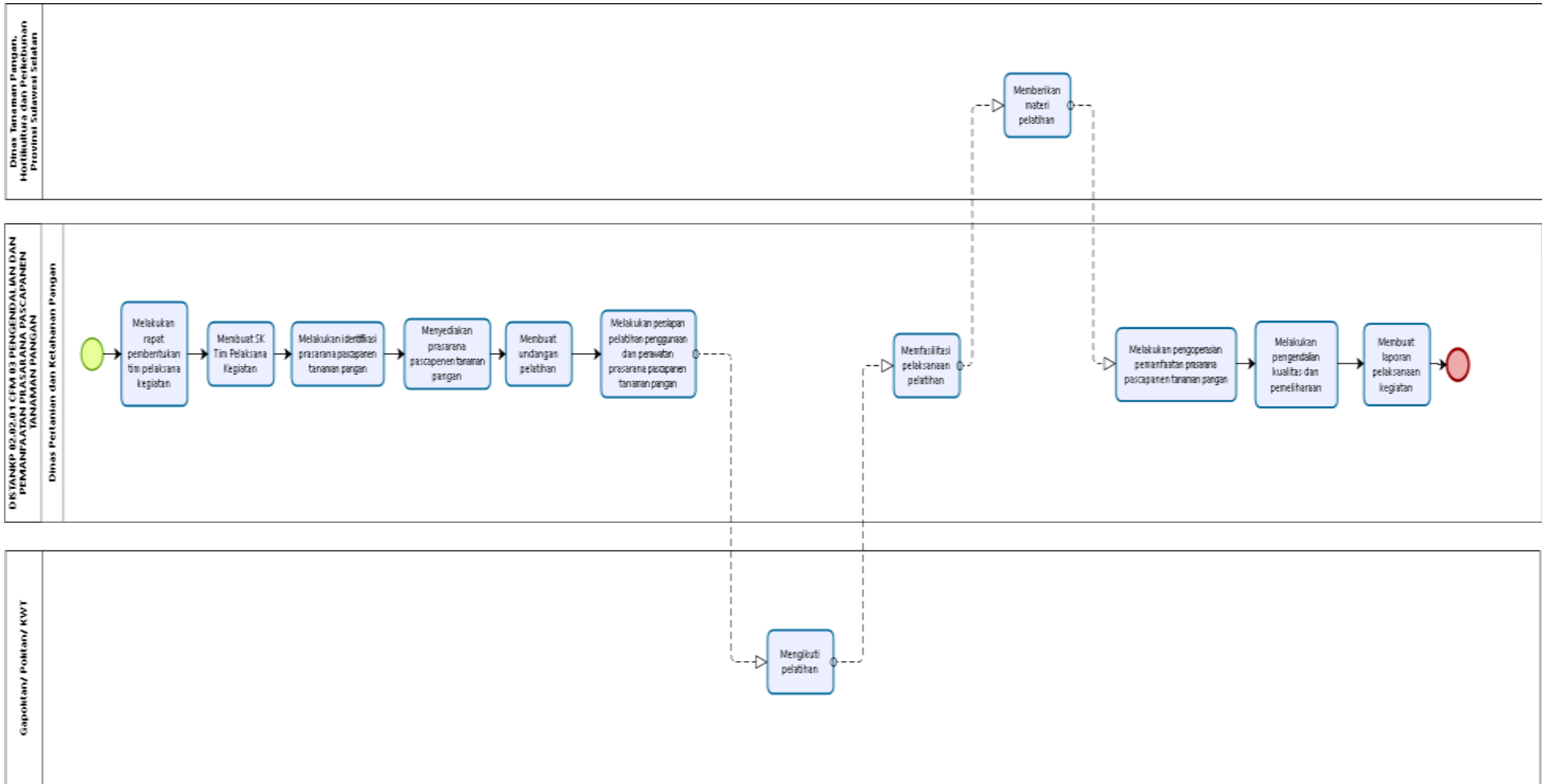
02.02.01CFM01



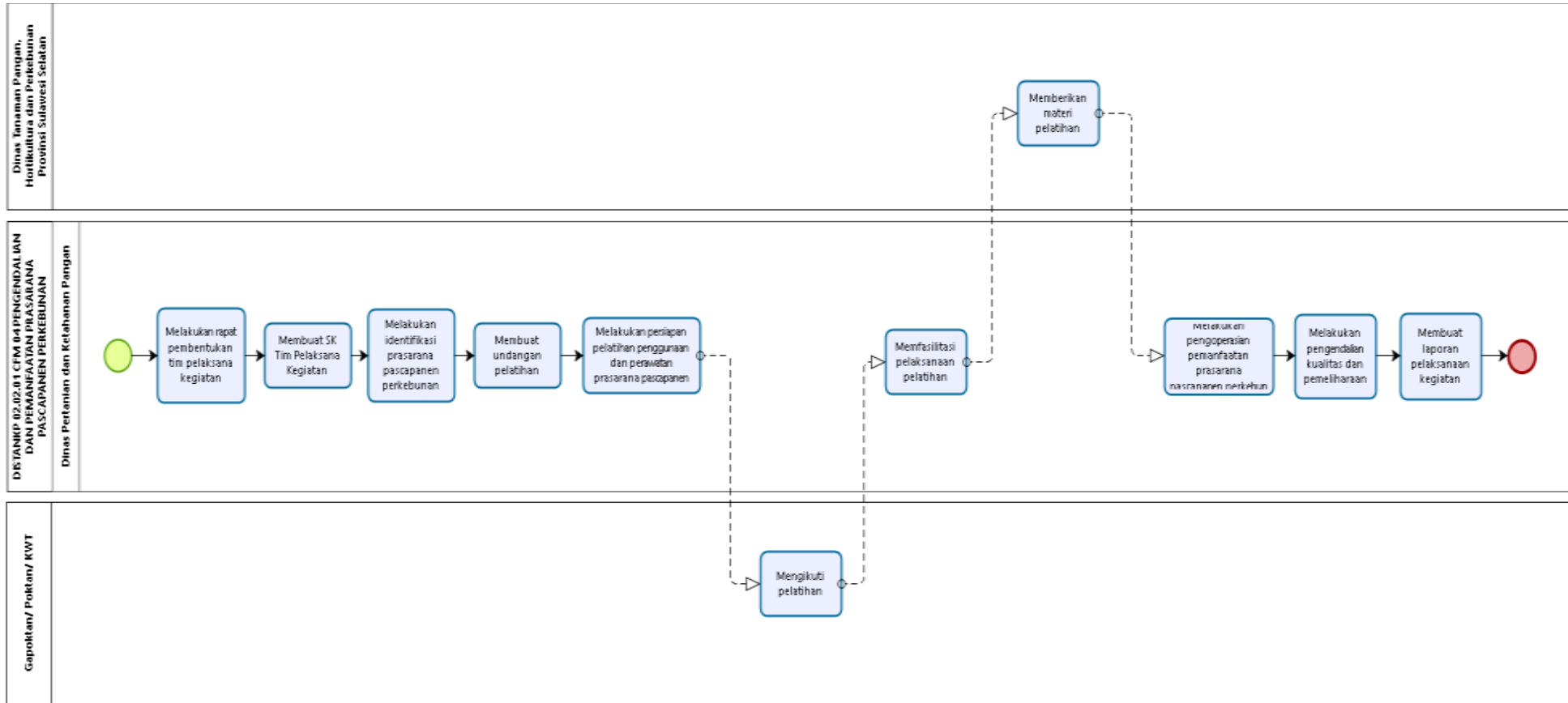
02.02.01CFM02



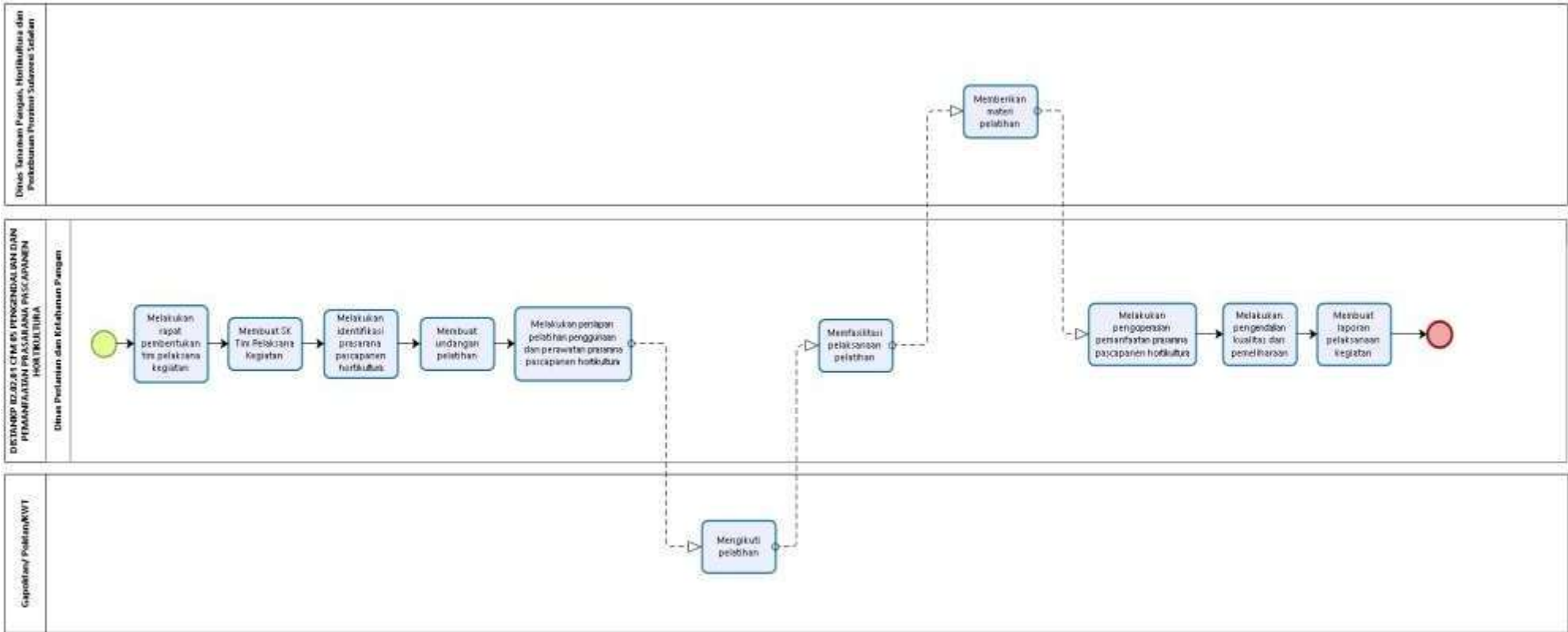
02.02.01CFM03



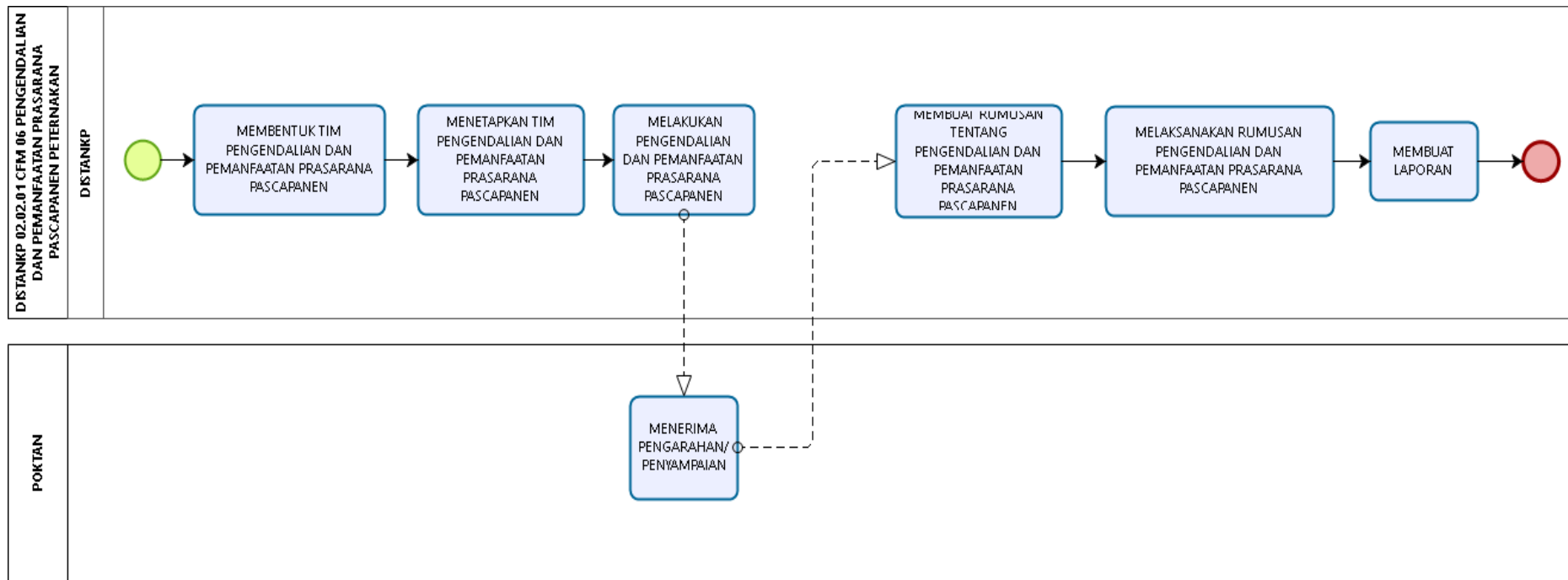
02.02.01CFM04



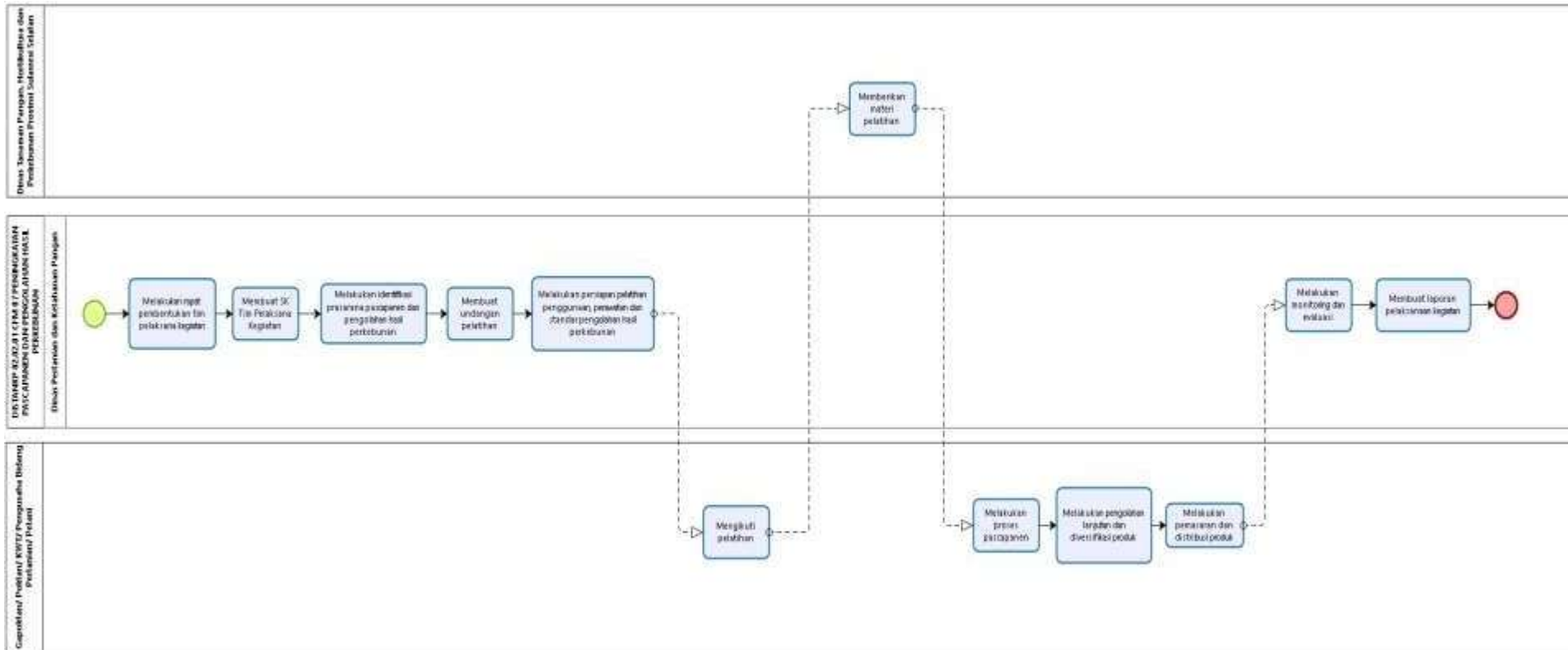
02.02.01CFM05



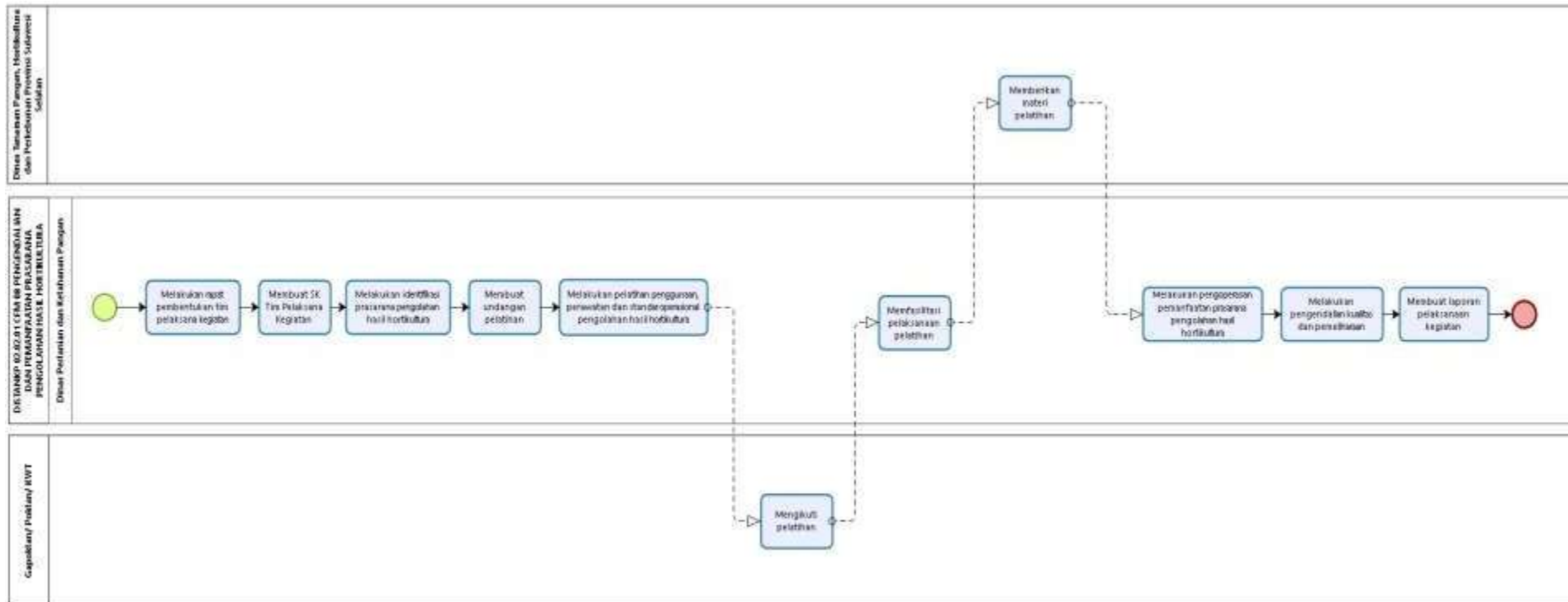
02.02.01CFM06



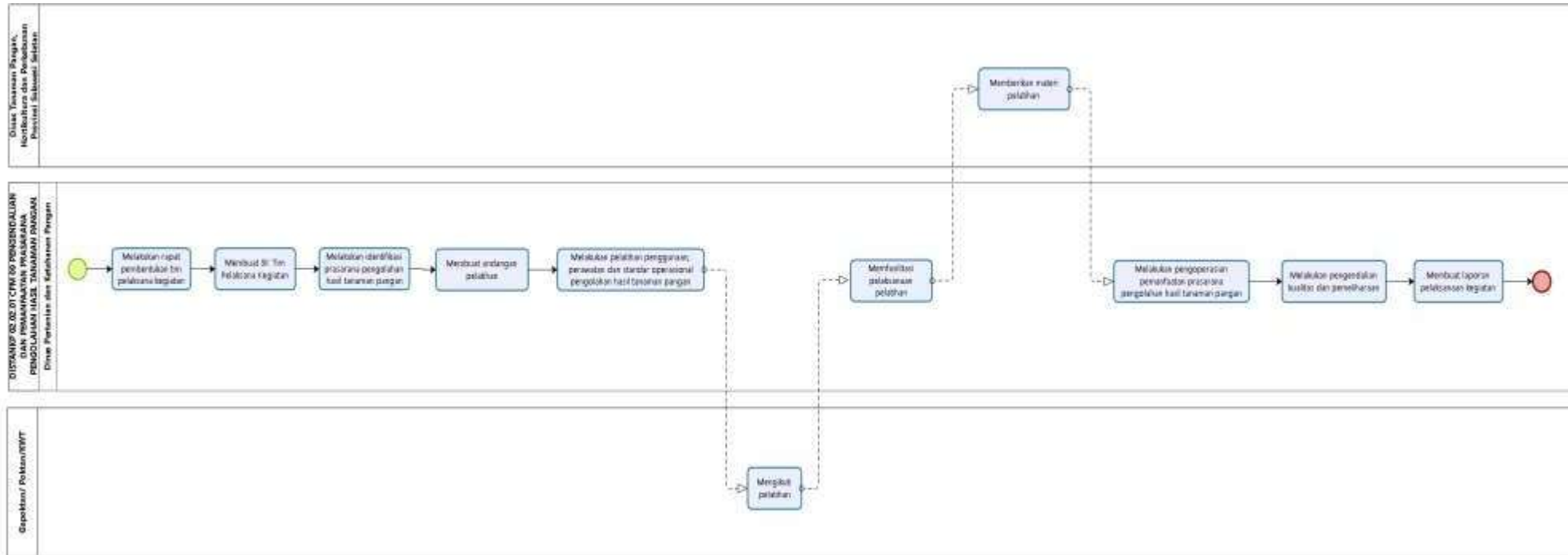
02.02.01CFM07



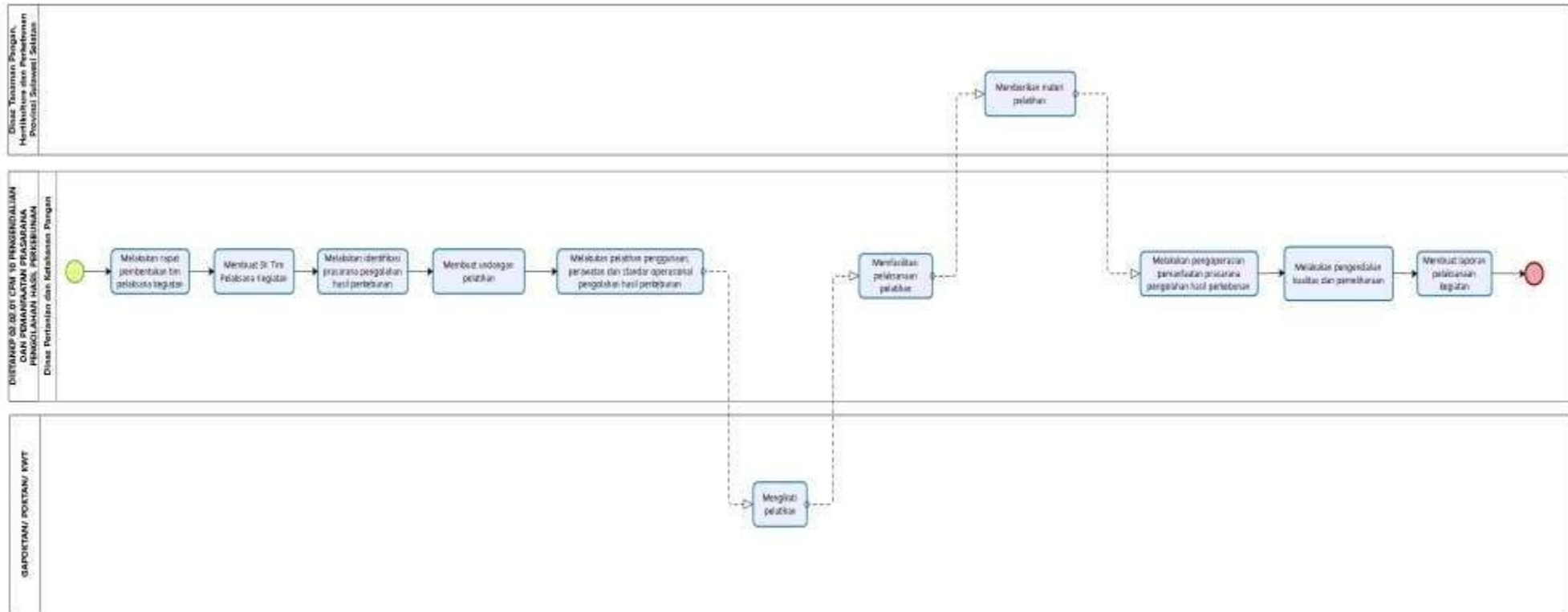
02.02.01CFM08



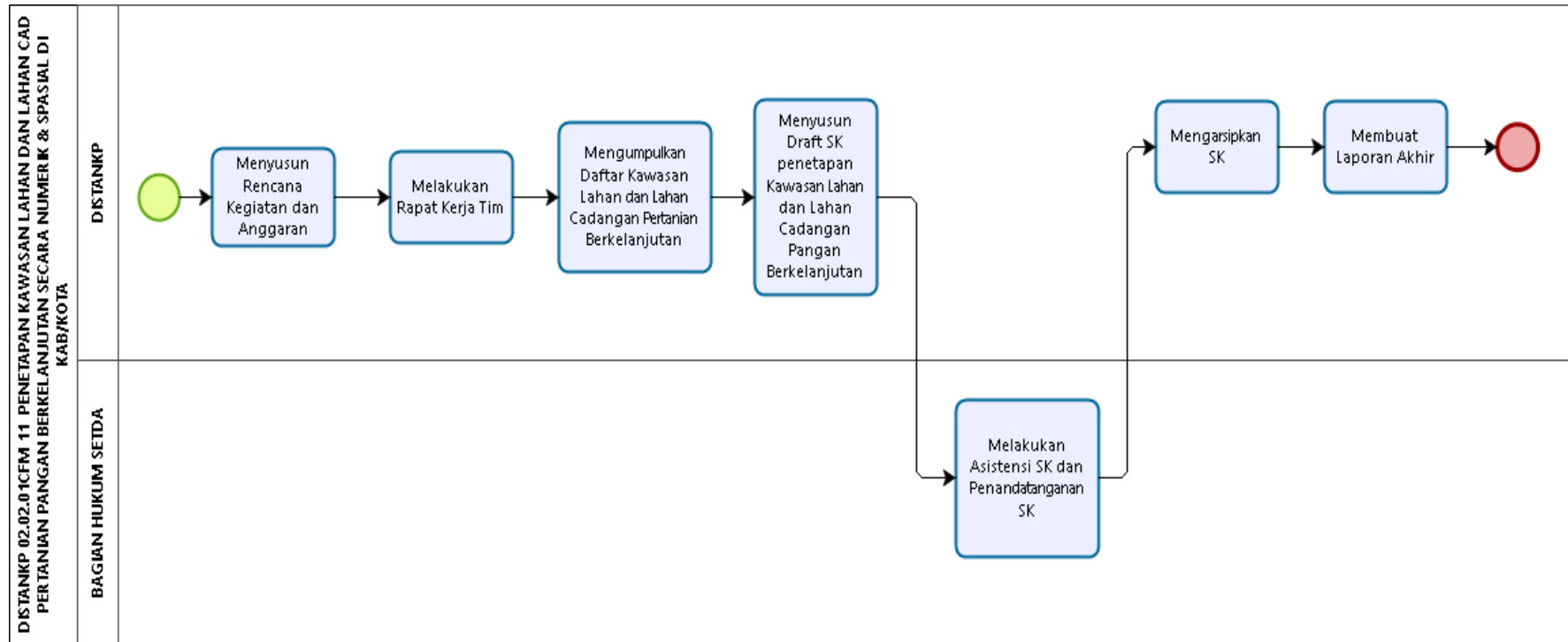
02.02.01CFM09



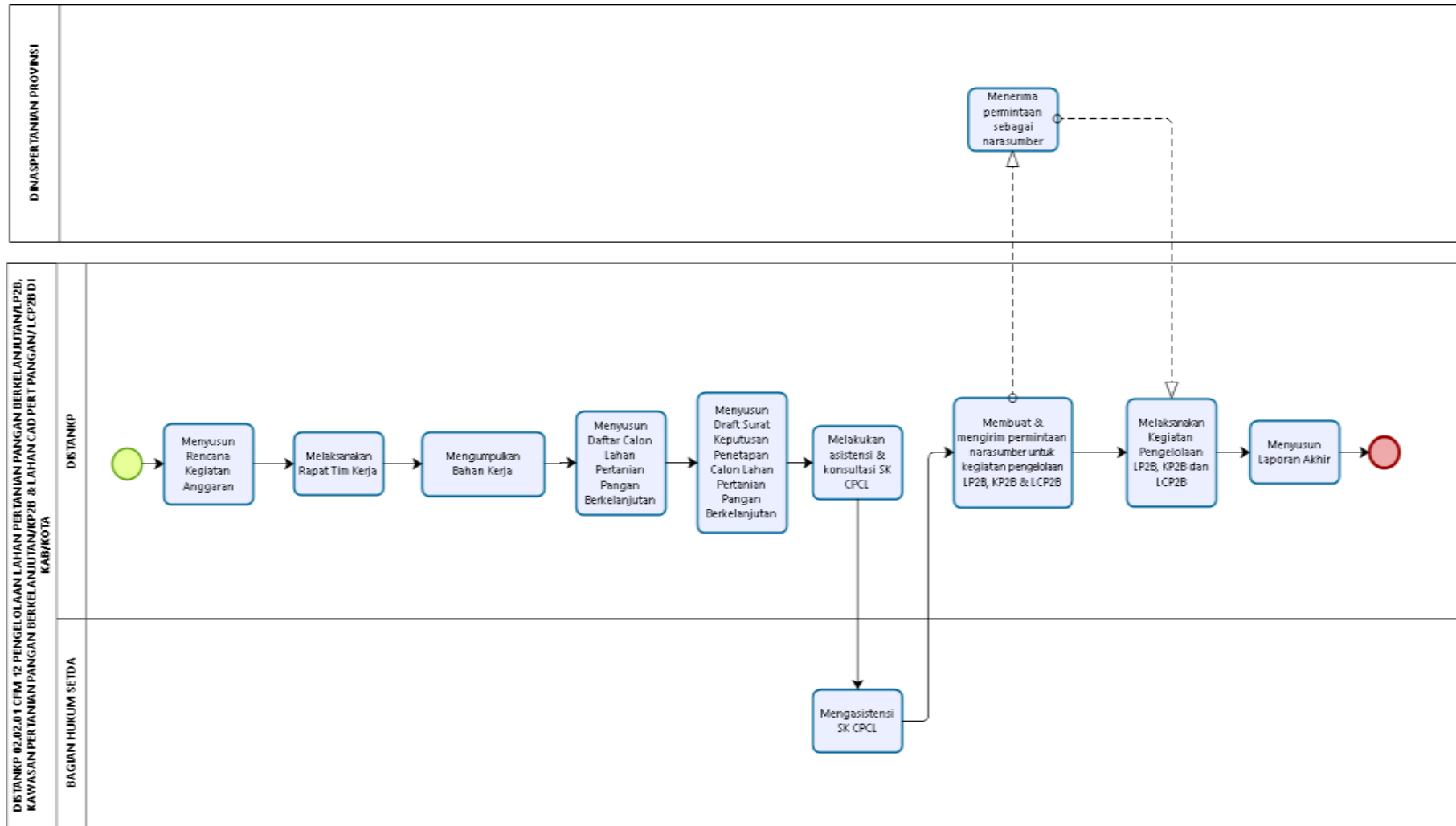
02.02.01CFM10



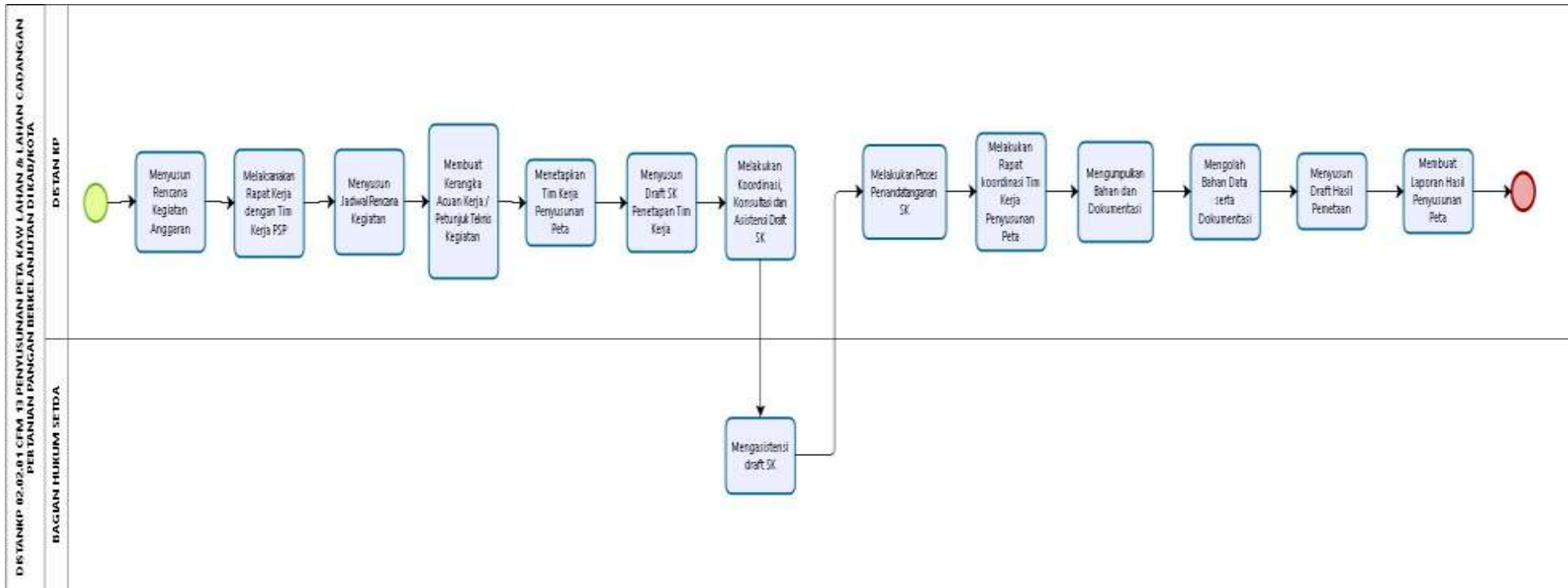
02.02.01CFM11



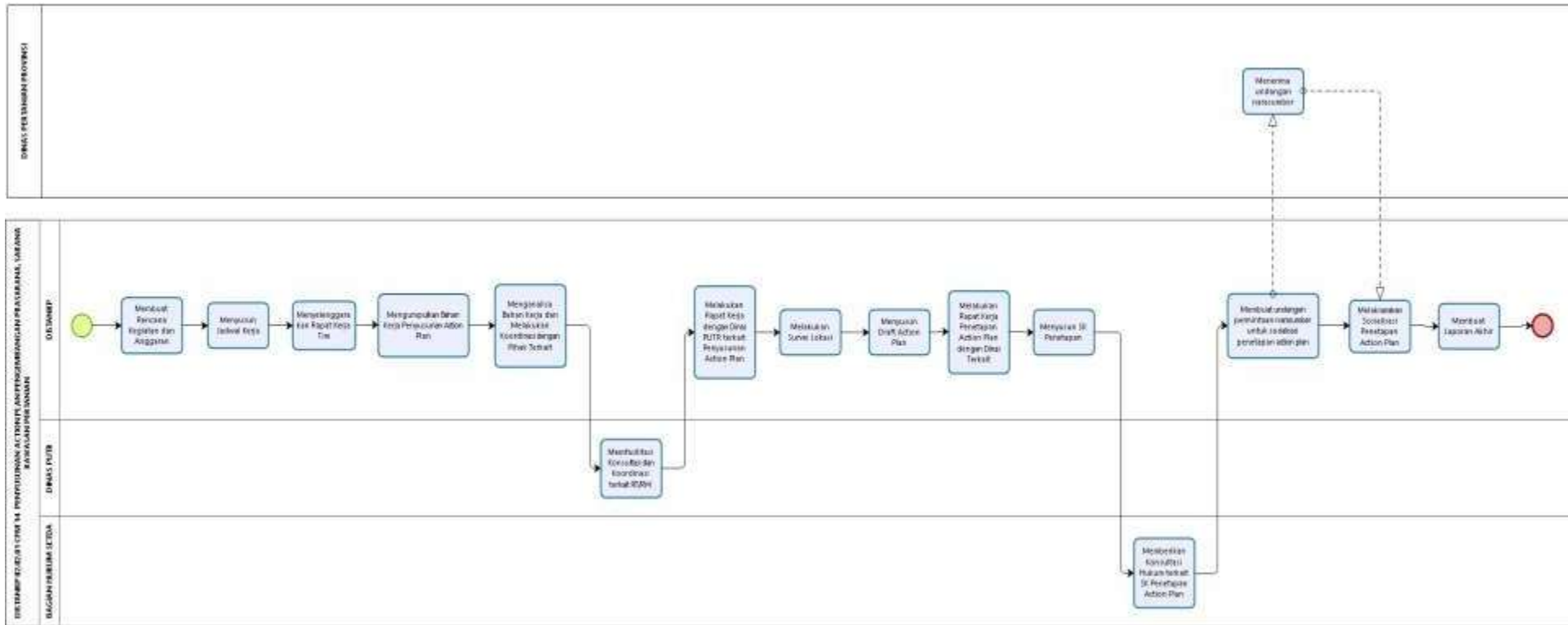
02.02.01CFM12



02.02.01CFM13



02.02.01CFM14



SUB KEG 02.02.02

DISTANKP 02.02.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN



DISTANKP 02.02.02.01
PEMBANGUNAN,
REHABILITASI &
PEMELIHARAAN
EMBUNG PERTANIAN



DISTANKP 02.02.02.02
PEMBANGUNAN, REHABILITASI &
PEMELIHARAAN JUT



DISTANKP 02.02.02.04
PEMBANGUNAN, REHABILITASI &
PEMELIHARAAN DAM PARIT



DISTANKP 02.02.02.04
PEMBANGUNAN, REHABILITASI &
PEMELIHARAAN PINTU AIR



DISTANKP 02.02.02.05
PEMBANGUNAN, REHABILITASI &
PEMELIHARAAN BALAI
PENYULUH DI KEC SERTA
SARANA PENDUKUNGNYA



DISTANKP 02.02.02.06
PEMBANGUNAN, REHABILITASI &
PEMELIHARAAN PRASARANA
PERTANIAN LAINNYA



DISTANKP 02.02.02.07
PEMBANGUNAN REHABILITASI &
PEMELIHARAAN JARINGAN
IRIGASI USAHA TANI



DISTANKP 02.02.02.08
PEMB & REHABILITASI
PRASARANA UPTD
PEMBIBITAN/PRODUKSI
TERNAK



DISTANKP 02.02.02.09
PEMB, REHABILITASI &
PEMELIHARAAN SARANA
PRASARANA LAB KESYWAN &
KES MASY VETERINER



DISTANKP 02.02.02.10 PEMB &
REHABILITASI PRASARANA UPTD
BALAI INSEMINASI BUATAN

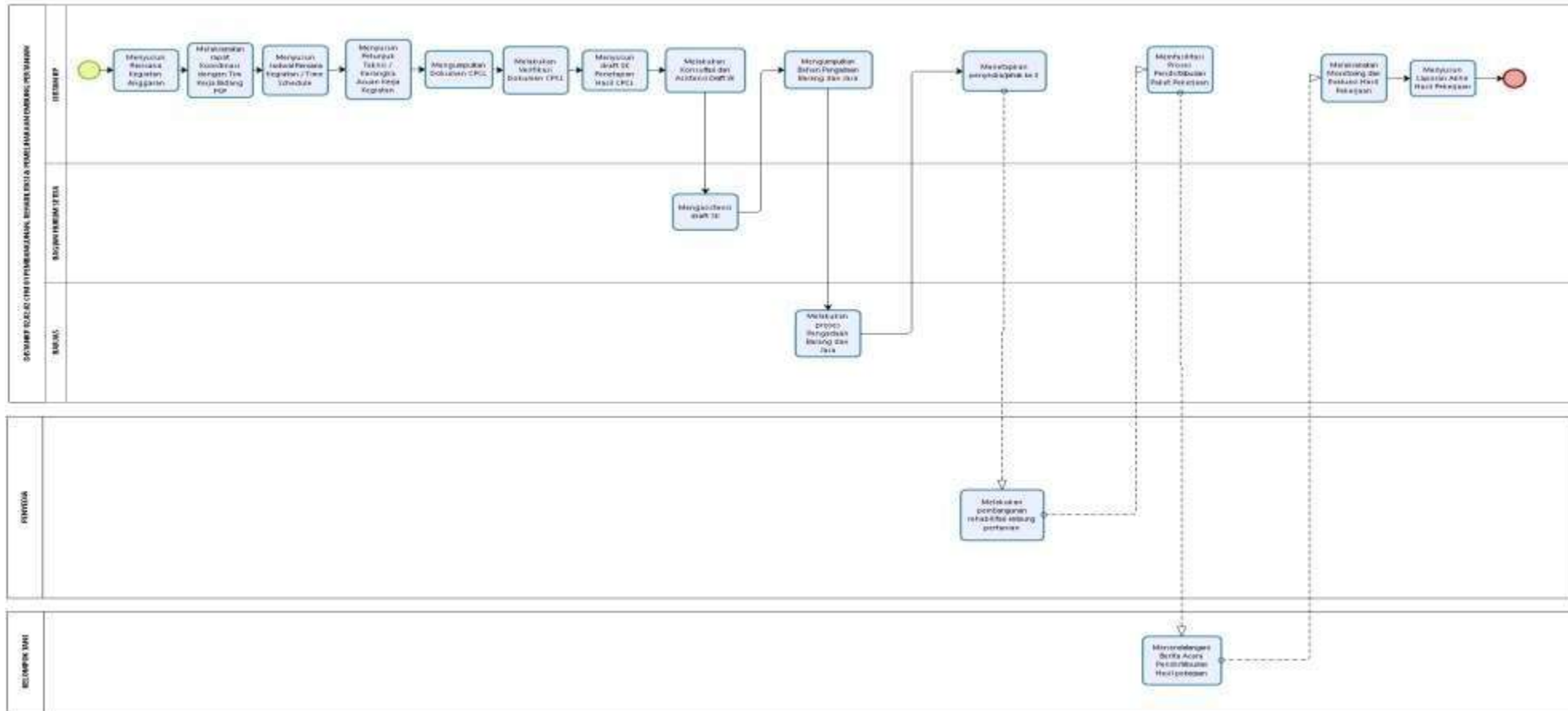


DISTANKP 02.02.02.11
PEMBANGUNAN, REHABILITASI,
PEMELIHARAAN & OPERASIONAL
PUSKESWAN

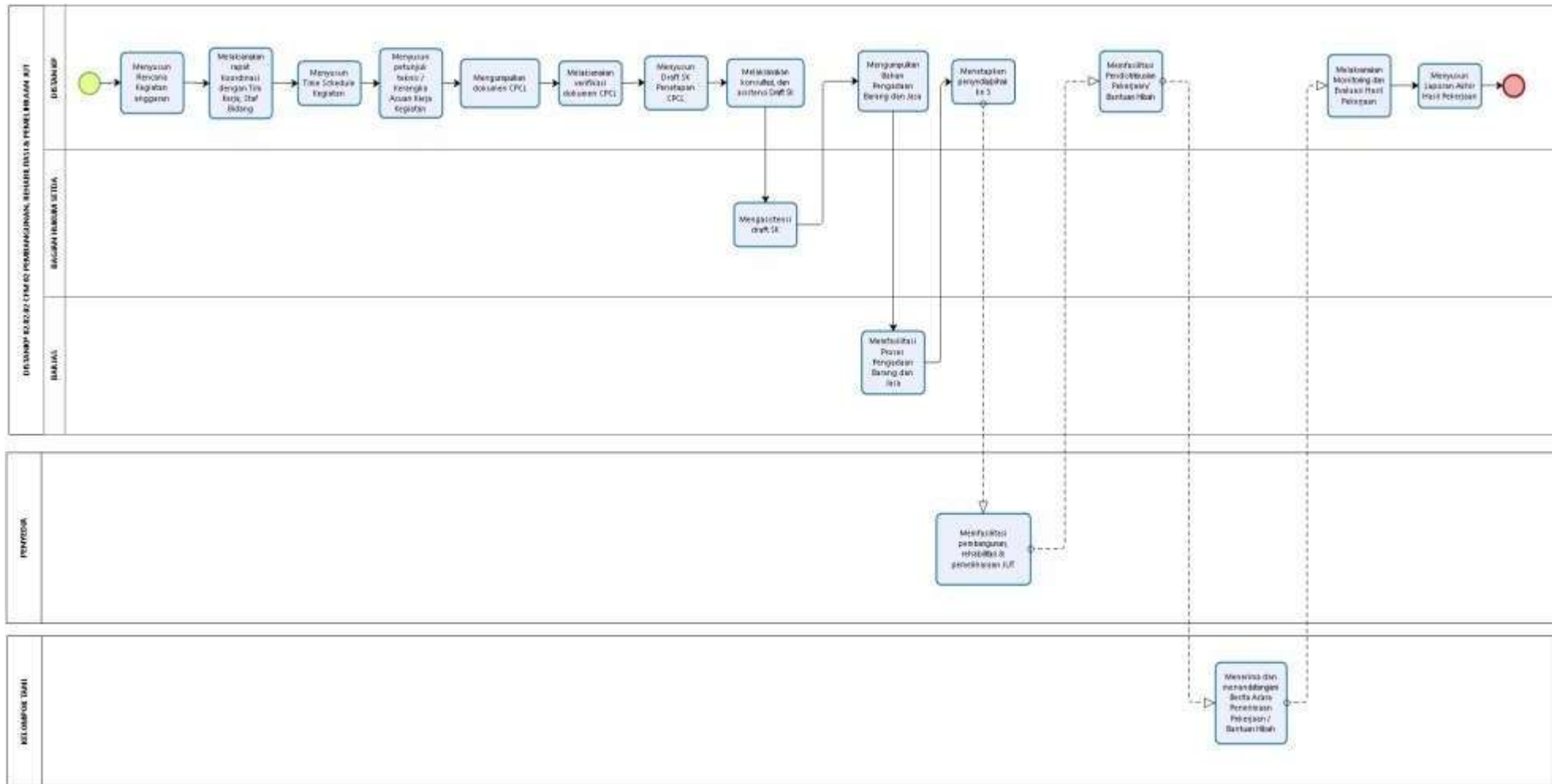


DISTANKP 02.02.02.12
PEMBANGUNAN, REHABILITASI,
PEMELIHARAAN & OPERASIONAL
RPH

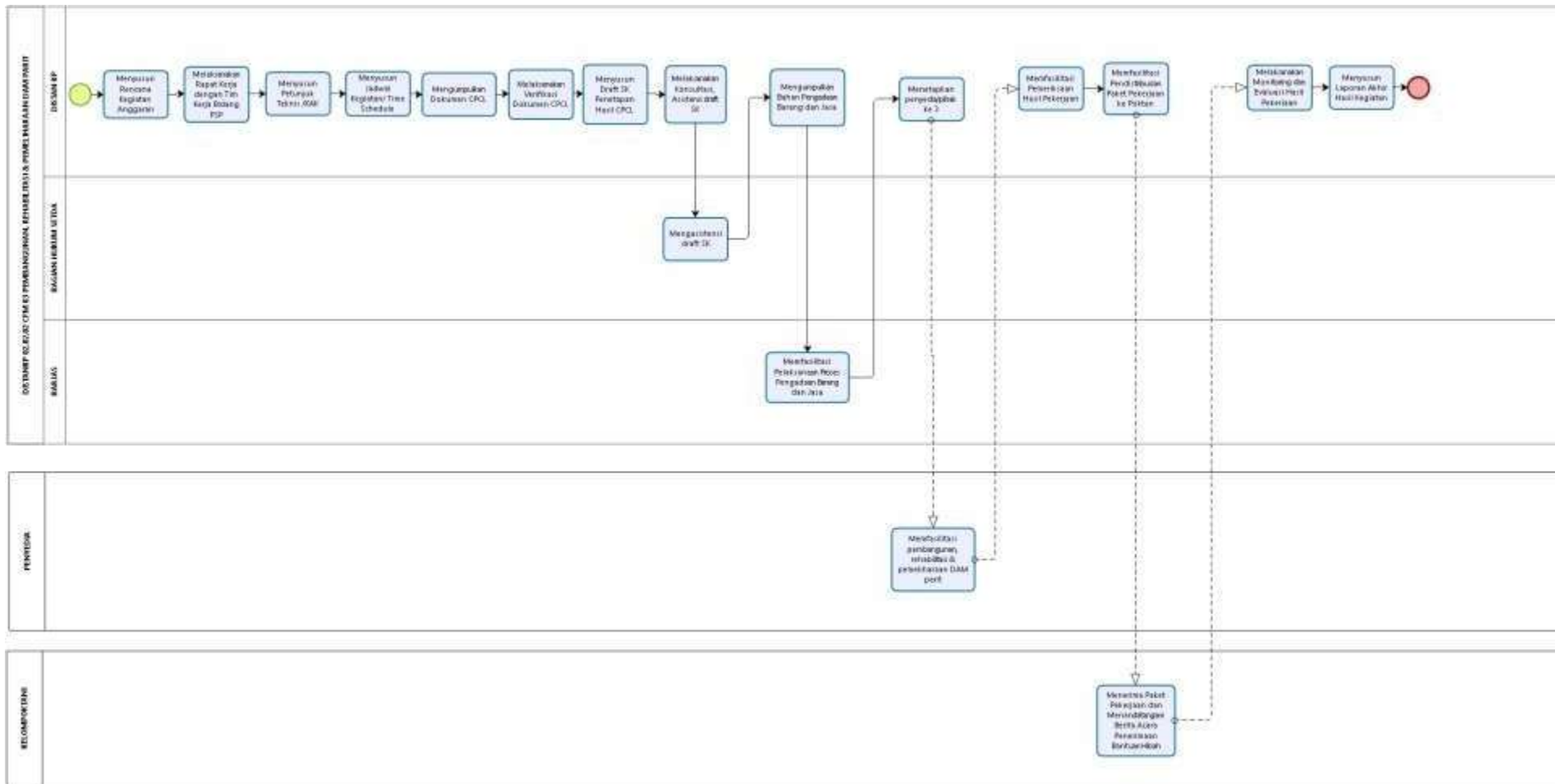
02.02.02CFM01



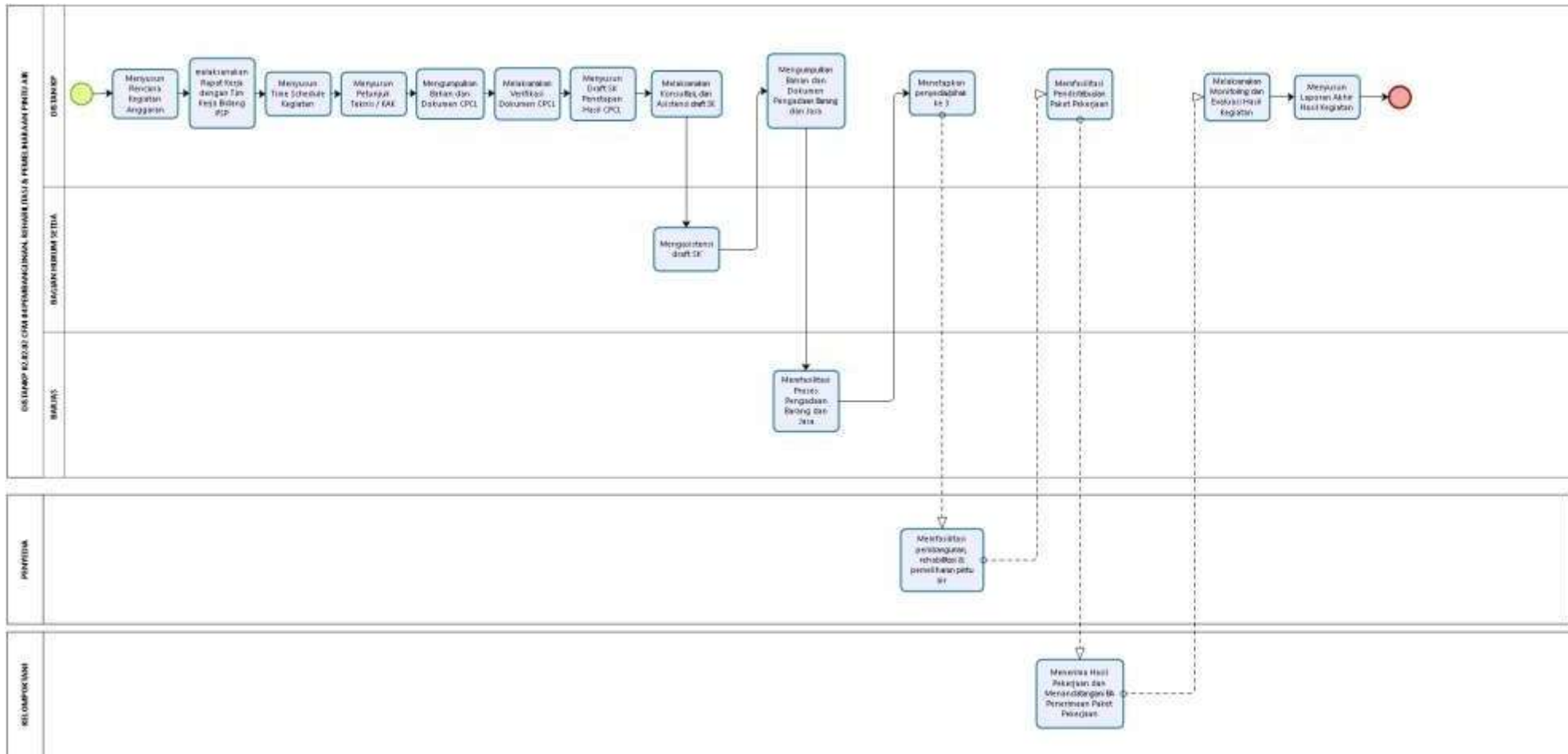
02.02.02CFM02



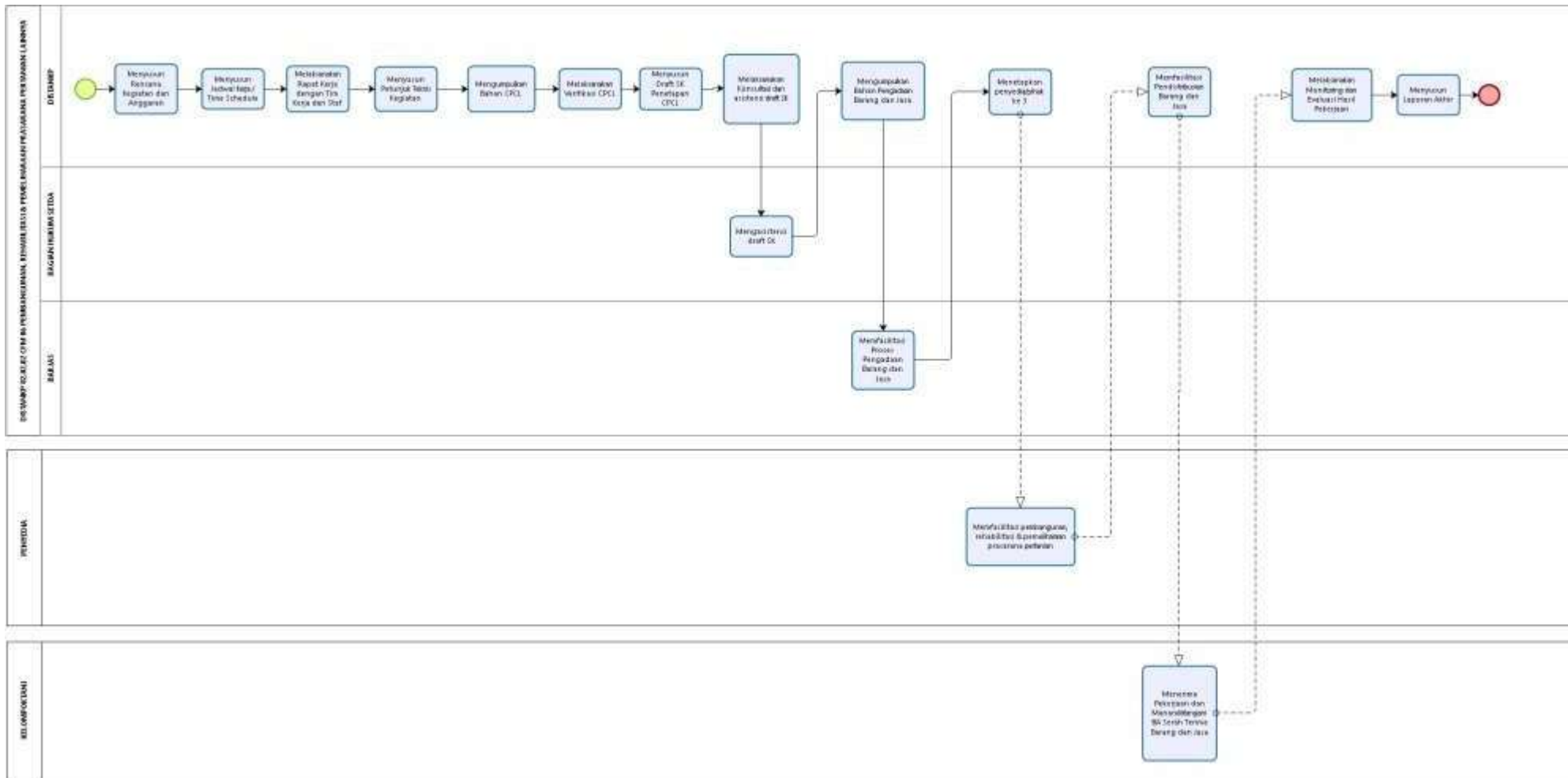
02.02.02CFM03



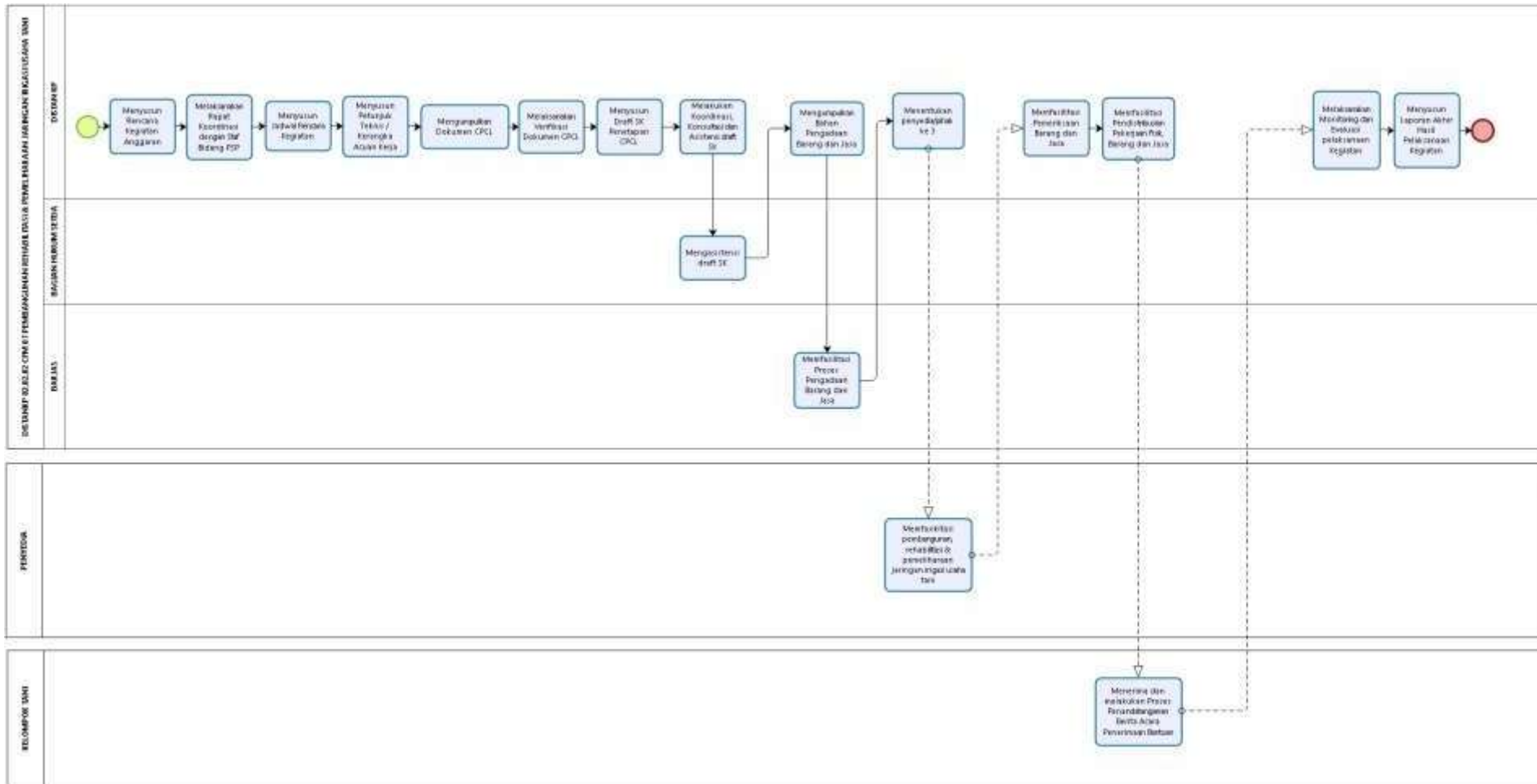
02.02.02CFM04



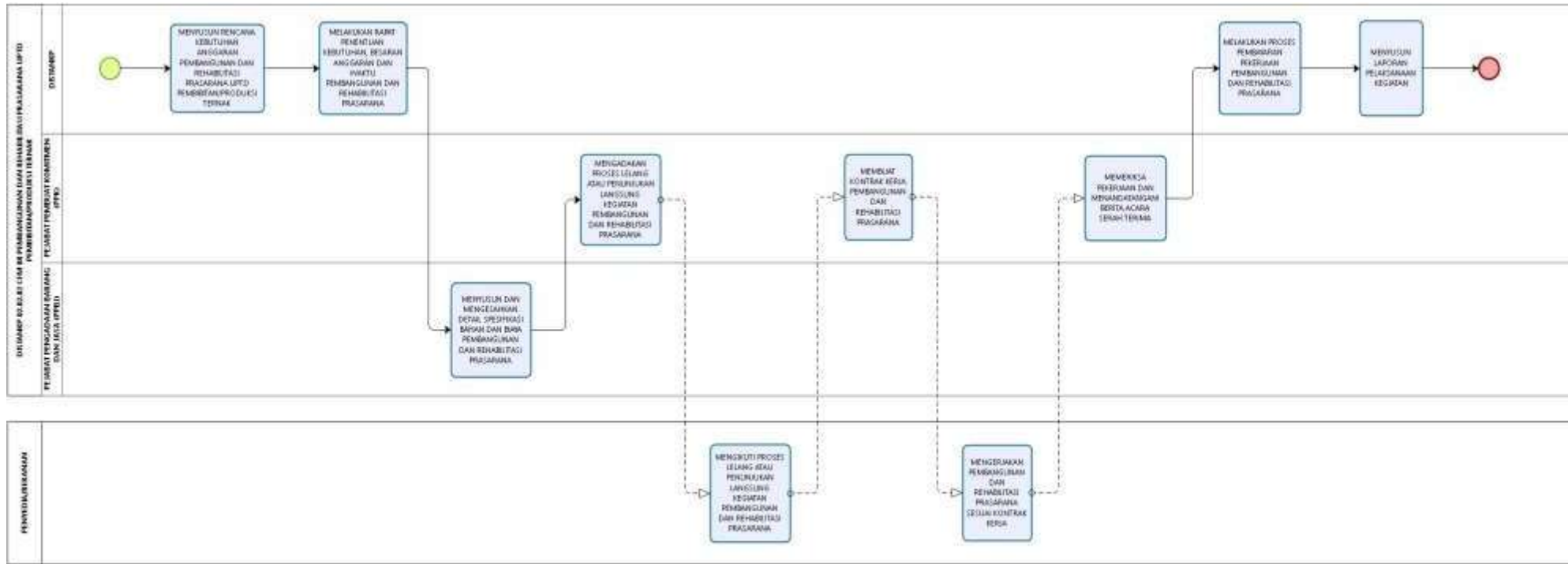
02.02.02CFM06



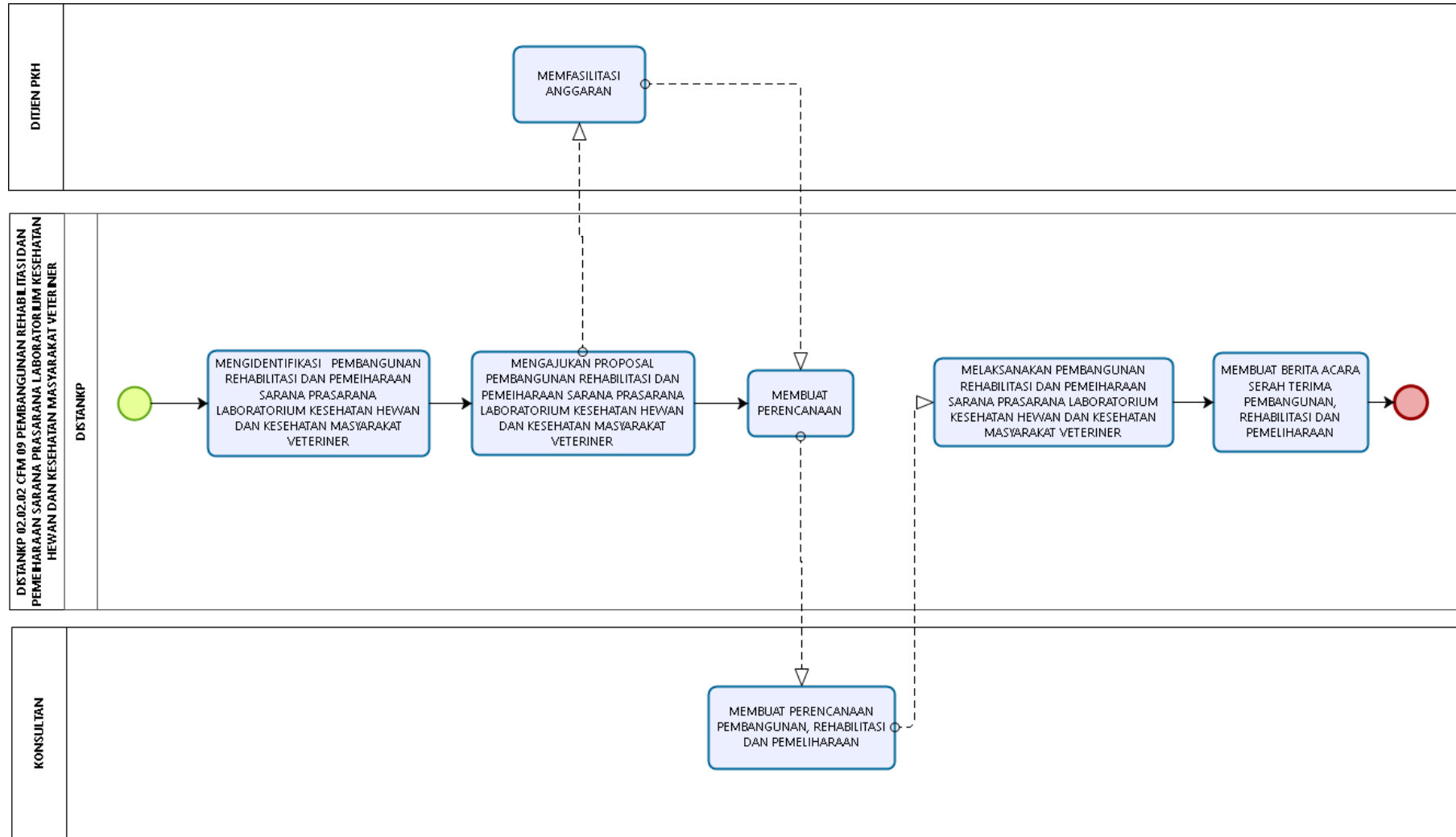
02.02.02CFM07



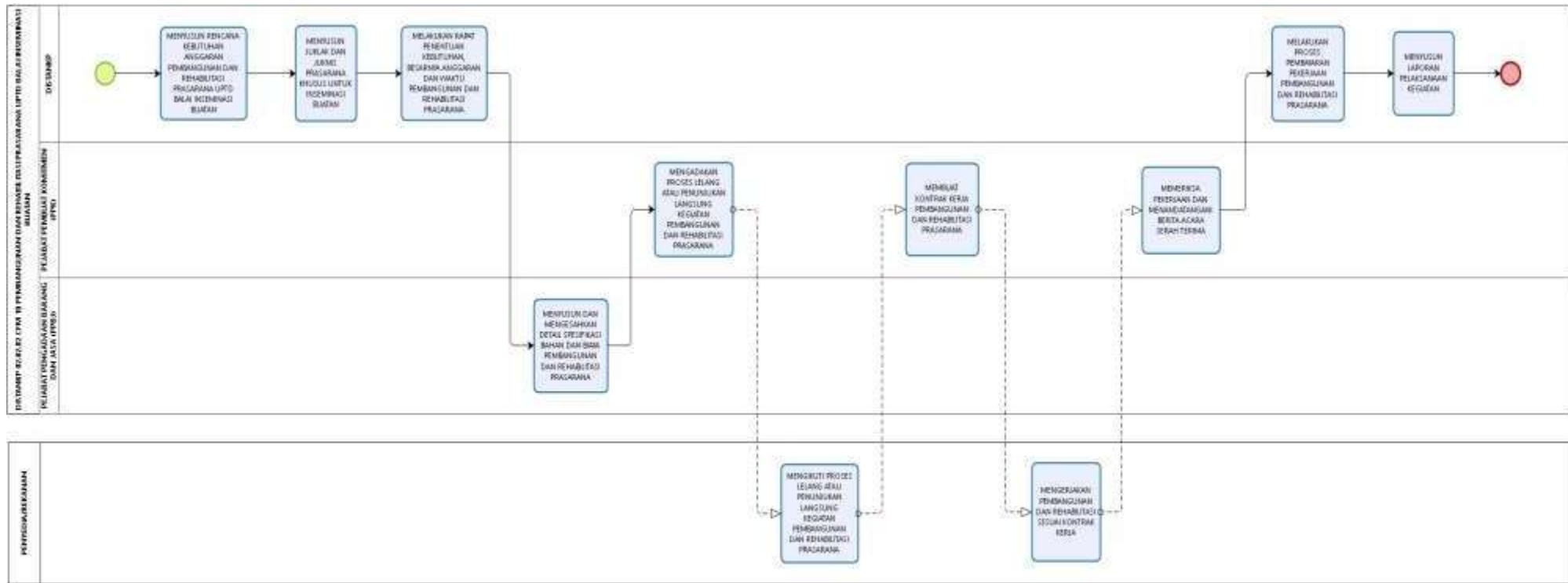
02.02.02CFM08



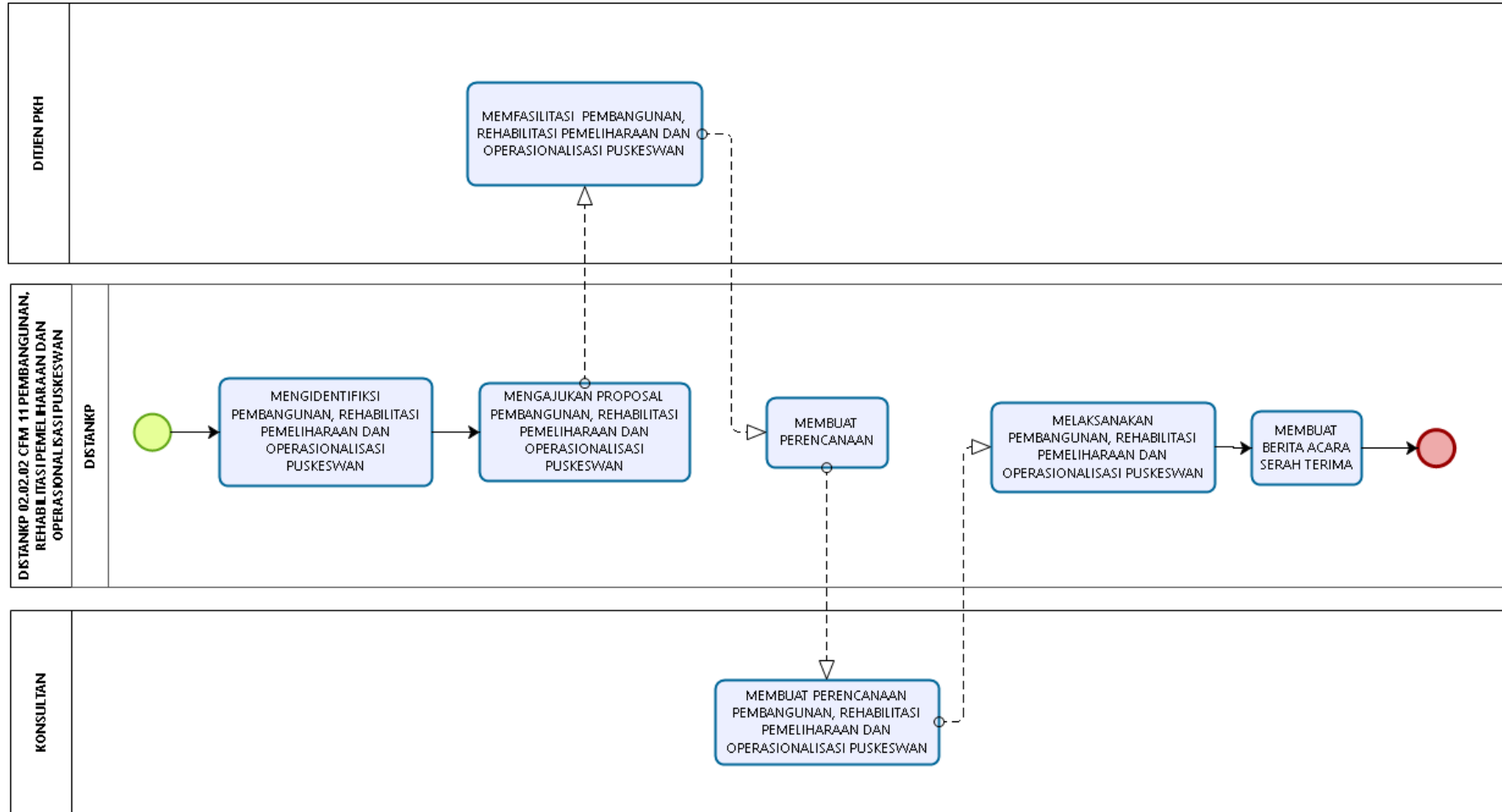
02.02.02CFM09



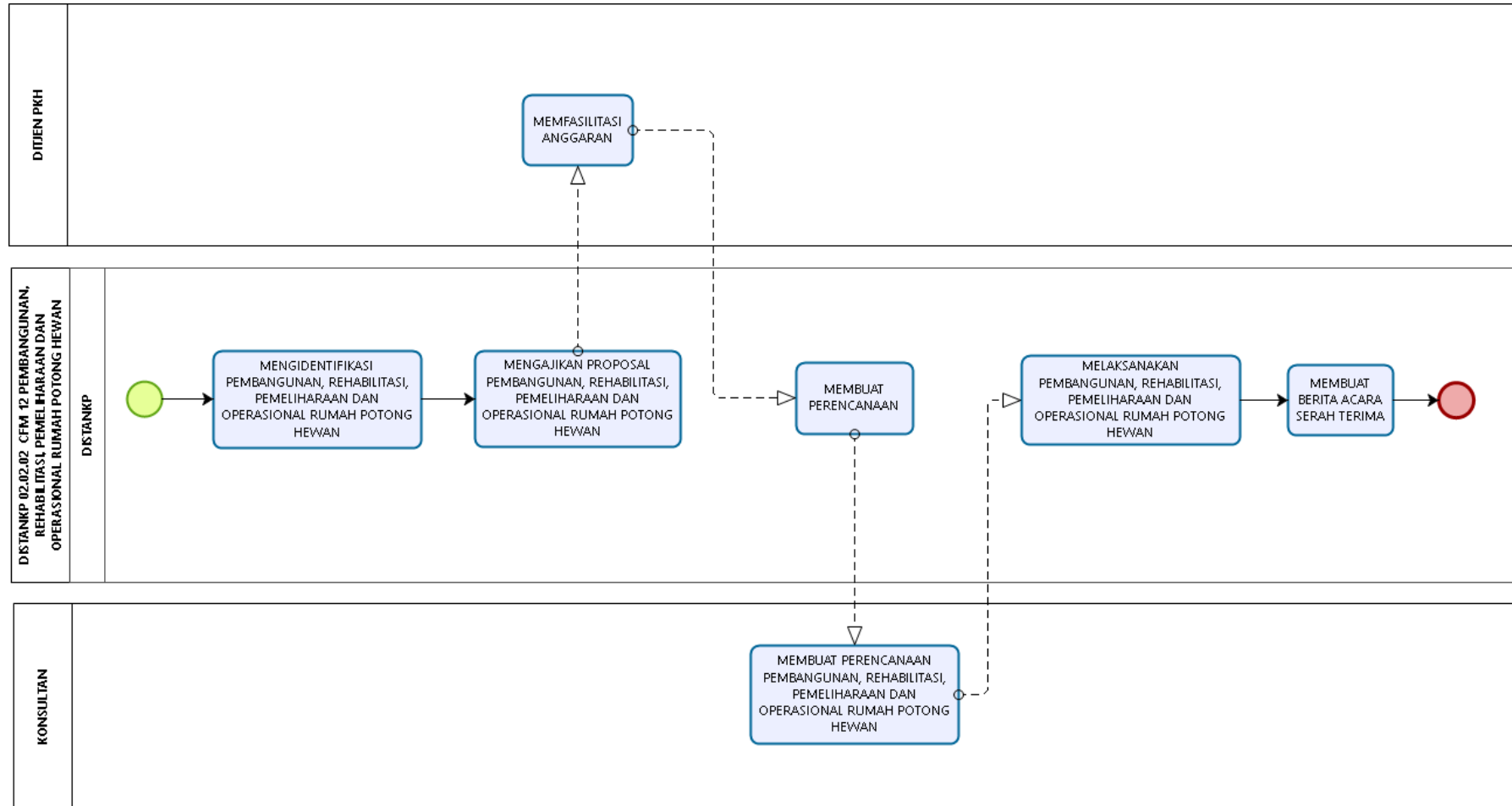
02.02.02CFM10



02.02.02CFM11



02.02.02CFM12



SUB KEG 02.02.03

DISTANKP 02.02.03 PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK DALAM DAERAH KAB/KOTA

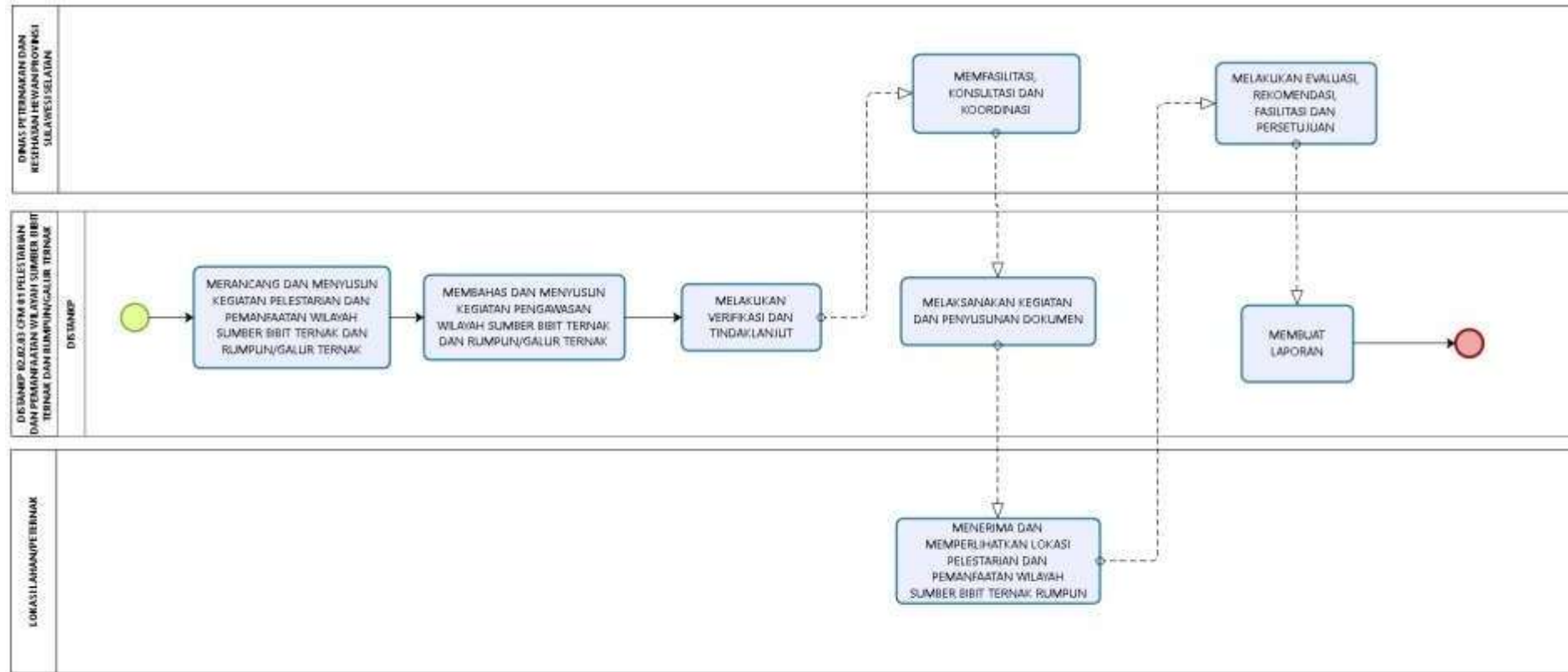


DISTANKP 02.02.03.01
PELESTARIAN & PEMANFAATAN
WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK
& RUMPUN/GALUR TERNAK

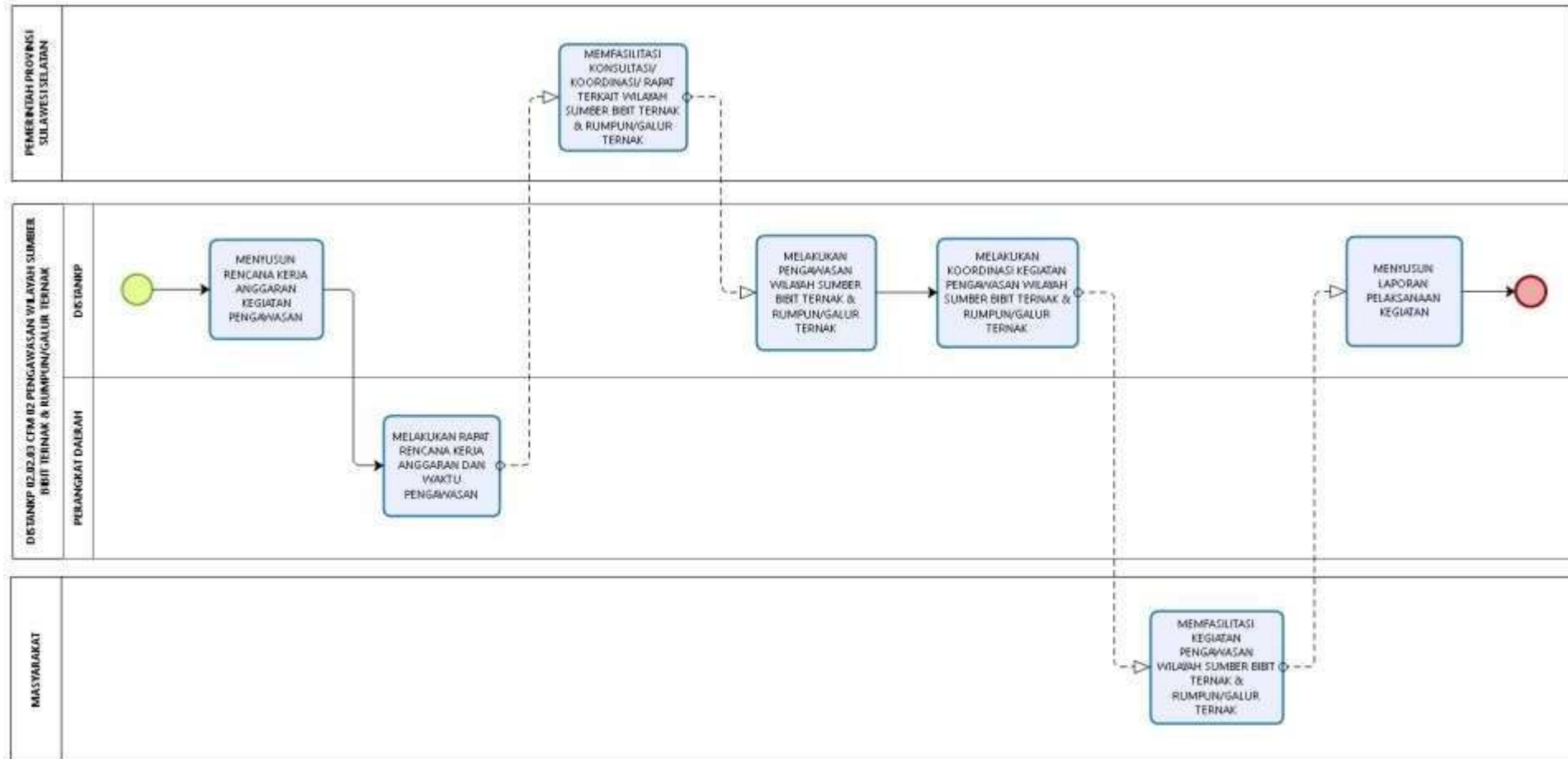


DISTANKP 02.02.03.02
PENGAWASAN WILAYAH SUMBER
BIBIT TERNAK & RUMPUN/GALUR
TERNAK

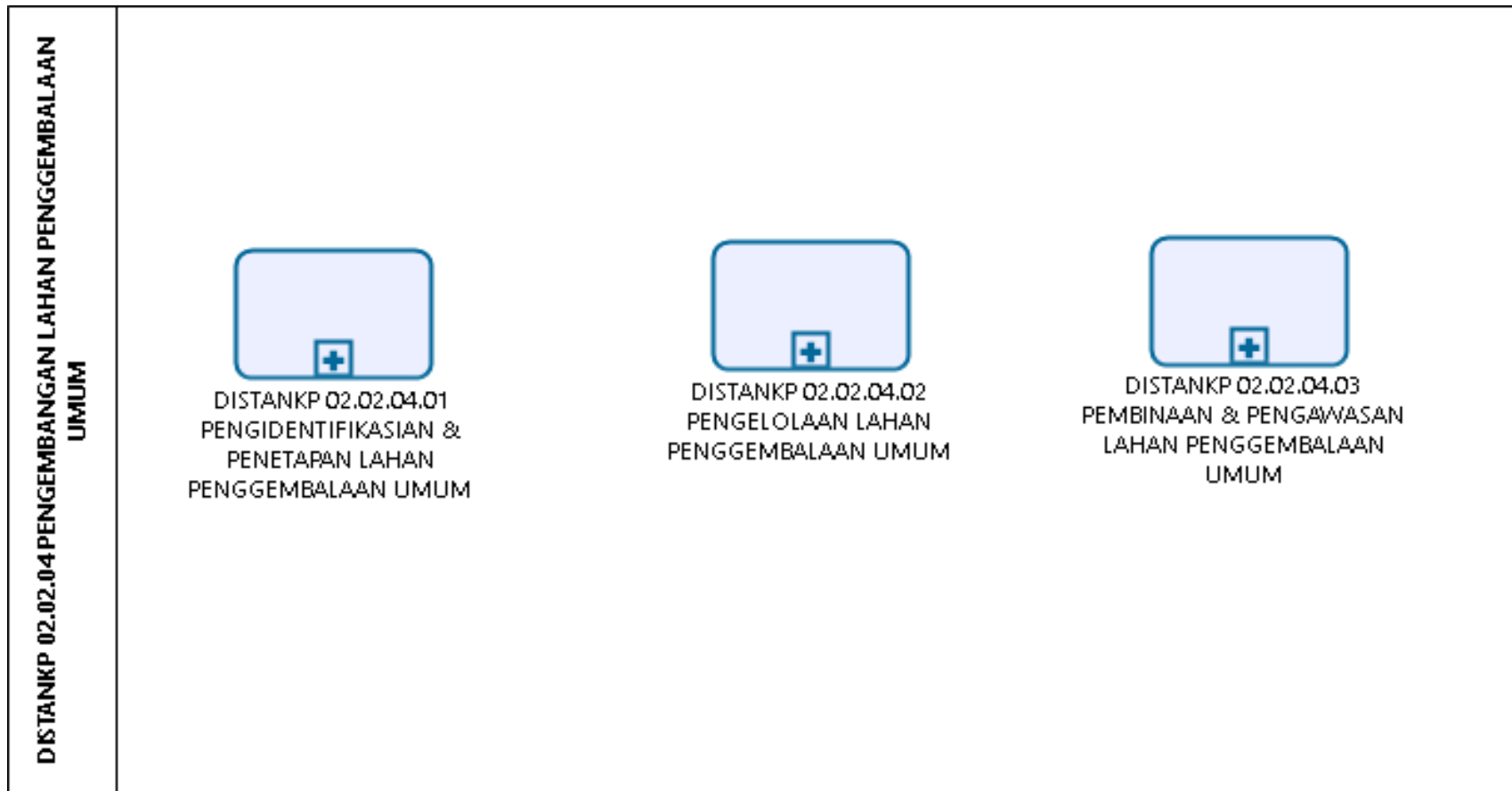
02.02.03CFM01



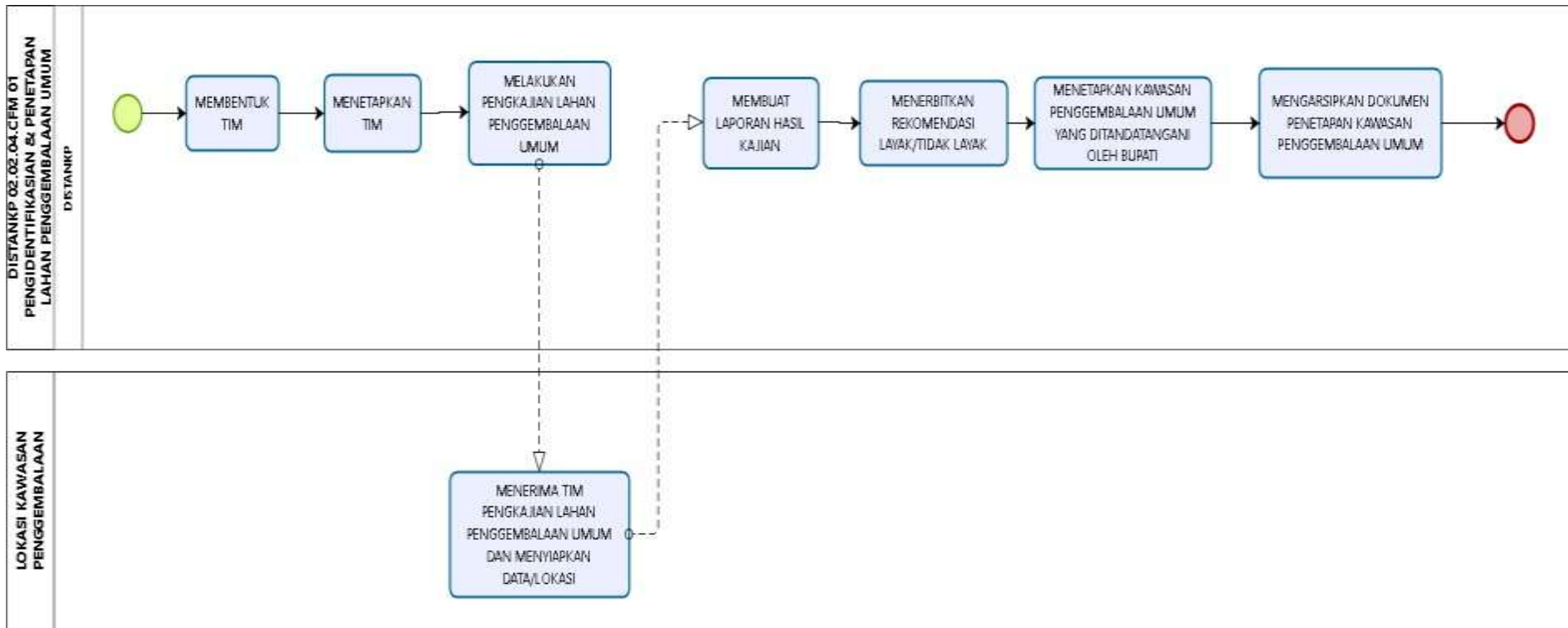
02.02.03CFM02



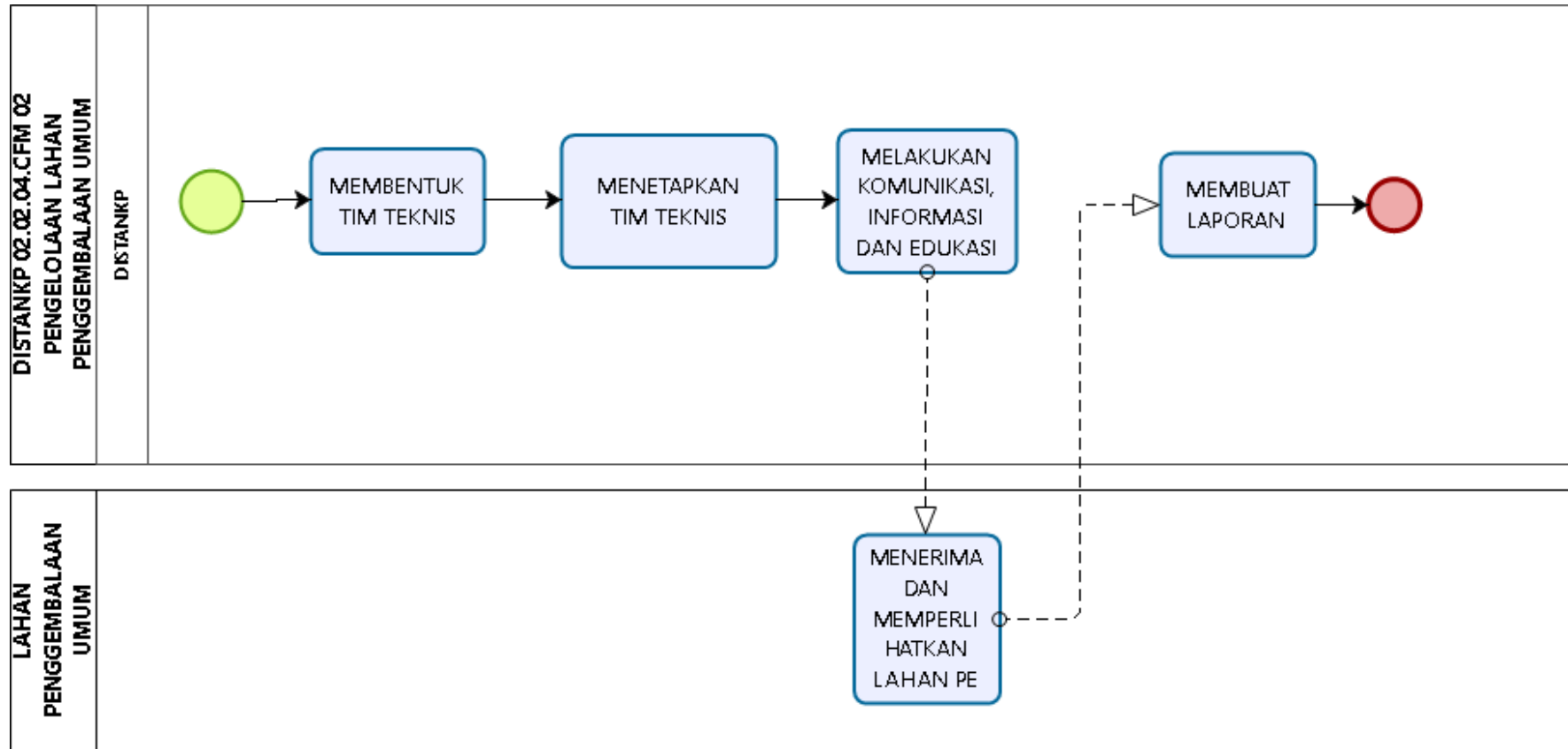
SUB KEG 02.02.04



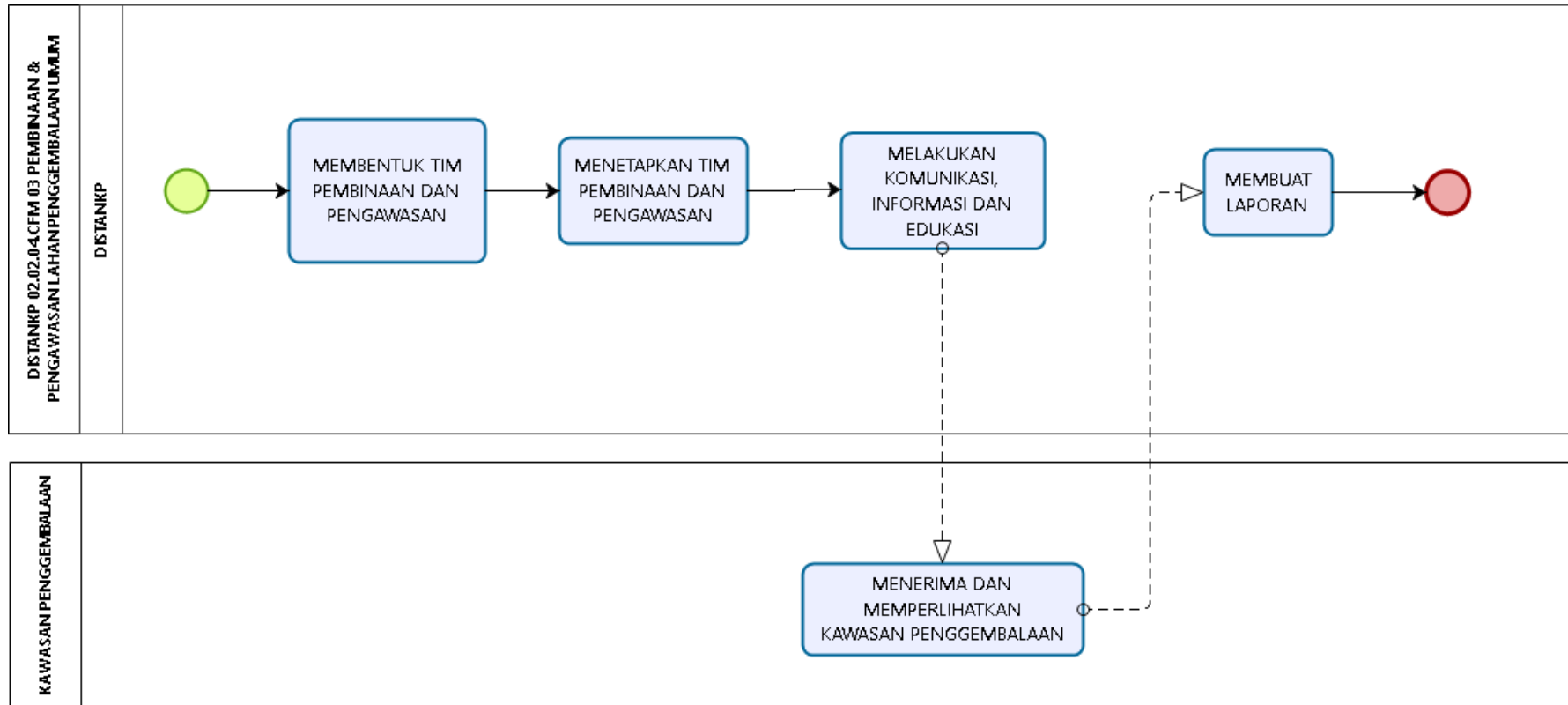
02.02.04CFM01



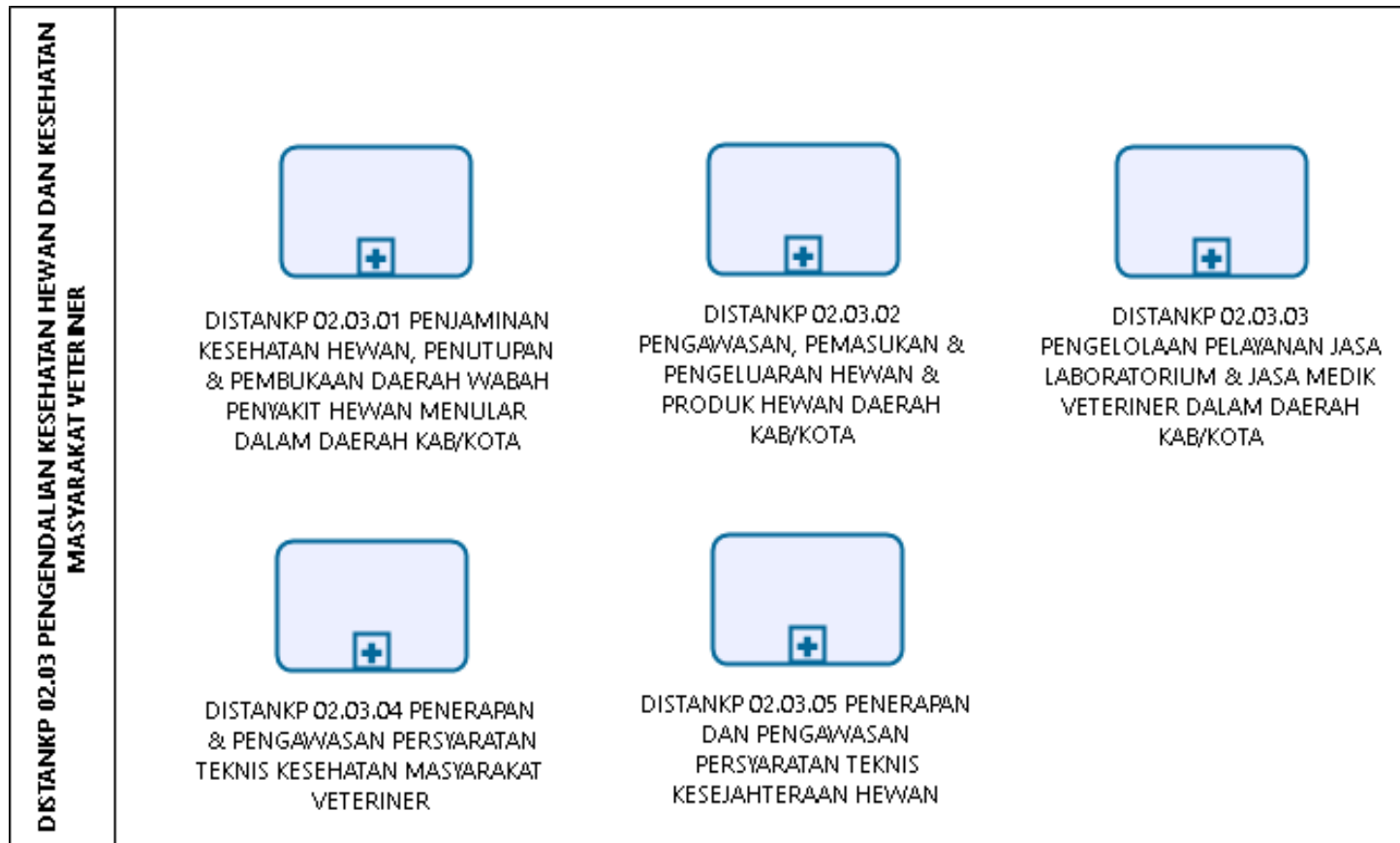
02.02.04CFM02



02.02.04CFM03



KEG 02..03



SUB KEG 02.03.01

DISTANKP 02.03.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN & PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KAB/KOTA



DISTANKP 02.03.01.01
PENANGGULANGAN DAERAH
TERDAMPAK WABAH PENYAKIT
HEWAN MENULAR



DISTANKP 02.03.01.02
PEMBERDAYAAN MASY DLM
PENGENDALIAN ZONOSIS



DISTANKP 02.03.01.03
PELAK SURVEILANS PENYAKIT
HEWAN & ZONOSIS PADA
HEWAN



DISTANKP 02.03.01.04
PELAK PENYIDIKAN PENYAKIT
HEWAN & ZONOSIS PADA
HEWAN

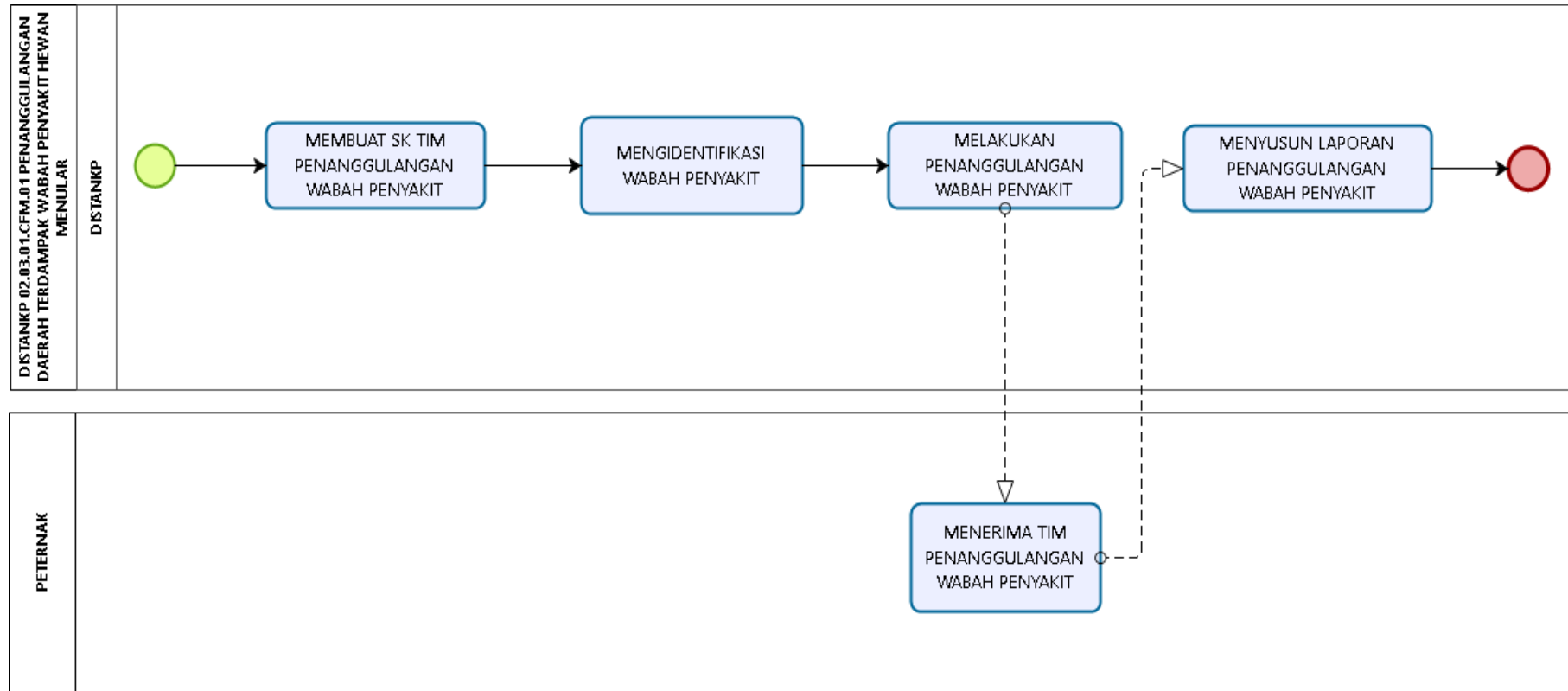


DISTANKP 02.03.01.05
PELAKSANAAN MANAJEMEN
RISIKO ZONOSIS

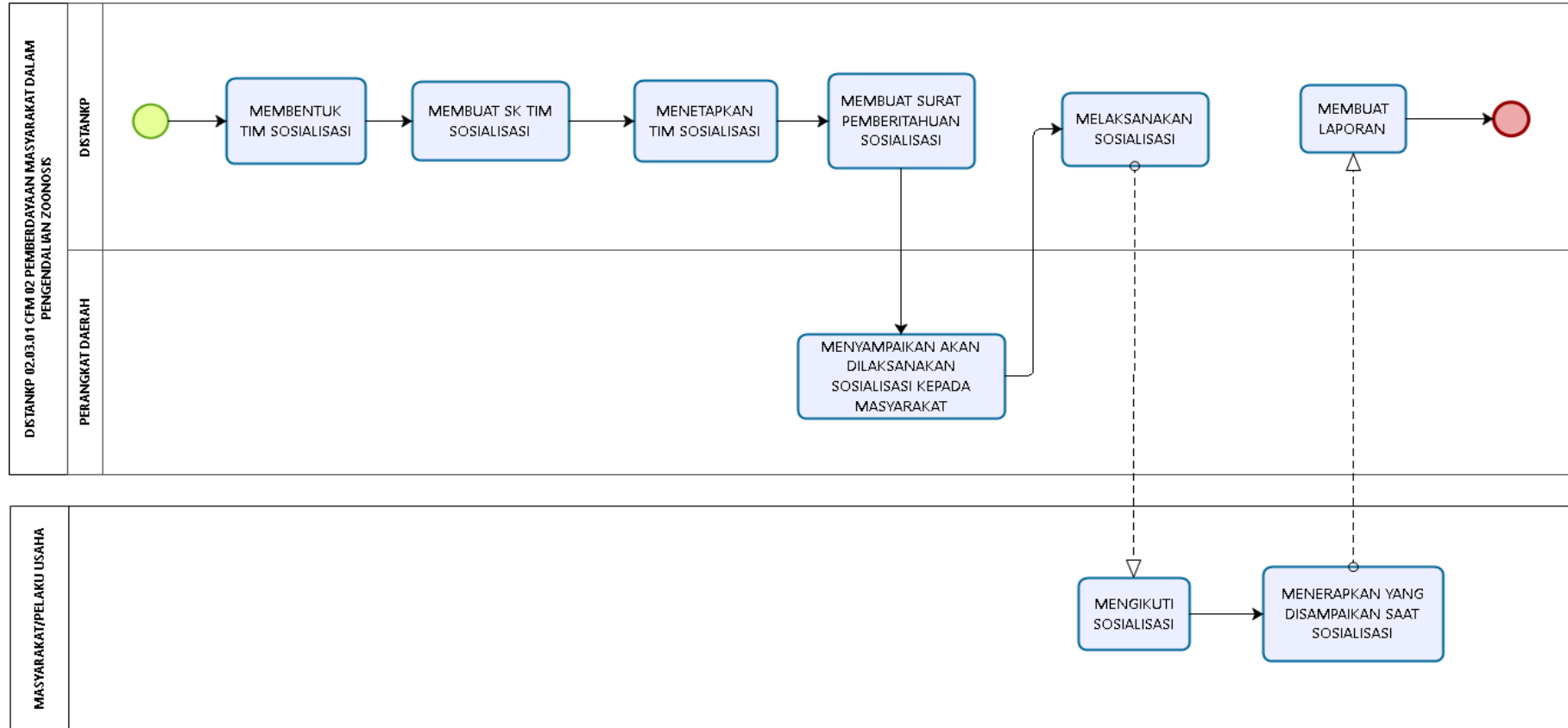


DISTANKP 02.03.01.06
PEMBERANTASAN PENYAKIT
HEWAN MENULAR & ZONOSIS
DALAM SATU DAERAH KAB/KOTA

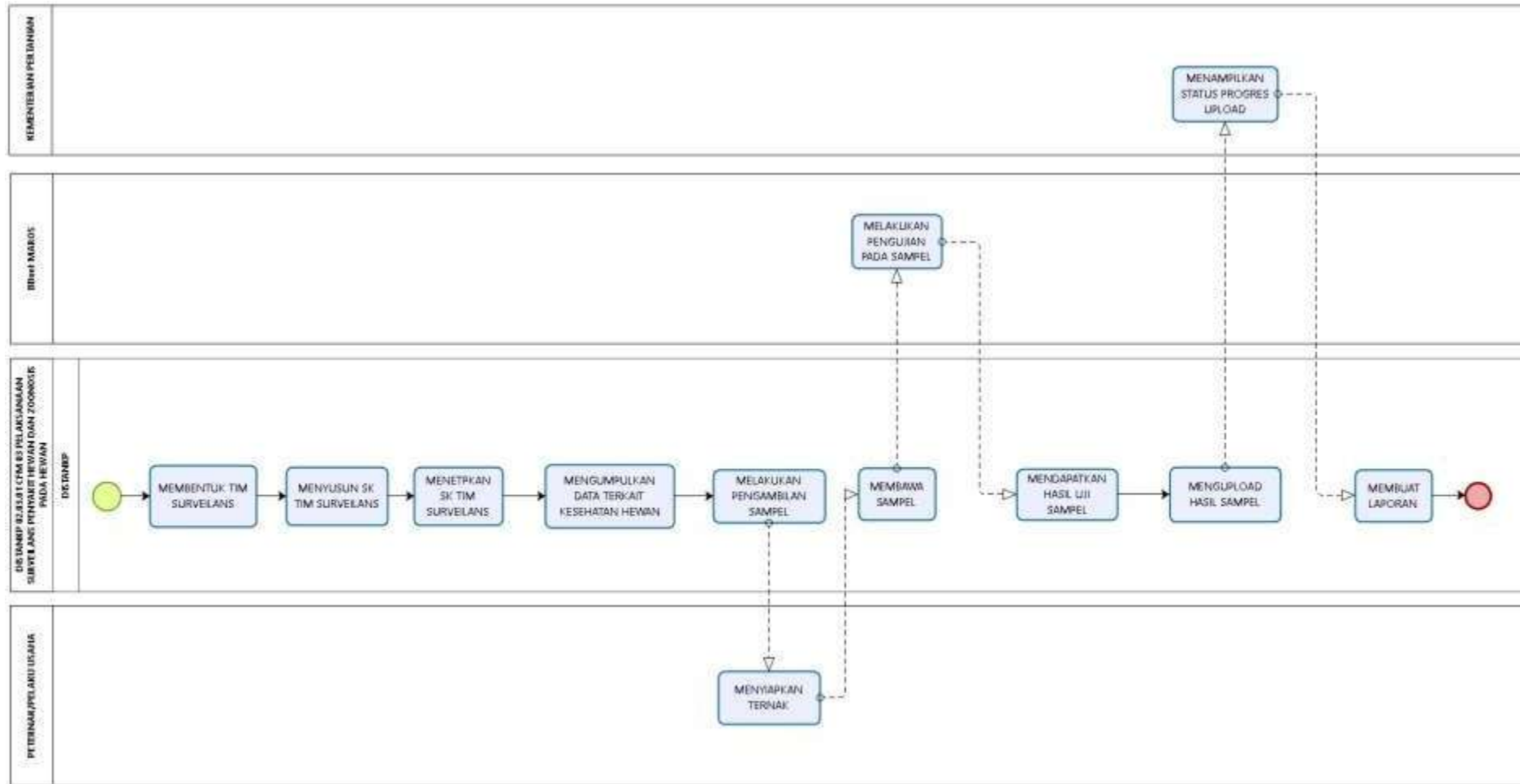
02.03.01CFM01



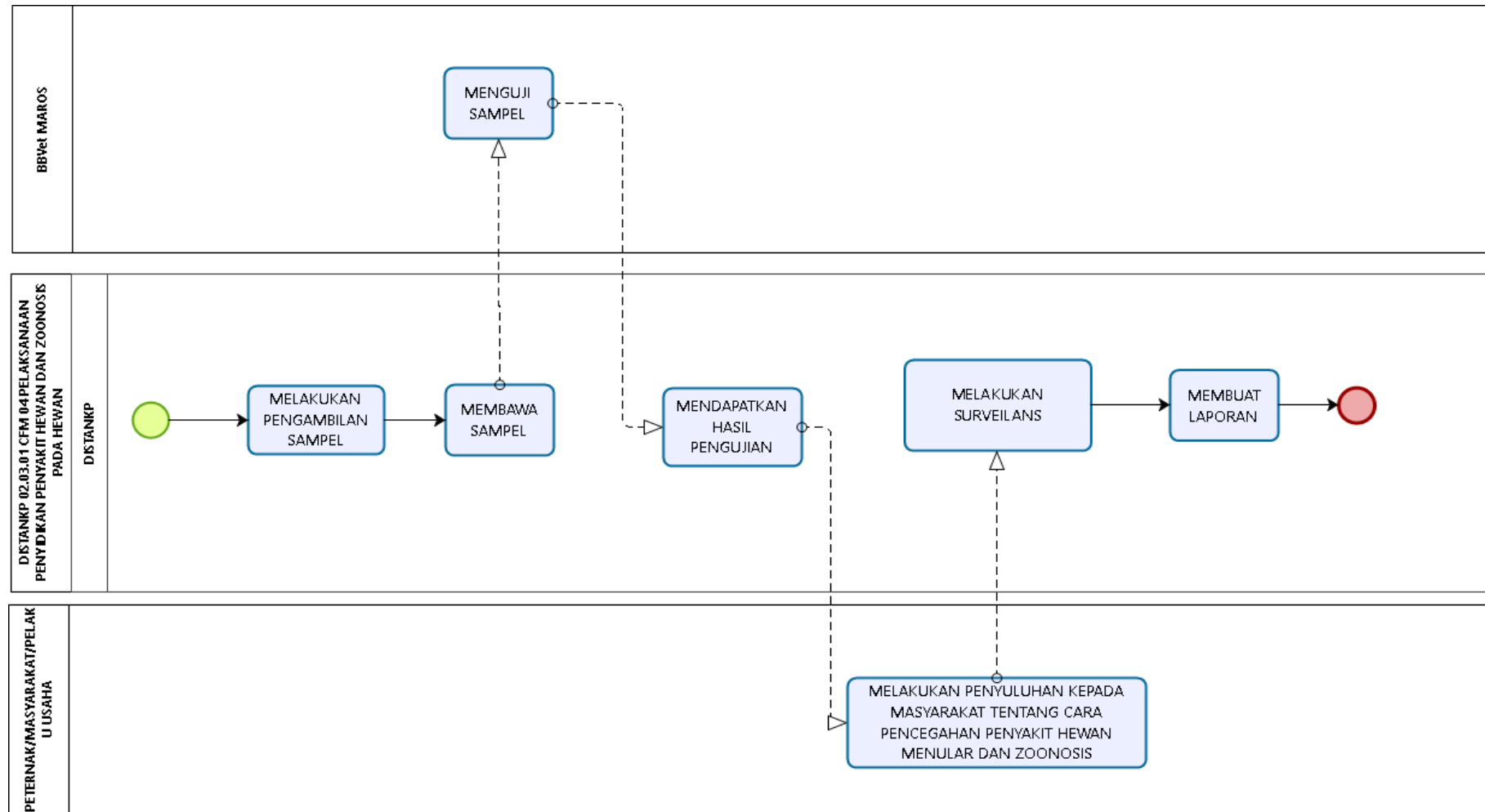
02.03.01CFM02



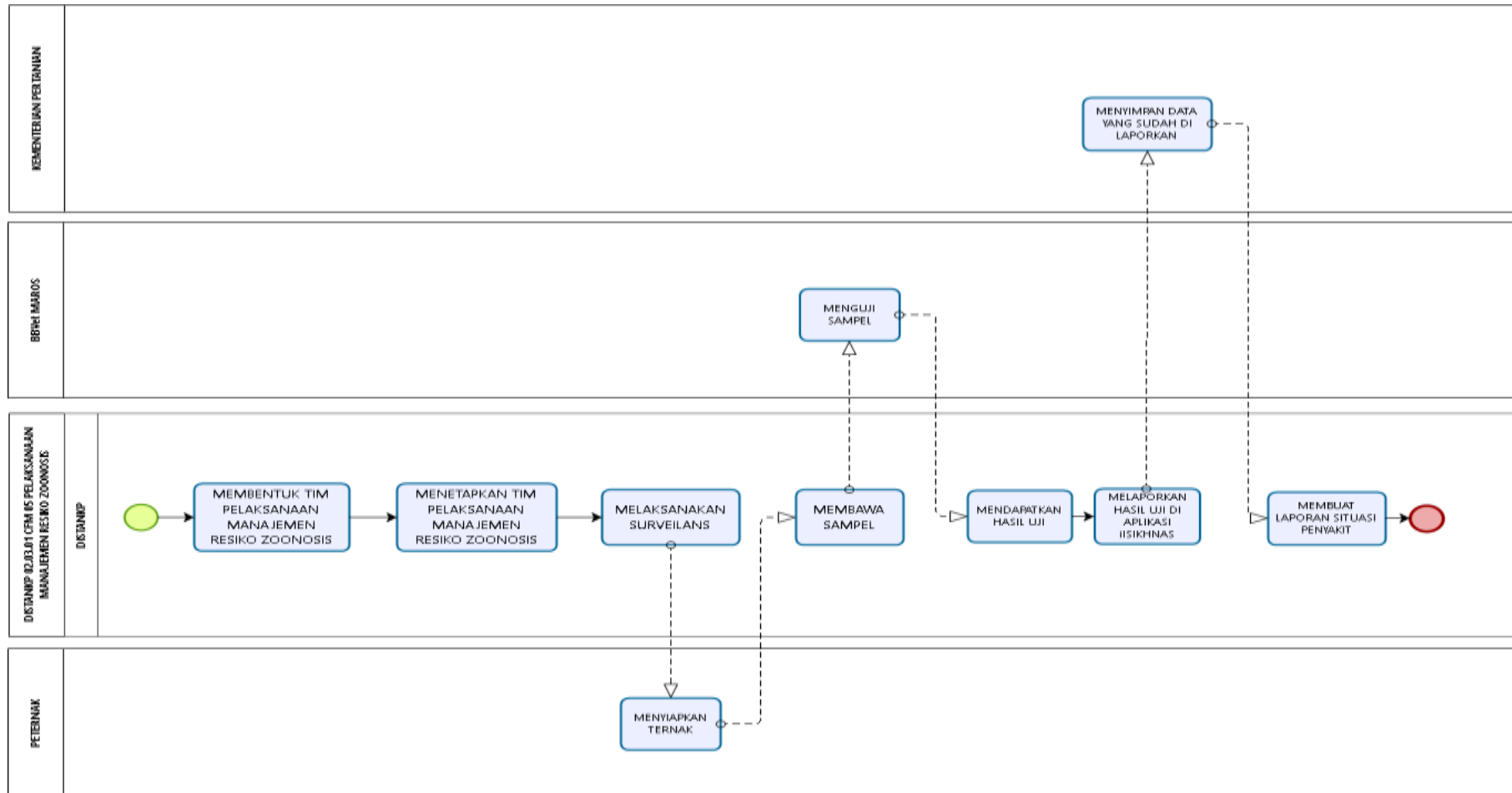
02.03.01CFM03



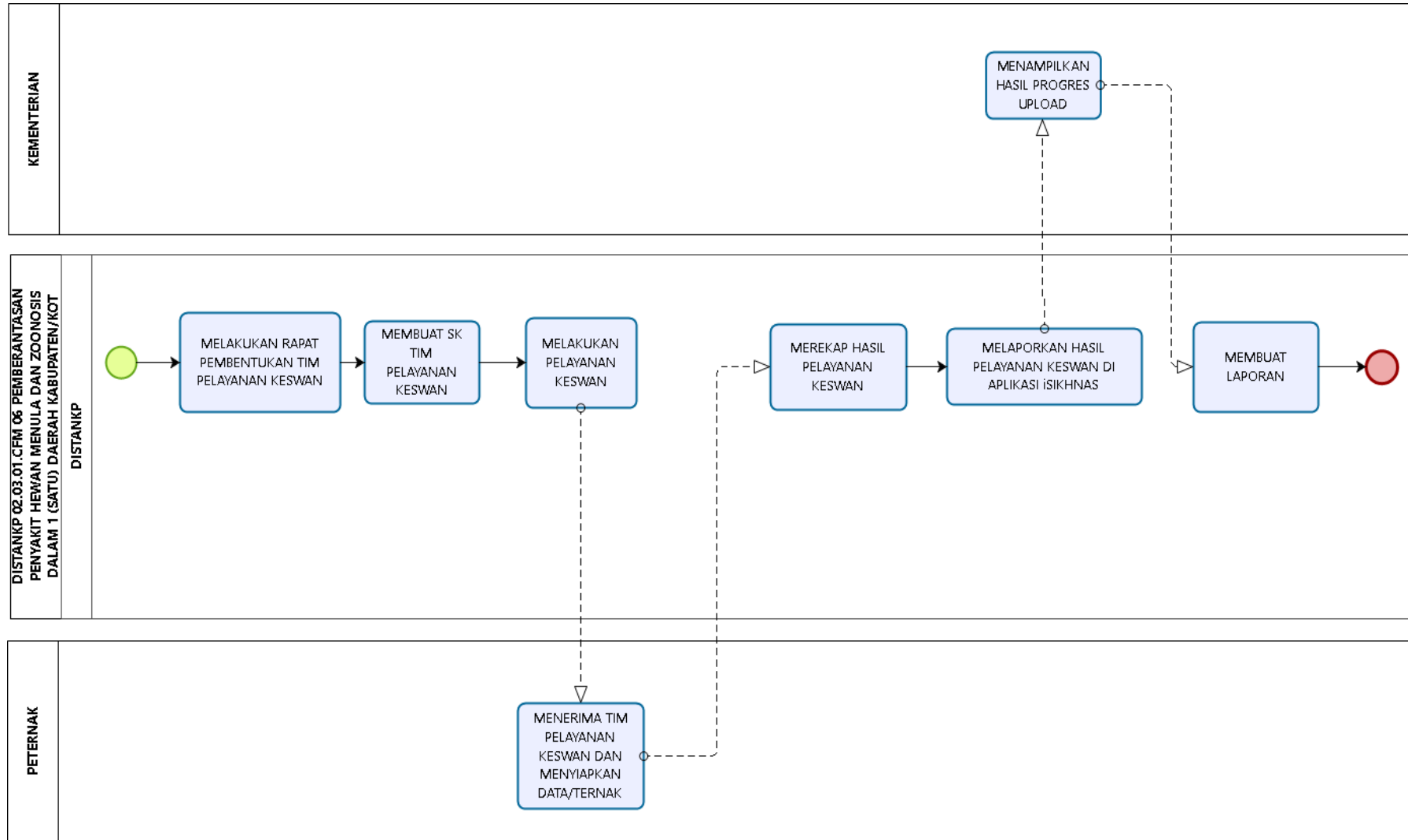
02.03.01CFM04



02.03.01CFM05



02.03.01CFM06



SUB KEG 02.03.02

DISTANKP 02.03.02 PENGAWASAN, PEMASUKAN & PENGELUARAN HEWAN & PRODUK HEWAN DAERAH KAB/KOTA



DISTANKP 02.03.02.01
PENGAWASAN ATAS PENERAPAN
PERSYAR TEKNIS UNTK
PEMASUKAN DAN/ATAU PENGEL
HEWAN & PRODUK HEWAN &
MEDIA PEMBAWA PENY HEWAN
LAINNYA (HPM)



DISTANKP 02.03.02.02
PENGAWASAN PEREDARAN
PRODUK HEWAN

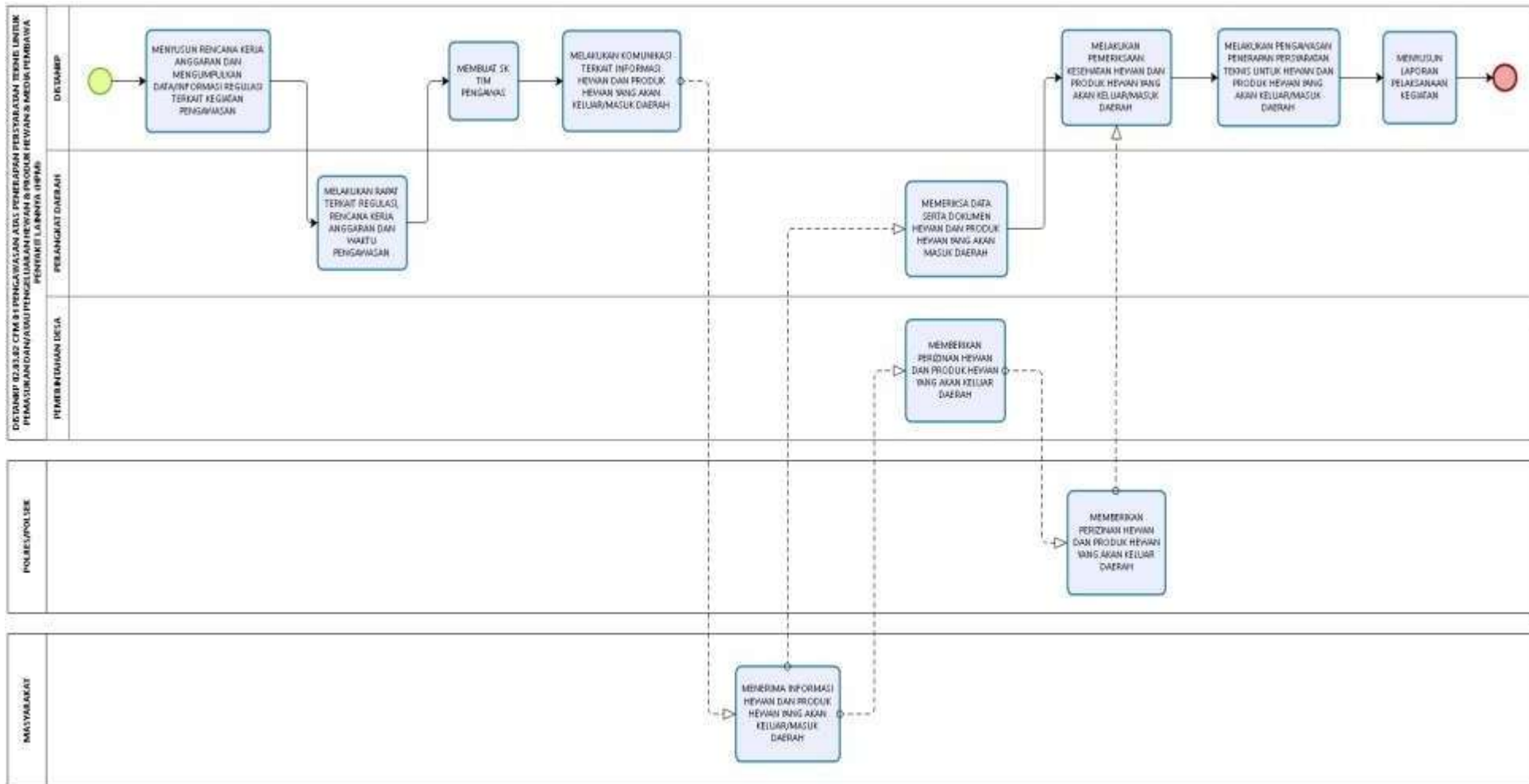


DISTANKP 02.03.02.03
PENGAWASAN & PEMERIKSAAN
KESWAN, PRODUK HEWAN &
MEDIA PEMBAWA PENY HEWAN
LAINNYA DIPERBATASAN TEMPAT
PEMERIKSAAN HPM

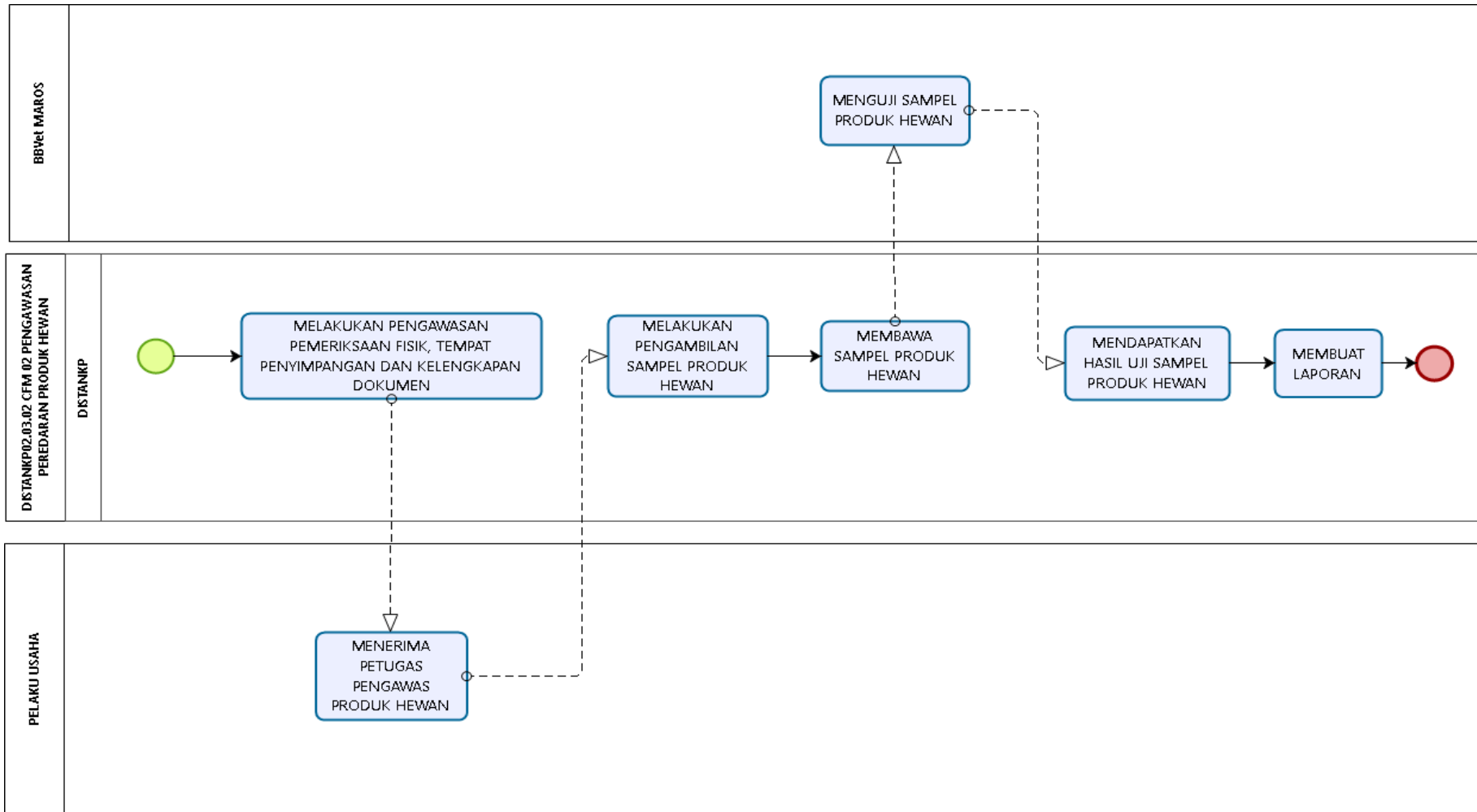


DISTANKP 02.03.02.04 ANALISIS
RESIKO PENYAKIT HEWAN,
ZONOSIS, PRODUK HEWAN &
MEDIA PEMBAWA PENY HEWAN
LAINNYA

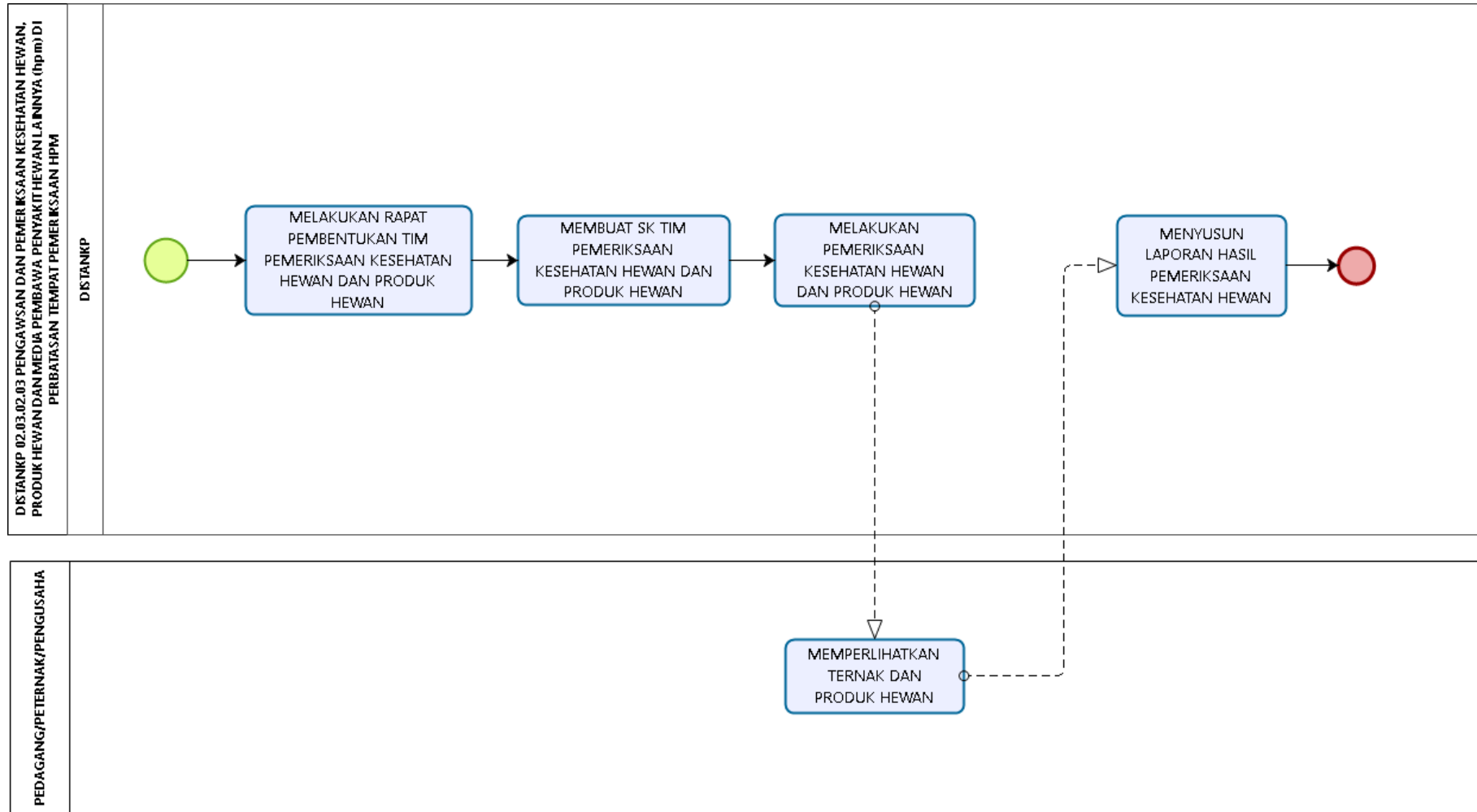
02.03.02CFM01



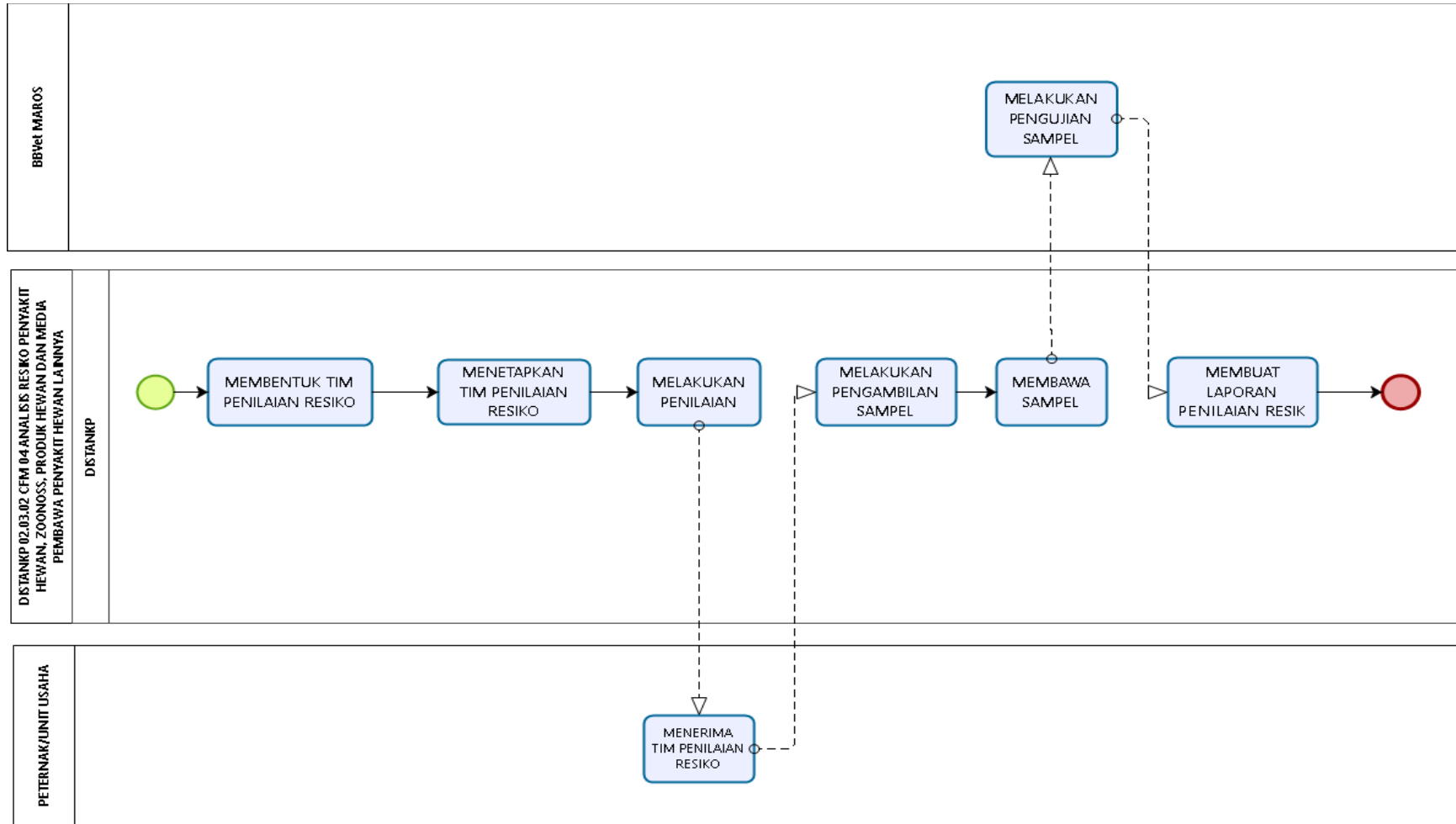
02.03.02CFM02



02.03.02CFM03



02.03.02CFM04



KEG 02.03.03

DISTANKP 02.03.03 PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM
& JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KAB/KOTA

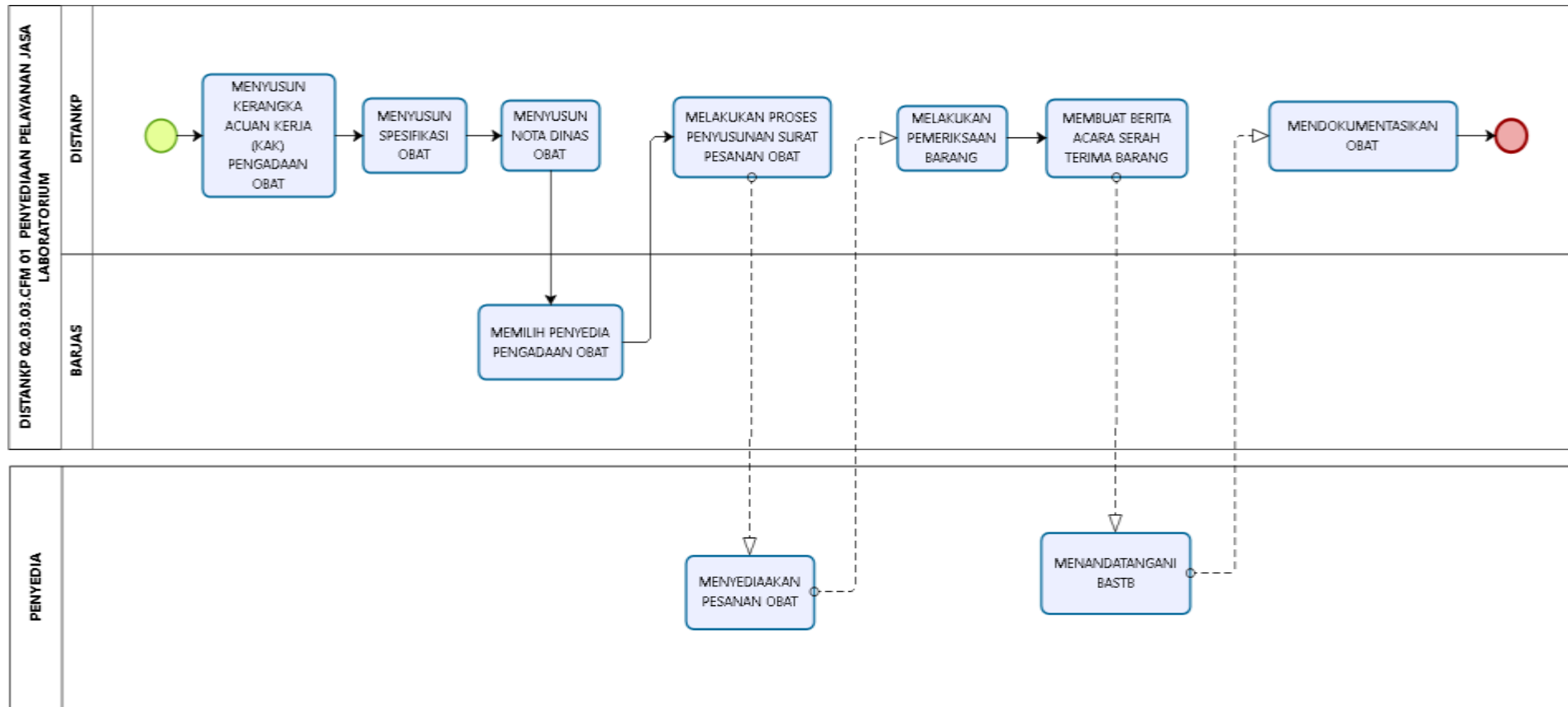


DISTANKP 02.03.03.01
PENYEDIAAN PELAYANAN JASA
LABORATORIUM

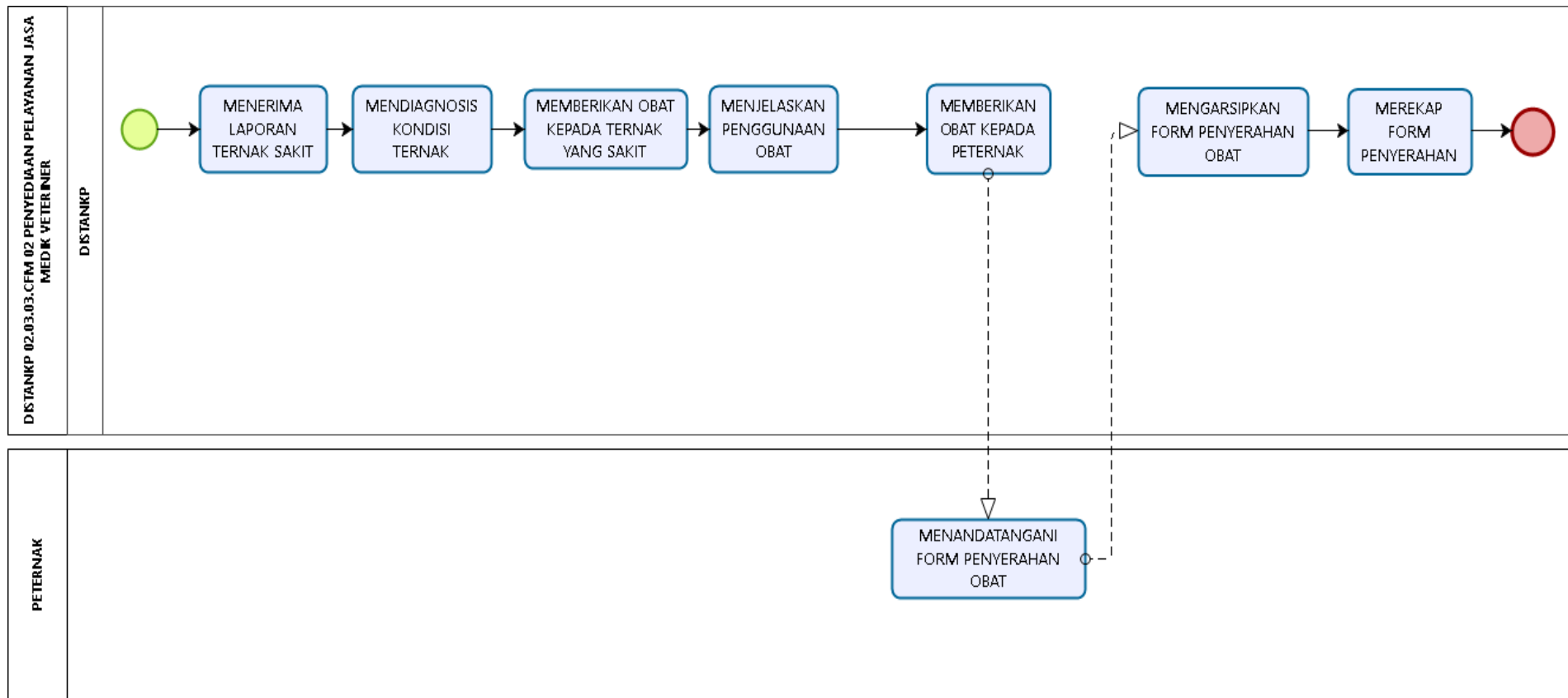


DISTANKP 02.03.03.02
PENYEDIAAN PELAYANAN JASA
MEDIK VETERINER

02.03.03CFM01



02.03.03CFM02



SUB KEG 02.03.04

DISTANKP 02.03.04 PENERAPAN & PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER



DISTANKP 02.03.04.01
PENGAWASAN PEREDARAN
HEWAN DAN PRODUK HEWAN



DISTANKP 02.03.04.02
PENGUJIAN LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER



DISTANKP 02.03.04.03
PEMBINAAN PENERAPAN
PERSYARATAN HIGIENE SANITASI
PADA UNIT USAHA PRODUK
HEWAN



DISTANKP 02.03.04.04
PENGELOLAAN PENERBITAN
REKOMENDASI PEMASKN &
PENDEL, SERTIFIKASI VETERINER
& SKKH/SKPH HEWAN, PRODUK
HEWAN & MEDIA PEMBAWA PENY
HEWAN LAINNYA (HPM)



DISTANKP 02.03.04.05
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PETUGAS TEKNIS KESWAN, KES
MASYRKT VETERINER &
KESEJAHTERAAN HEWAN



DISTANKP 02.03.04.06
PENINGKATAN KESADARAN
MASYARAKAT TERHDP KESMAVET
& KESEJAHTERAAN HEWAN

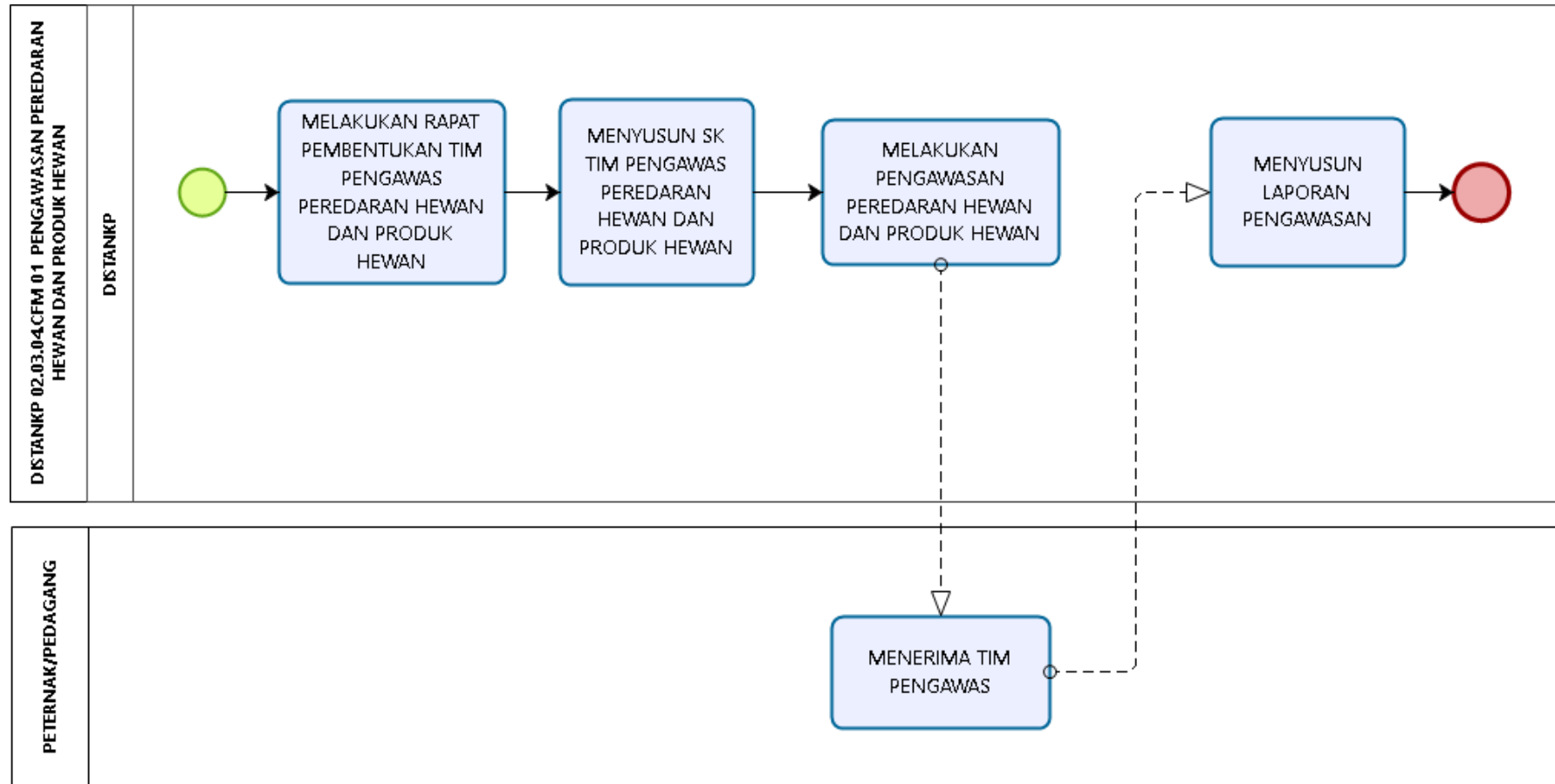


DISTANKP 02.03.04.07
PEMBINAAN & PENDAMPINGAN
PEMENUHAN PERSYARATAN
REGISTRASI PRODUK HEWAN
SEGAR BERKEMASAN

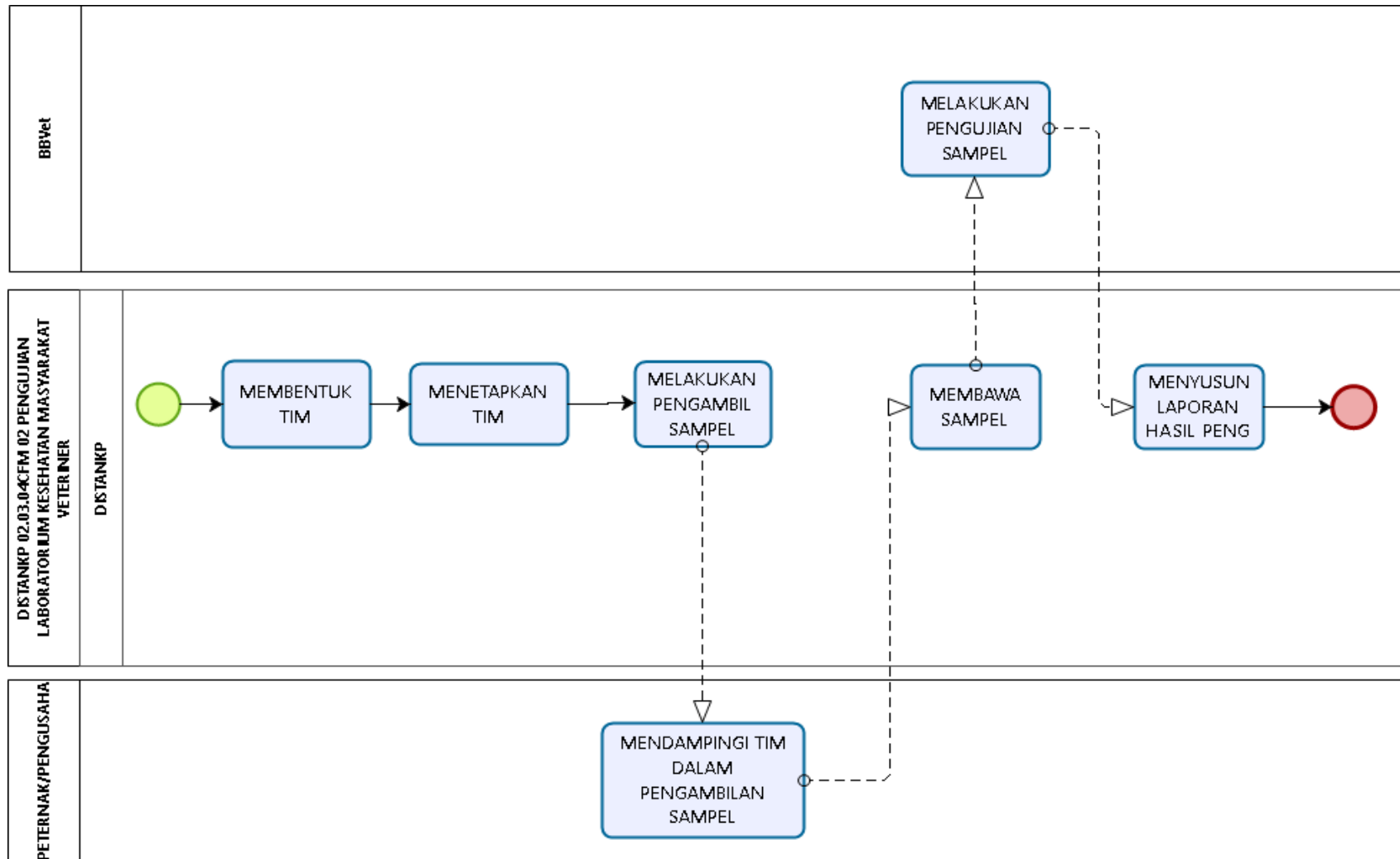


DISTANKP 02.03.04.08
PENGAWASAN UNIT USAHA
PRODUK HEWAN

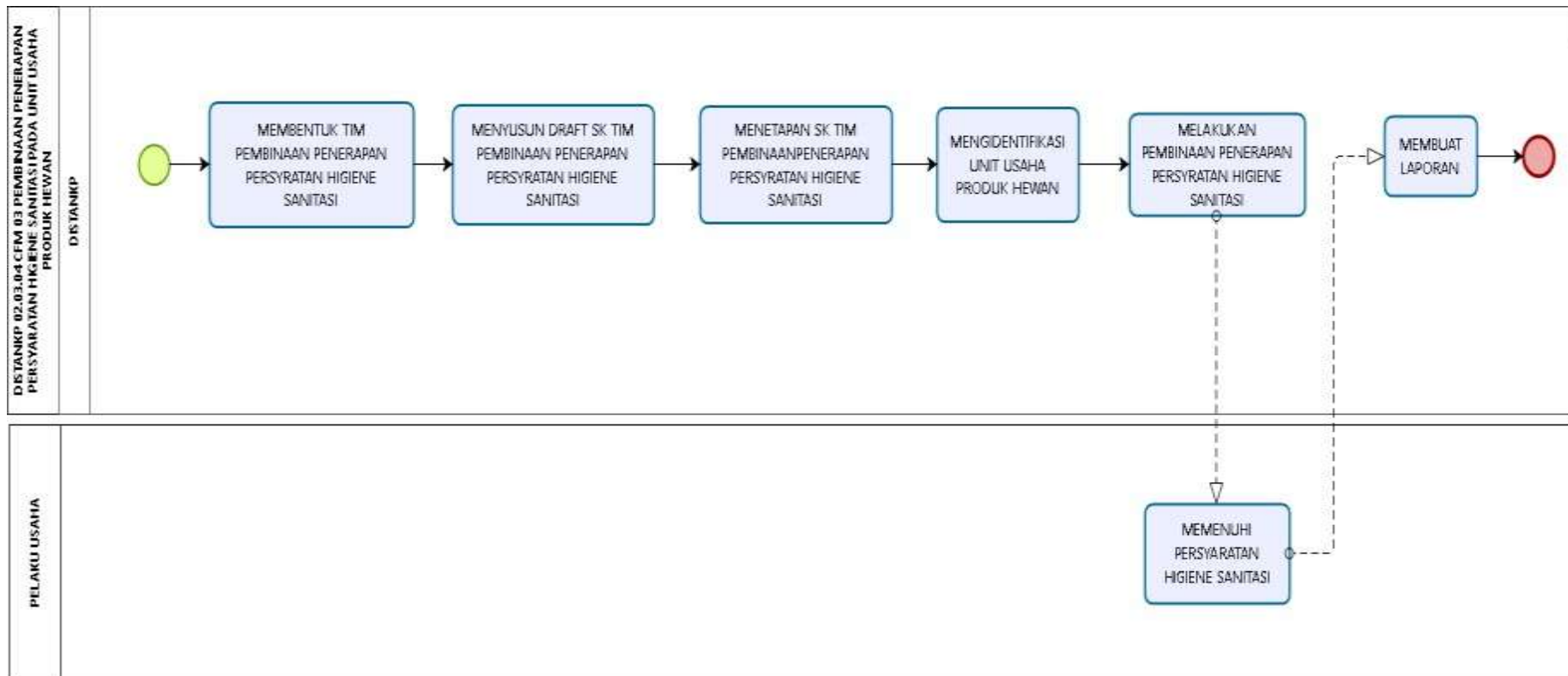
02.03.04CFM01



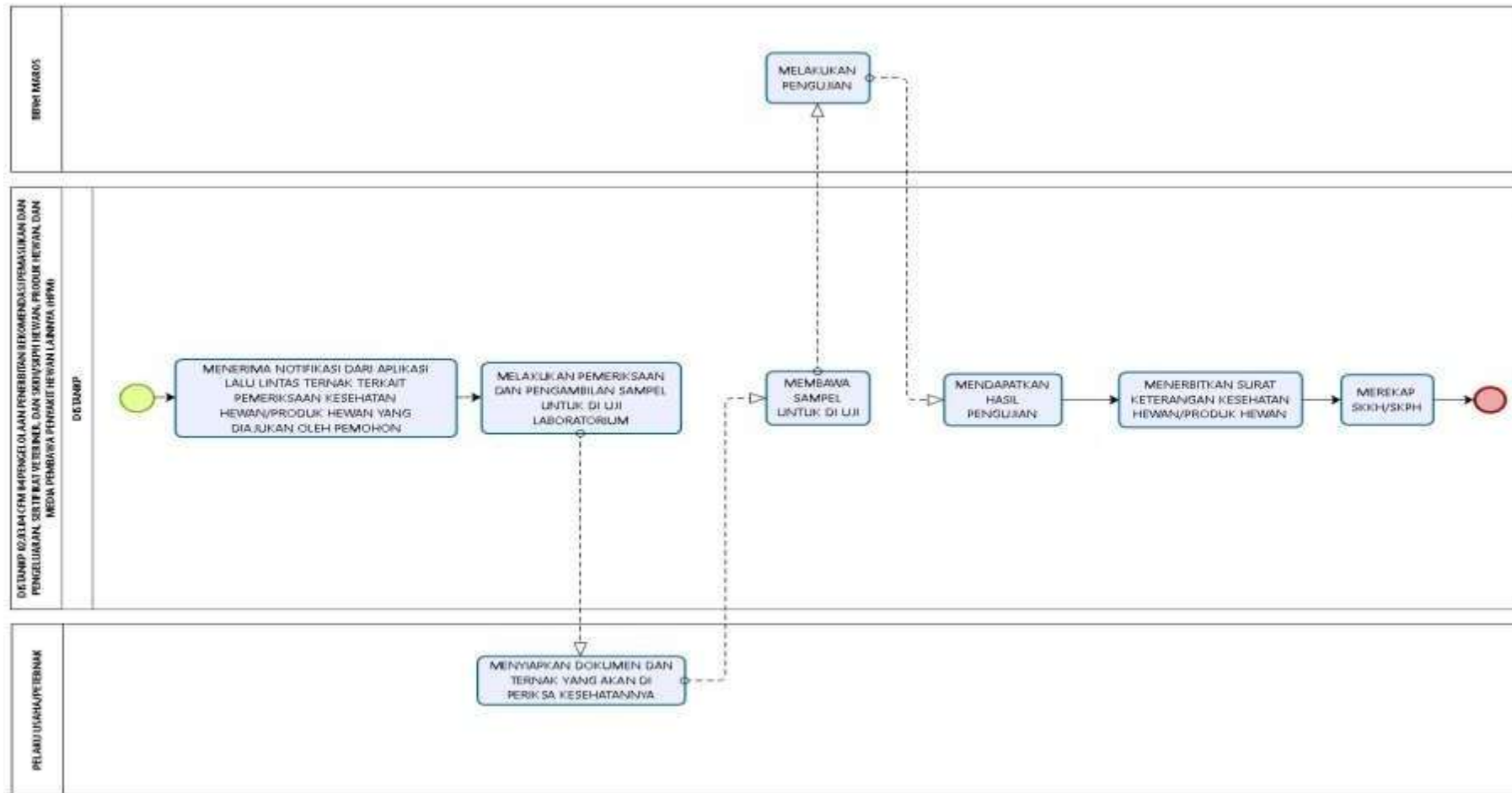
02.03.04CFM02



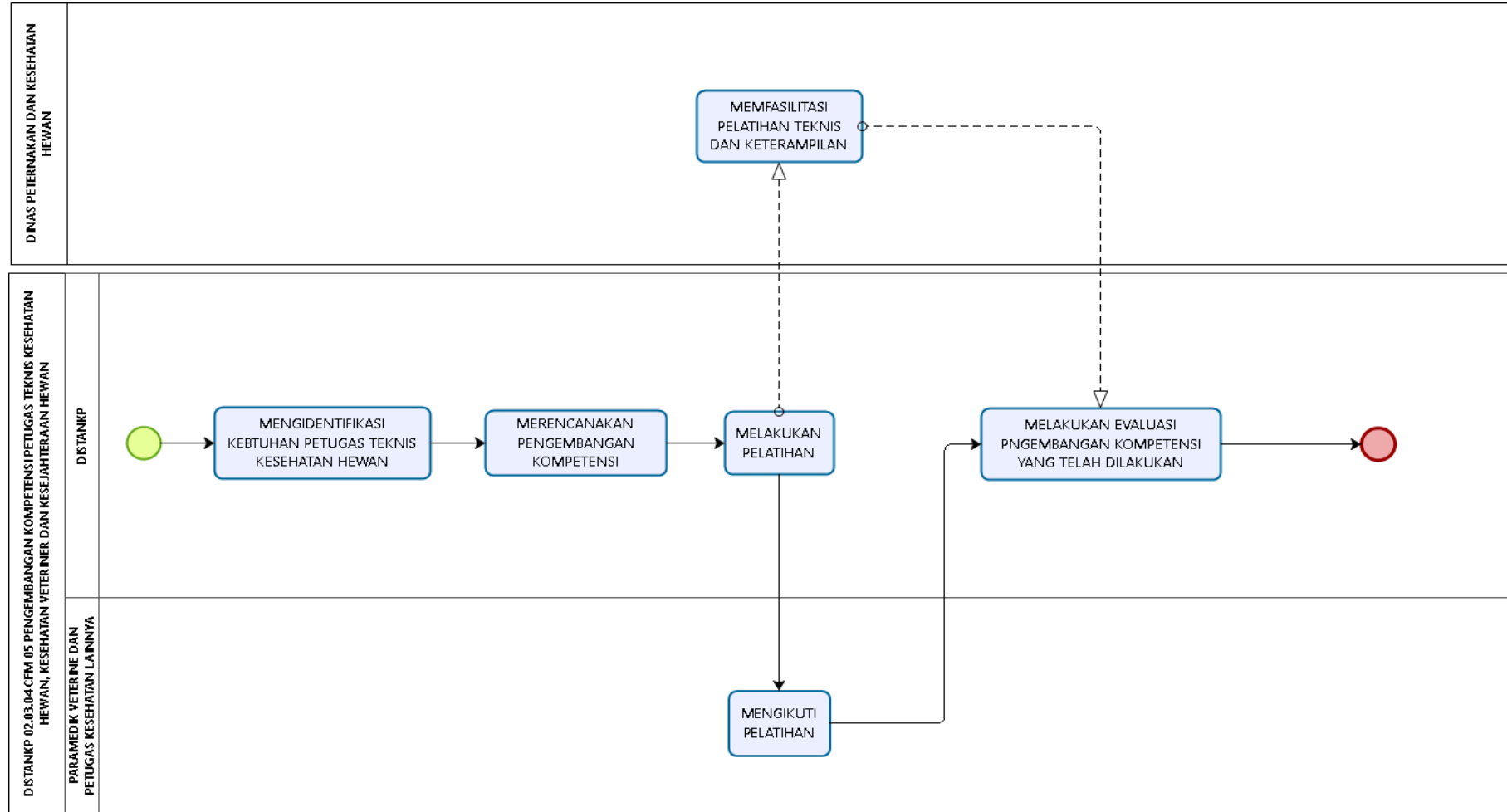
02.03.04CFM03



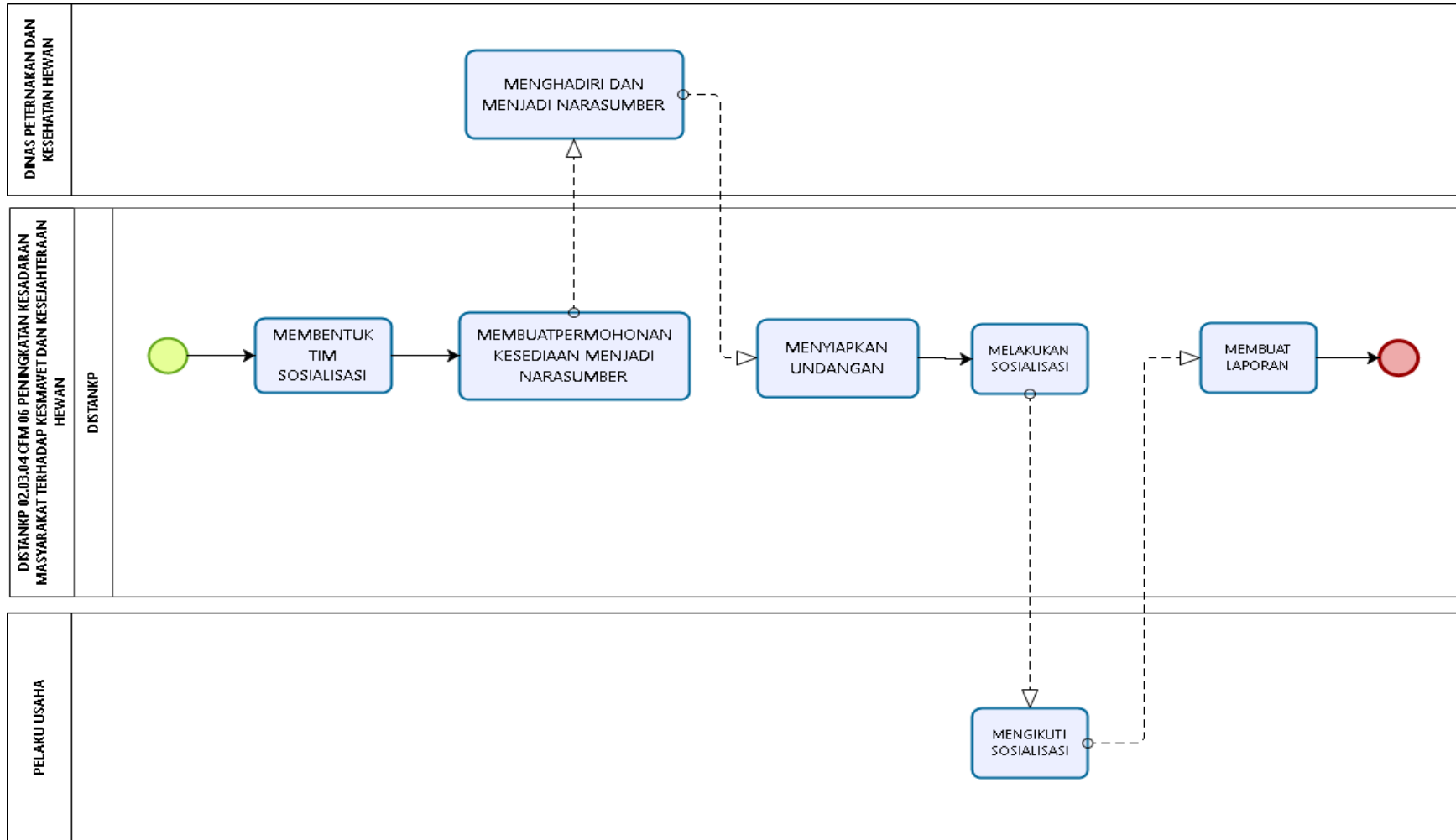
02.03.04CFM04



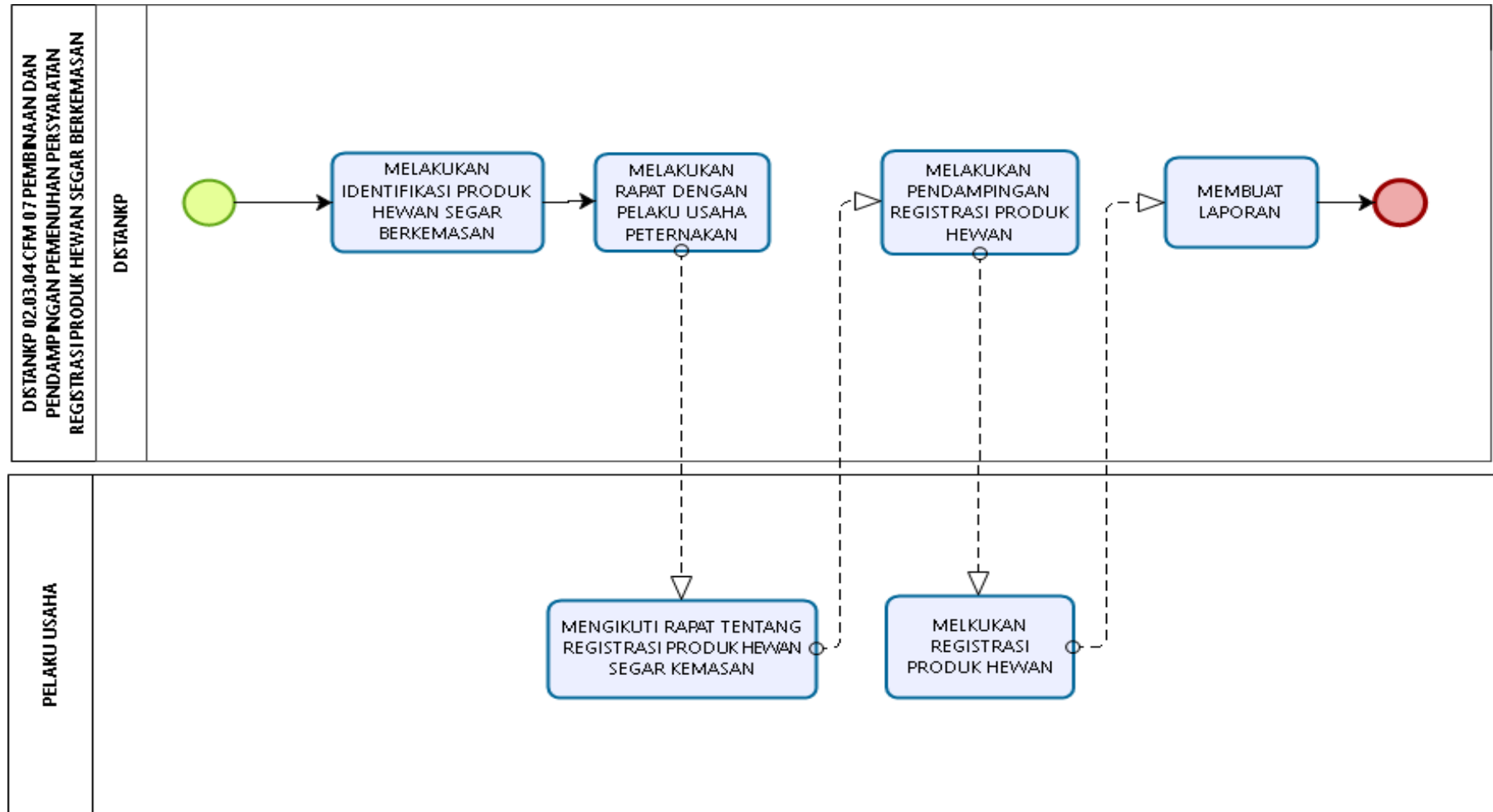
02.03.04CFM05



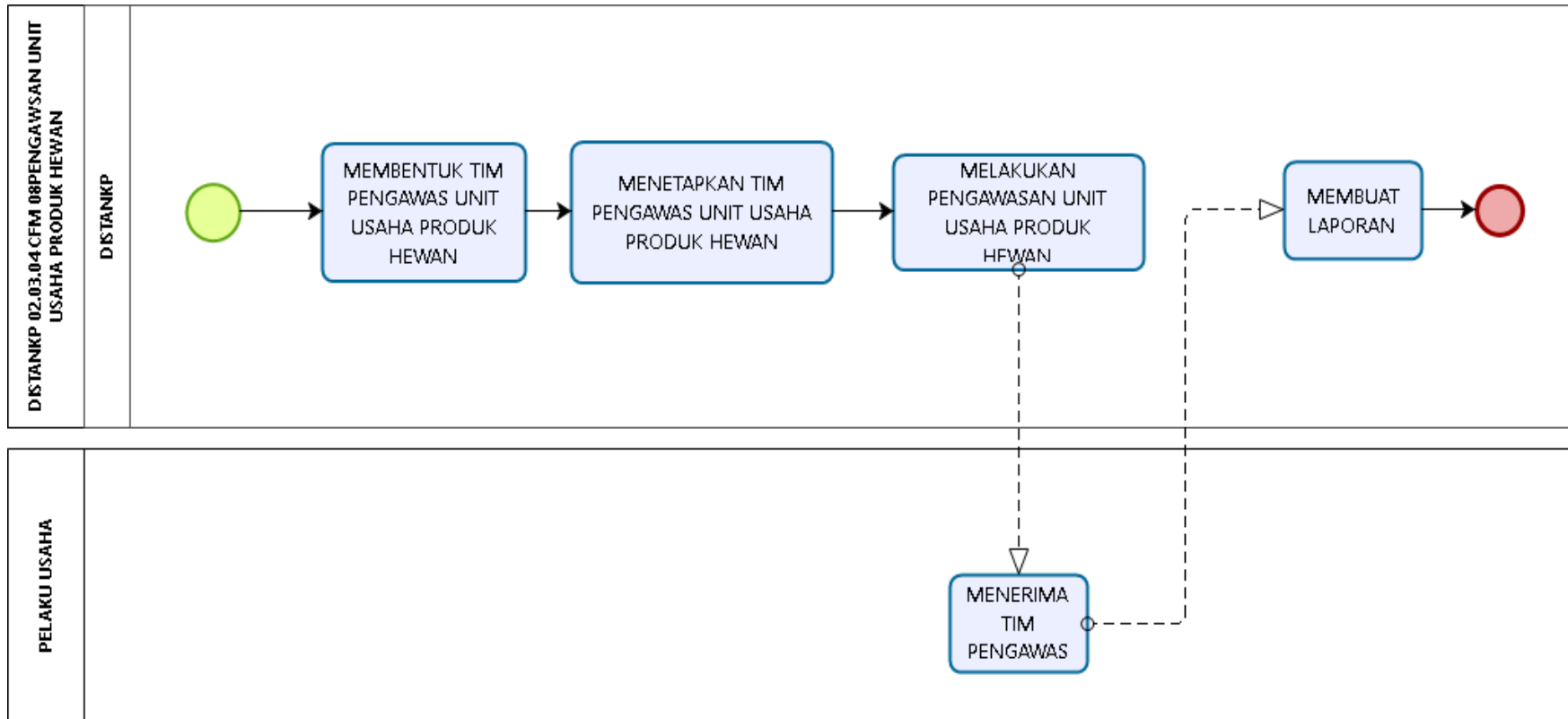
02.03.04CFM06



02.03.04CFM07



02.03.04CFM08



SUB KEG 02.03.05

**DISTANKP 02.03.05 PENERAPAN DAN PENGAWASAN
PERSYARATAN TEKNIS KESEJAHTERAAN HEWAN**

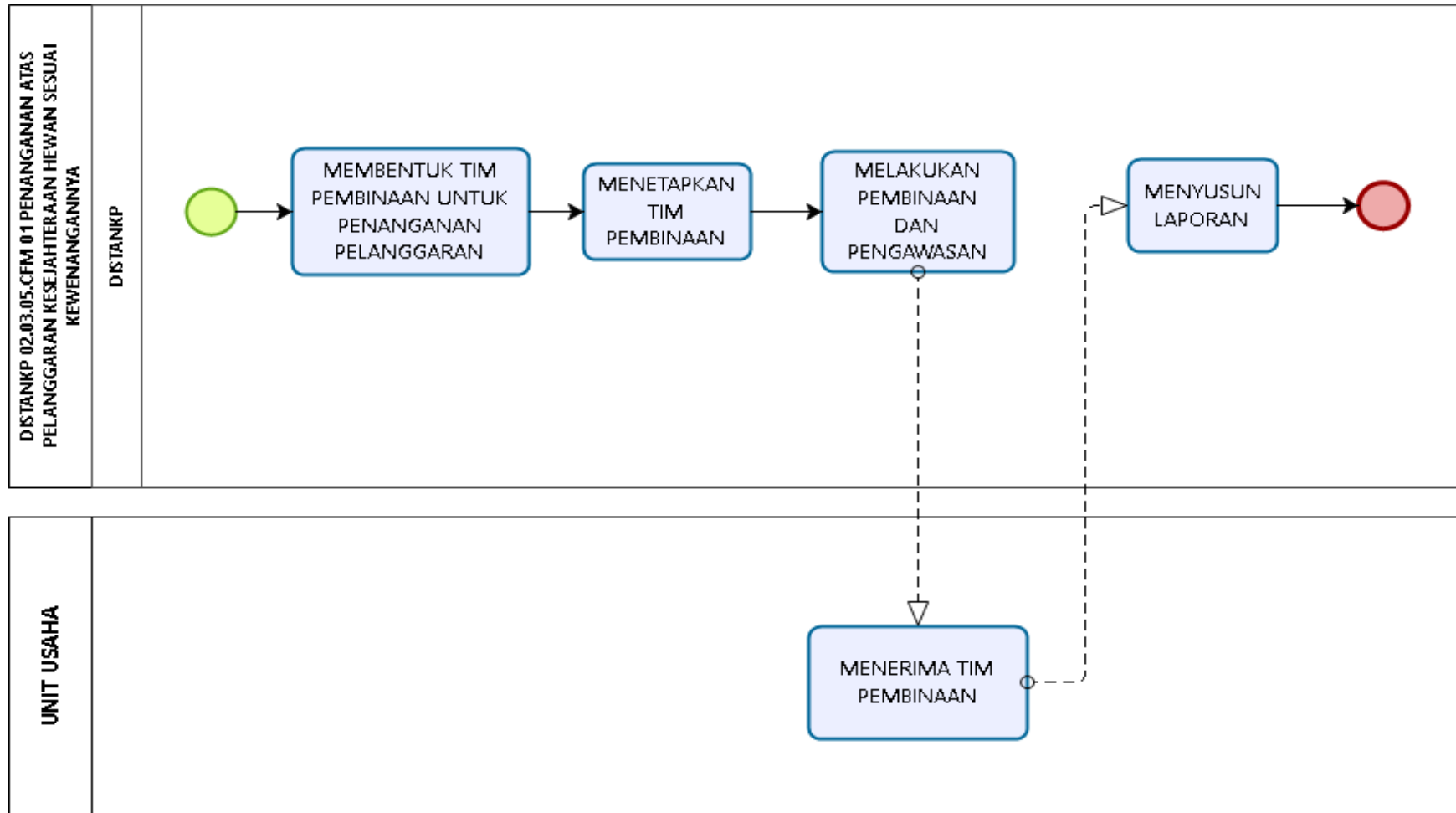


DISTANKP 02.03.05.01
PENANGANAN ATAS
PELANGGARAN KESEJAHTERAAN
HEWAN SESUAI
KEWENANGANNYA

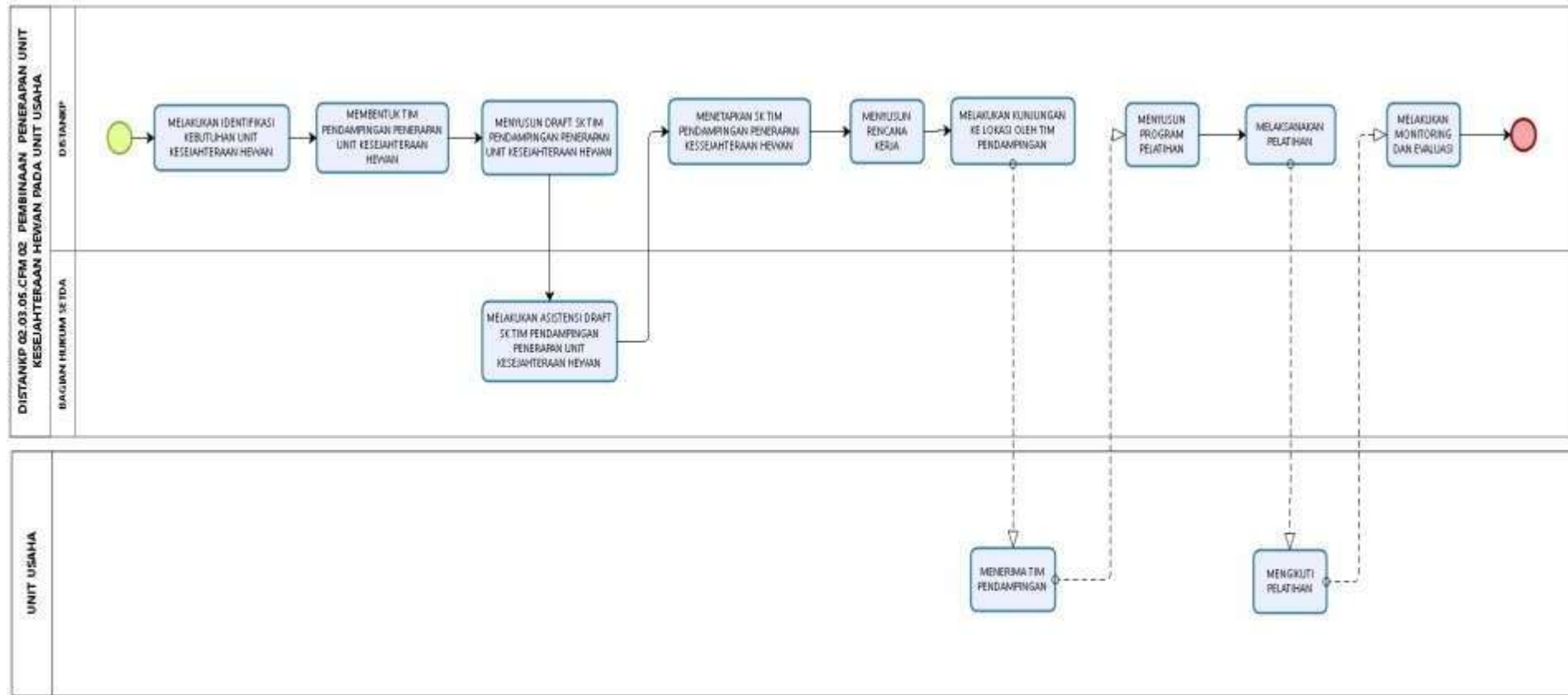


DISTANKP 02.03.05.02
PEMBINAAN PENERAPAN
KESEJAHTERAAN HEWAN PADA
UNIT USAHA

02.03.05CFM01



02.03.05CFM02



KEG 02..04

**DISTANKP 02.04 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN**



**DISTANKP 02.04.01
PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
PERTANIAN KAB/KOTA**

SUB KEG 02.04.01

DISTANKP 02.04.01 PENANGGULANGAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
KAB/KOTA



DISTANKP 02.04.01.01
PENGENDALIAN OPT TAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN



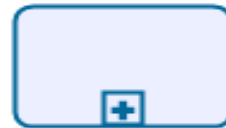
DISTANKP 02.04.01.02
PENANGANAN DAMPAK
PERUBAHAN IKLIM (DPI) TAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN



DISTANKP 02.04.01.03
PENCEGAHAN, PENANGANAN
KEBAKARAN LAHAN DAN
GANGGUAN USAHA TAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN



DISTANKP 02.04.01.04
PENANGGULANGAN BENCANA
NON ALAM YANG BERSIFAT
ZONOSIS

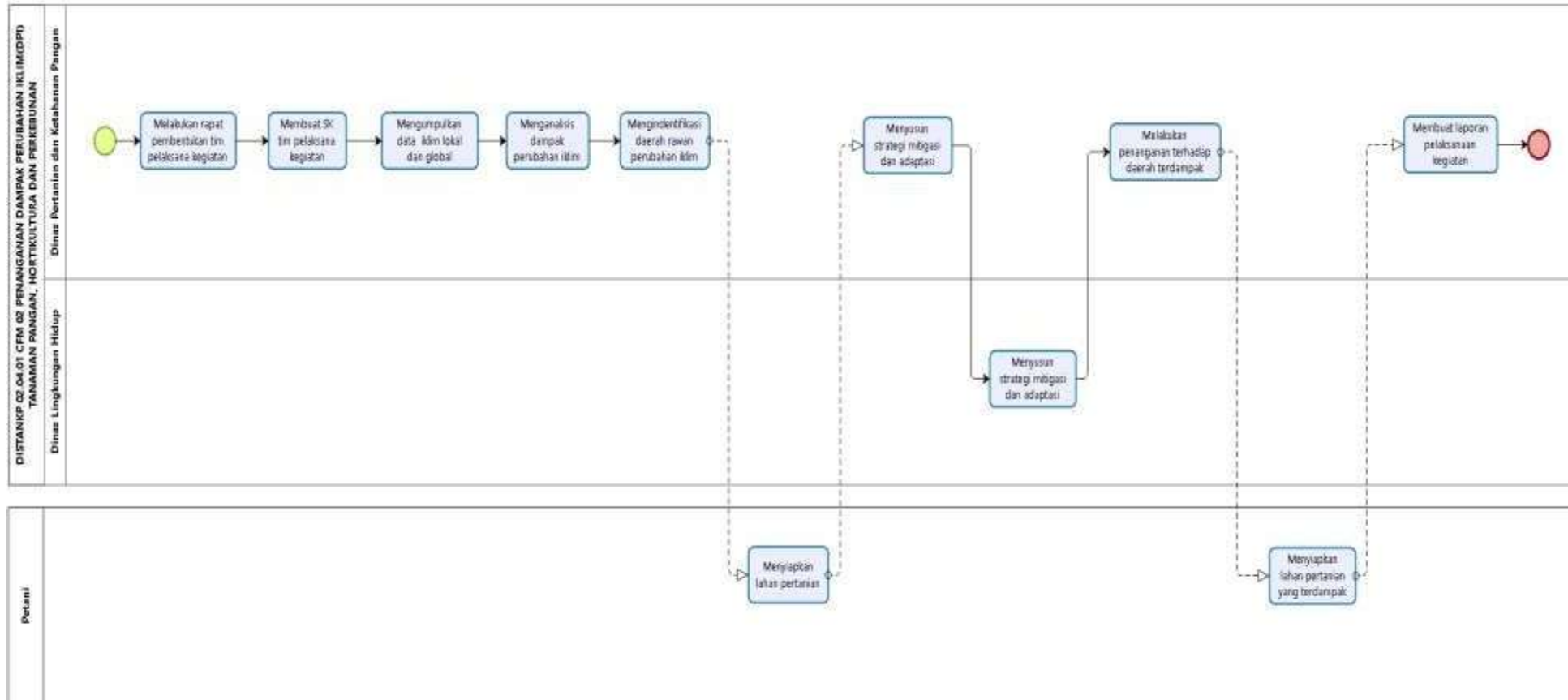


DISTANKP 02.04.01.05
PENANGGULANGAN PASCA
BENCANA ALAM BID TAN
PANGAN, HORTIKULTURA &
PERKEBUNAN

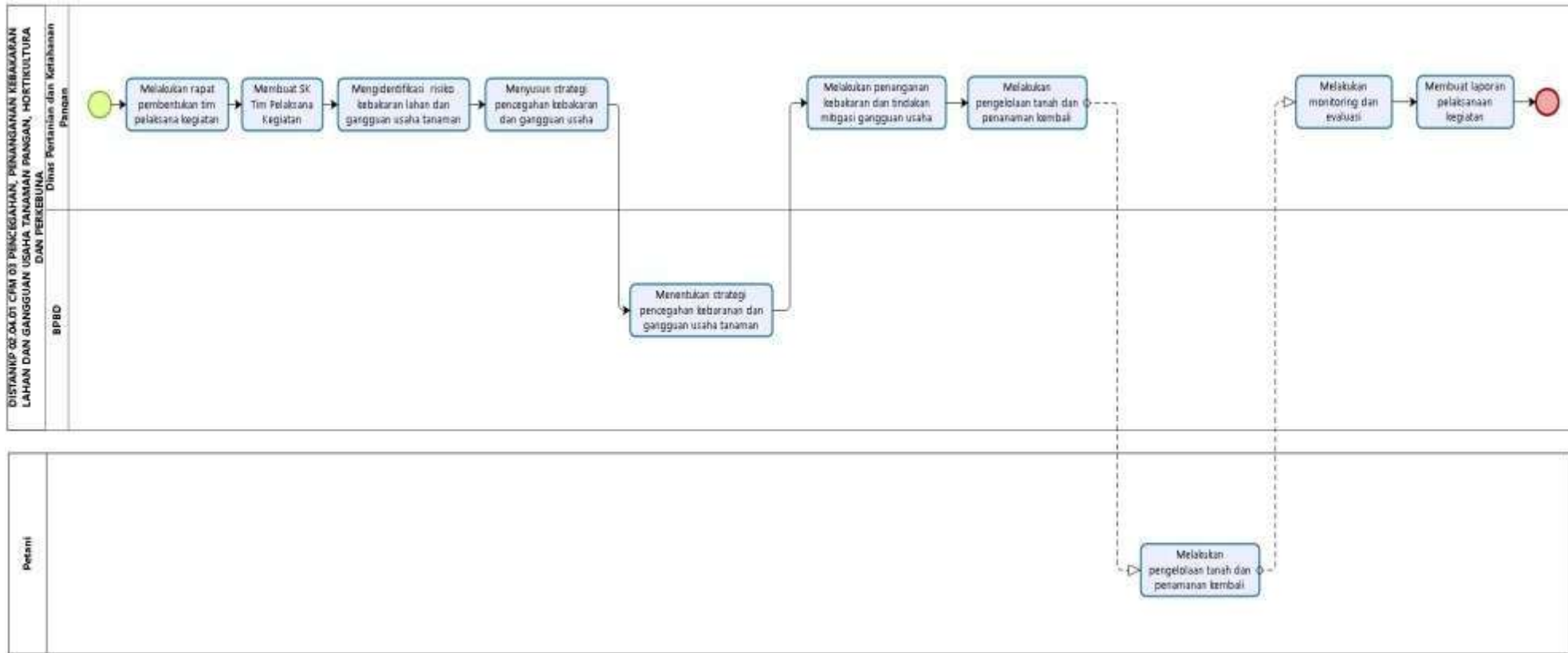


DISTANKP 02.04.01.06
PENANGGULANGAN PASCA
BENCANA ALAM BID
PETERNAKAN & KESWAN

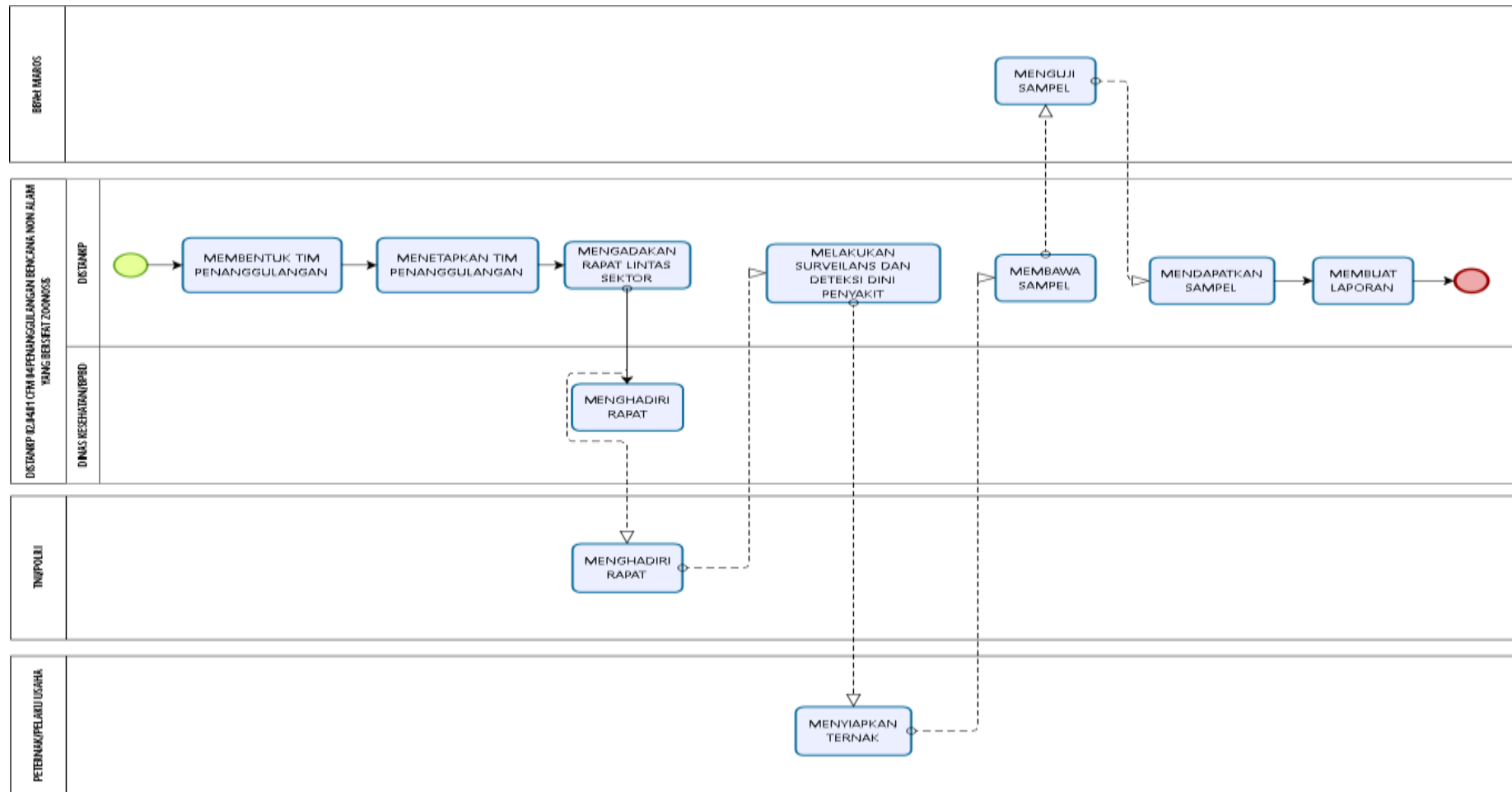
02.04.01CFM02



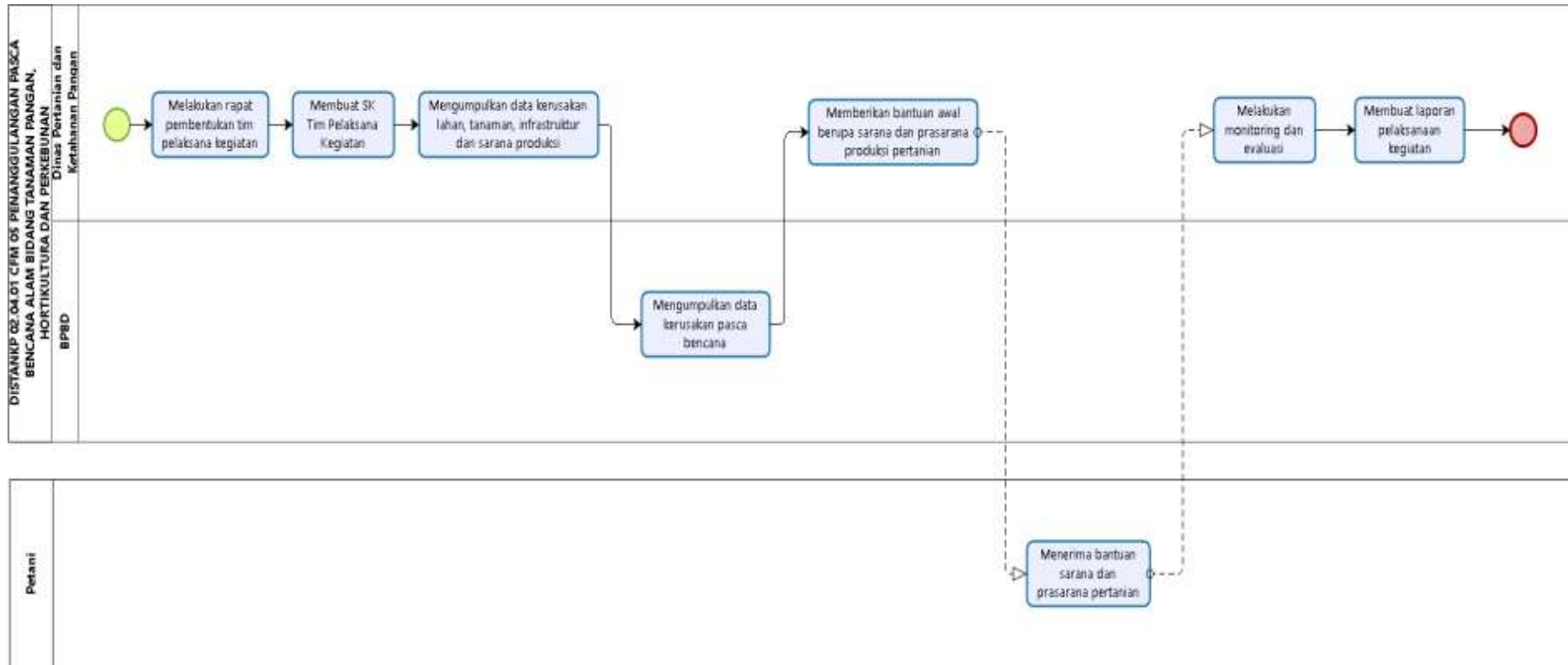
02.04.01CFM03



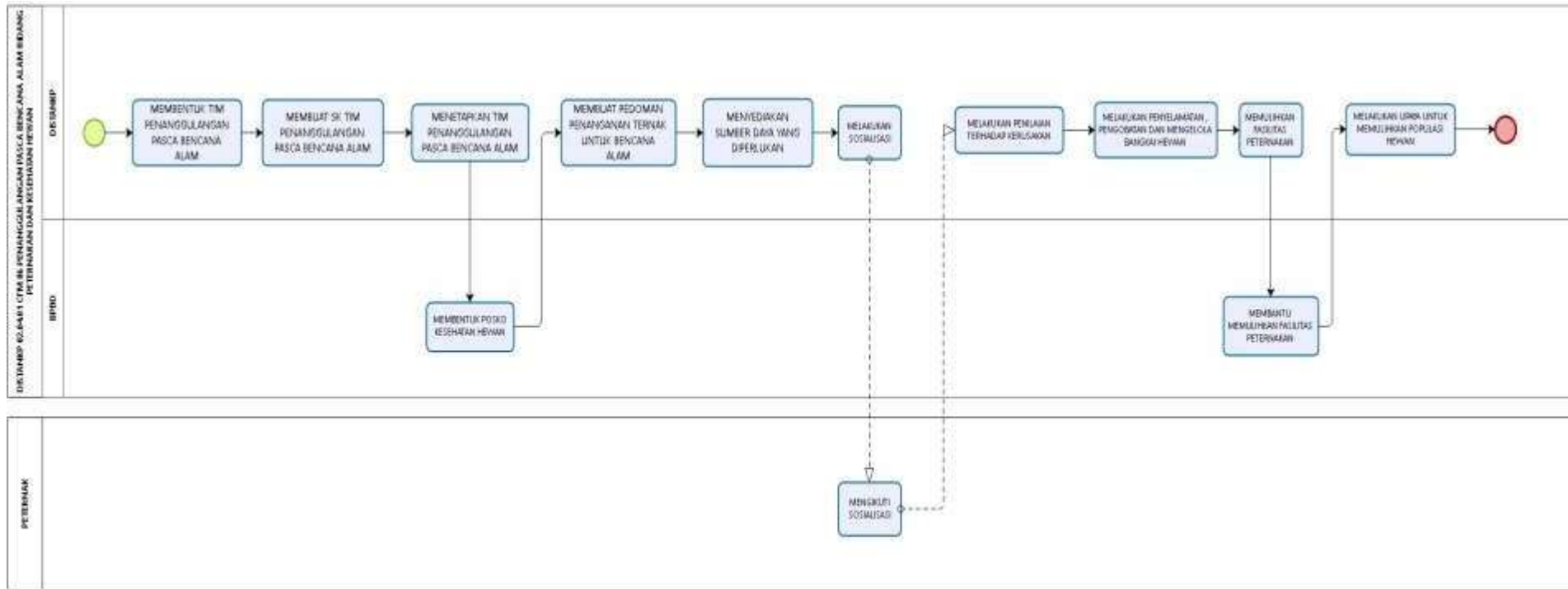
02.04.01CFM04



02.04.01CFM05



02.04.01CFM06



KEG 02.05

DISTANKP 02.05 PERIZINAN USAHA PERTANIAN



DISTANKP 02.05.01 PENERBITAN
IZIN USAHA PERTANIAN YANG
KEGIATAN USAHANYA DALAM
DAERAH KAB/KOTA



DISTANKP 02.05.02 PENERBITAN
IZIN USAHA PRODUKSI
BENIH/BIBIT TERNAK DAN
PAKAN, FASILITAS
PEMELIHARAAN HEWAN, RS
HEWAN/PASAR HEWAN, RPH



DISTANKP 02.05.03
PENDAMPINGAN IZIN USAHA
PENGE CER (TOKO RETAIL,
SUBDISTRIBUTOR) OBAT HEWAN

SUB KEG 02.05.01

**DISTANKP 02.05.01 PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG
KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KAB/KOTA**



DISTANKP 02.05.01.01
PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PEMBERIAN
IZIN USAHA PERTANIAN



DISTANKP 02.05.01.02 PENILAIAN
KELAYAKAN DAN PEMBERIAN
PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN
USAHA PERTANIAN

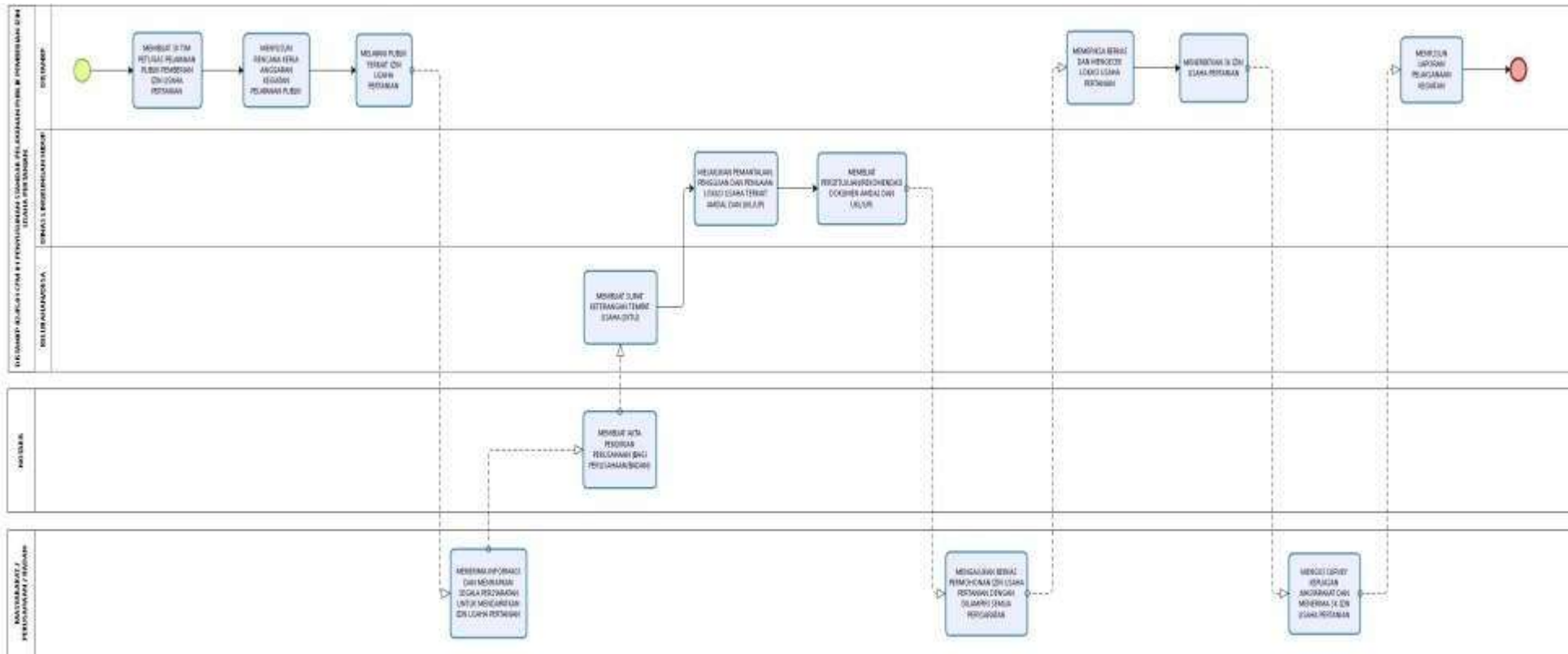


DISTANKP 02.05.01.03
PENGAWASAN SERTIFIKASI UNIT
USAHA PEMBIBITAN/BUDIDAYA
TERNAK

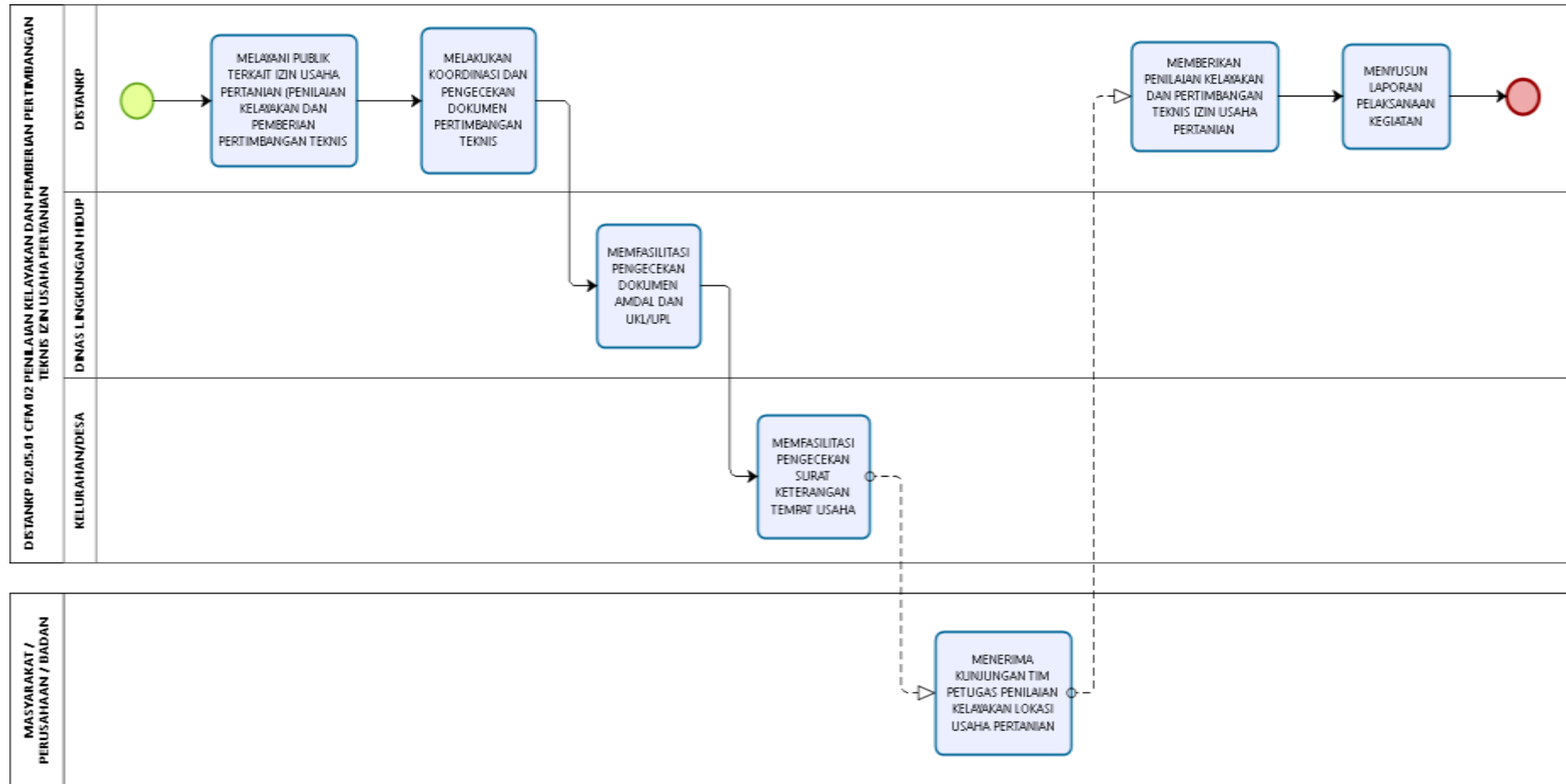


DISTANKP 02.05.01.04
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENERAPAN IZIN USAHA
PERTANIAN

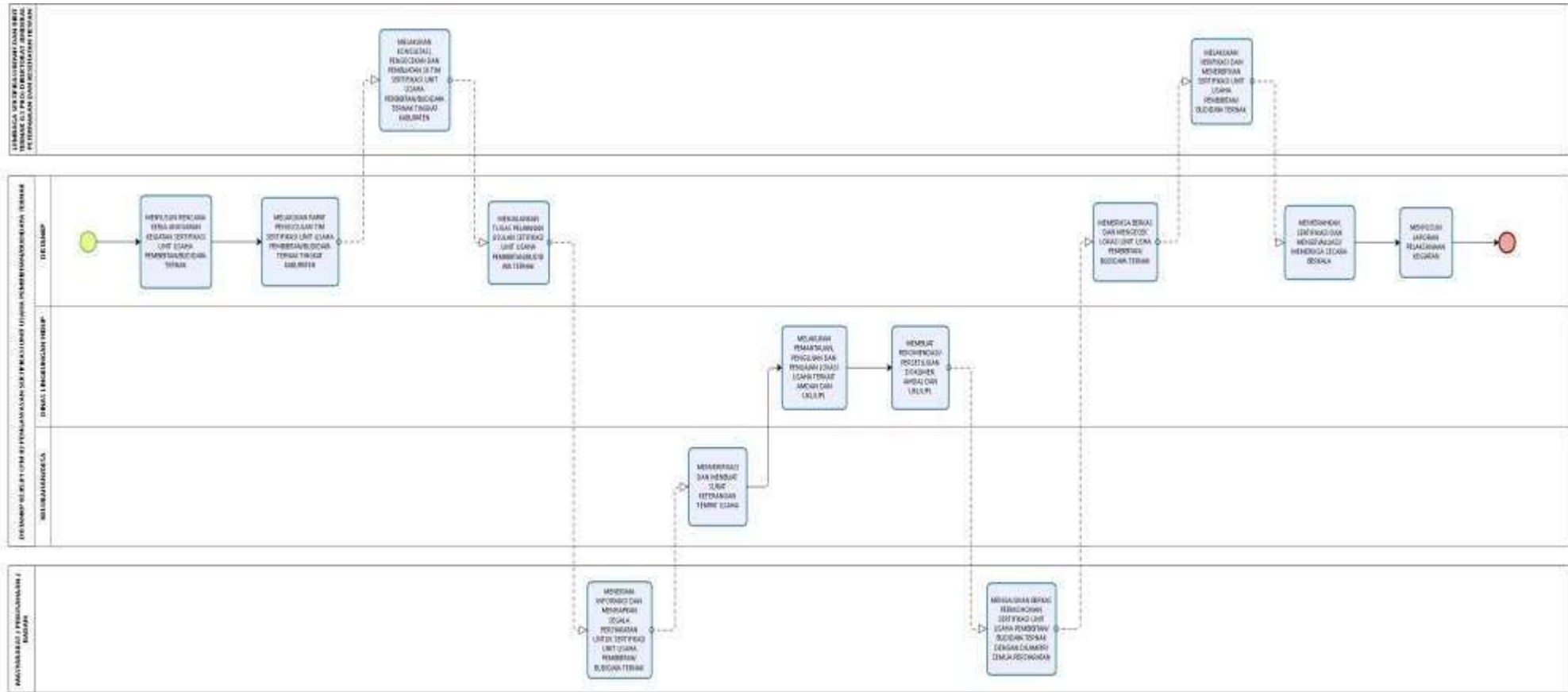
02.05.01CFM01



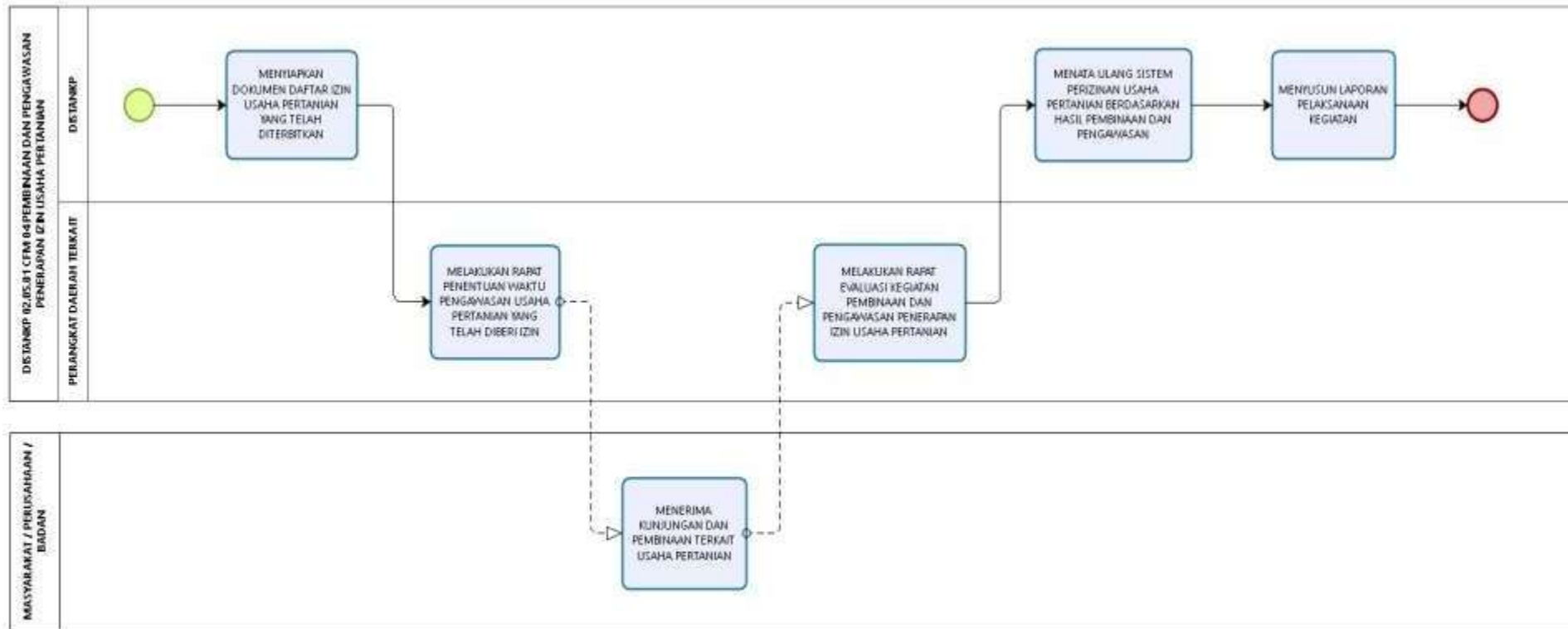
02.05.01CFM02



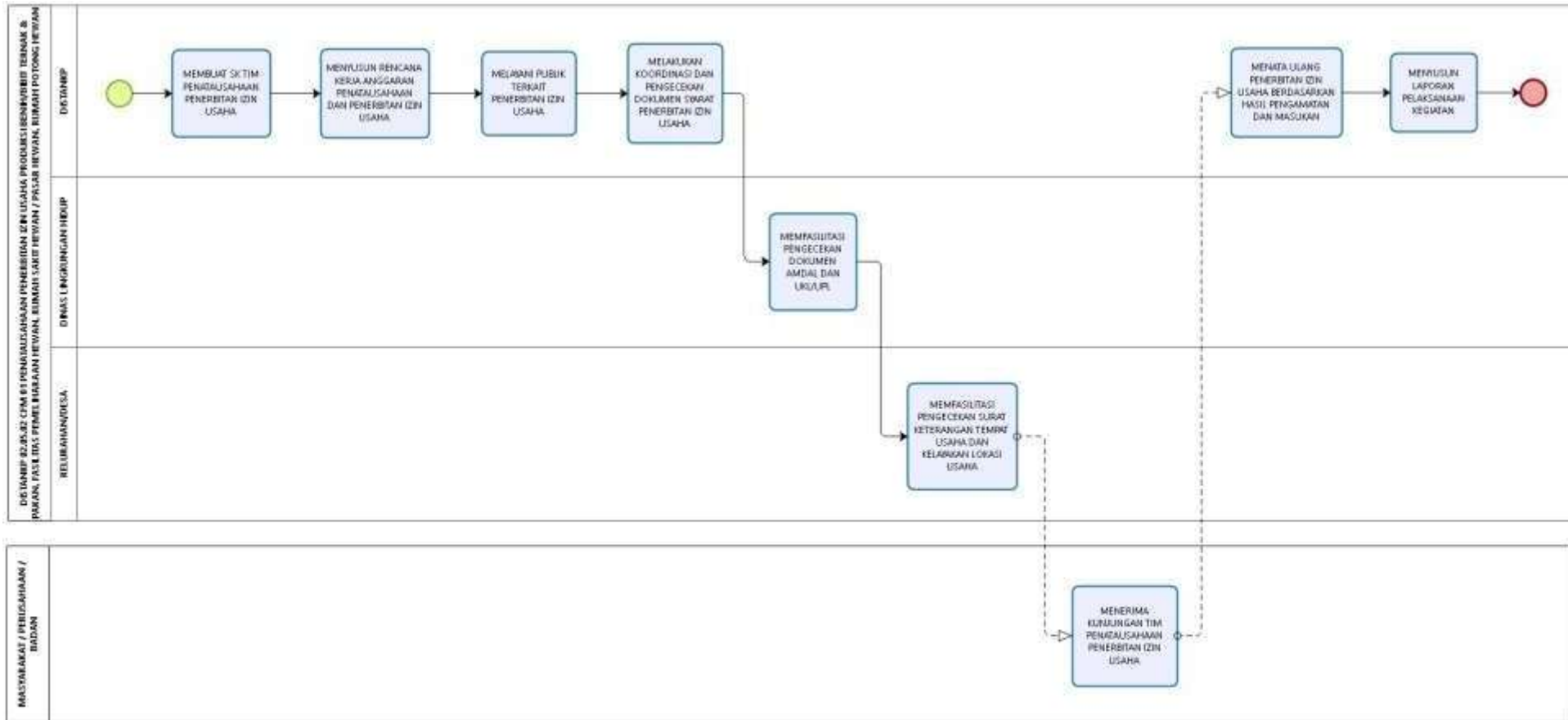
02.05.01CFM03



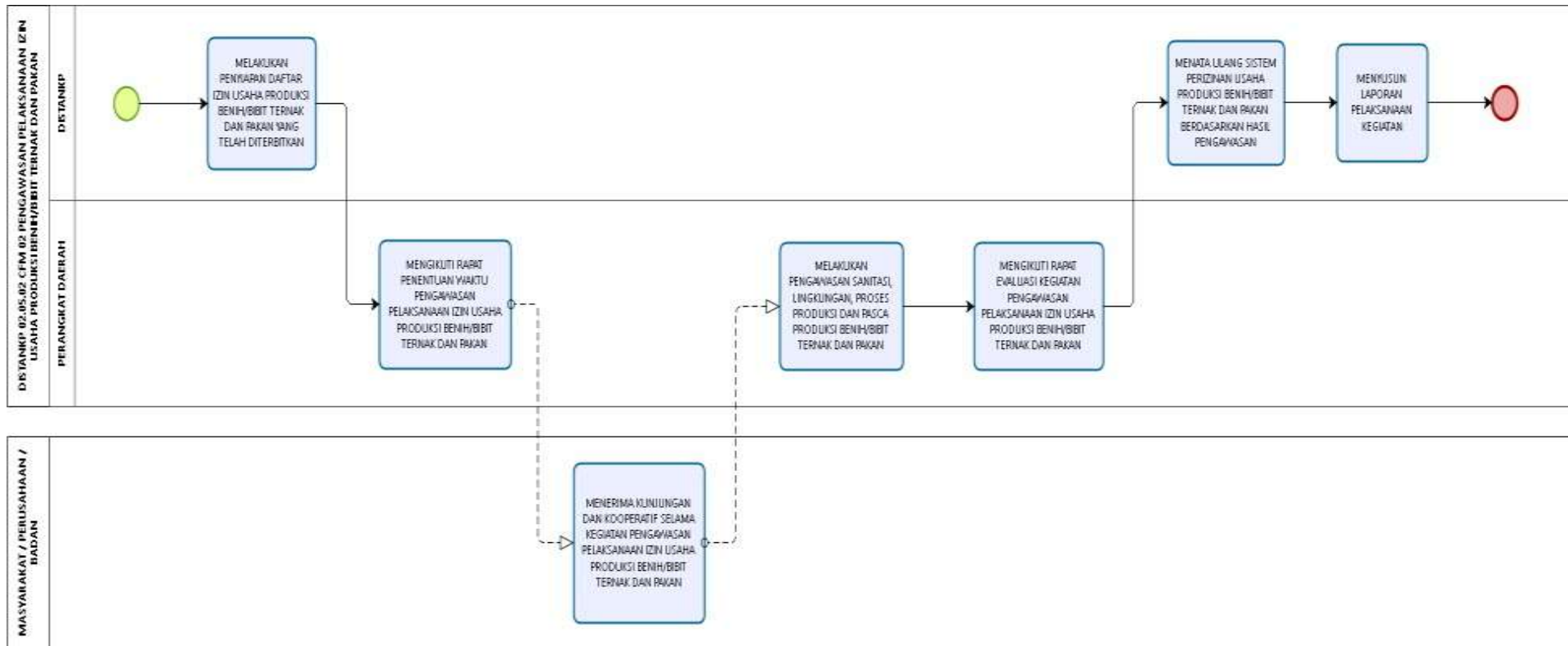
02.05.01CFM04



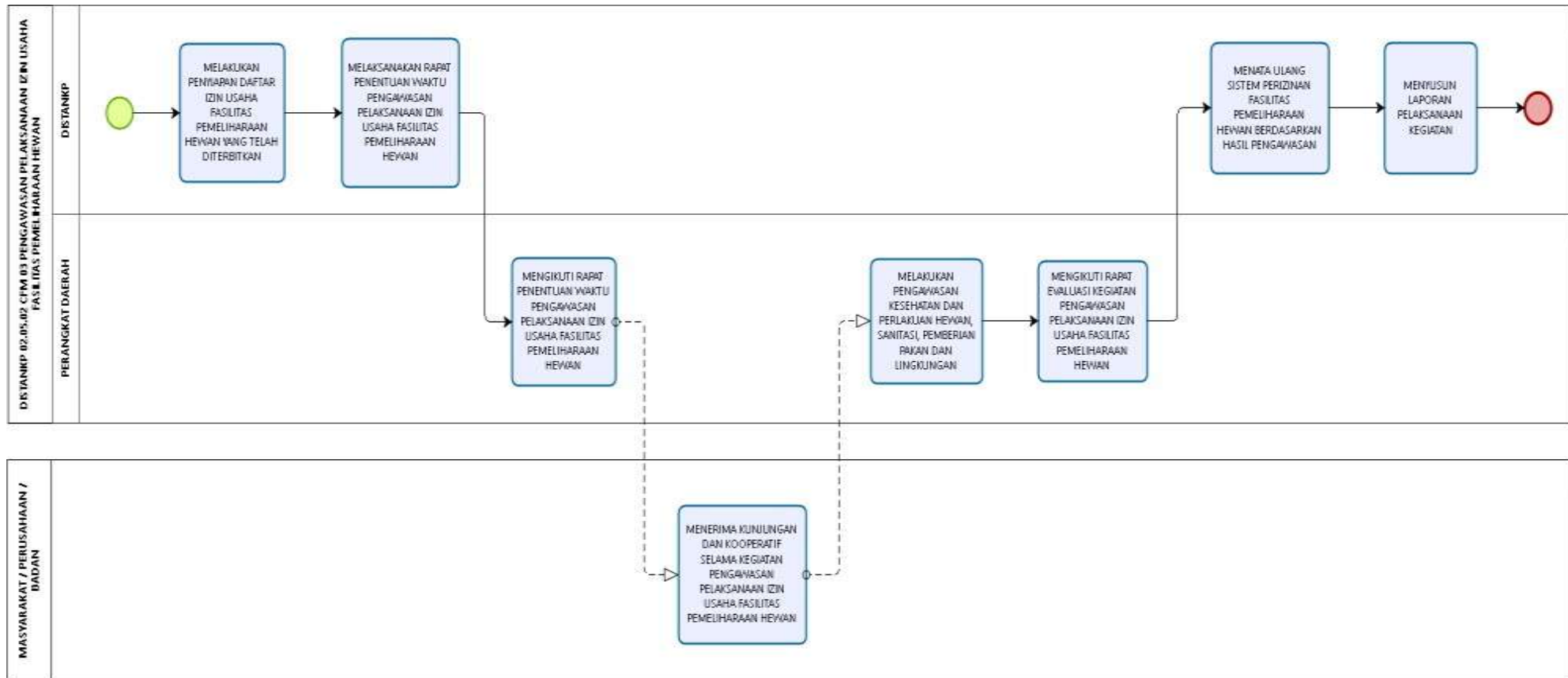
02.05.02 CFM 01



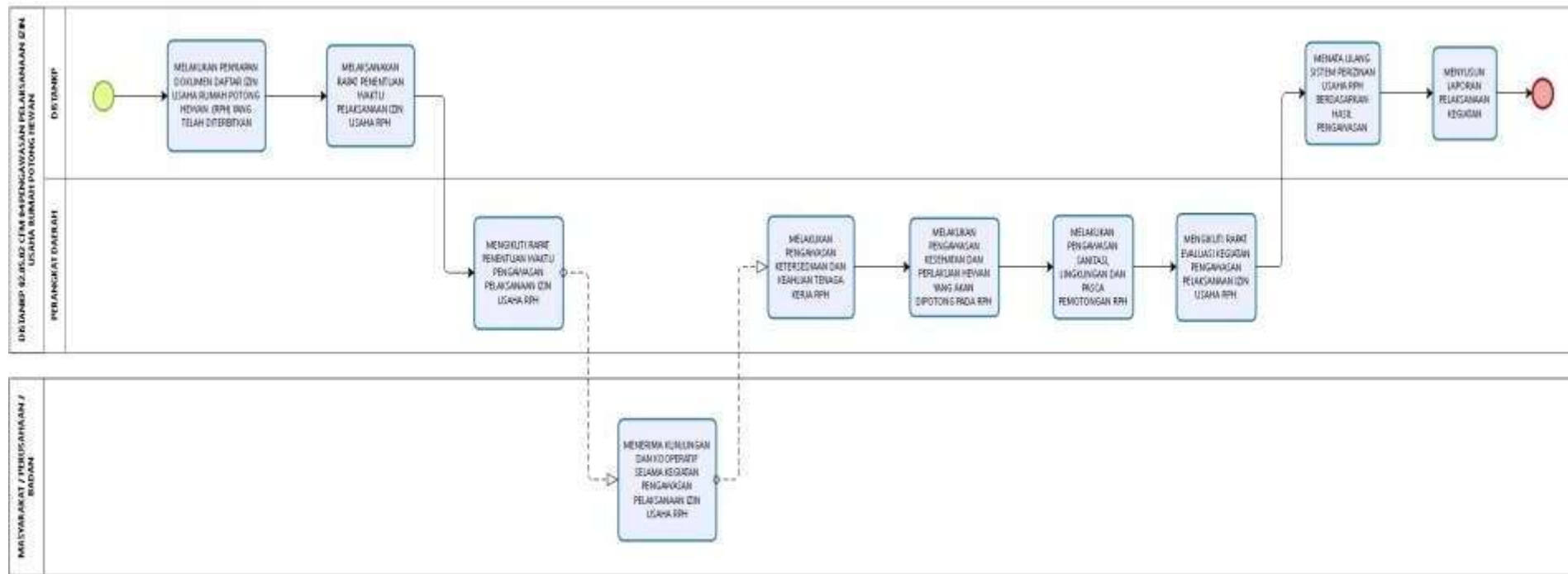
02.05.02 CFM 02



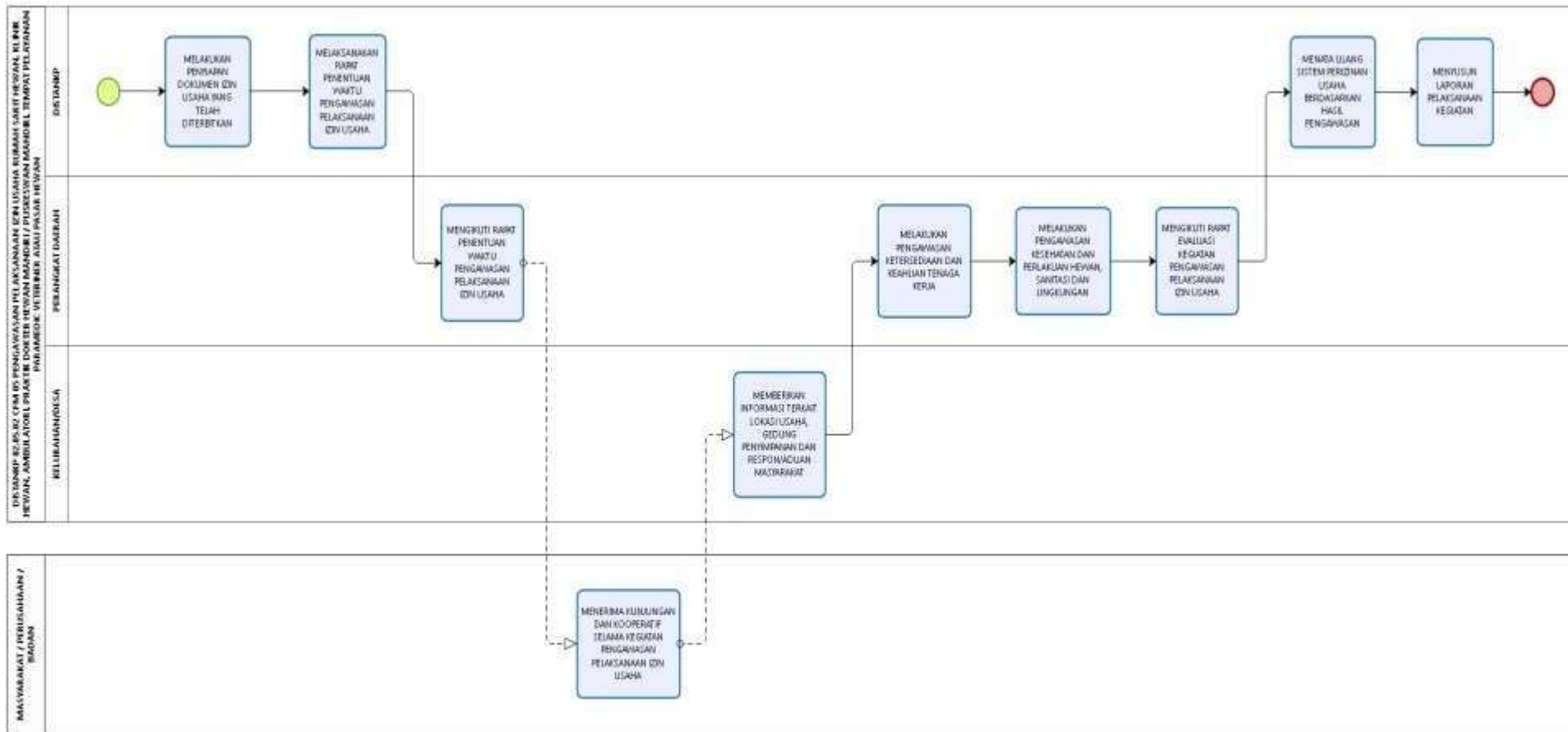
02.05.02 CFM 03



02.05.02 CFM 04



02.05.02 CFM 05



SUB KEG 02.05.03

DISTANKP 02.05.03 PENDAMPINGAN IZIN USAHA PENGE CER
(TOKO RETAL, SUBDISTRIBUTOR) OBAT HEWAN

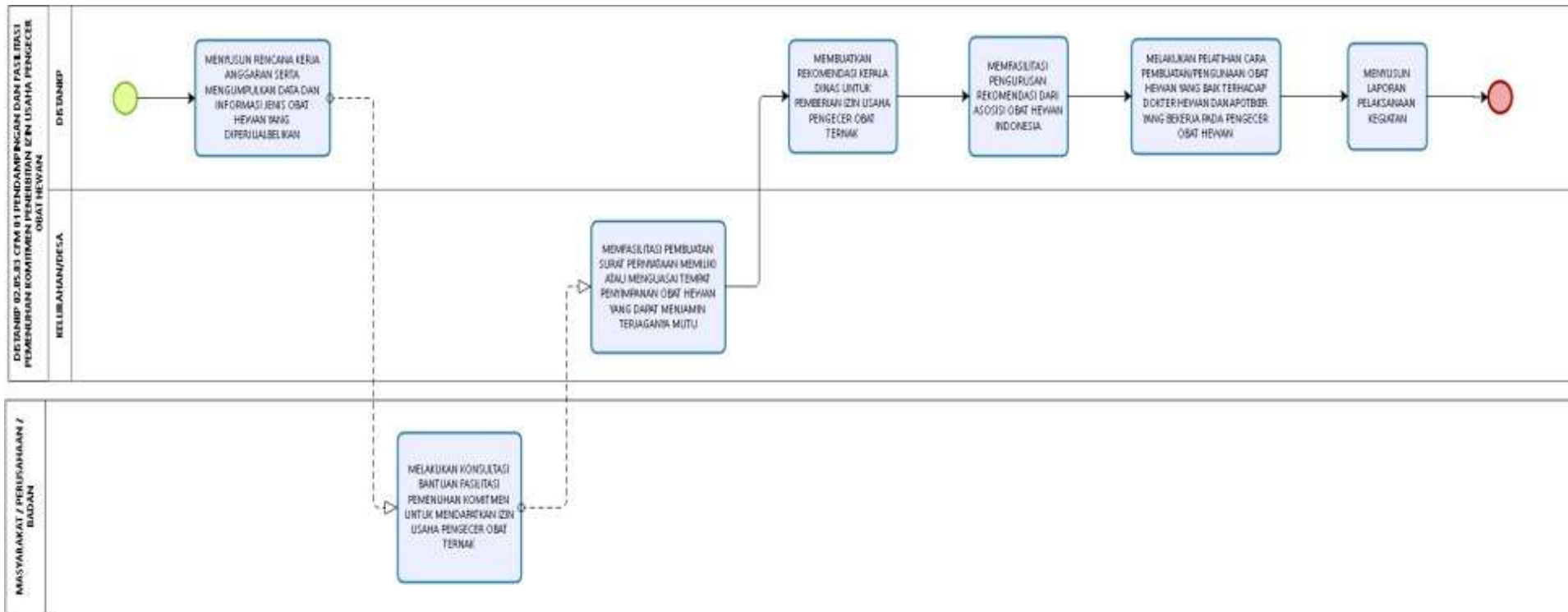


DISTANKP 02.05.03.01
PENDAMPINGAN DAN FASILITASI
PEMENUHAN KOMITMEN
PENERBITAN IZIN USAHA
PENGE CER OBAT HEWAN

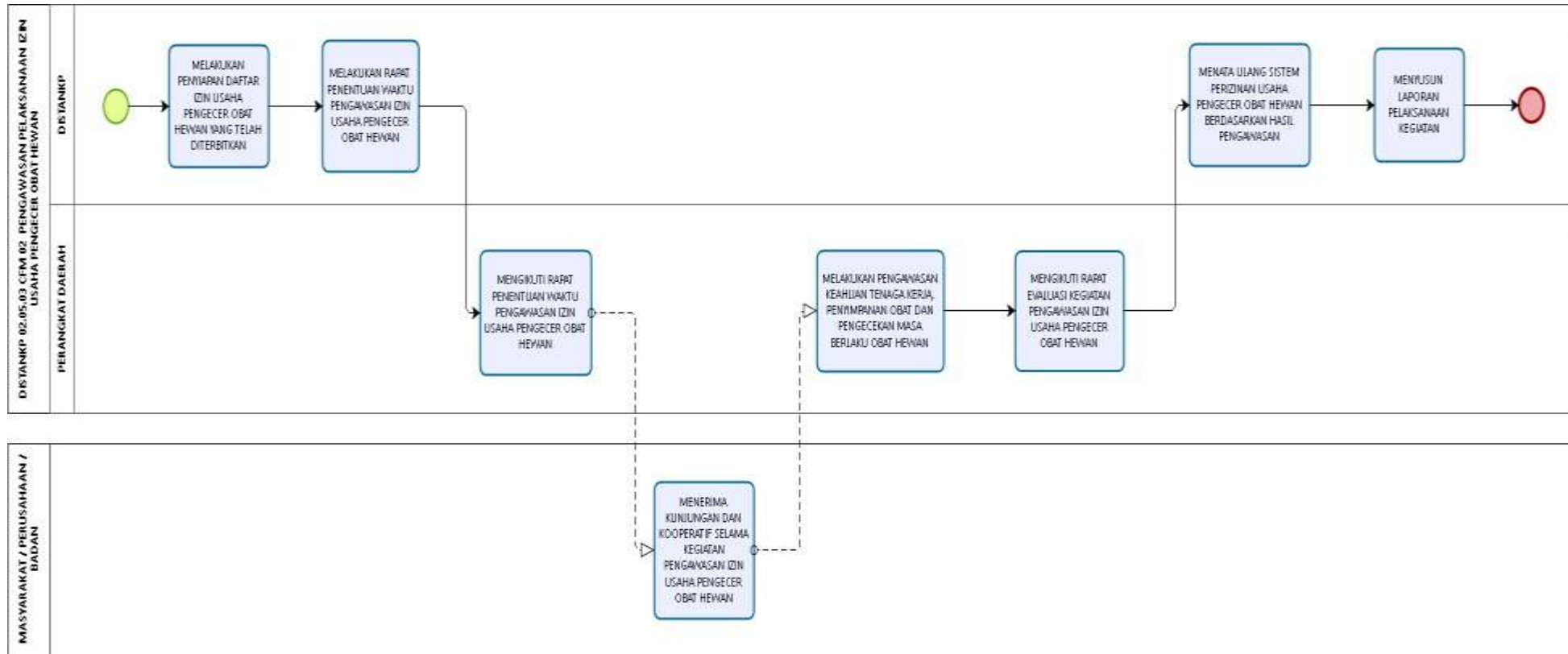


DISTANKP 02.05.03.02
PENGAWASAN PELAKSANAAN
IZIN USAHA PENGE CER OBAT
HEWAN

02.05.03CFM01



02.05.03CFM02



KEG 02..06

DISTANKP 02.06 PENYULUHAN PERTANIAN



DISTANKP 02.06.01
PELAKSANAAN PENYULUHAN
PERTANIAN

SUB KEG 02.06.01

DISTANKP 02.06.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN



DISTANKP 02.06.01.01
PENINGKATAN KAPASITAS
KEL;EMBAGAAN PENYULUHAN
PERTANIAN DI KEC DAN DESA



DISTANKP 02.06.01.02
PENGEMBANGAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PETANI DI KEC
DAN DESA



DISTANKP 02.06.01.03
PENYEDIAAN DAN
PEMANFAATAN SARANA DAN
PRASARANA PENYULUHAN
PERTANIAN



DISTANKP 02.06.01.04
PEMBENTUKAN DAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH
LAPANG KLPTANI TINGKAT
KAB/KOTA



DISTANKP 02.06.01.05
PENYEDIAAN & PENINGKATAN
KAPASITAS PENYULUH
PERTANIAN

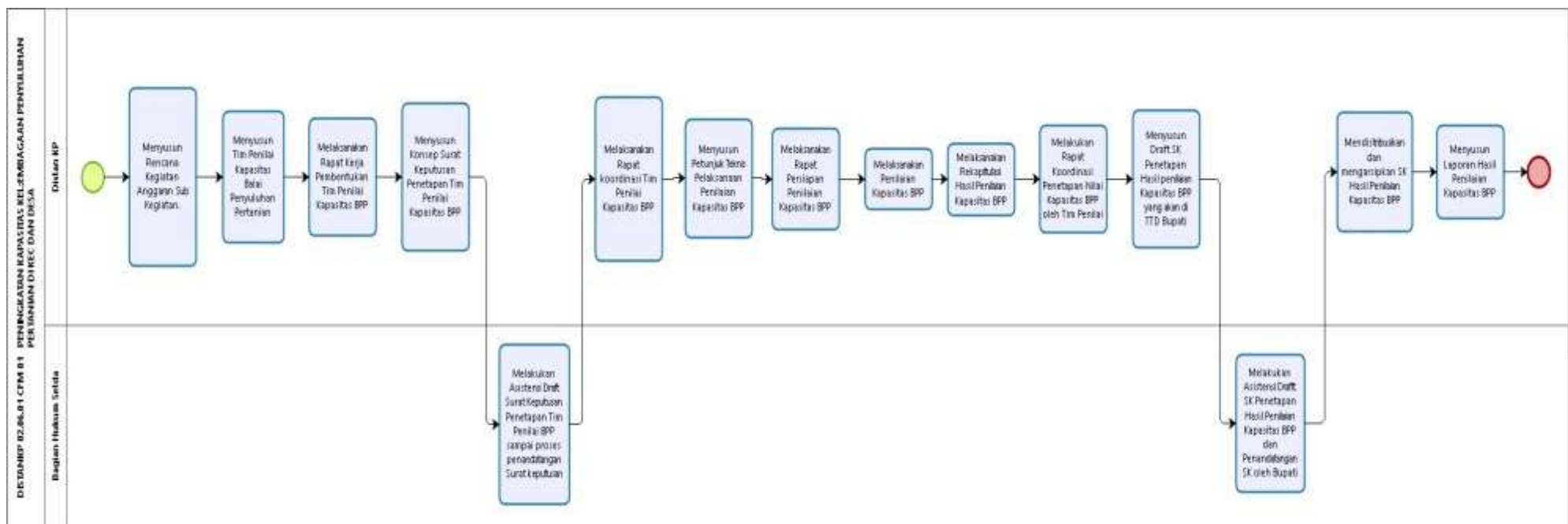


DISTANKP 02.06.01.06
PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENYULUH PERTANIAN
DITINGKAT KAB/KOTA

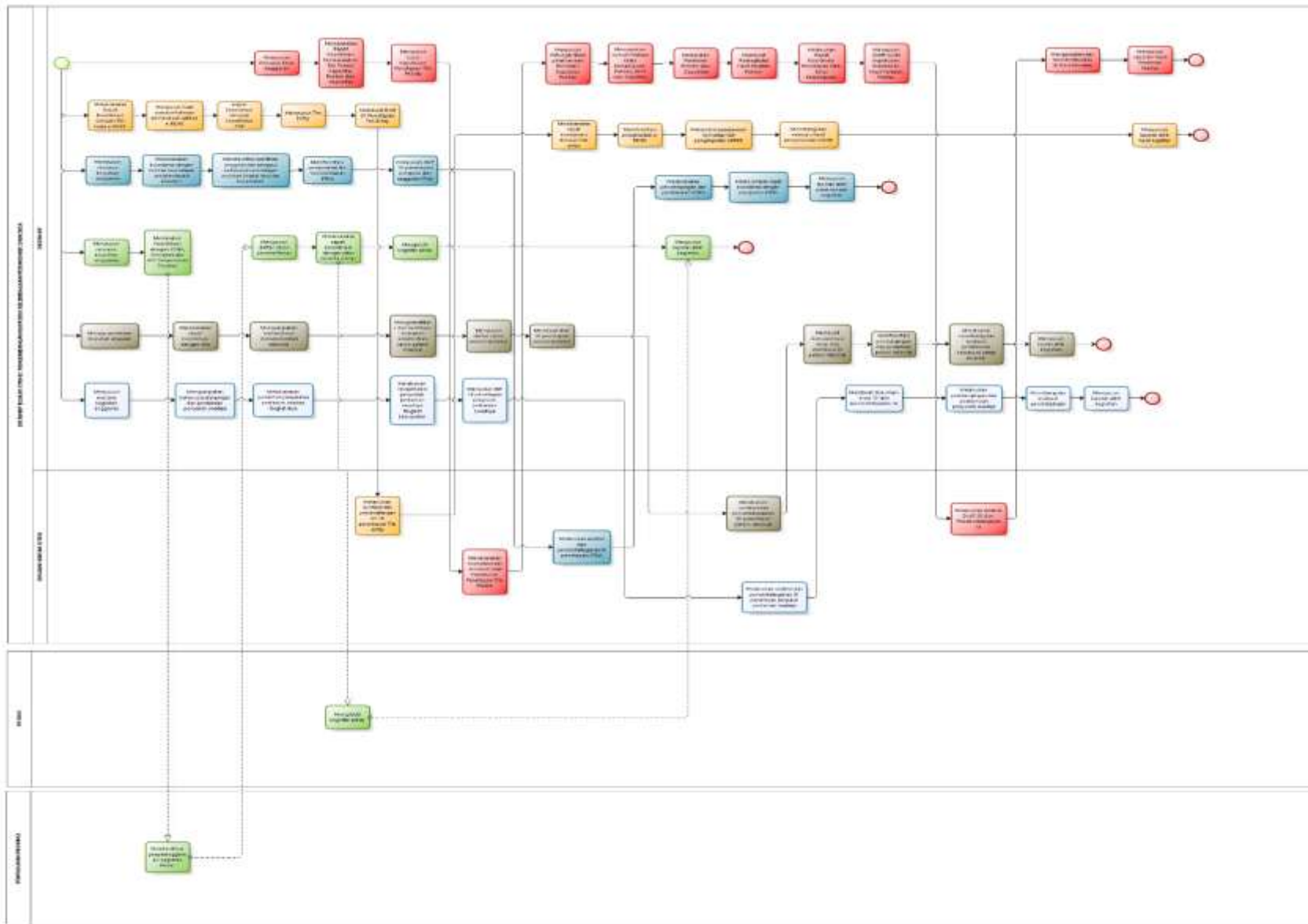


DISTANKP 02.06.01.07
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
EKONOMI PETANI

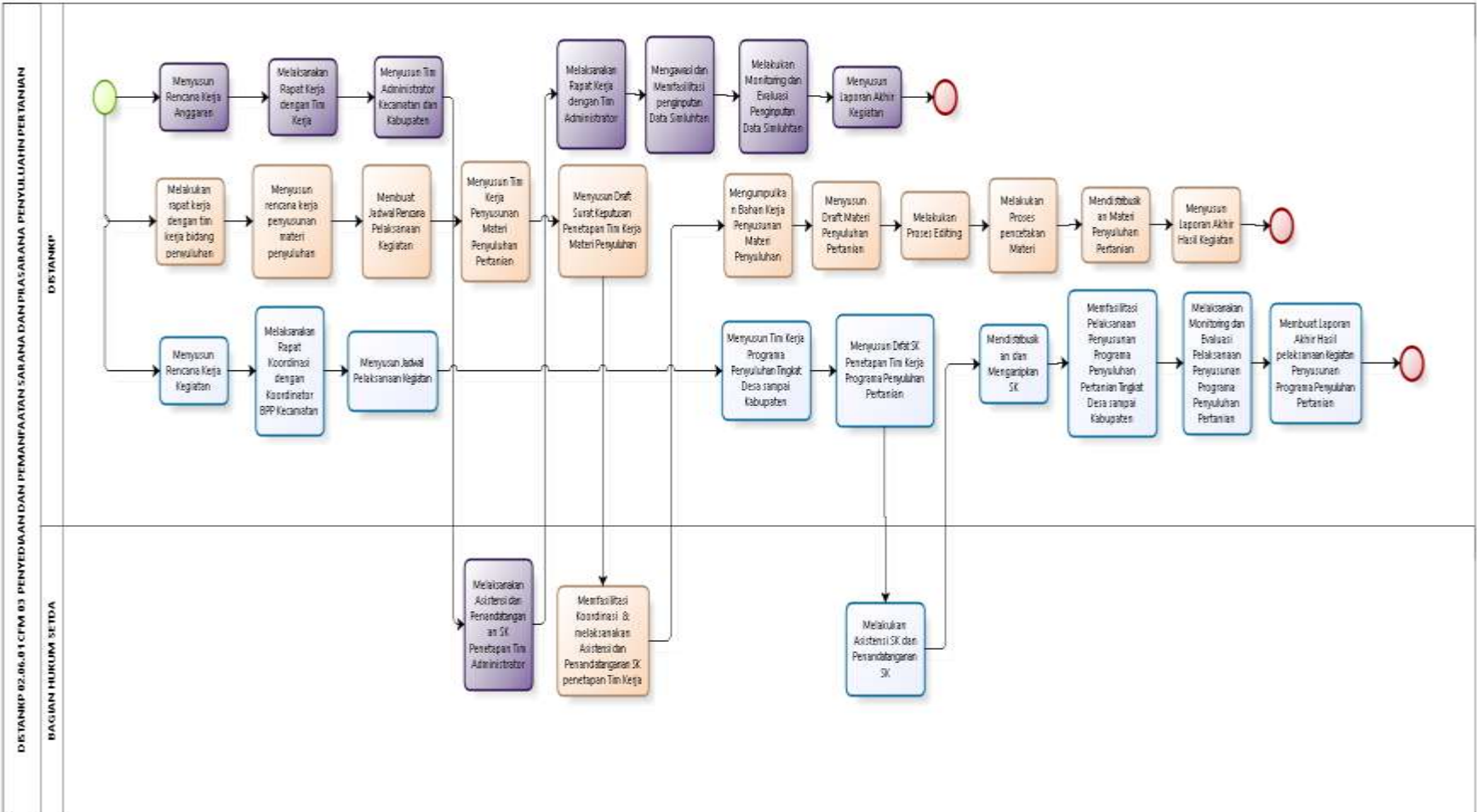
02.06.01CFM01



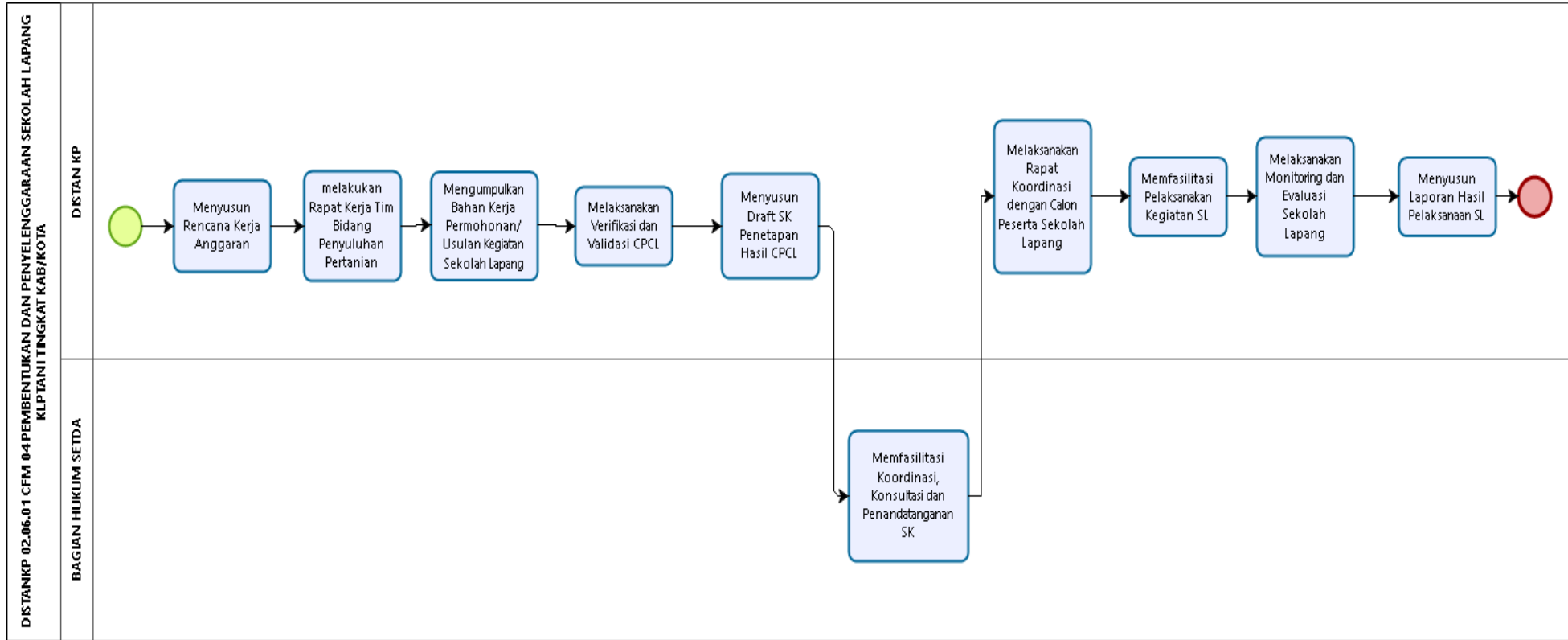
02.06.01CFM02

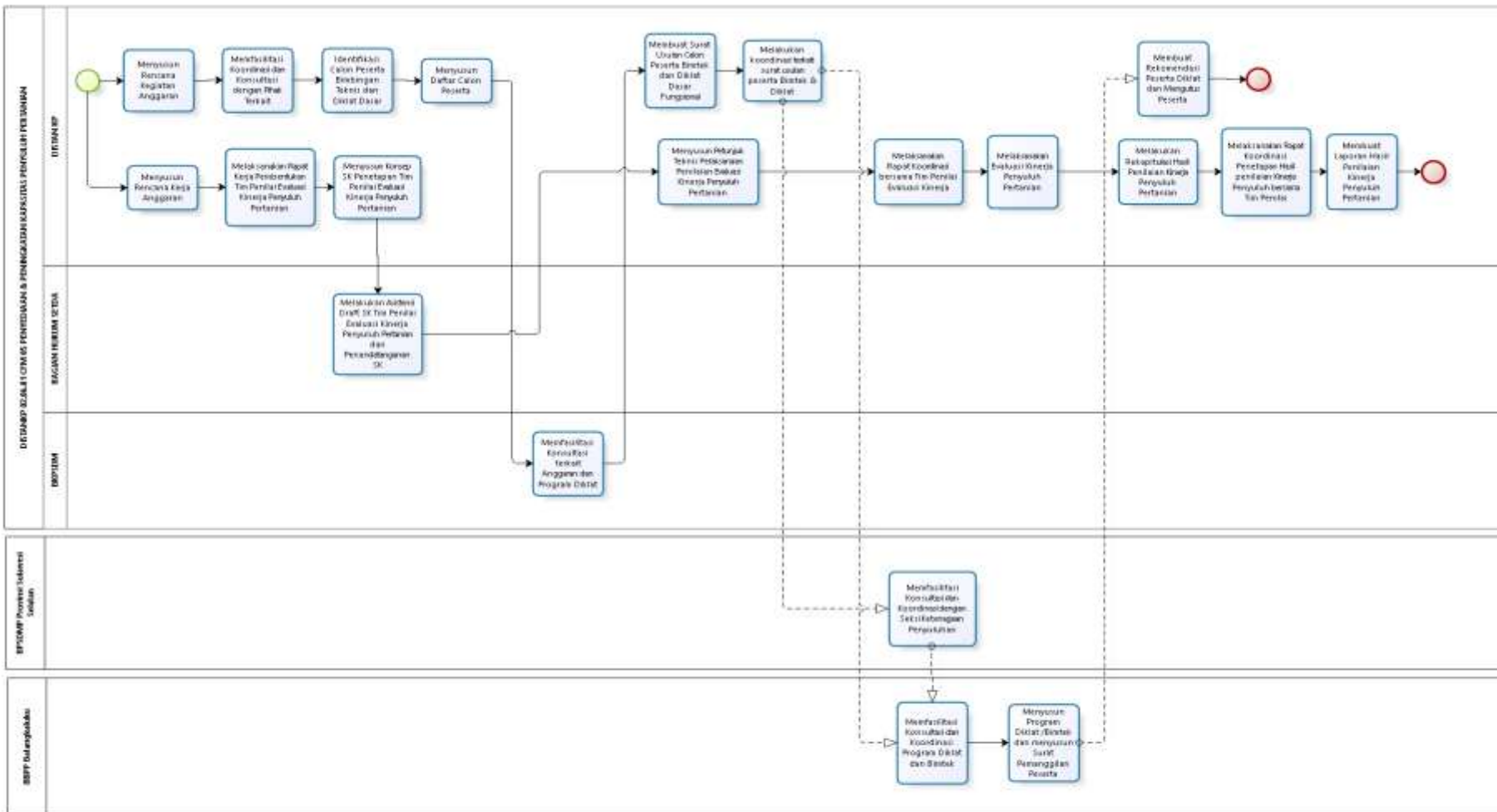


02.06.01CFM03

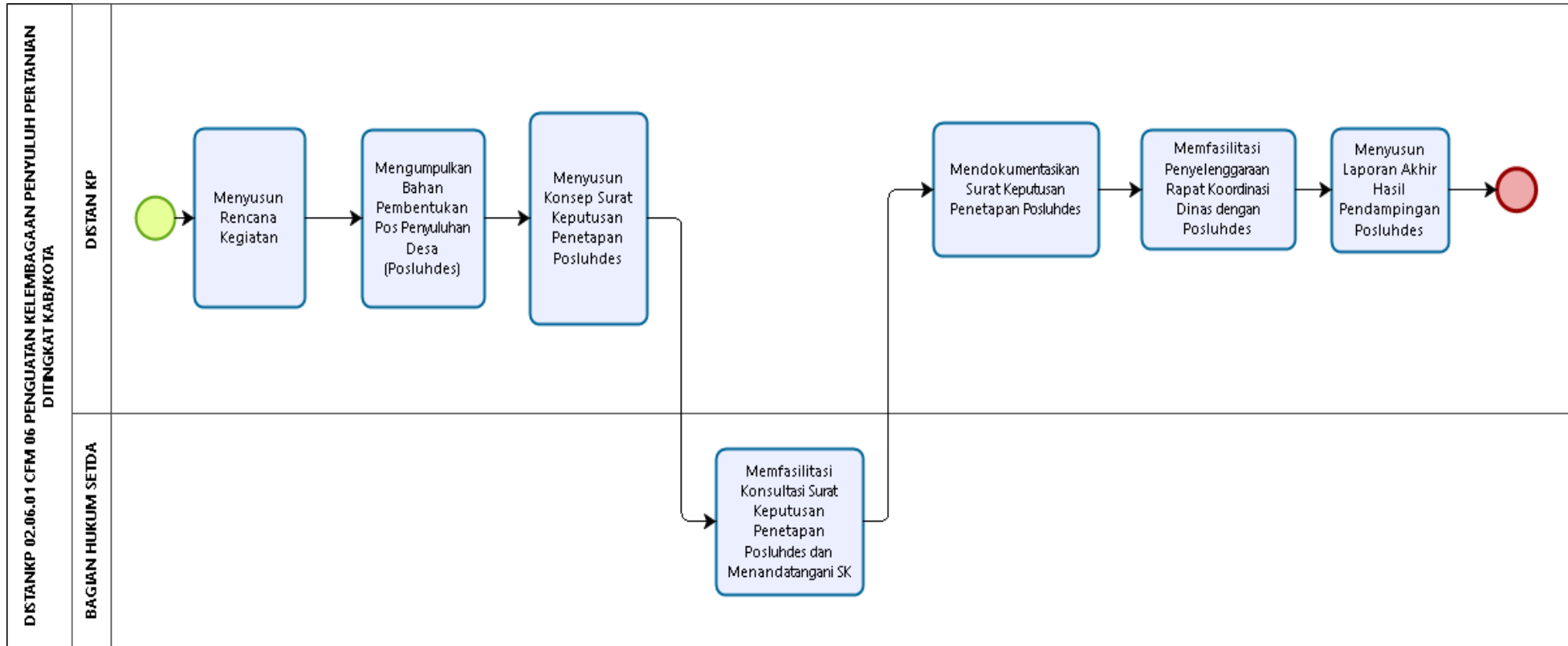


02.06.01CFM04

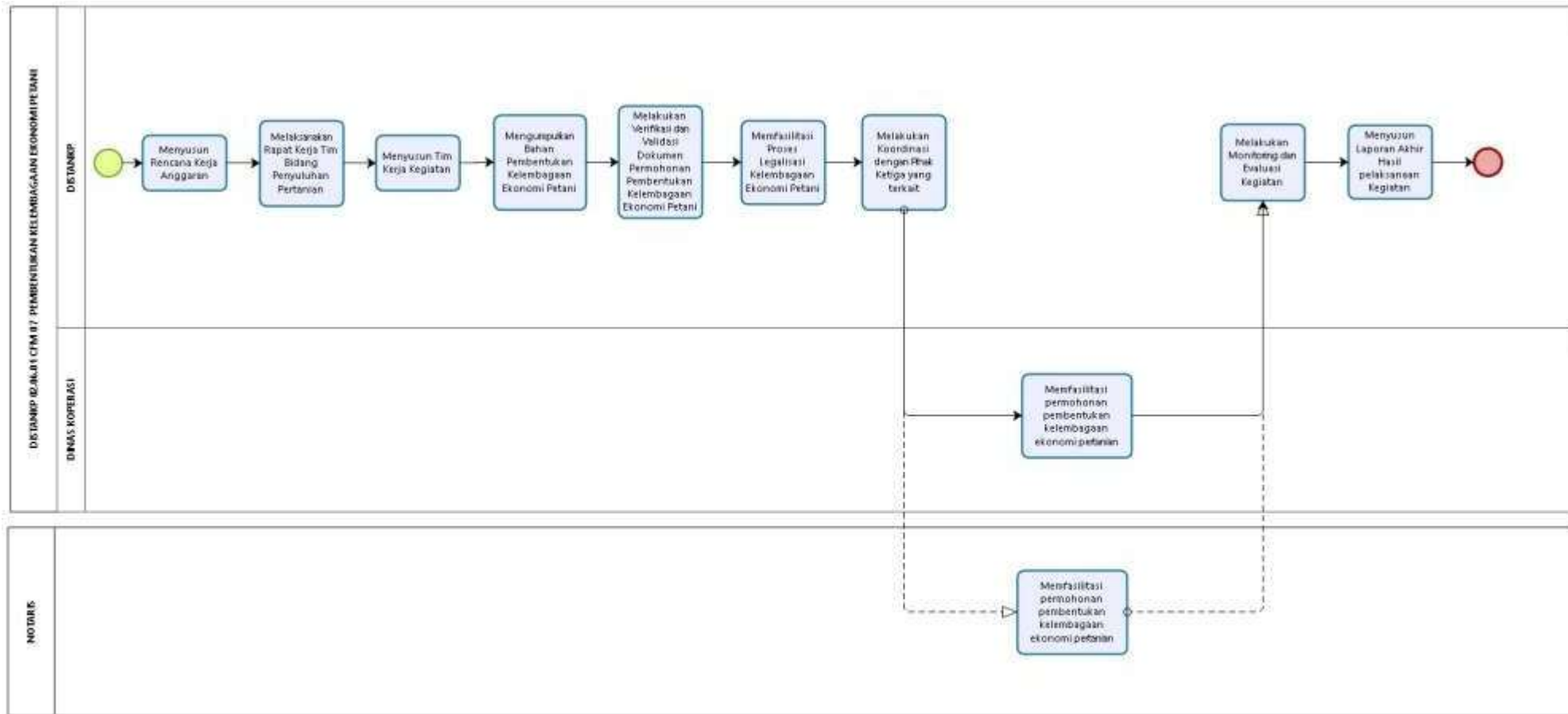




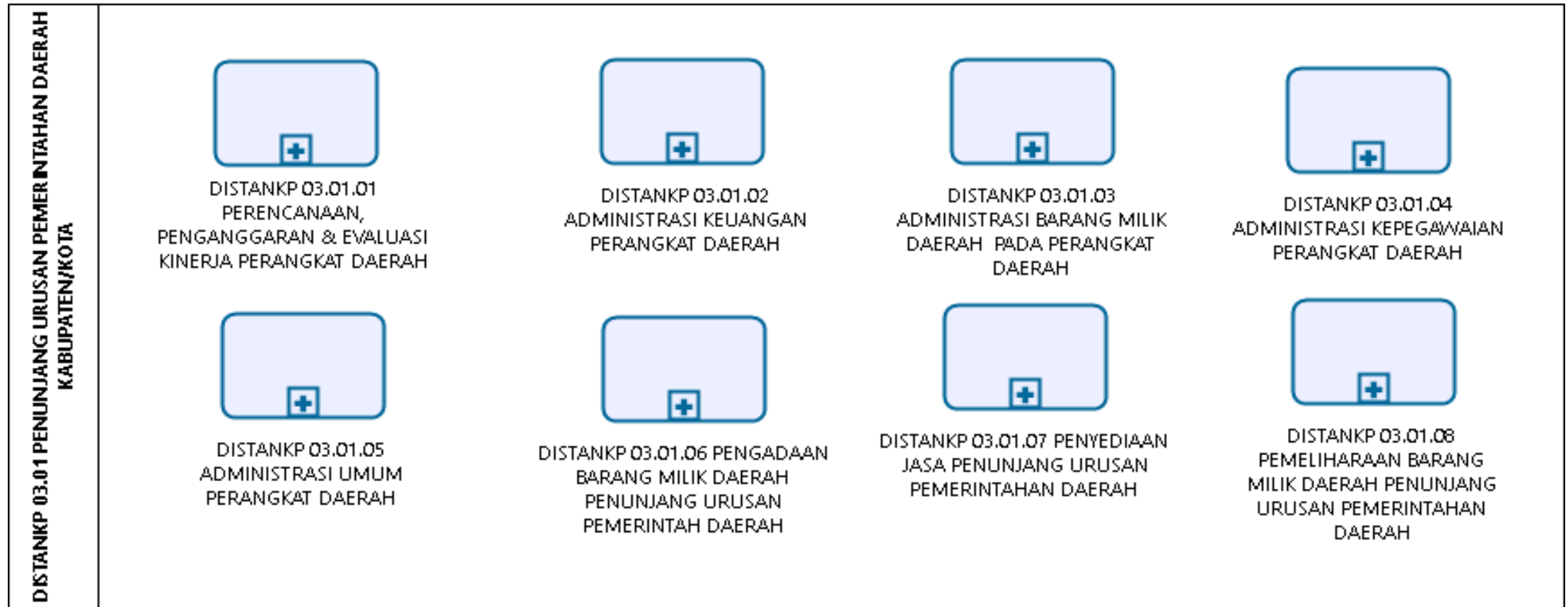
02.06.01CFM06



02.06.01CFM07



KEG03.01

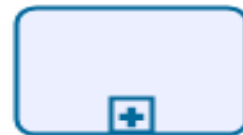


SUBKEG03.01.01

DISTANKP 03.0.1.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH



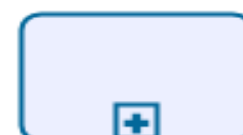
DISTANKP 03.01.01.01
PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH



DISTANKP 03.01.01.02
KOORDINASI & PENYUSUNAN
DOKUMEN RKA-SKPD



DISTANKP 03.01.01.03
KOORDINASI &
PENYUSUNAN DOKUMEN
PERUBAHAN RKA-SKPD



DISTANKP 03.01.01.04
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
DPA-SKPD



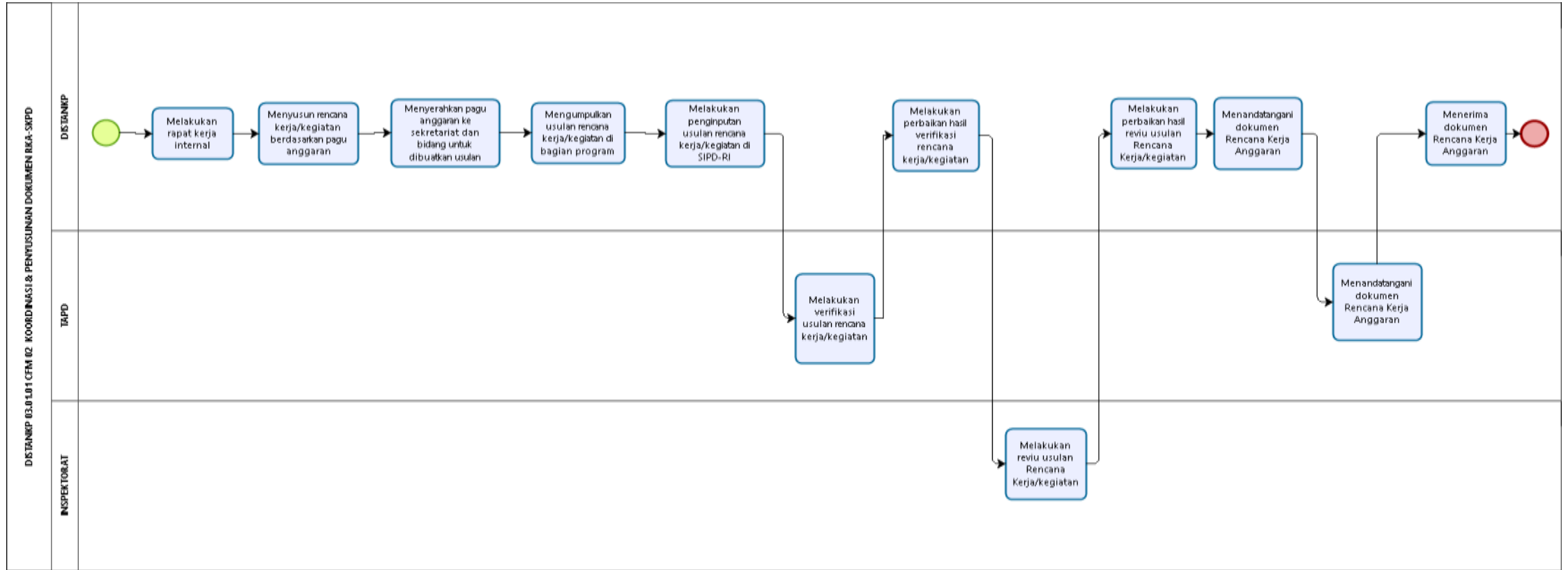
DISTANKP 03.01.01.05
KOORDINASI DAN
PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA
-SKPD



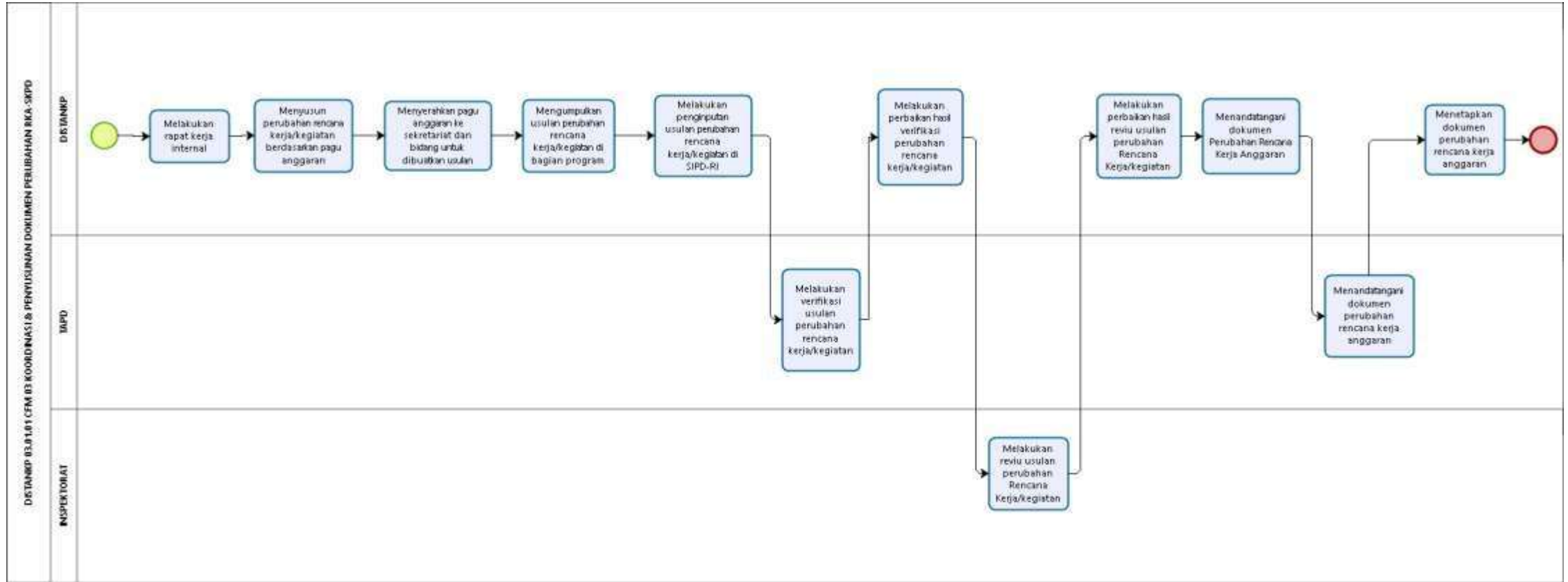
DISTANKP 03.01.01.06 KORDINASI
& PENYUSUNAN LAPORAN
CAPAIAN KINERJA & IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD



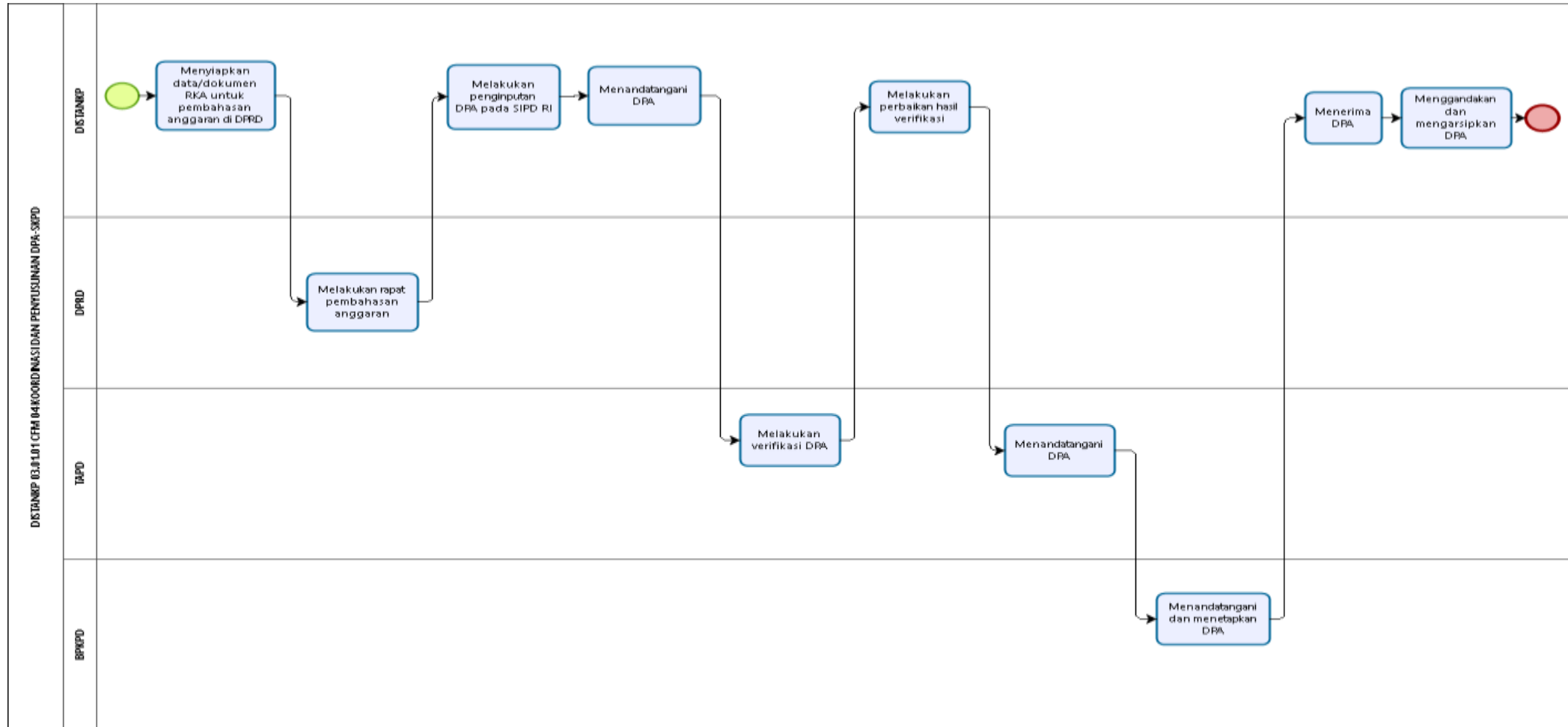
DISTANKP 03.01.01.07 EVALUASI
KINERJA PERANGKA DAERAH



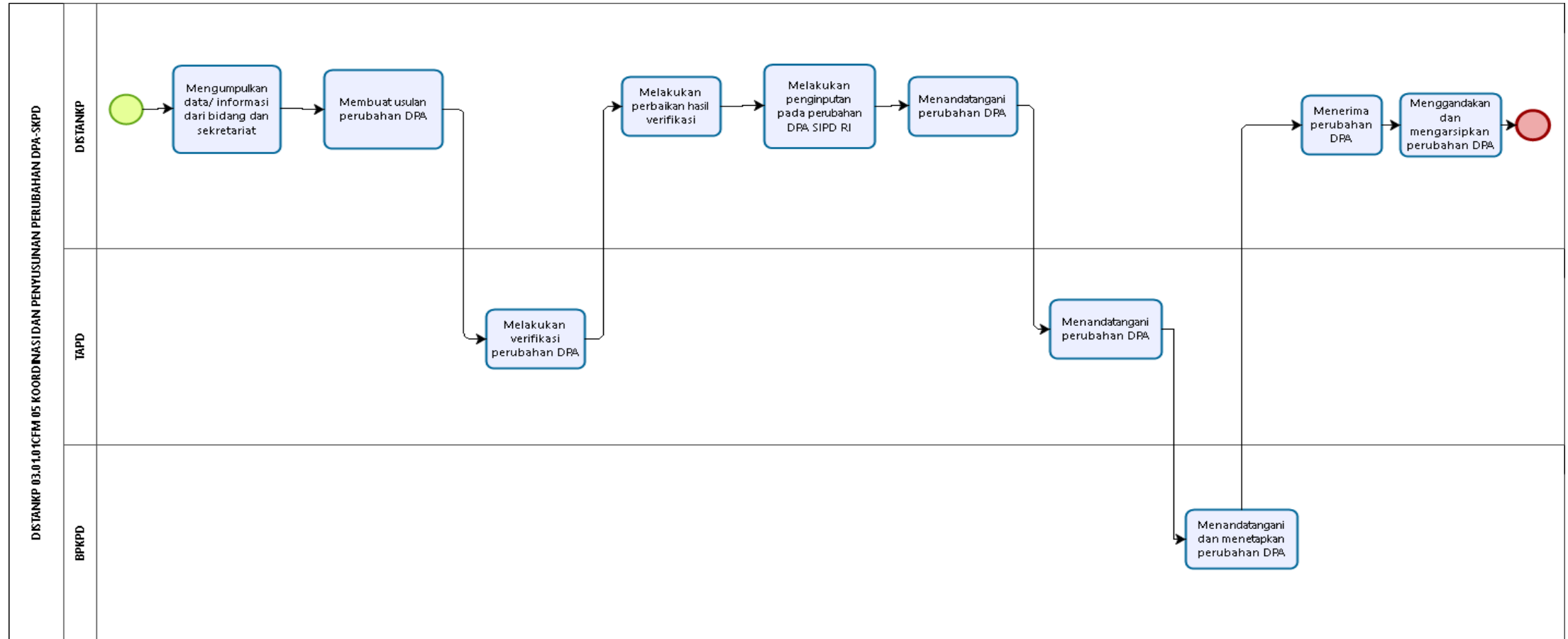
03.01.01.03



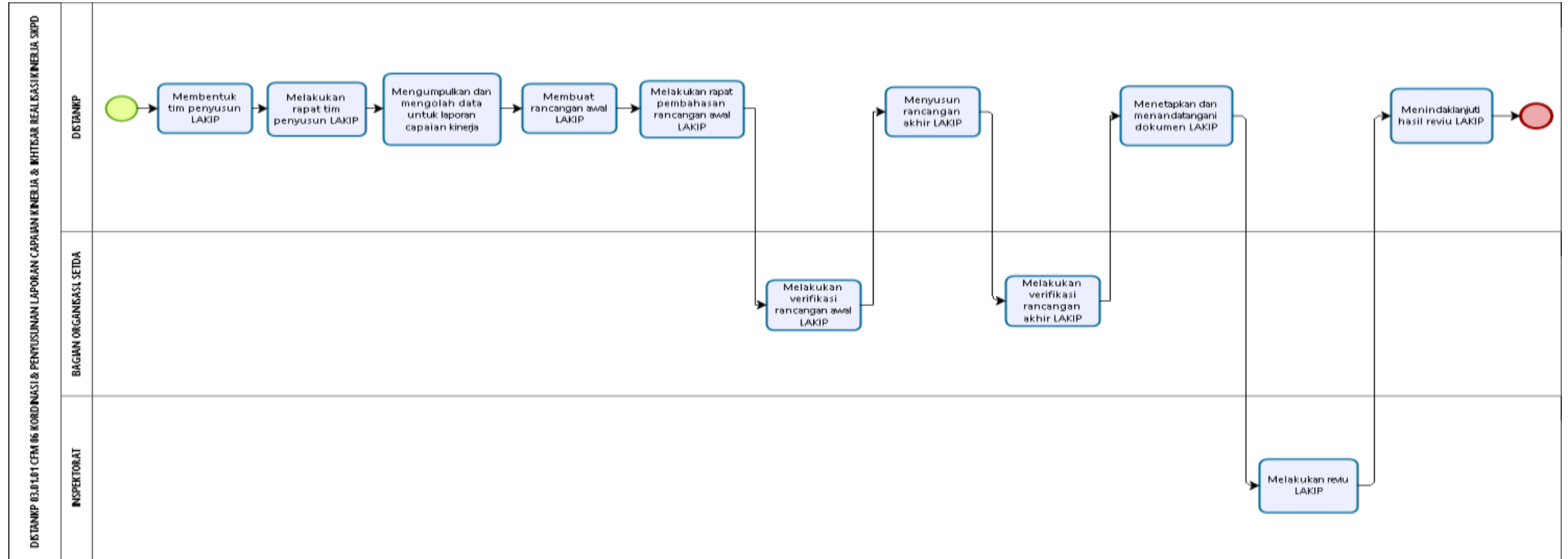
03.01.01.04



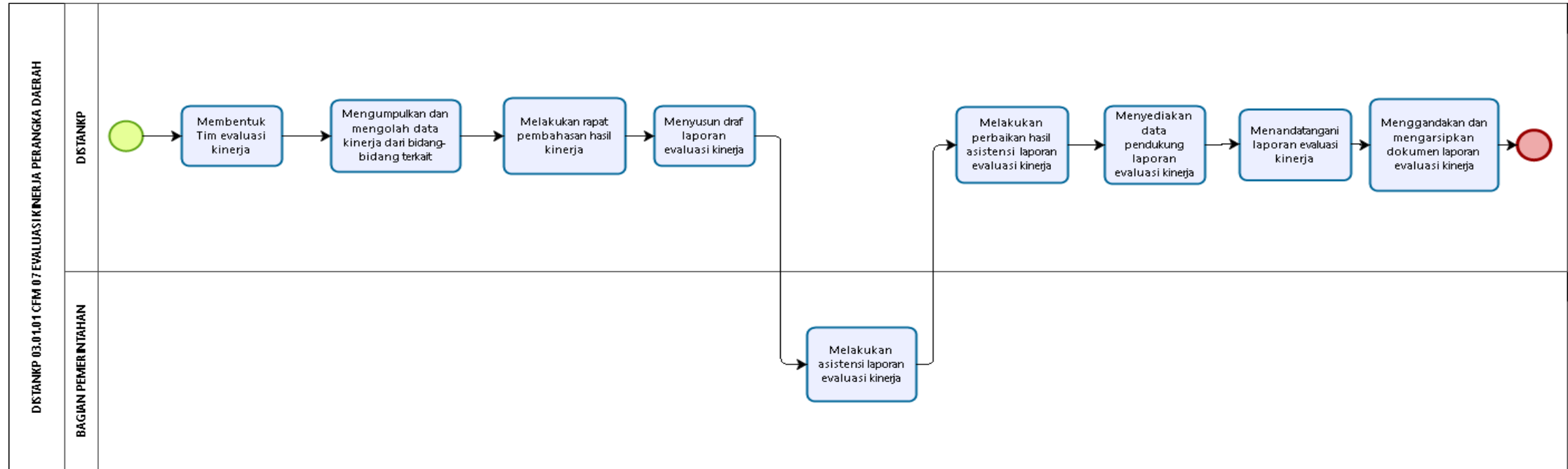
03.01.01.05



03.01.01.06

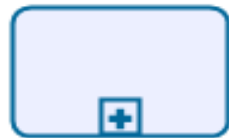


03.01.01.07



SUBKEG03.01.02

DISTANKP 03.01.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH



DISTANKP 03.01.02.01
PENYEDIAAN GAJI DAN
TUNJANGAN ASN



DISTANKP 03.01.02.02
PENYEDIAAN ADMINISTRASI
PELAKSANAAN TUGAS ASN



DISTANKP 03.01.02.03
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
& PENGUJIAN/VERIFIKASI
KEUANGAN SKPD



DISTANKP 03.01.02.04
KOORDINASI & PELAKSANAAN
AKUNTANSI SKPD



DISTANKP 03.01.02.05
KOORDINASI & PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN SKPD



DISTANKP 03.01.02.06
PENGELOAAN & PENYIAPAN
BAHAN TANGGAPAN
PEMERIKSAAN

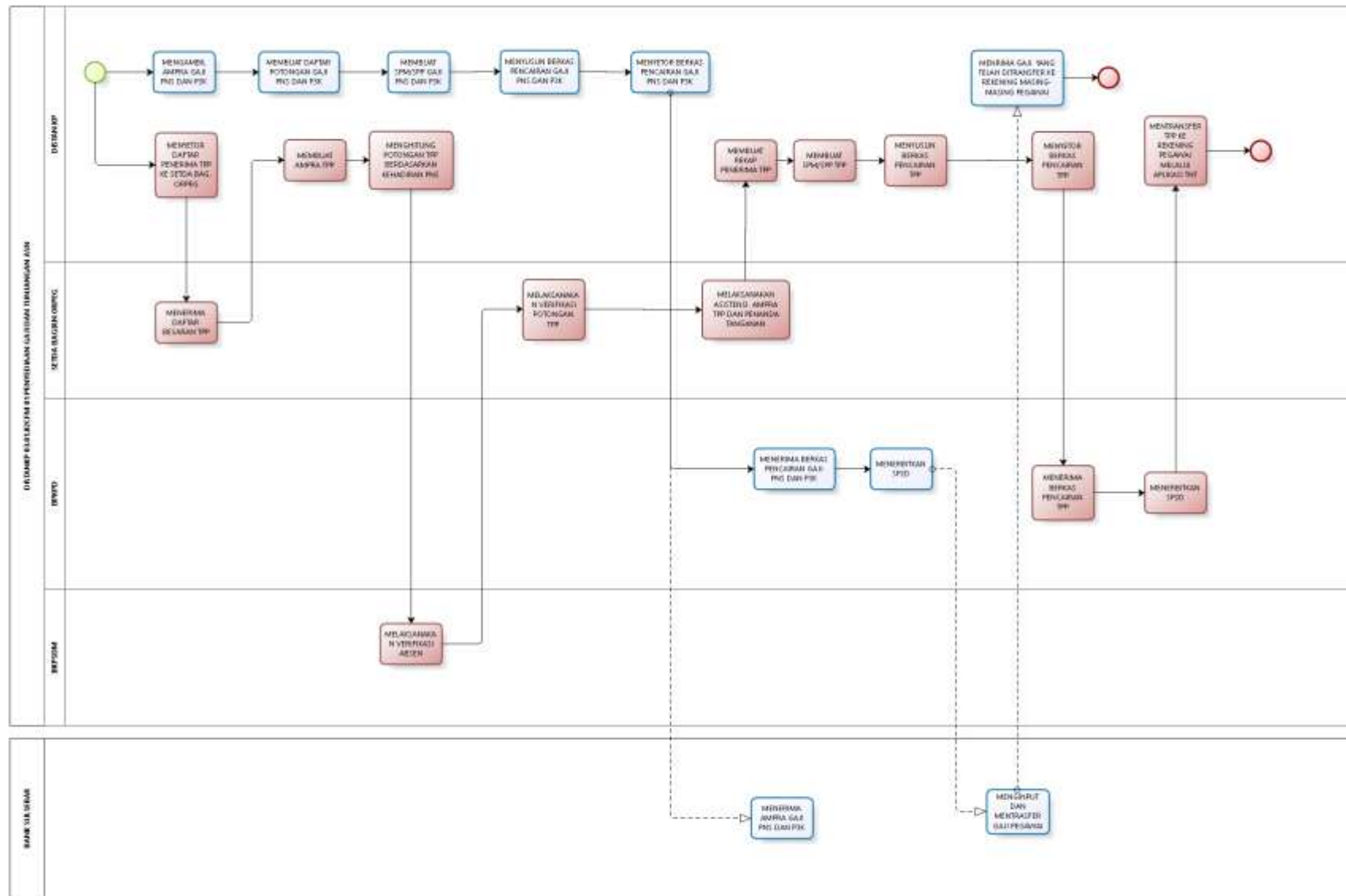


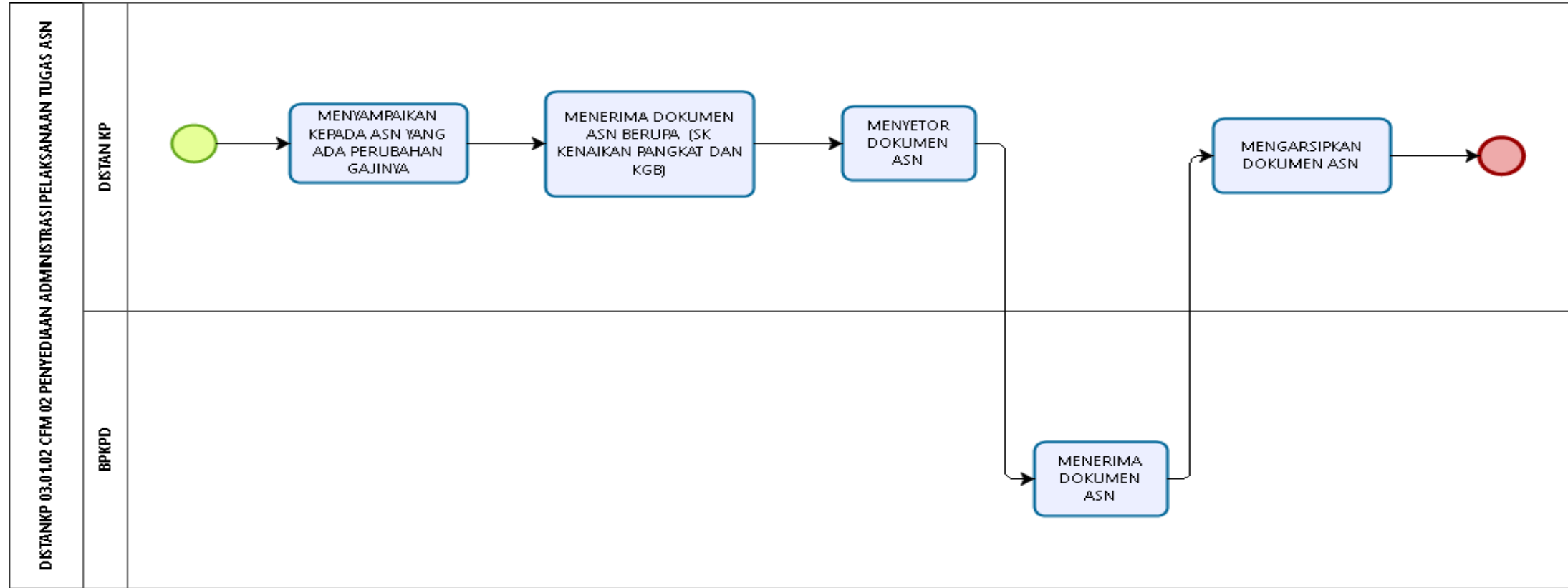
DISTANKP 03.01.02.07
KOORDINASI & PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULANAN/SEMEST
ERAN SKPD



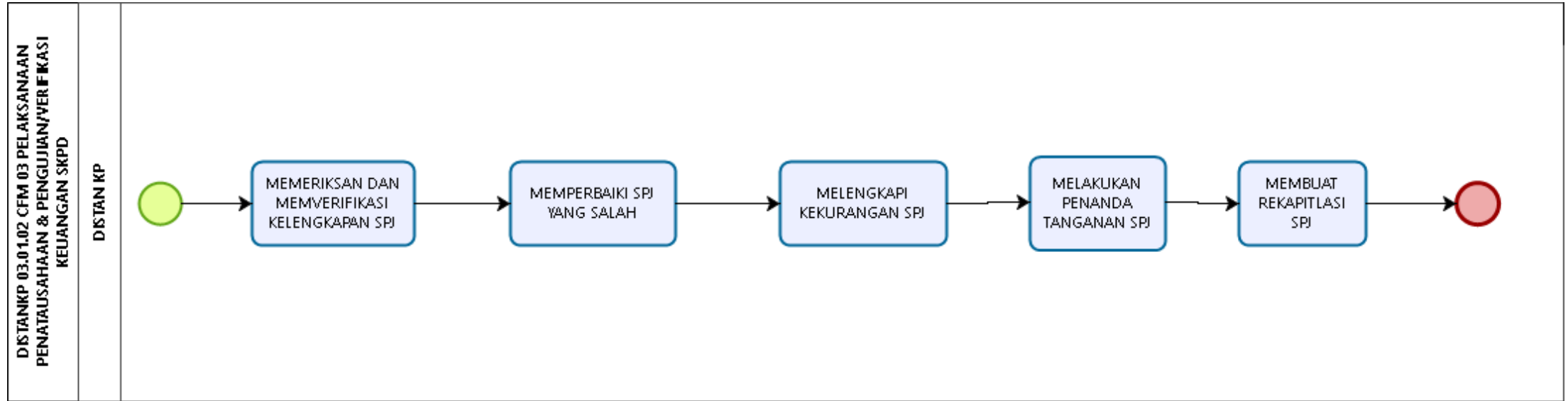
DISTANKP 03.01.02.08
PENYUSUNAN PELAPORAN &
ANALISIS PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN

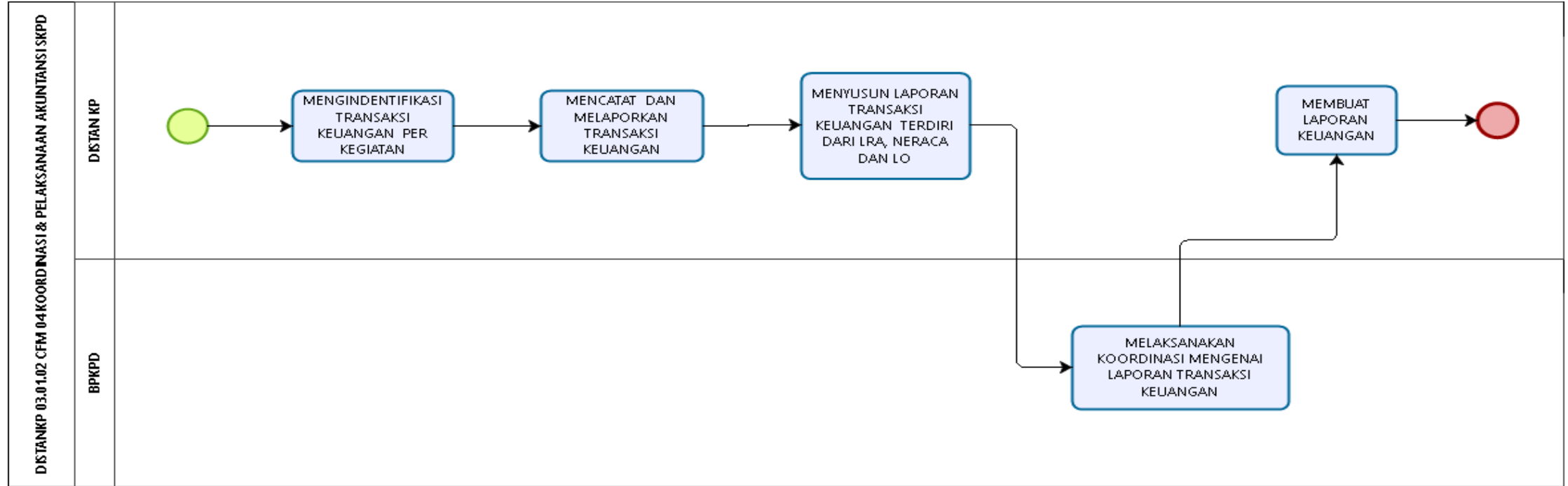
03.01.02.01



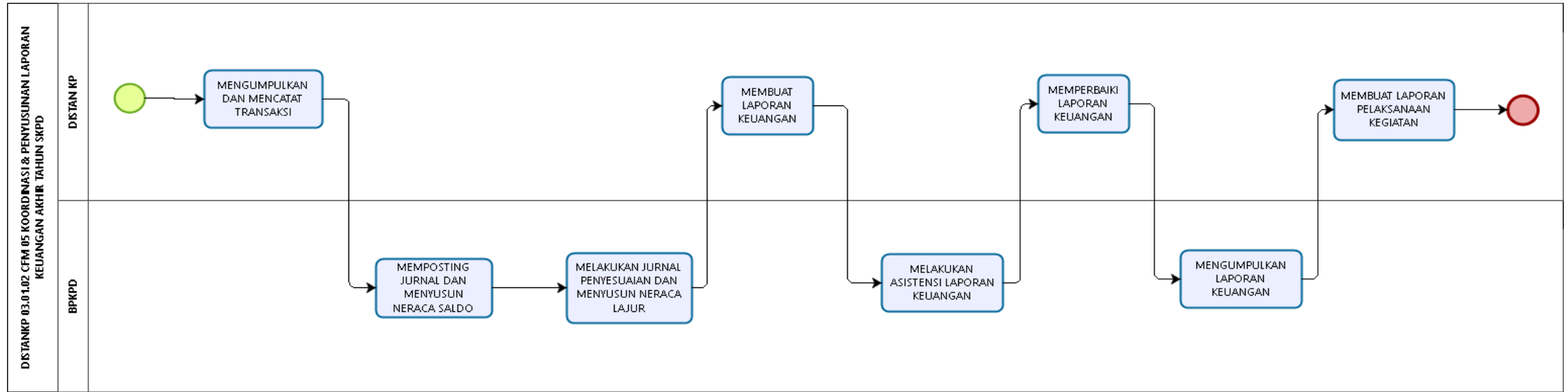


03.01.02.03

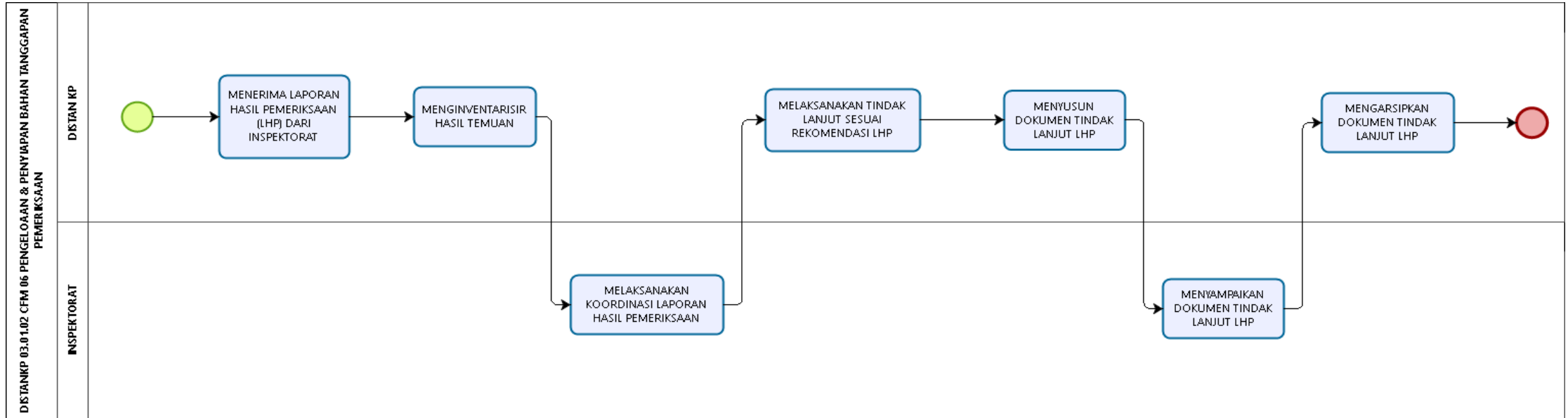


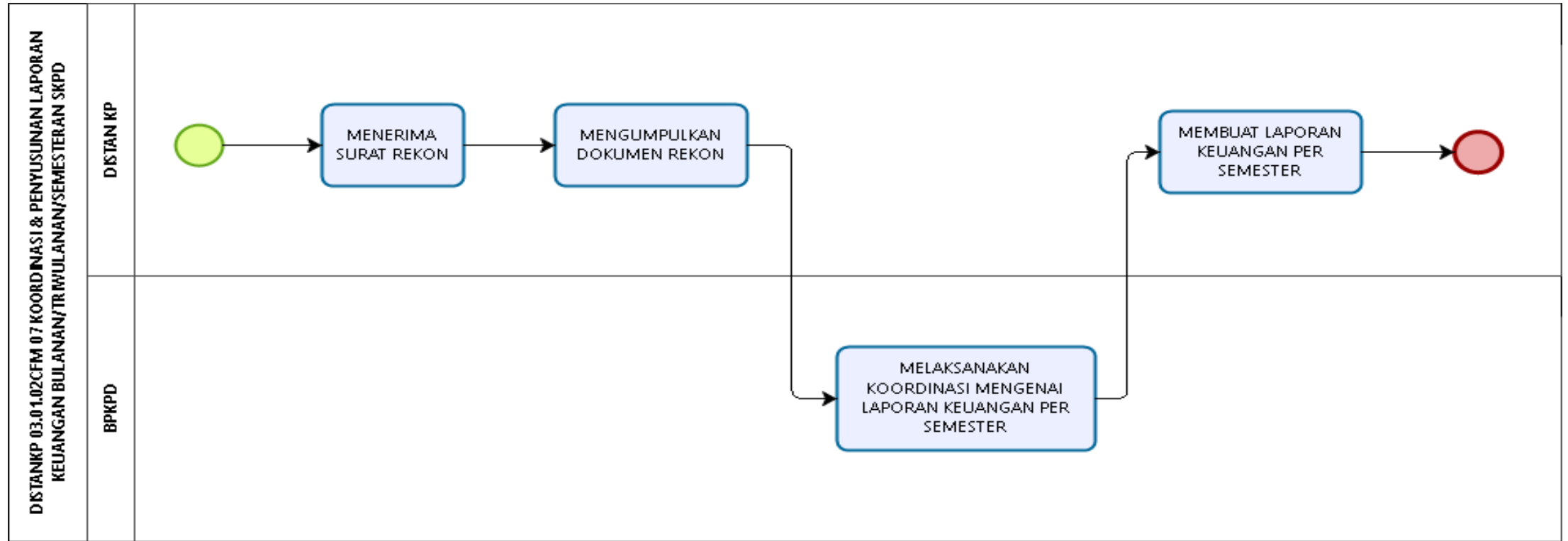


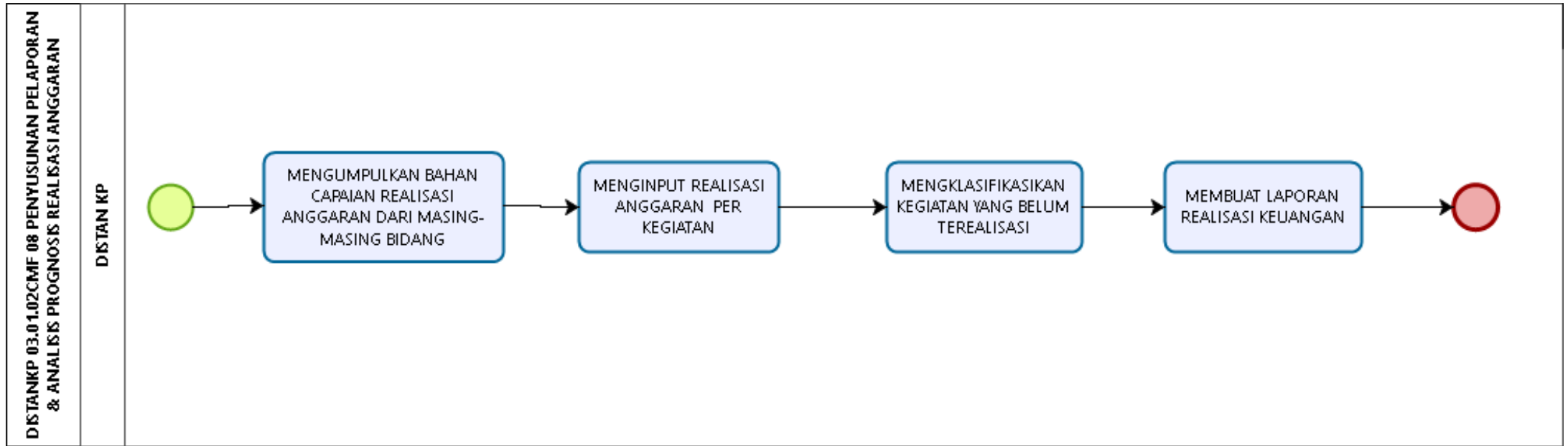
03.01.02.05



03.01.02.06







SUBKEG03.01.03

DISTANKP 03.01.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH



DISTANKP 03.01.03.01
PENYUSUNAN PERENCANAAN
KEBUTUHAN BARANG MILIK
DAERAH SKPD



DISTANKP 03.01.03.02
PENGAMANAN BARANG MILIK
DAERAH SKPD



DISTANKP 03.01.03.03
KOORDINASI & PENILAIAN
BARANG MILIK DAERAH SKPD



DISTANKP 03.01.03.04
PEMBINAAN, PENGAWASAN &
PENGENDALIAN BARANG MILIK
DAERAH PADA SKPD



DISTANKP 03.01.03.05
REKONSILIASI & PENYUSUNAN
LAPORAN BARANG MILIK
DAERAH PADA SKPD

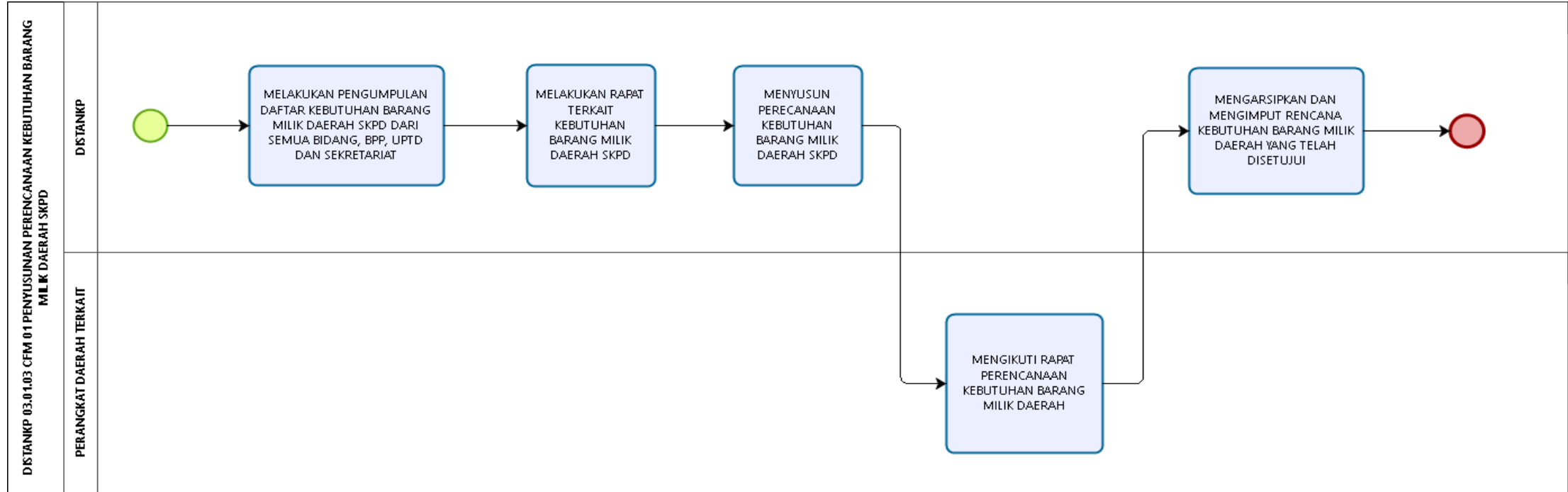


DISTANKP 03.01.03.06
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA SKPD

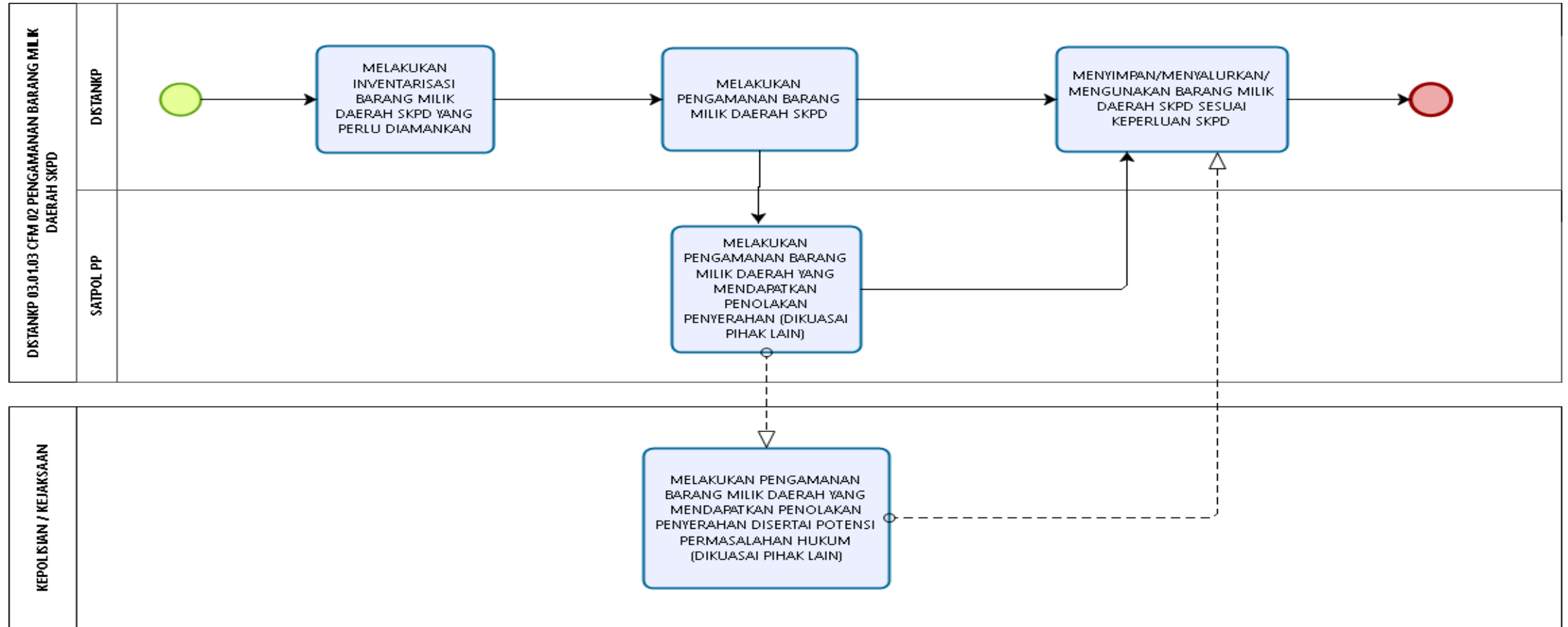


DISTANKP 03.01.03.07
PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH SKPD

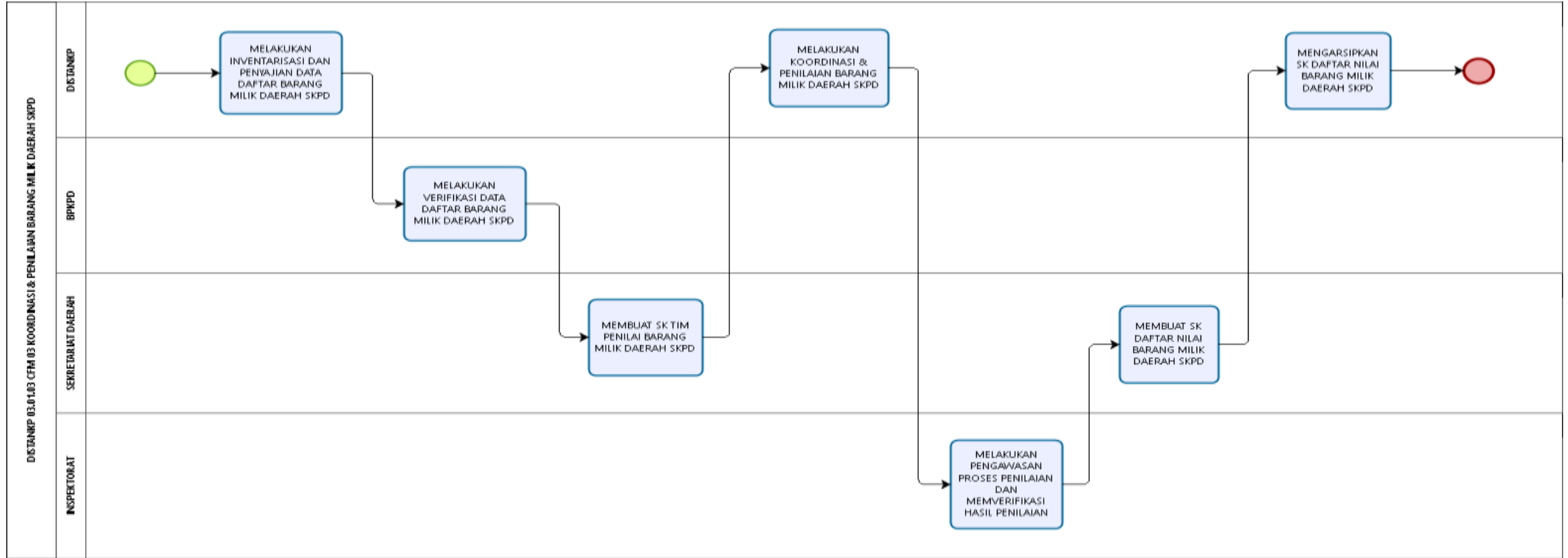
03.01.03.01



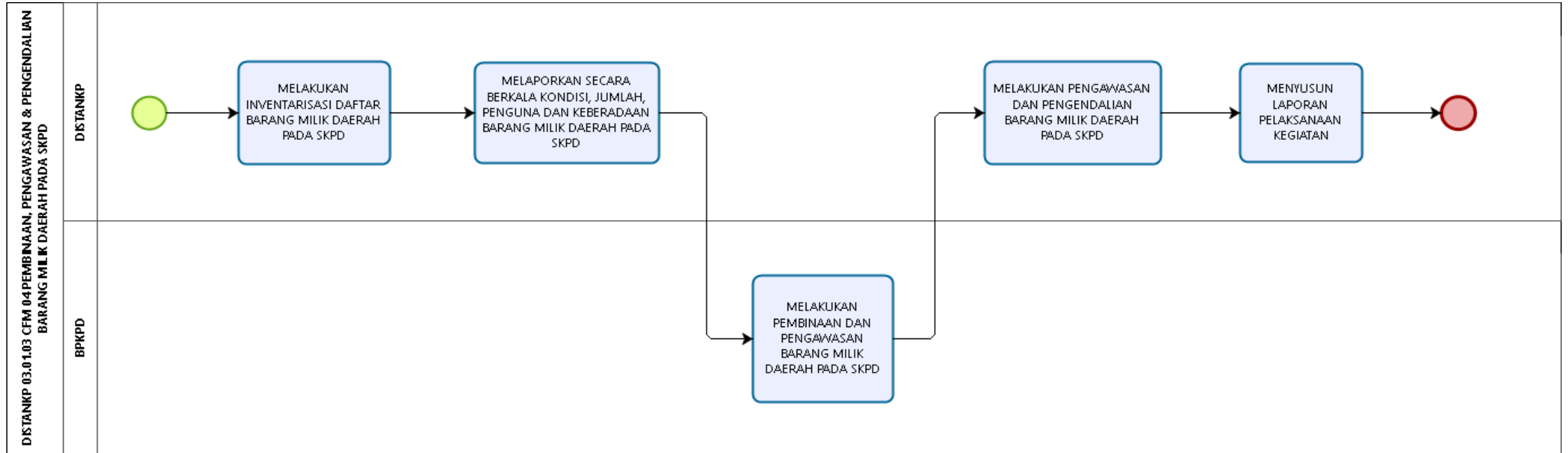
03.01.03.02



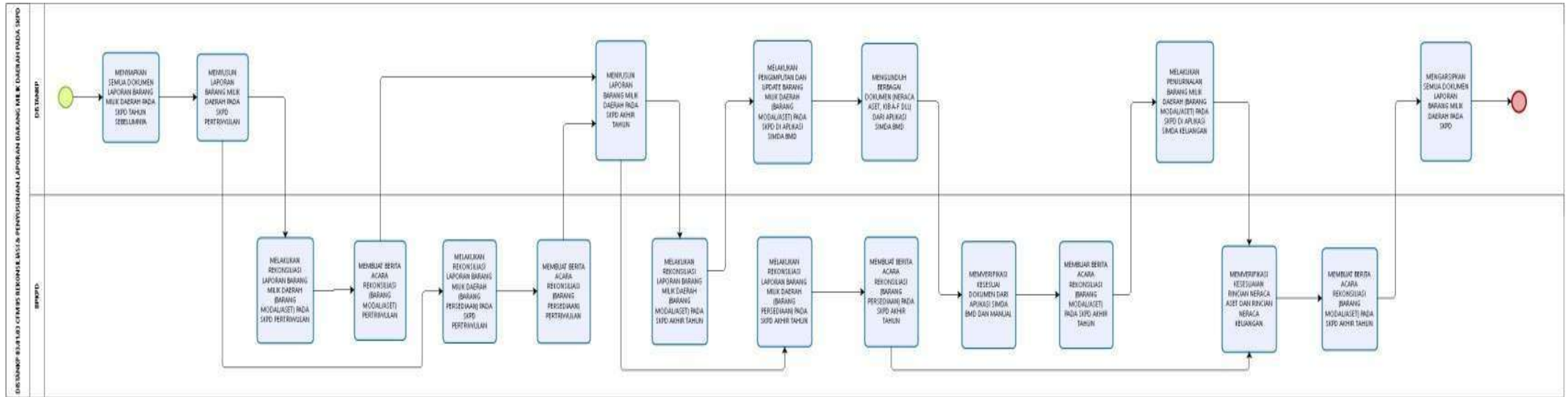
03.01.03.03



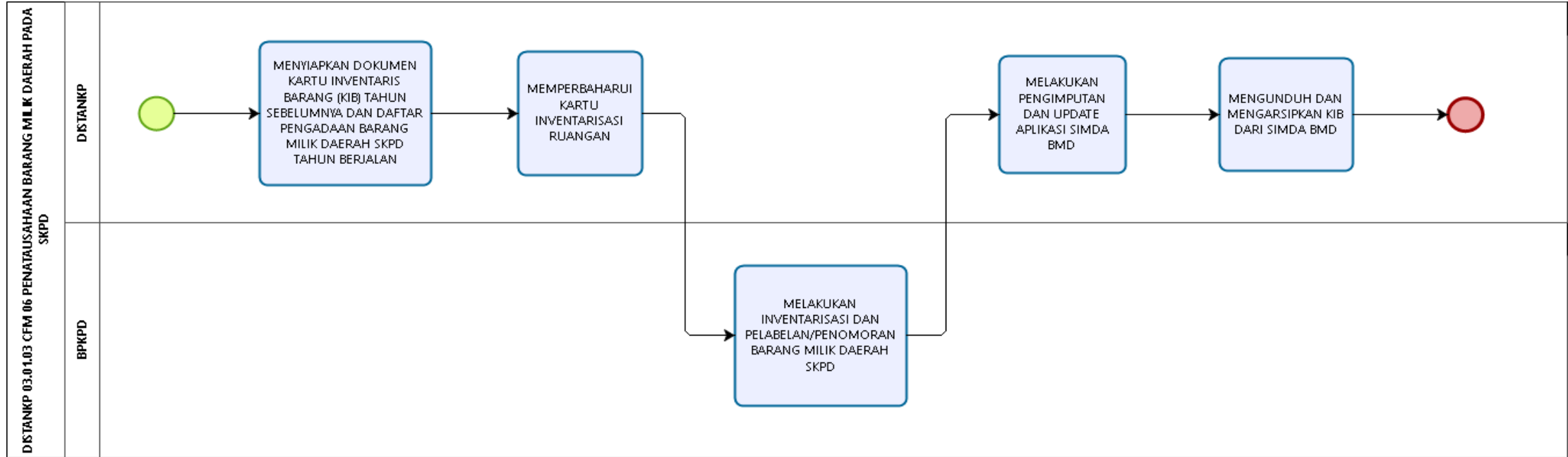
03.01.03.04



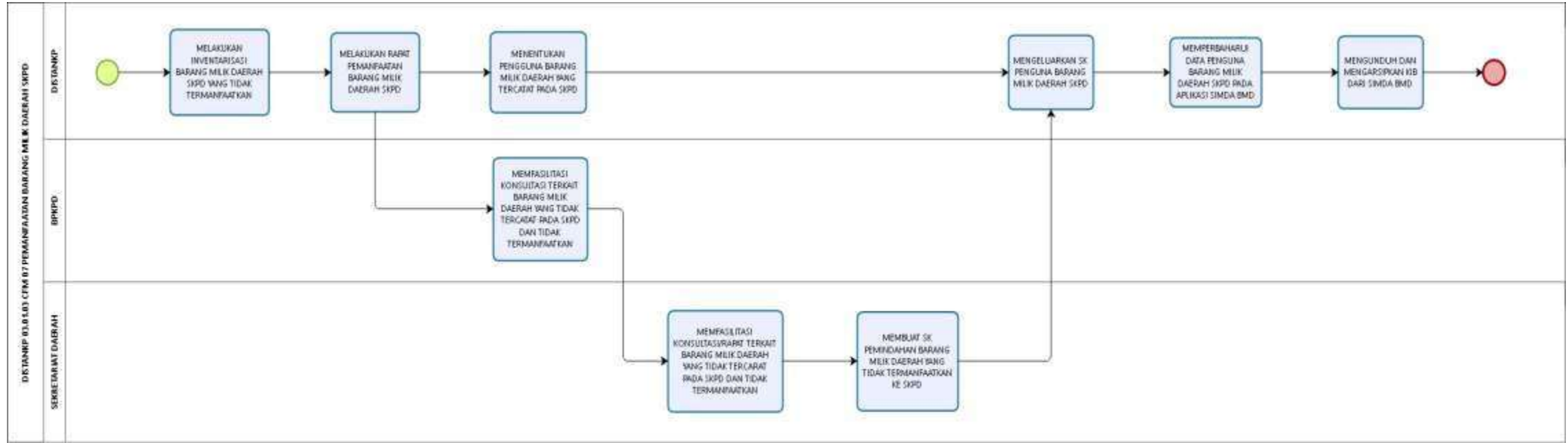
03.01.03.05



03.01.03.06



03.01.03.07



SUBKEG03.01.04

DISTANKP 03.01.04 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH



DISTANKP 03.01.04.01
PENINGKATAN SARANA &
PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI



DISTANKP 03.01.04.02
PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BESERTA ATRIBUT
KELENGKAPANNYA



DISTANKP 03.01.04.03
PENDATAAN & PENGOLAHAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN



DISTANKP 03.01.04.04
KOORDINASI & PELAKSANAAN
SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN



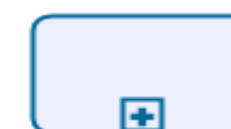
DISTANKP 03.01.04.05
MONITORING, EVALUASI &
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI



DISTANKP 03.01.04.06
PENDIDIKAN & PELATUHAN
PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS
& FUNGSI

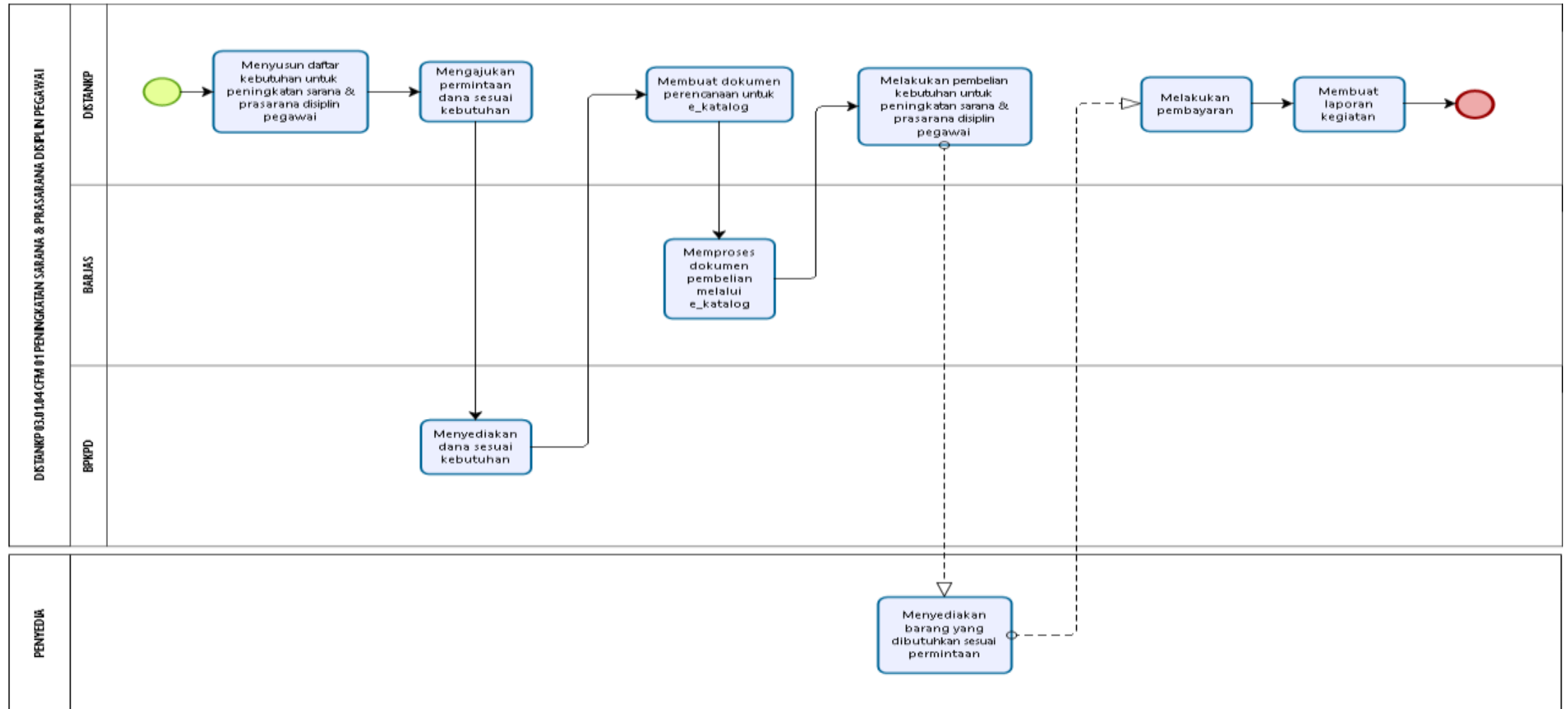


DISTANKP 03.01.04.07
SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

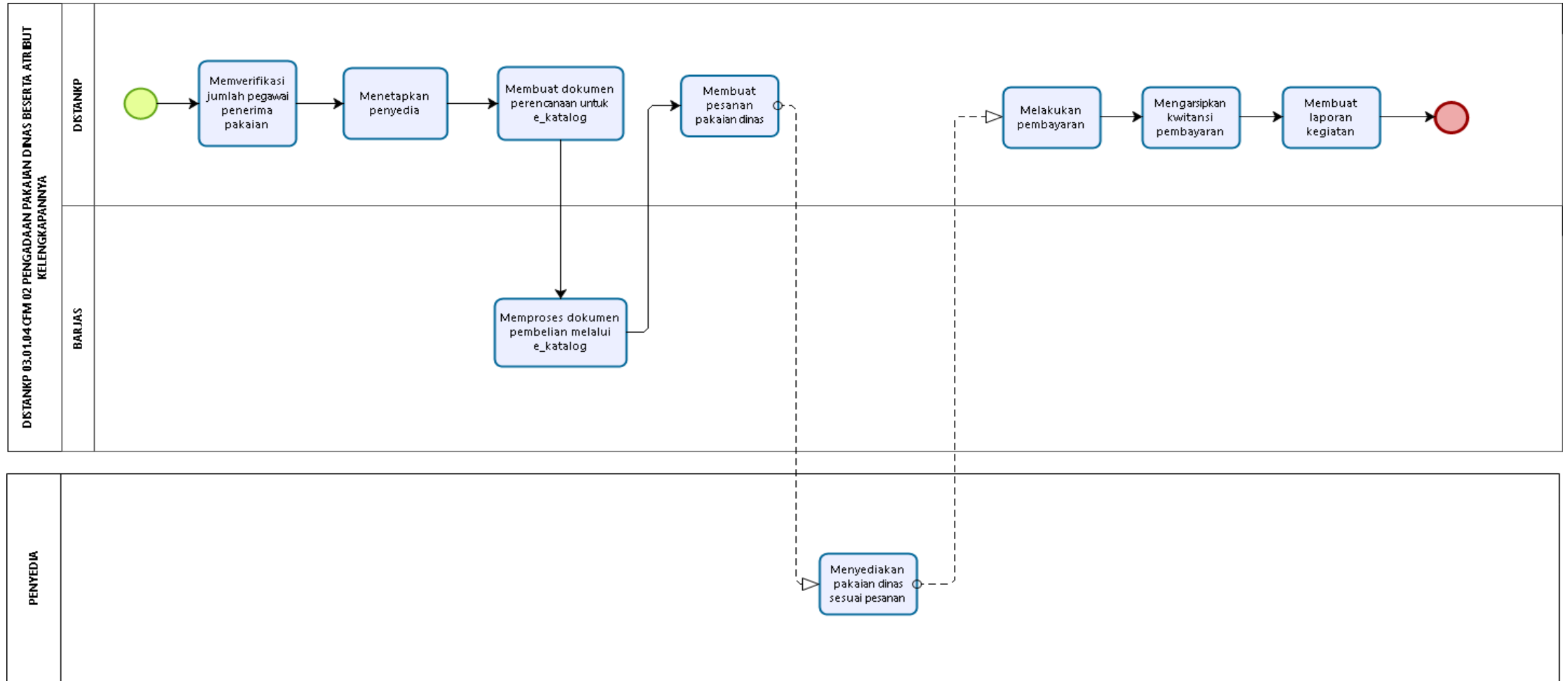


DISTANKP 03.01.04.08
BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

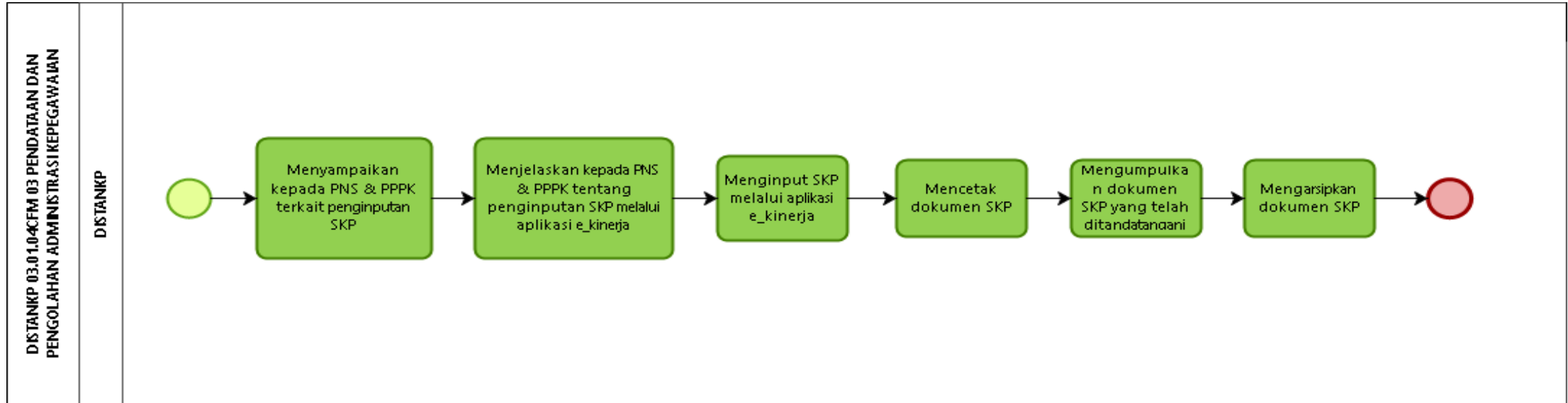
03.01.04.01



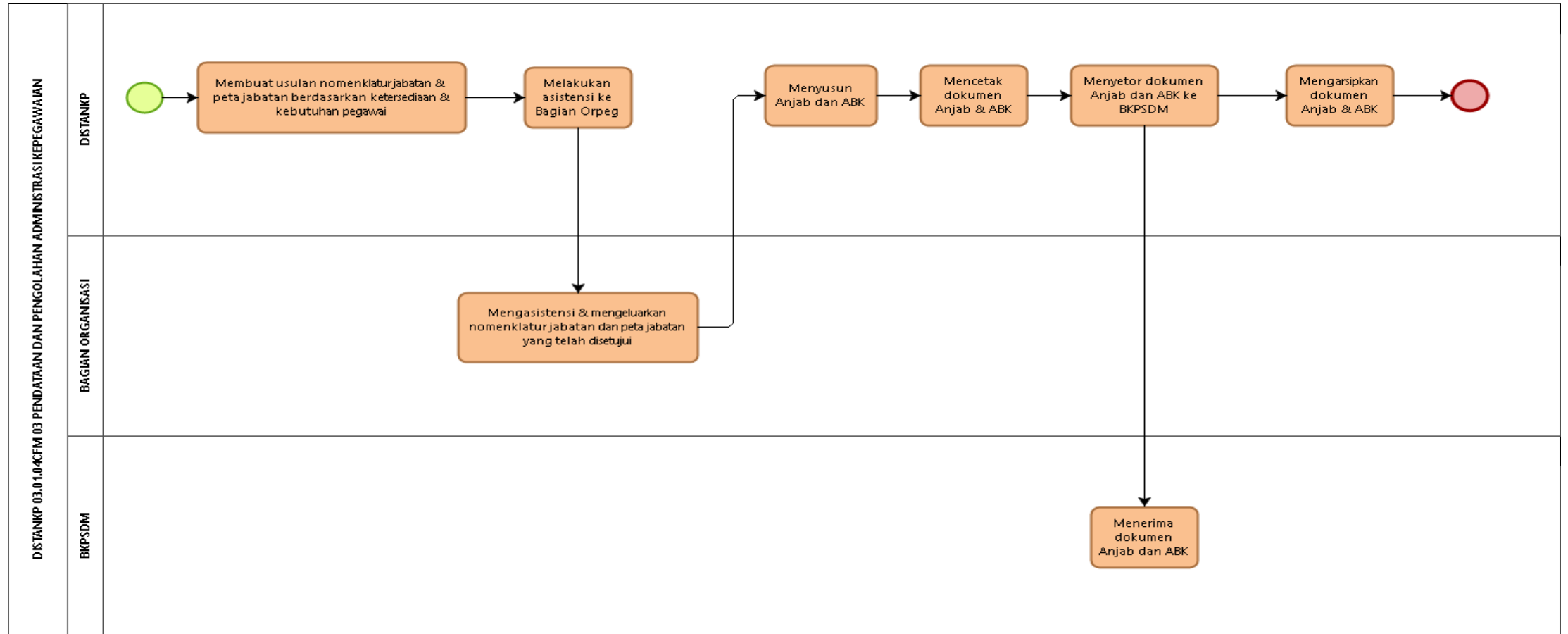
03.01.04.02

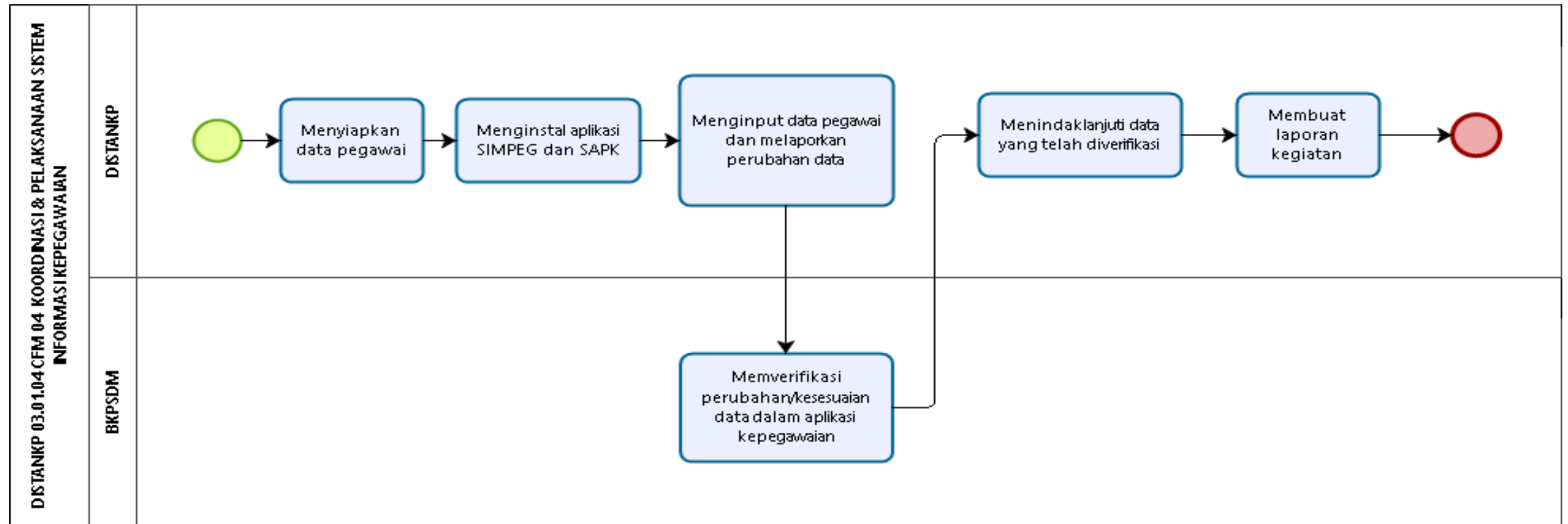


03.01.04.03(4)SKP

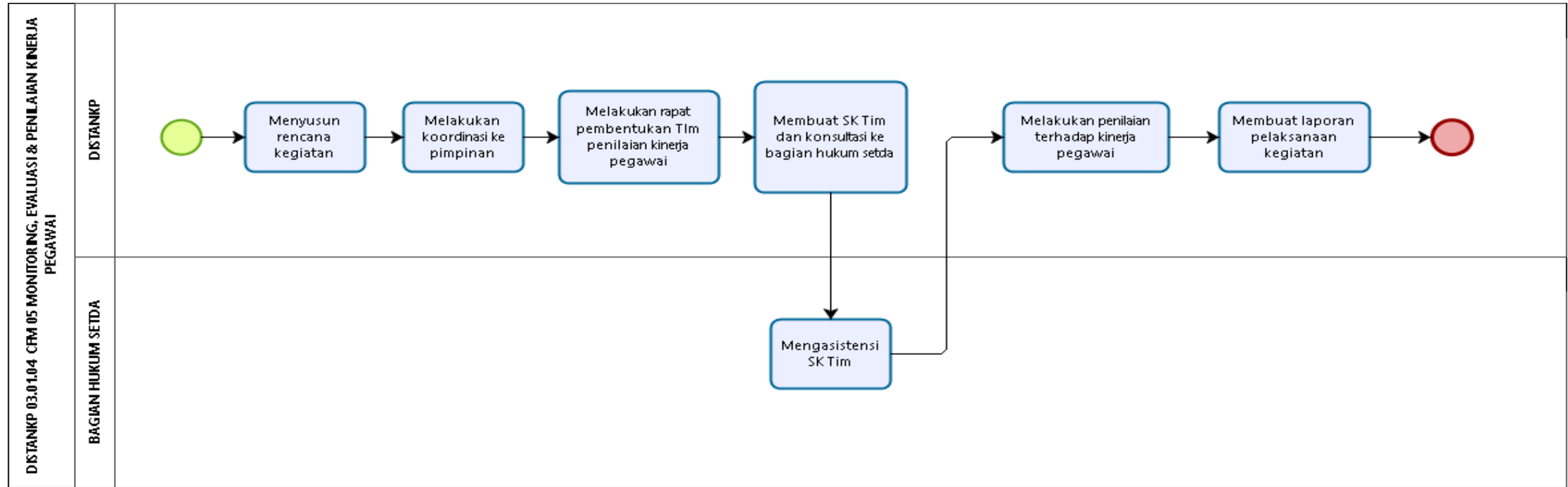


03.01.04.03(5)ANJAB

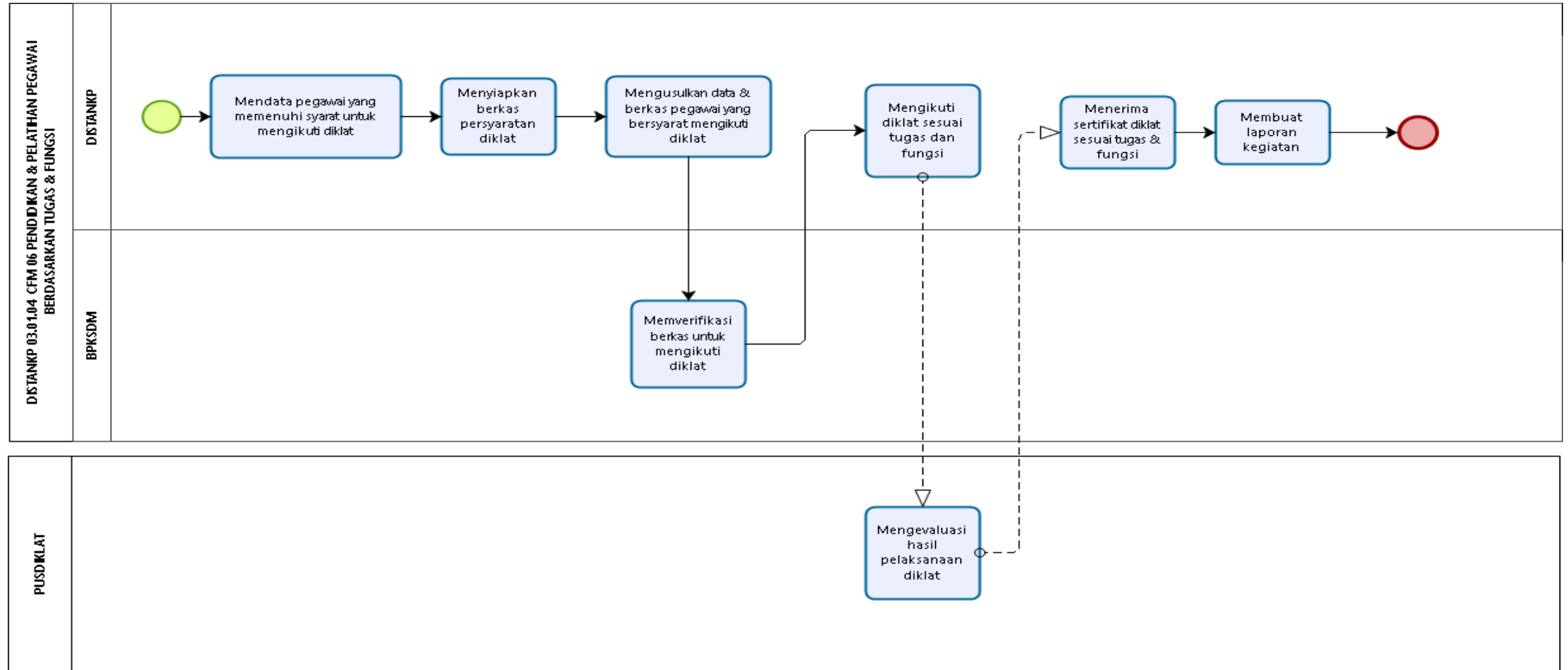




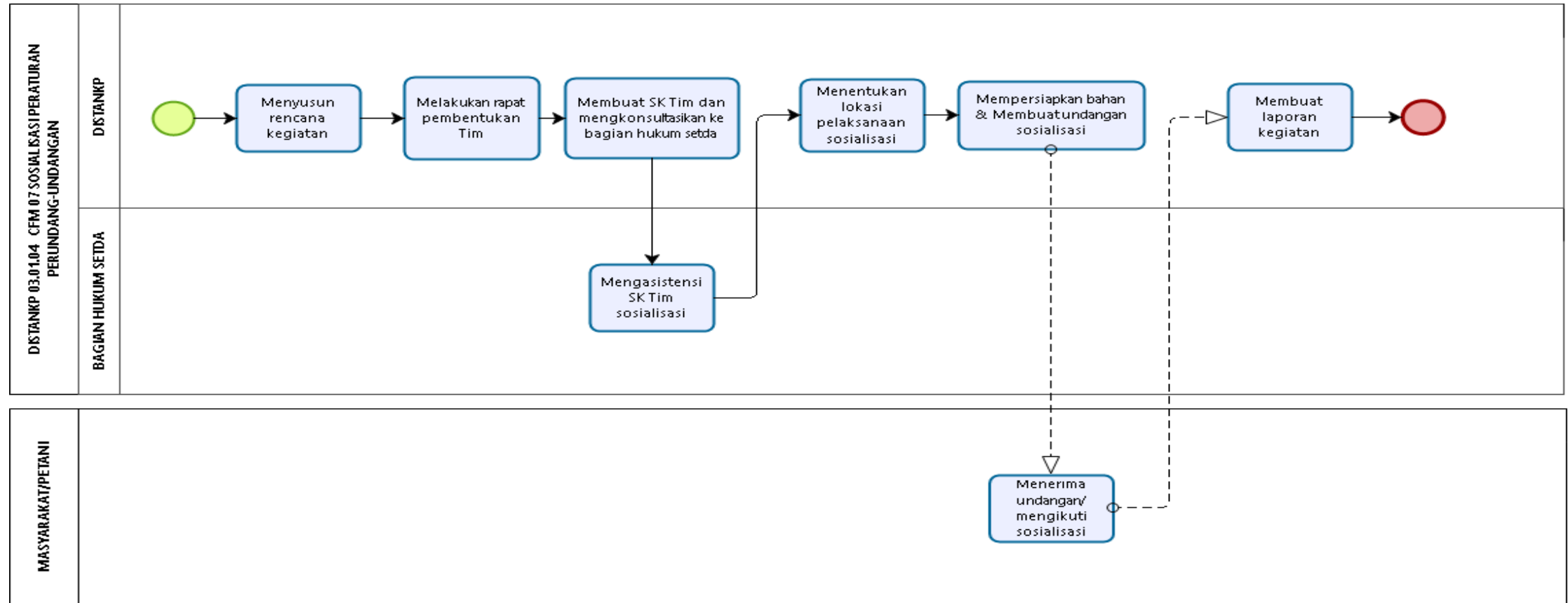
03.01.04.05



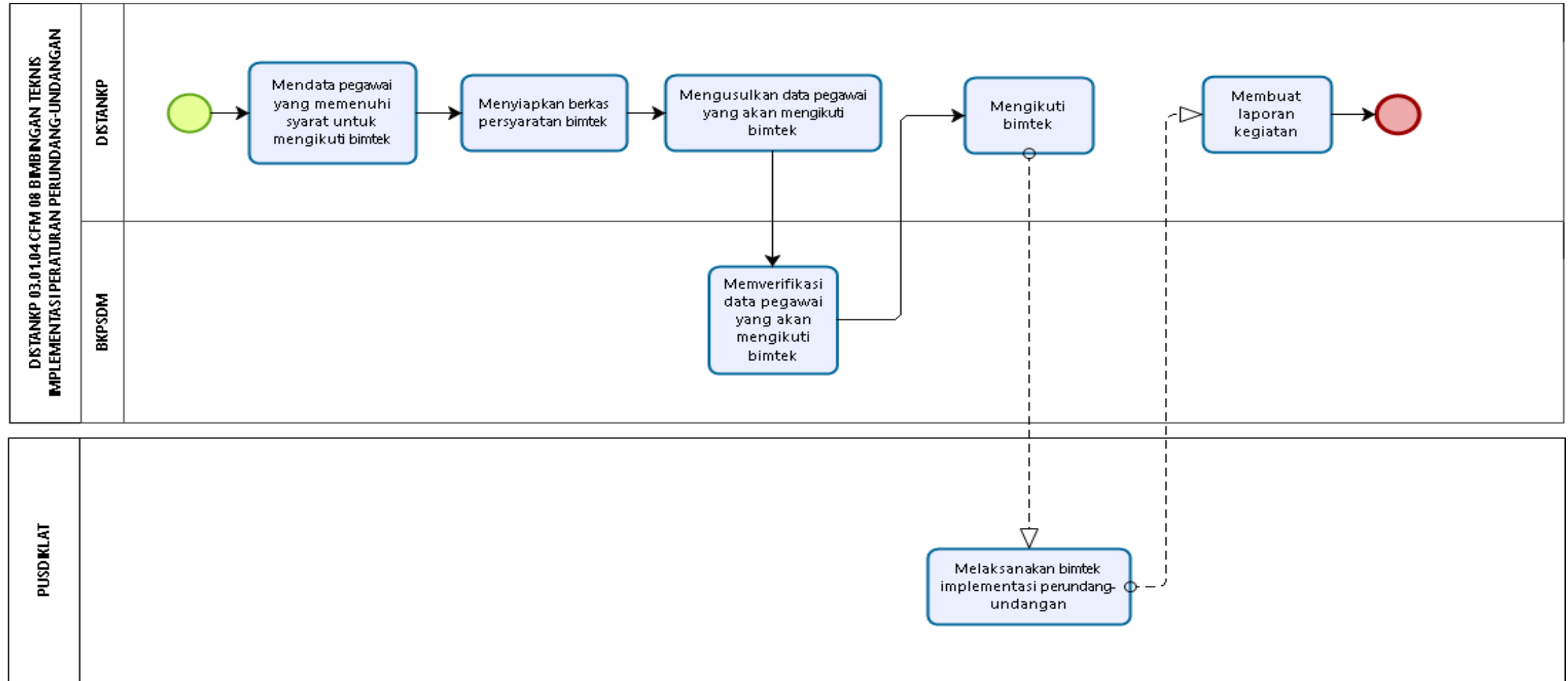
03.01.04.06



03.01.04.07



03.01.04.08



SUBKEG03.01.05

DISTANKP 03.01.05 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH



DISTANKP 03.01.05.01
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR



DISTANKP 03.01.05.02
PENYEDIAAN PERALATAN &
PERLENGKAPAN KANTOR



DISTANKP 03.01.05.03
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA



DISTANKP 03.01.05.04
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR



DISTANKP 03.01.05.05
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
& PENGGANDAAN



DISTANKP 03.01.05.06
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN &
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN



DISTANKP 03.01.05.07
PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL



DISTANKP 03.01.05.08 FASILITASI
KUNJUNGAN TAMU



DISTANKP 03.01.05.09
PENYELENGGARAAN RAPAT
KOORDINASI & KONSULTASI
SKPD

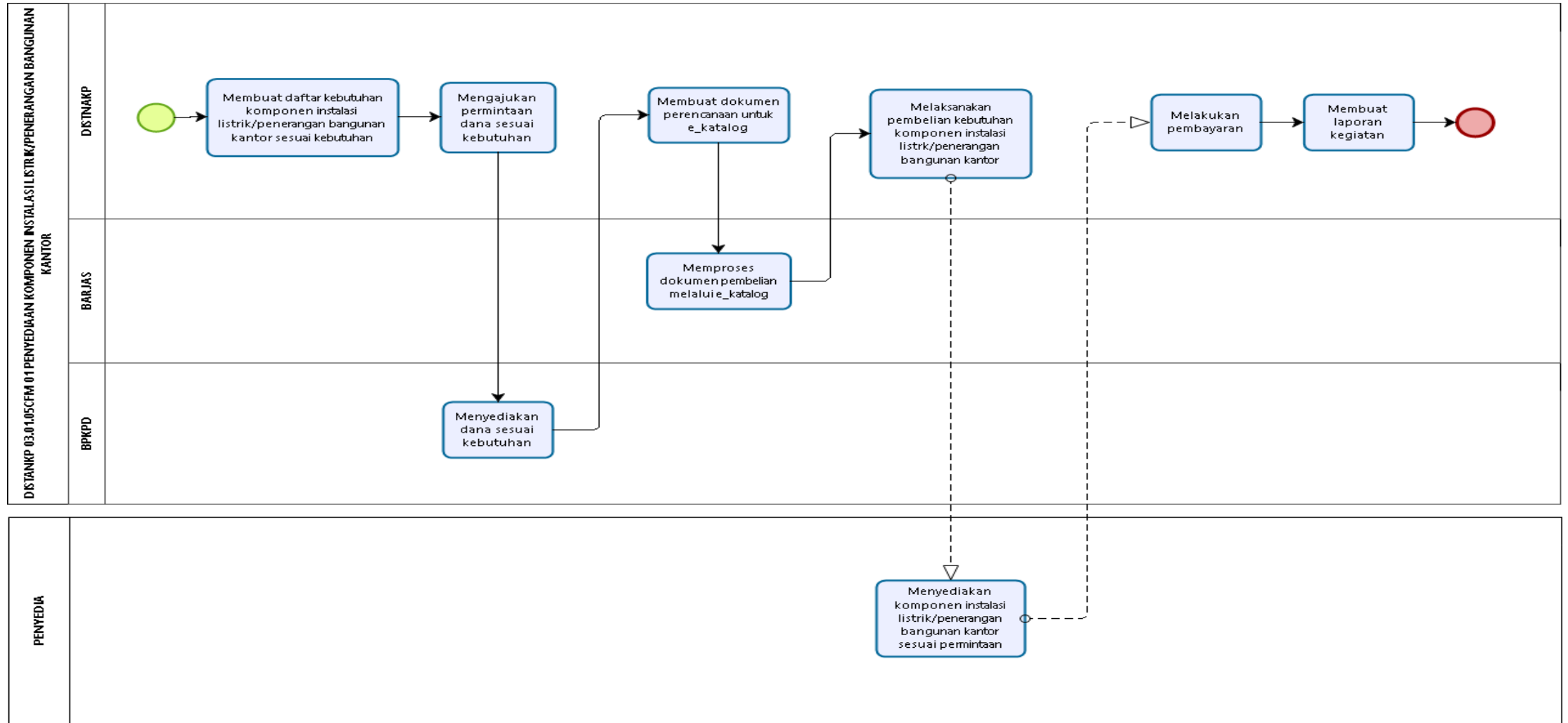


DISTANKP 03.01.05.10
PENATAUSAHAAN ARSIP
DINAMIS PADA SKPD

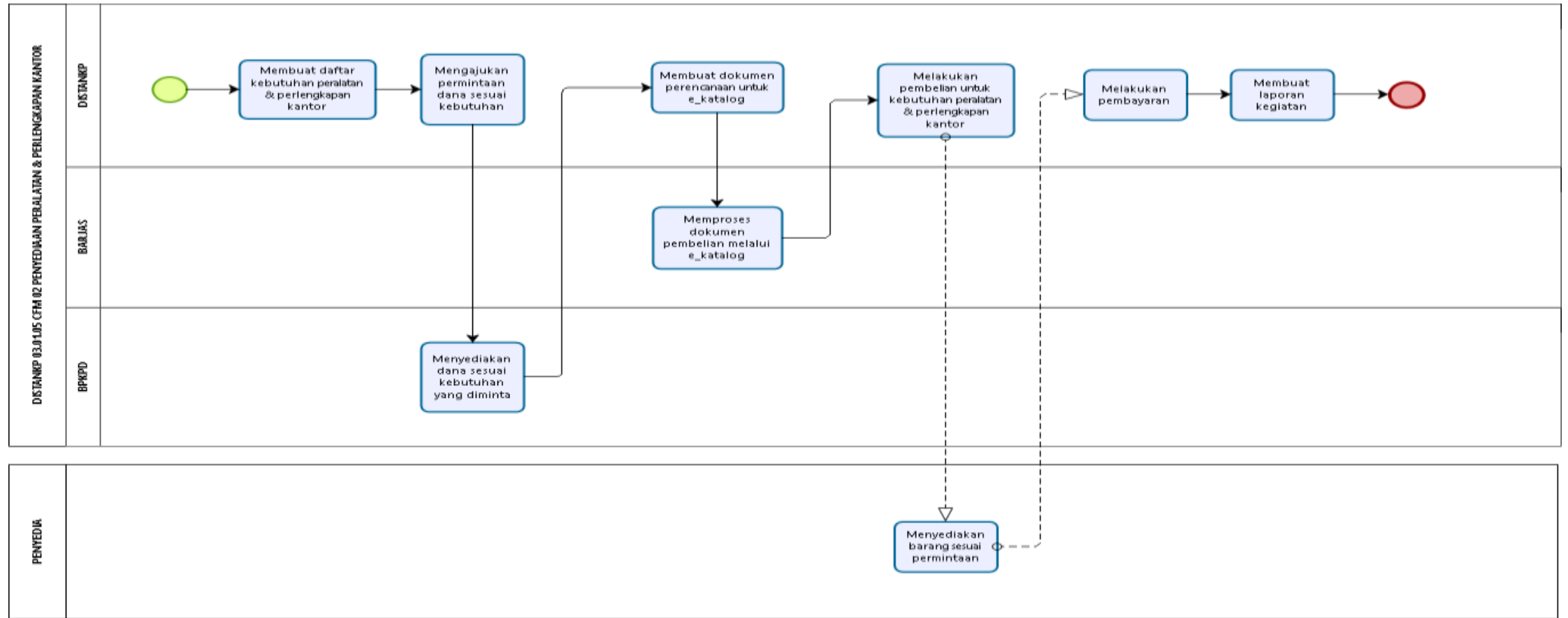


DISTANKP 03.01.05.11
DUKUNGAN PELAKSANAAN
SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA
SKPD

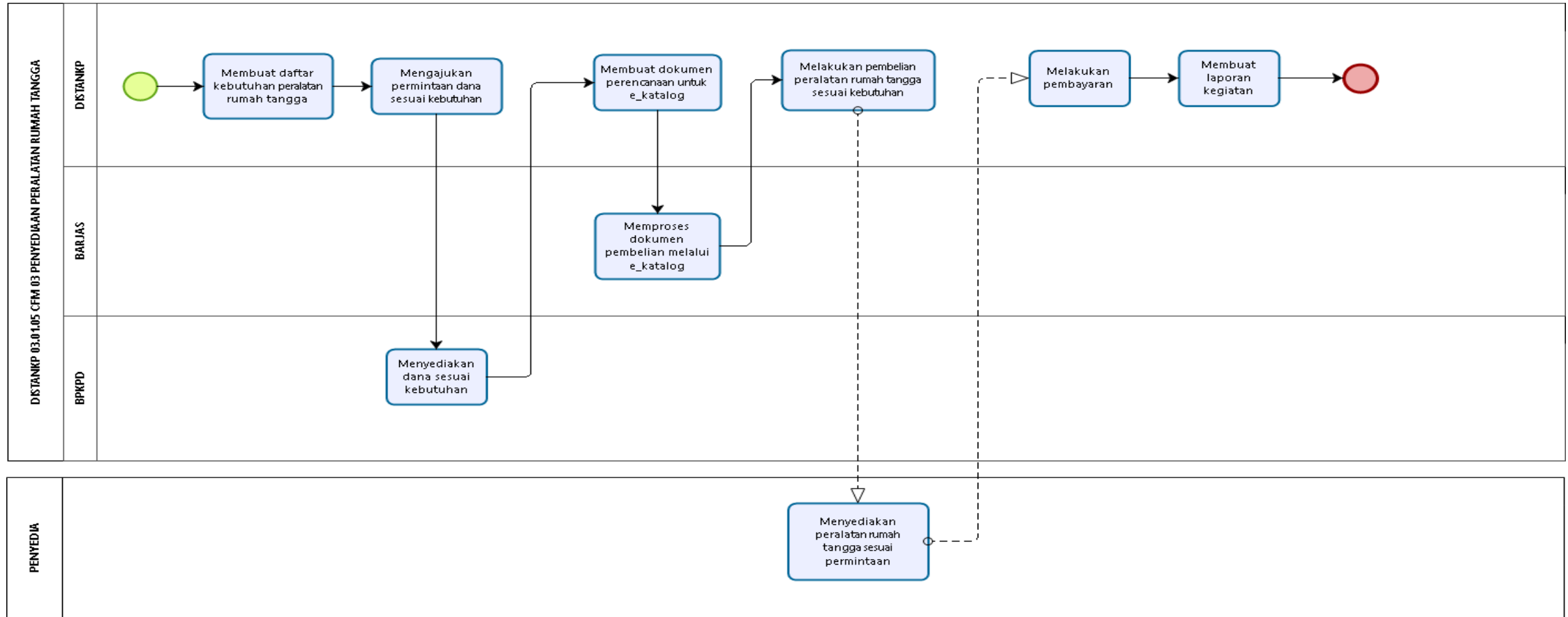
03.01.05.01



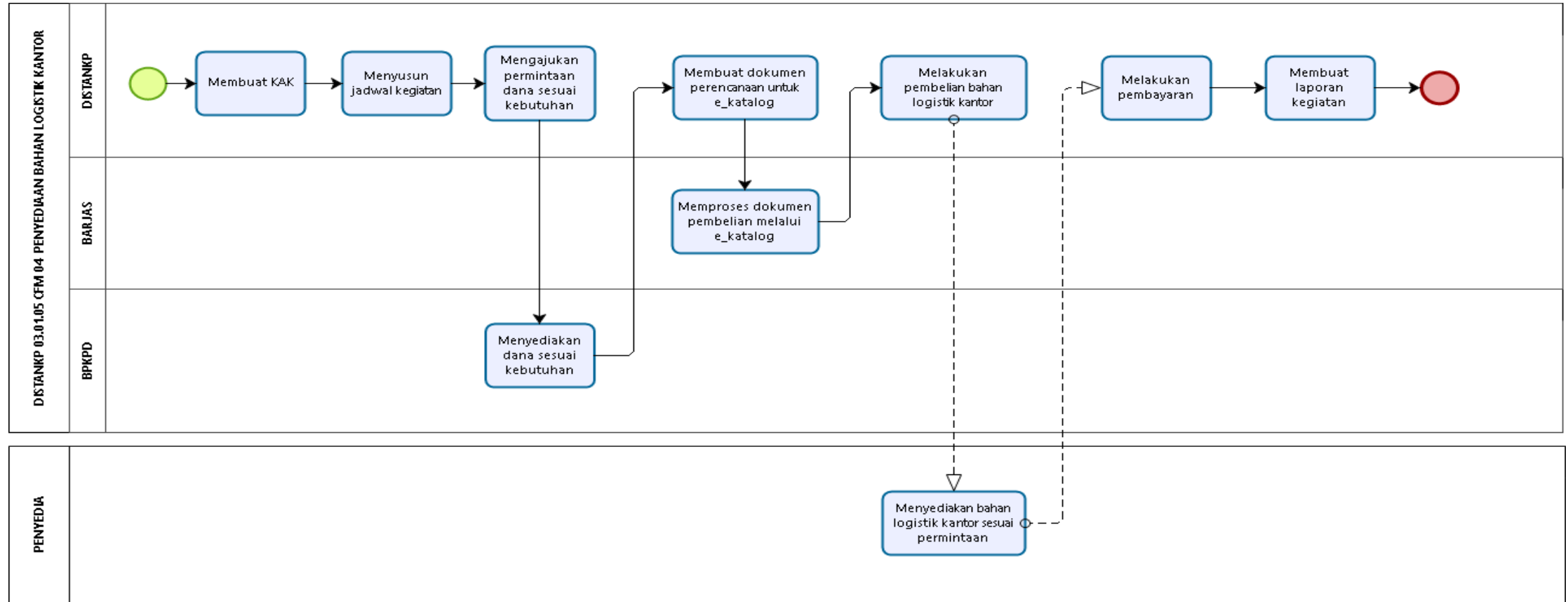
03.01.05.02



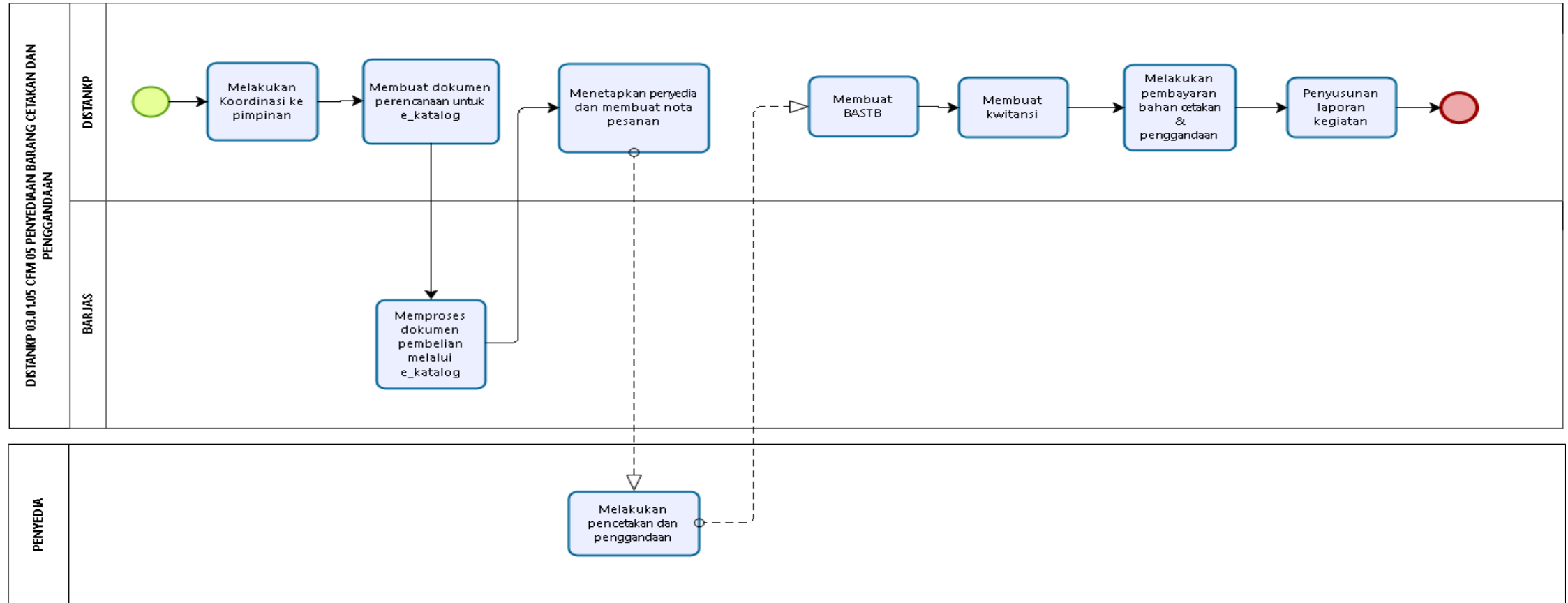
03.01.05.03



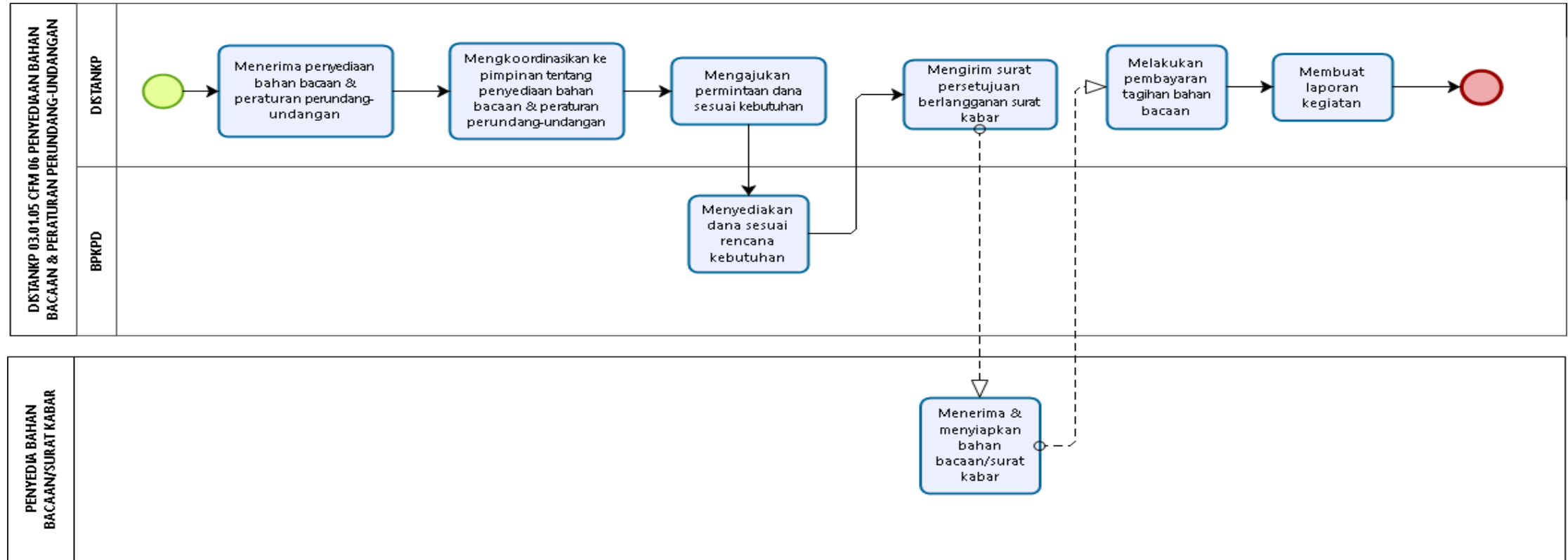
03.01.05.04



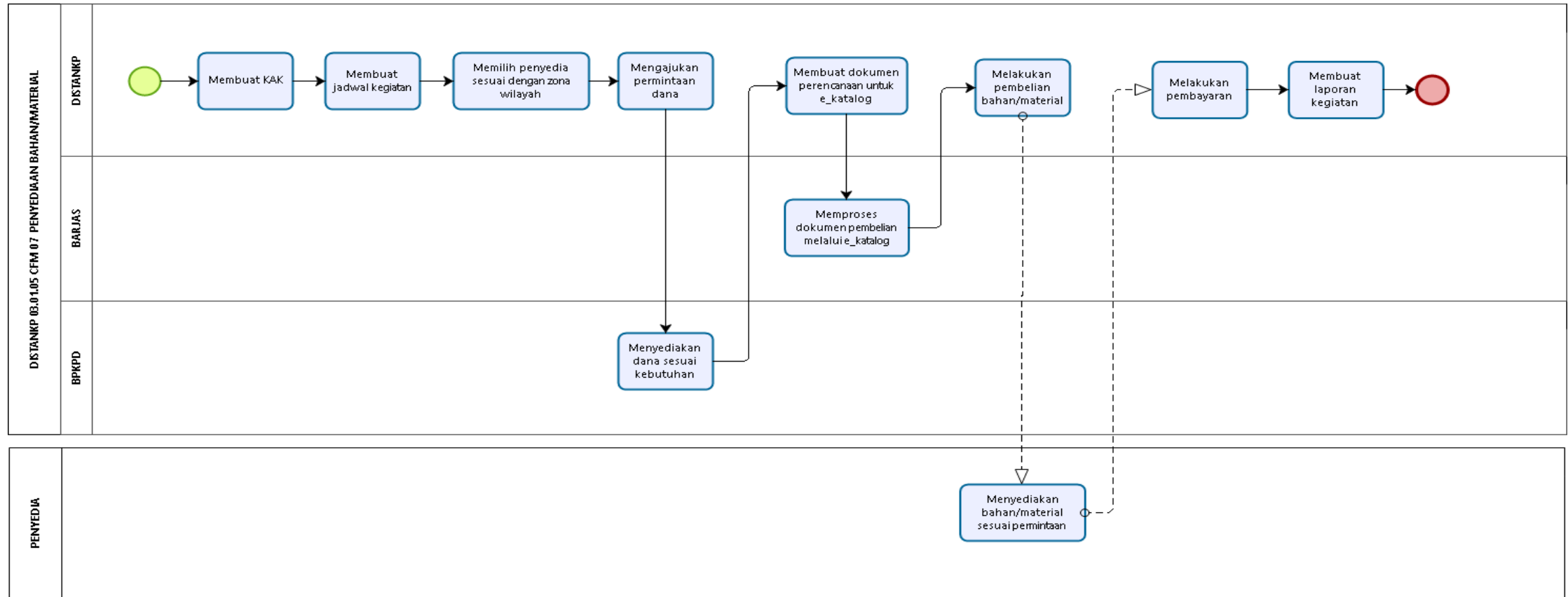
03.01.05.05



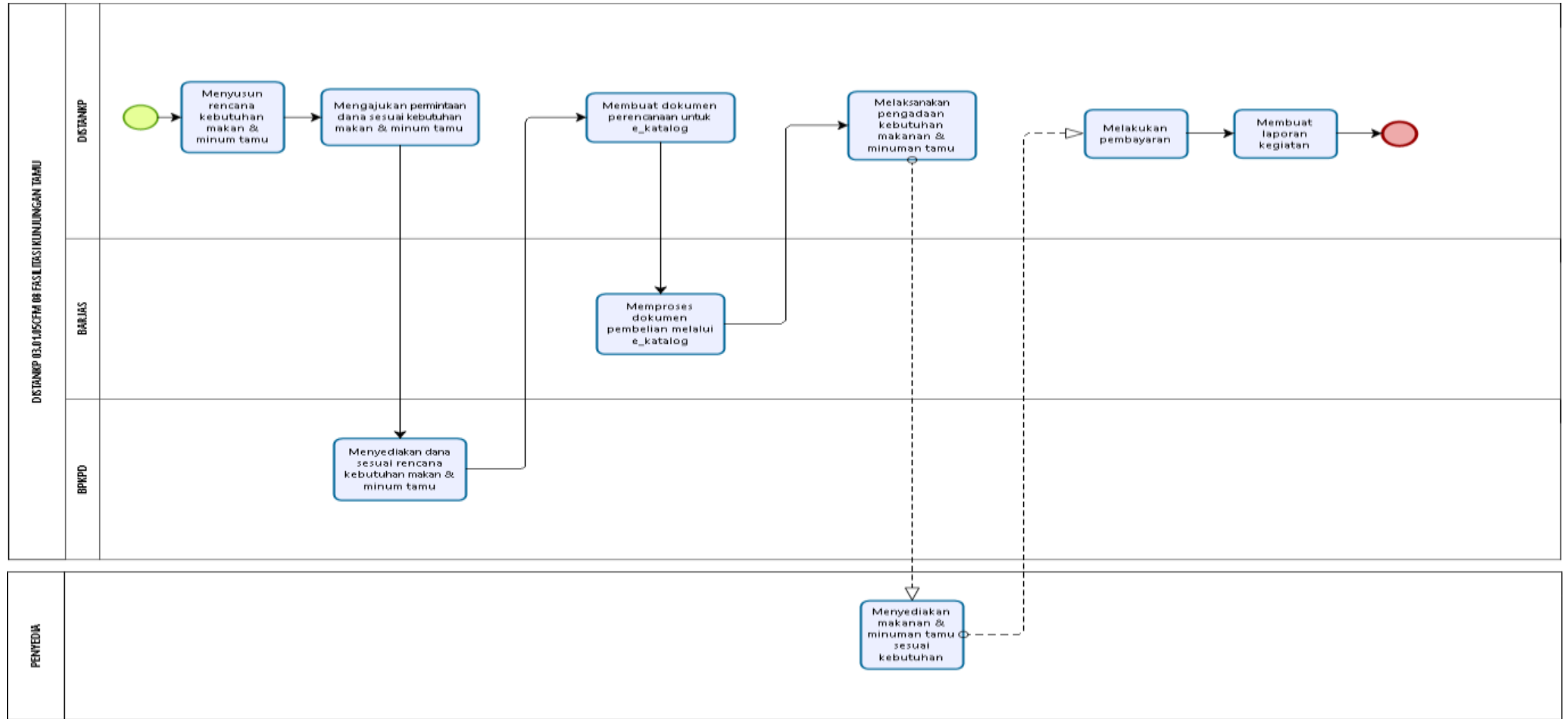
03.01.05.06



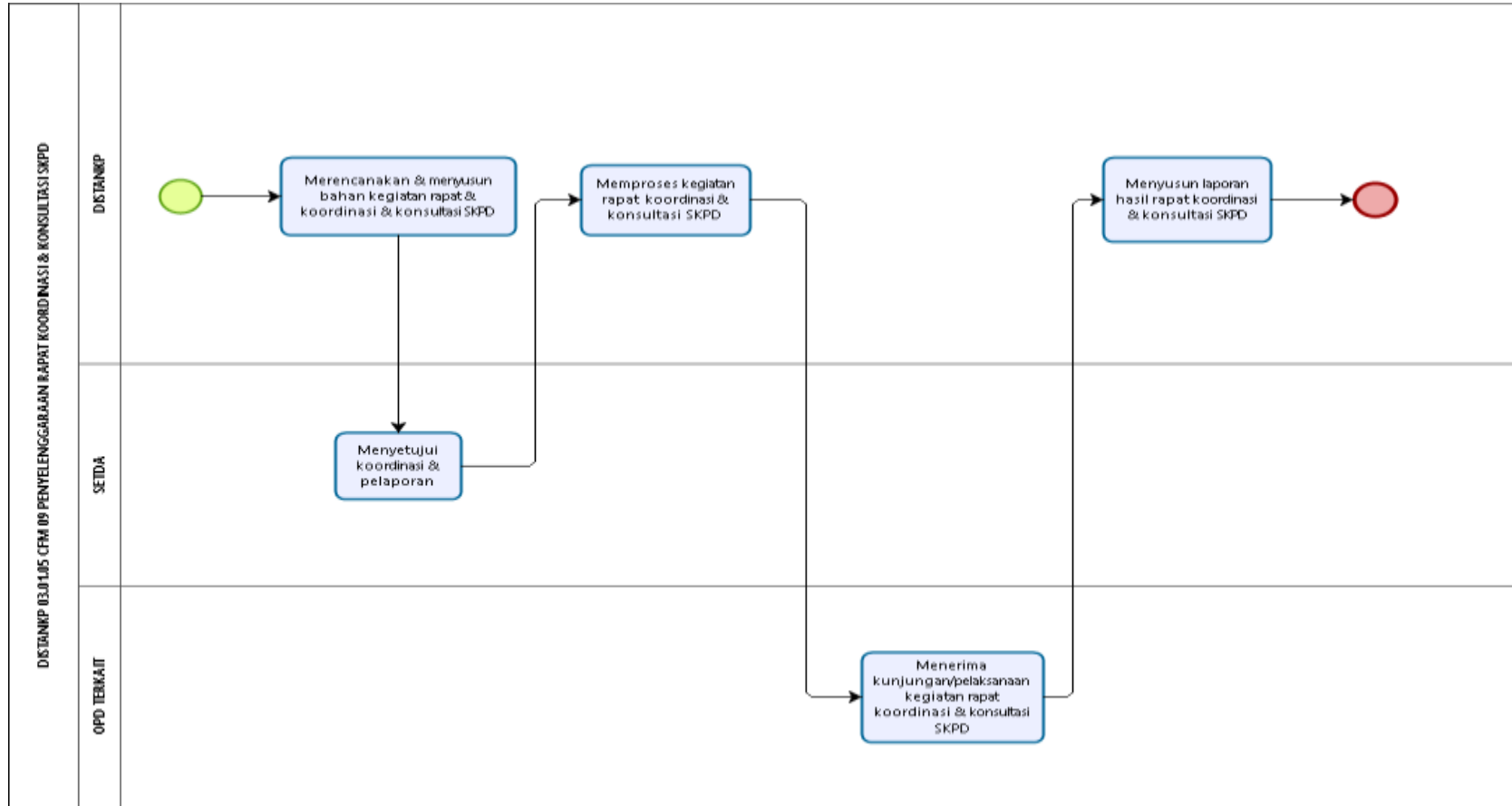
03.01.05.07

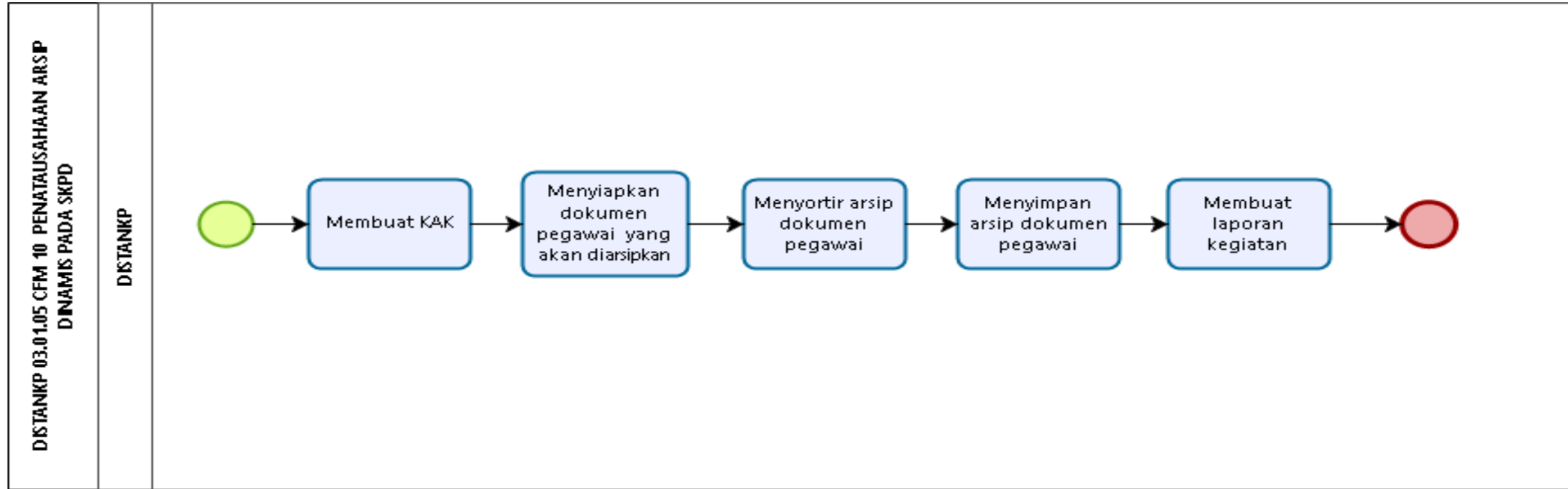


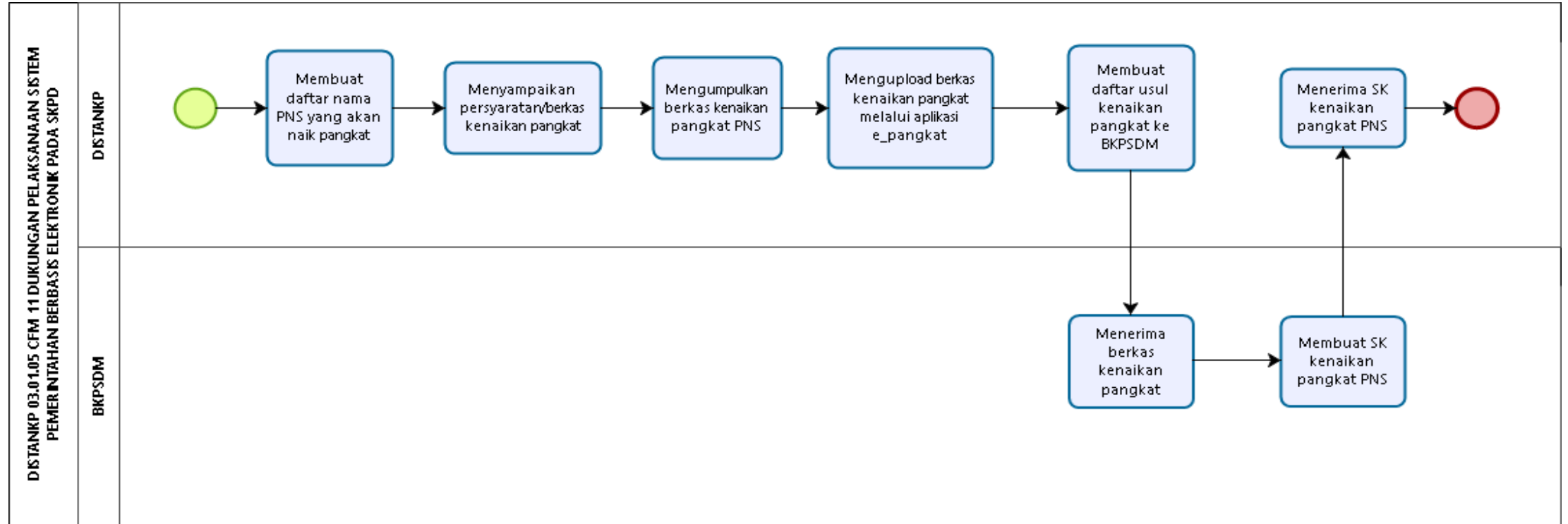
03.01.05.08



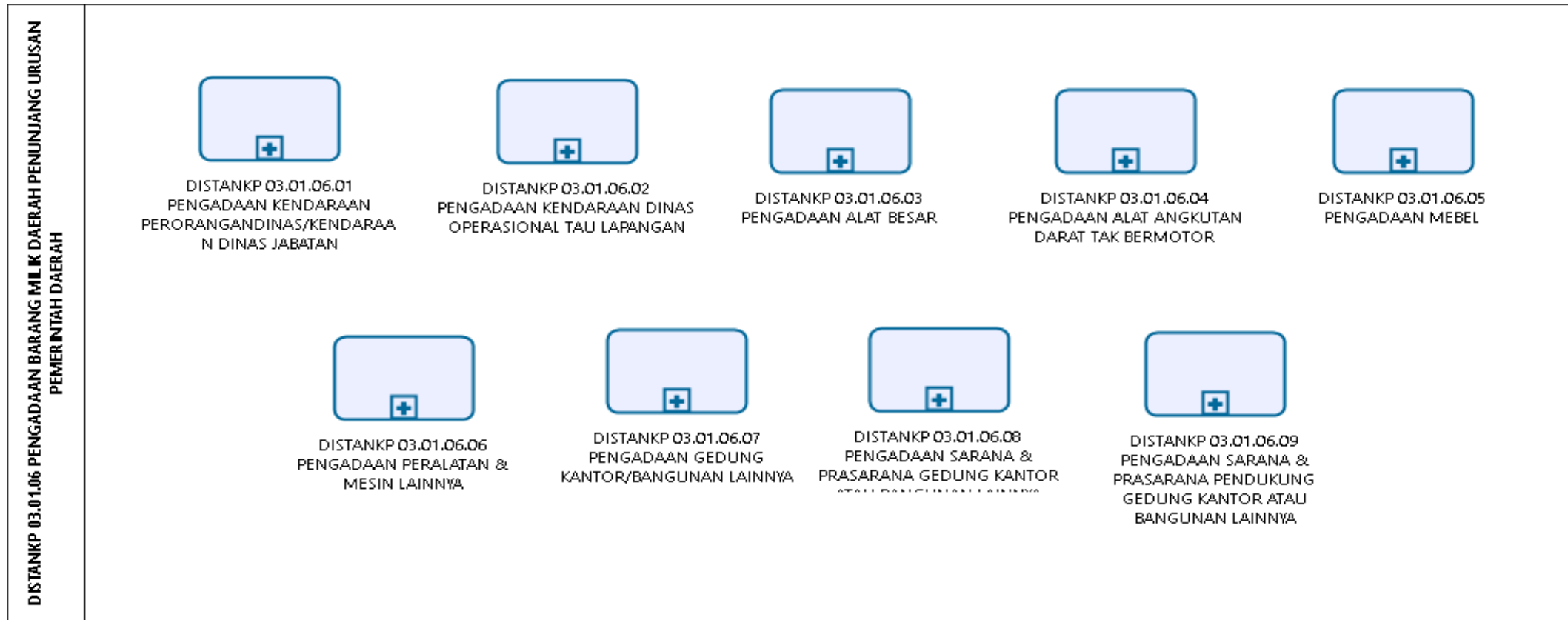
03.01.05.09



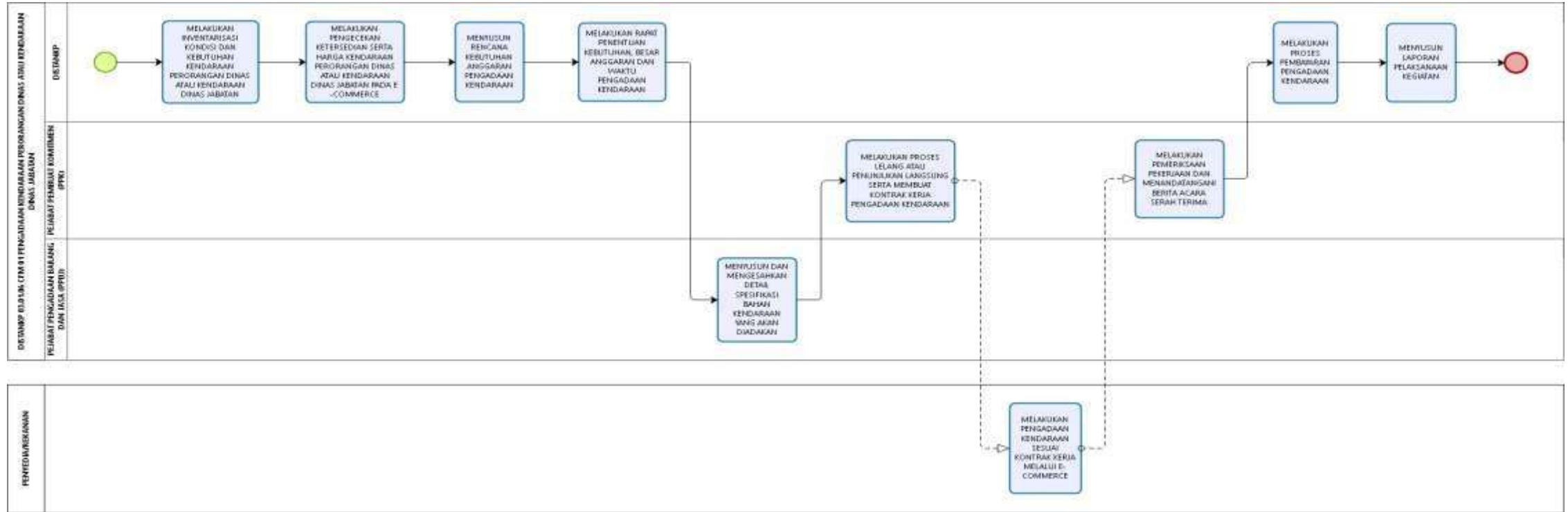




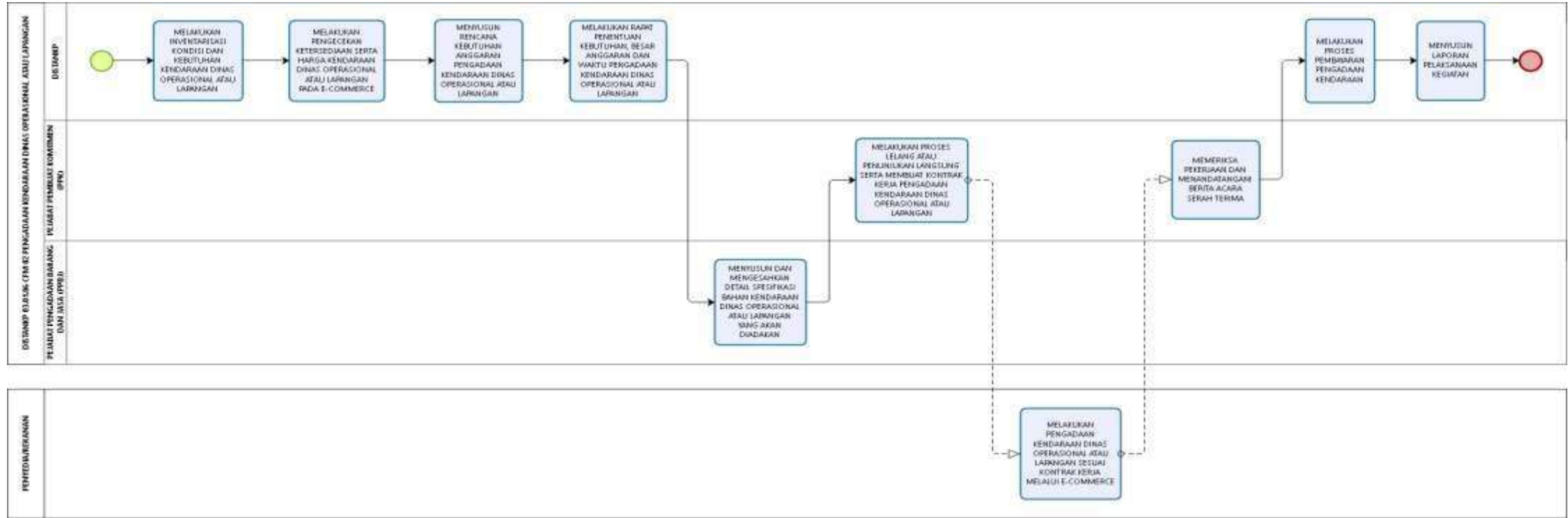
SUBKEG03.01.06



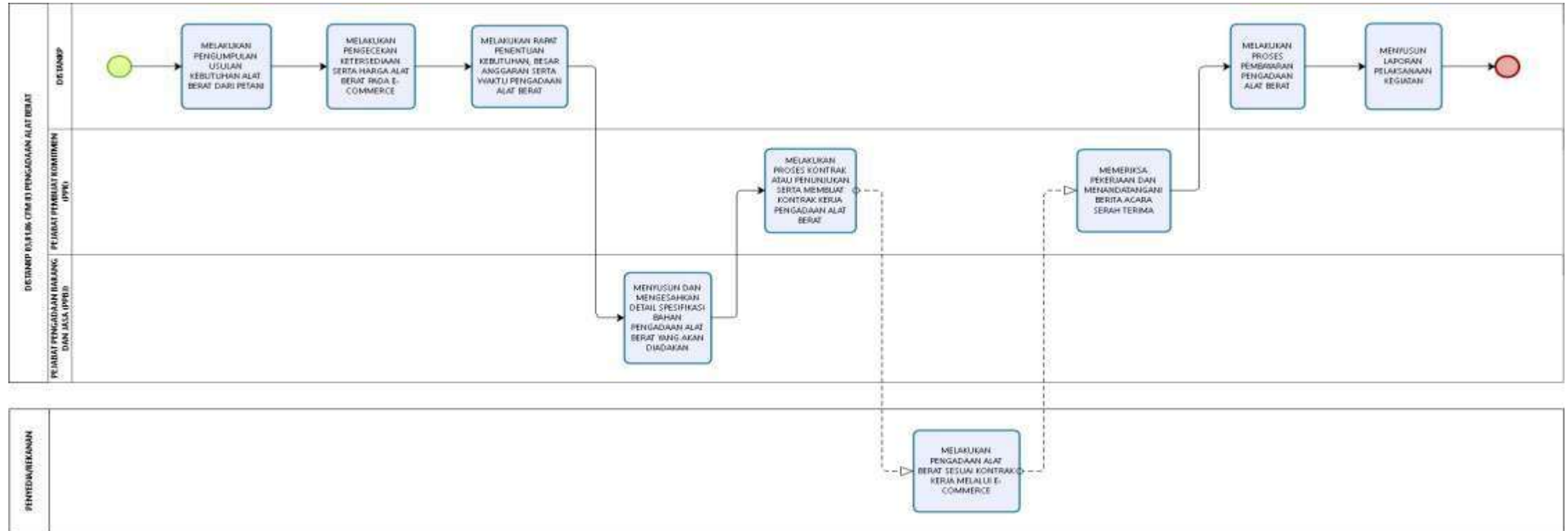
03.01.06.01



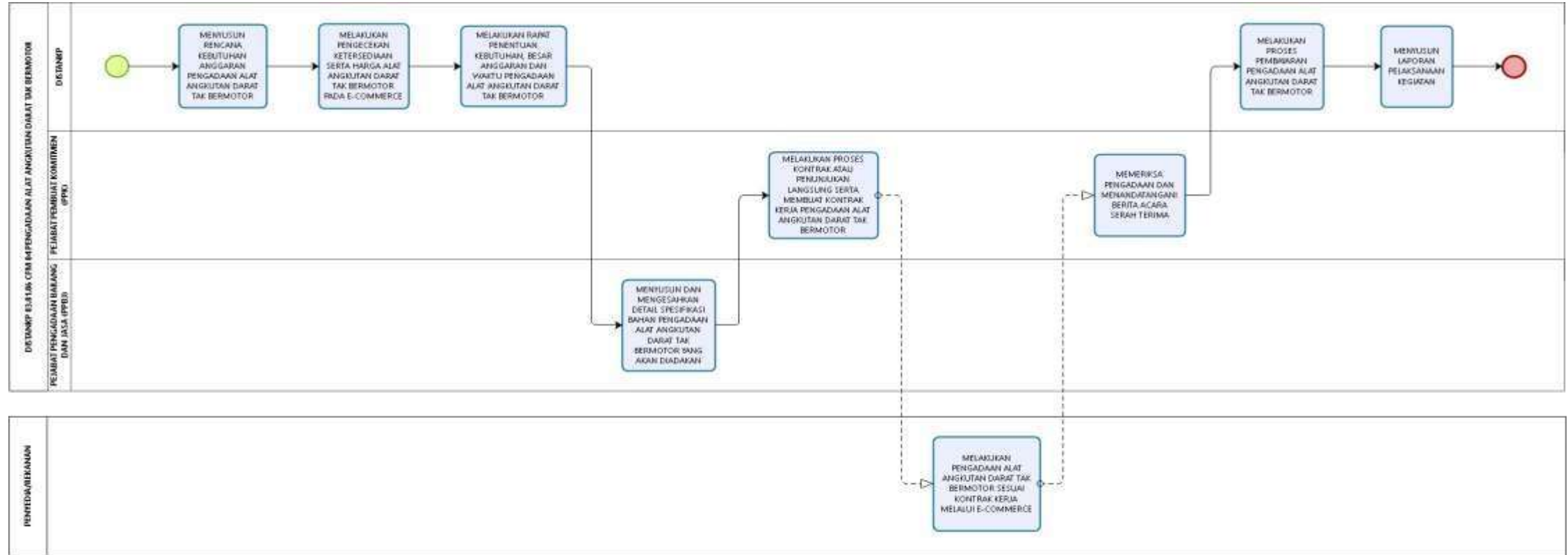
03.01.06.02



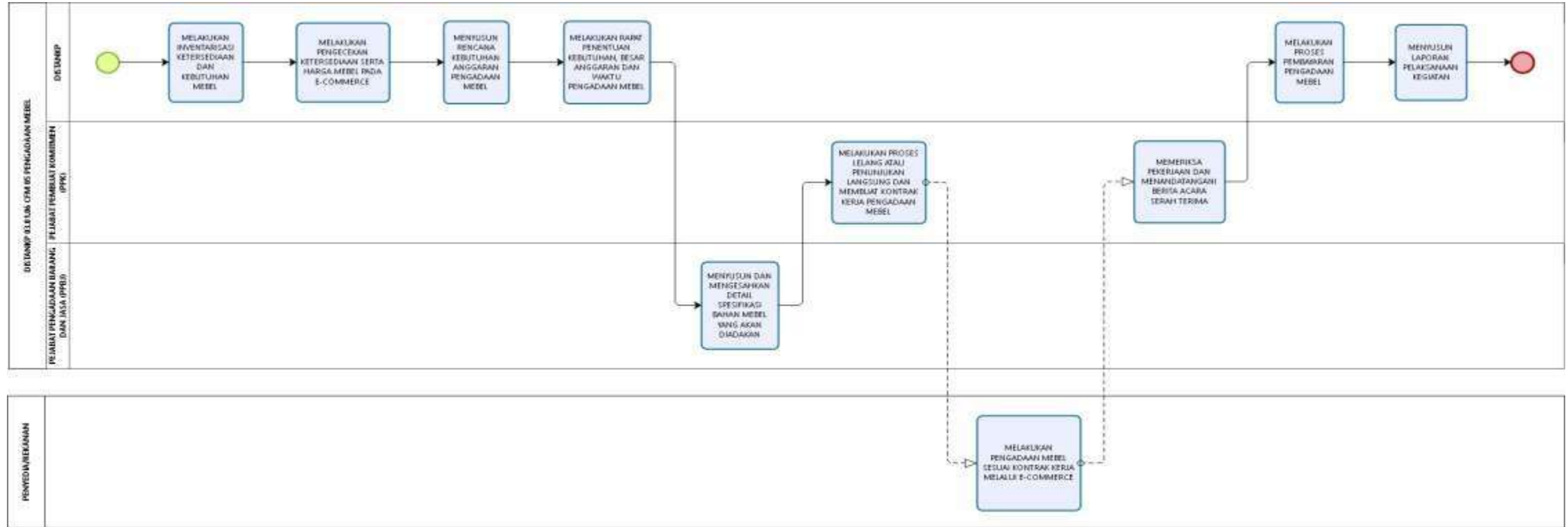
03.01.06.03



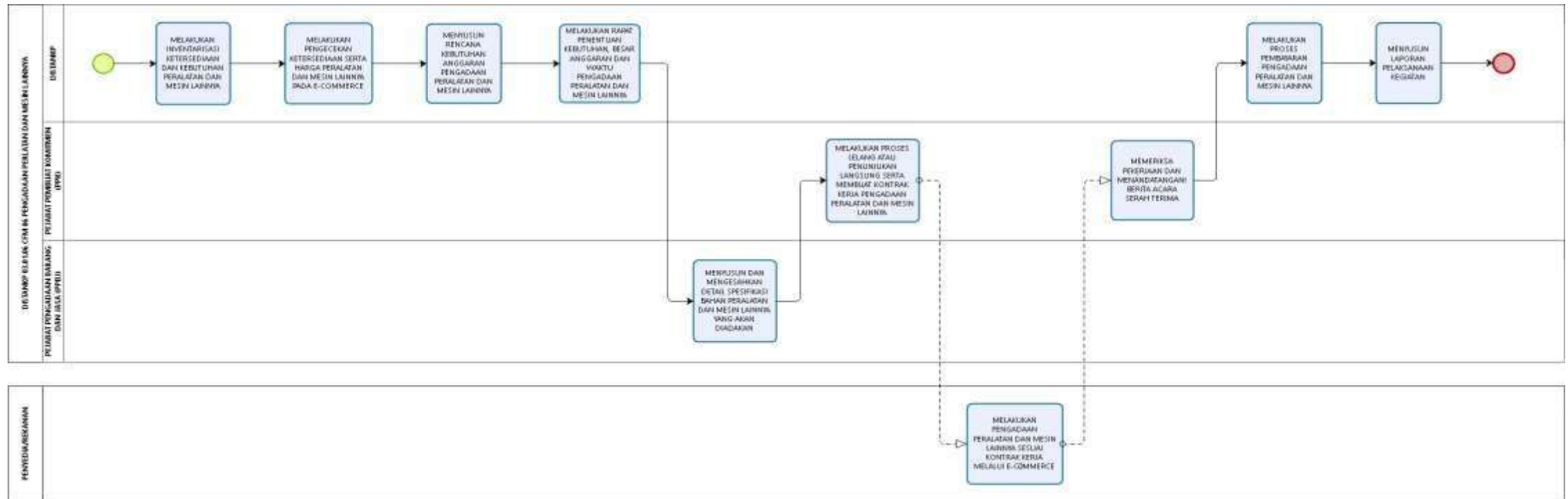
03.01.06.04



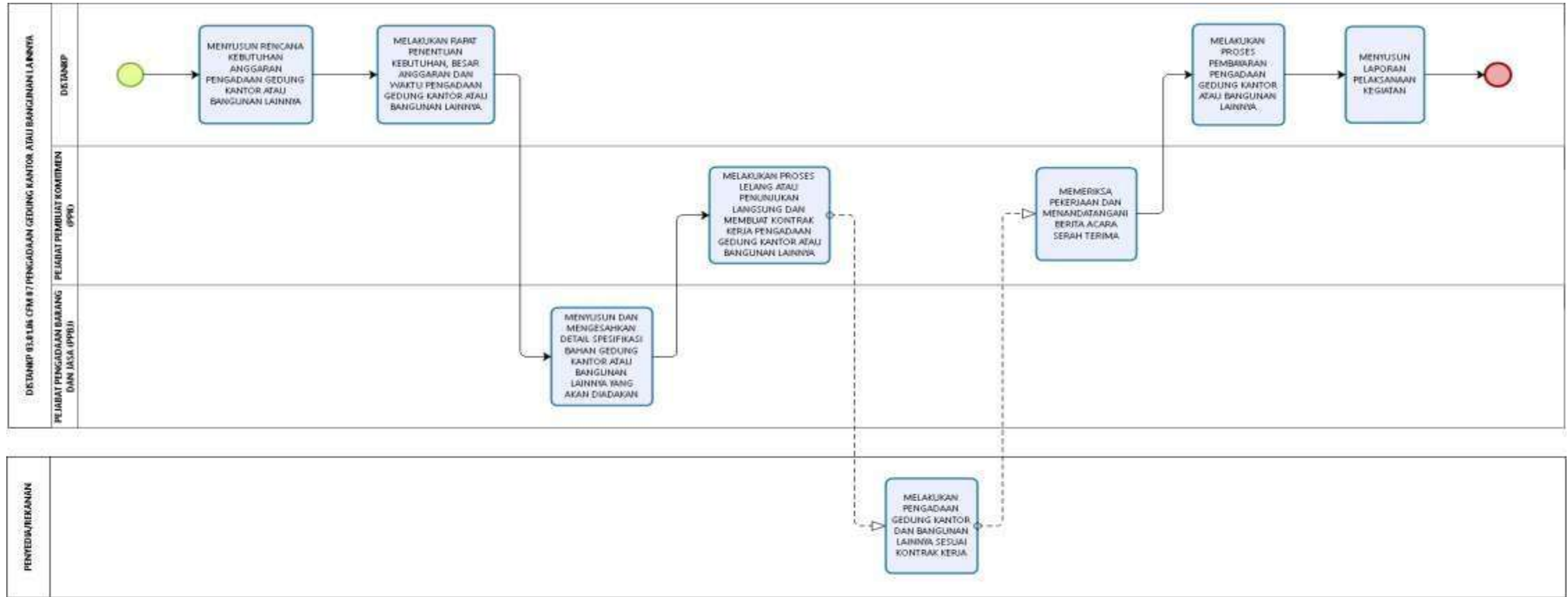
03.01.06.05



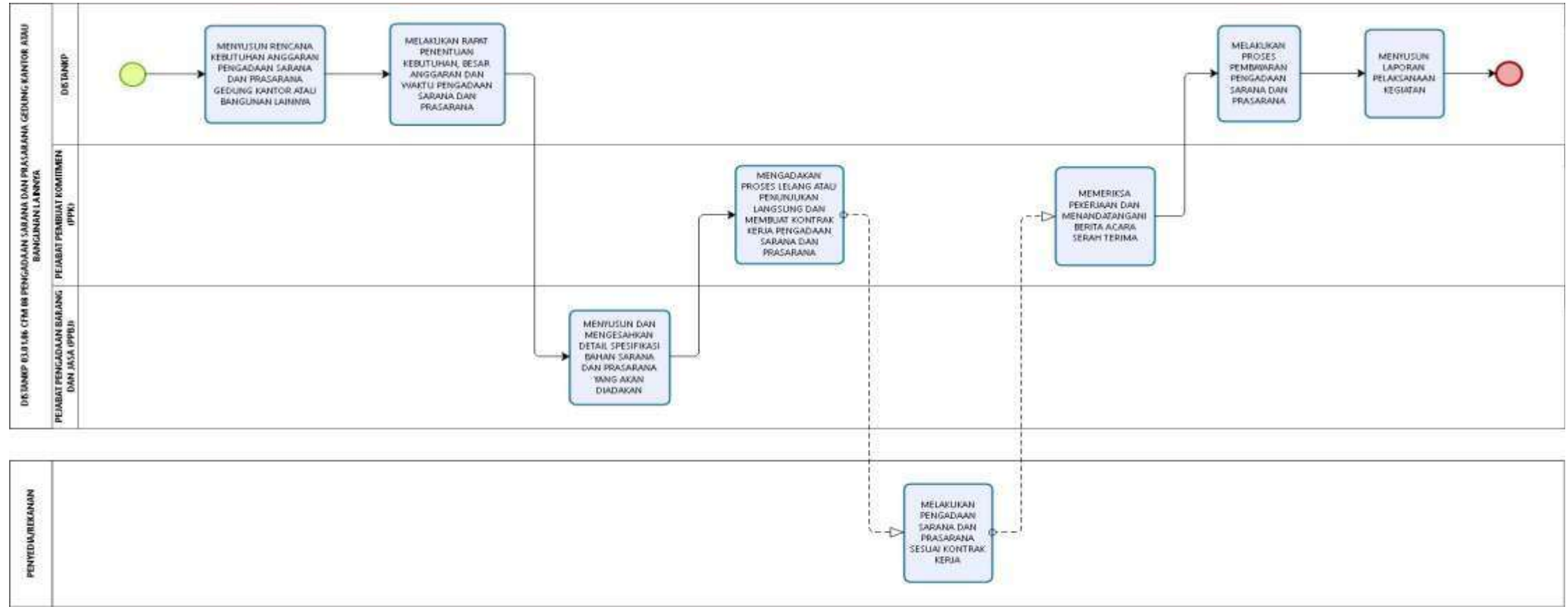
03.01.06.06



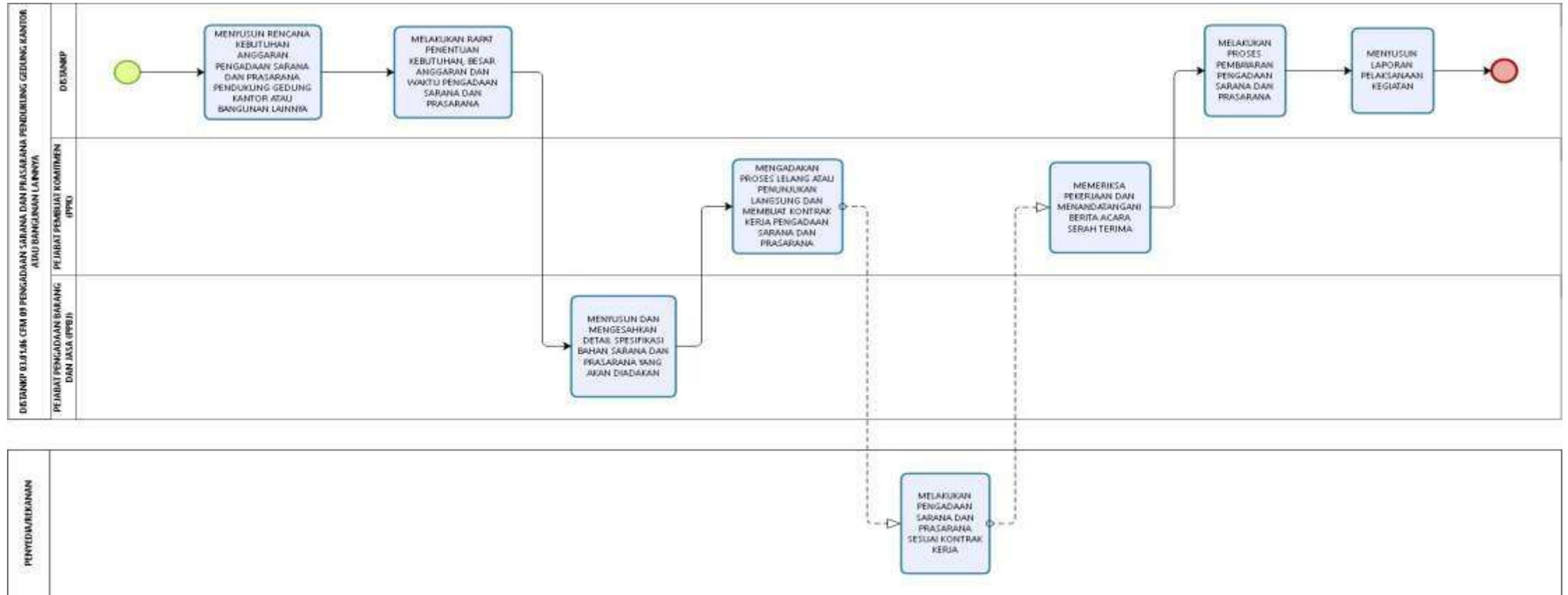
03.01.06.07







03.01.06.08

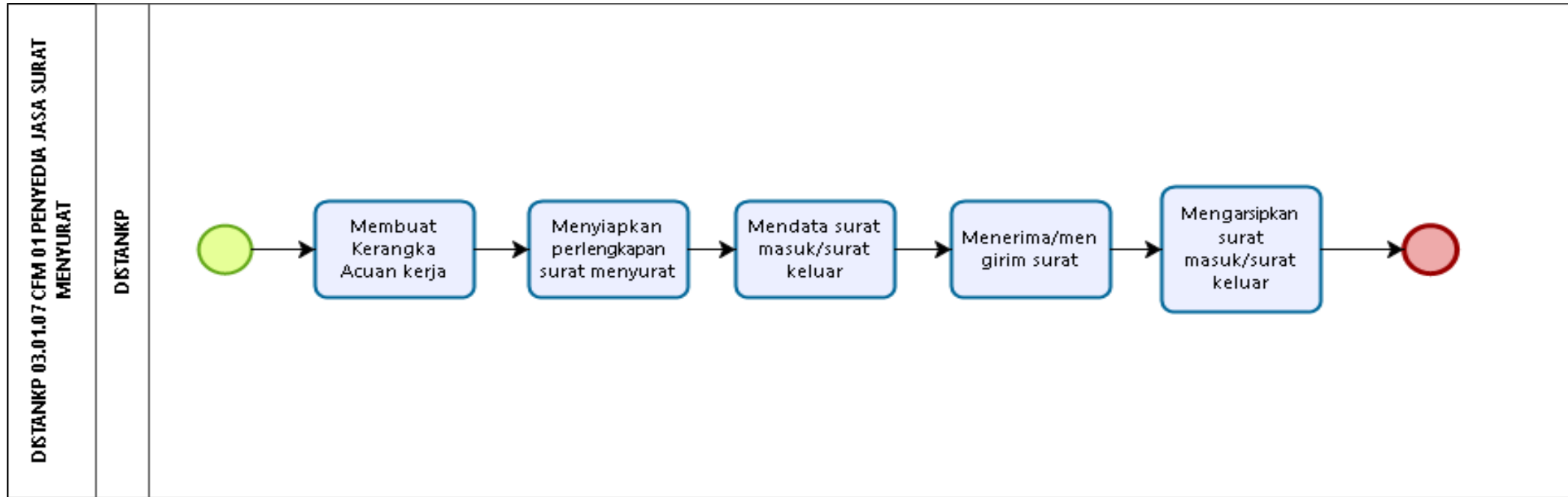


03.01.06.09

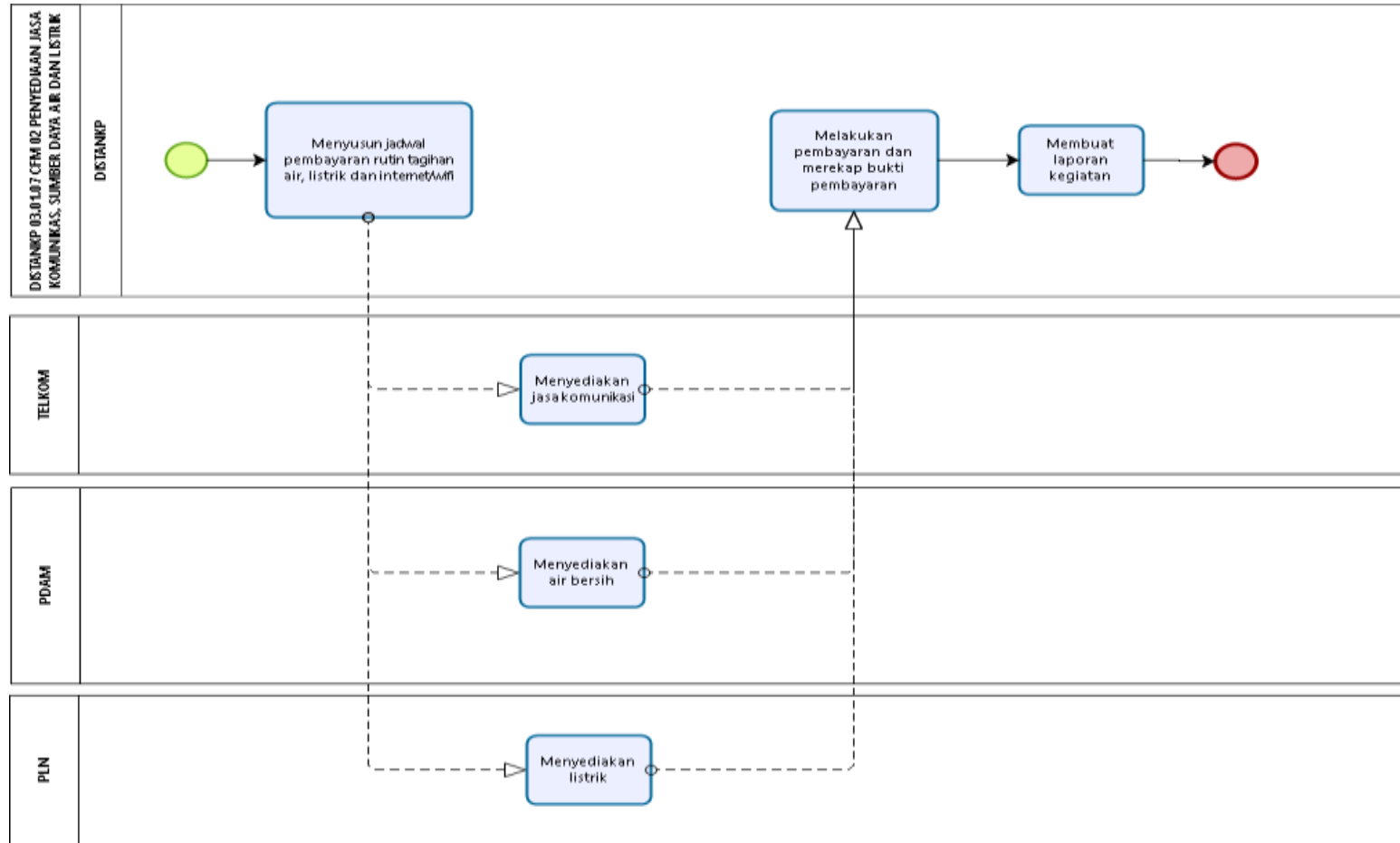


SUBKEG03.01.07

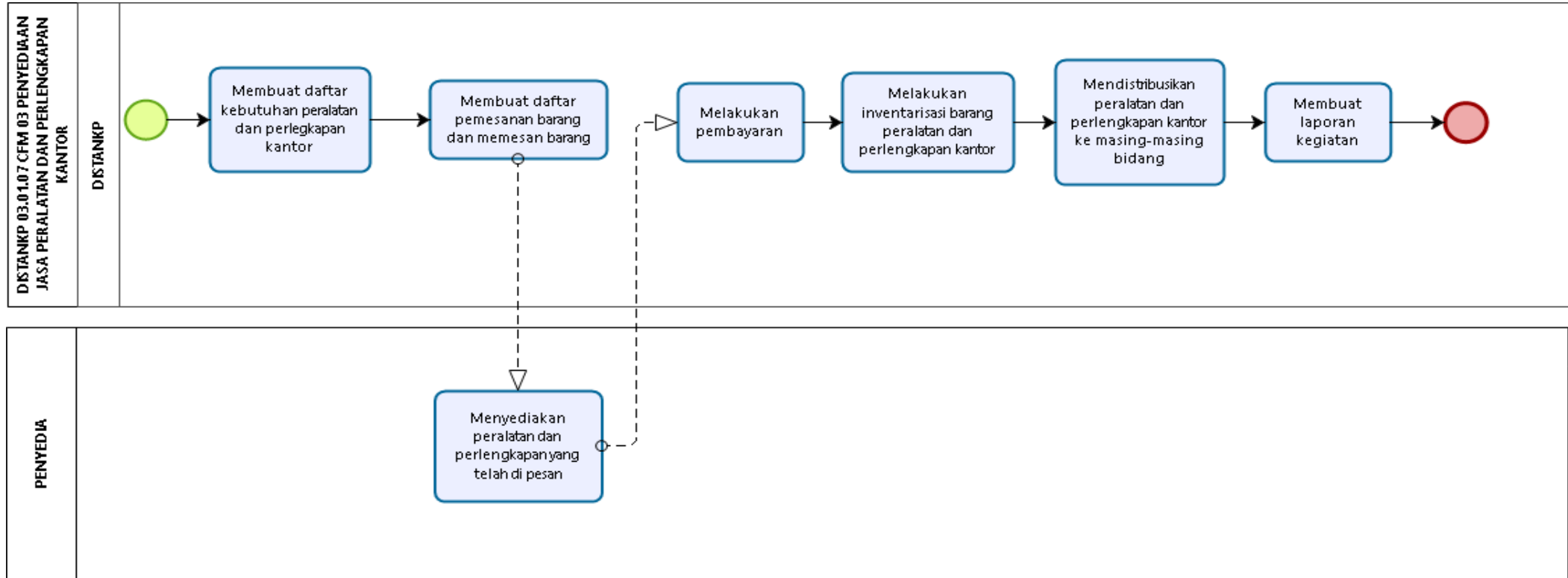
DISTANKP 03.01.07 PENYEDIAAN JASA PENUNJANGBURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	 <p>DISTANKP 03.01.07.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</p>	 <p>DISTANKP 03.01.07.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK</p>	 <p>DISTANKP 03.01.07.03 PENYEDIAAN JASA PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR</p>	 <p>DISTANKP 03.01.07. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR04</p>
---	--	--	---	---



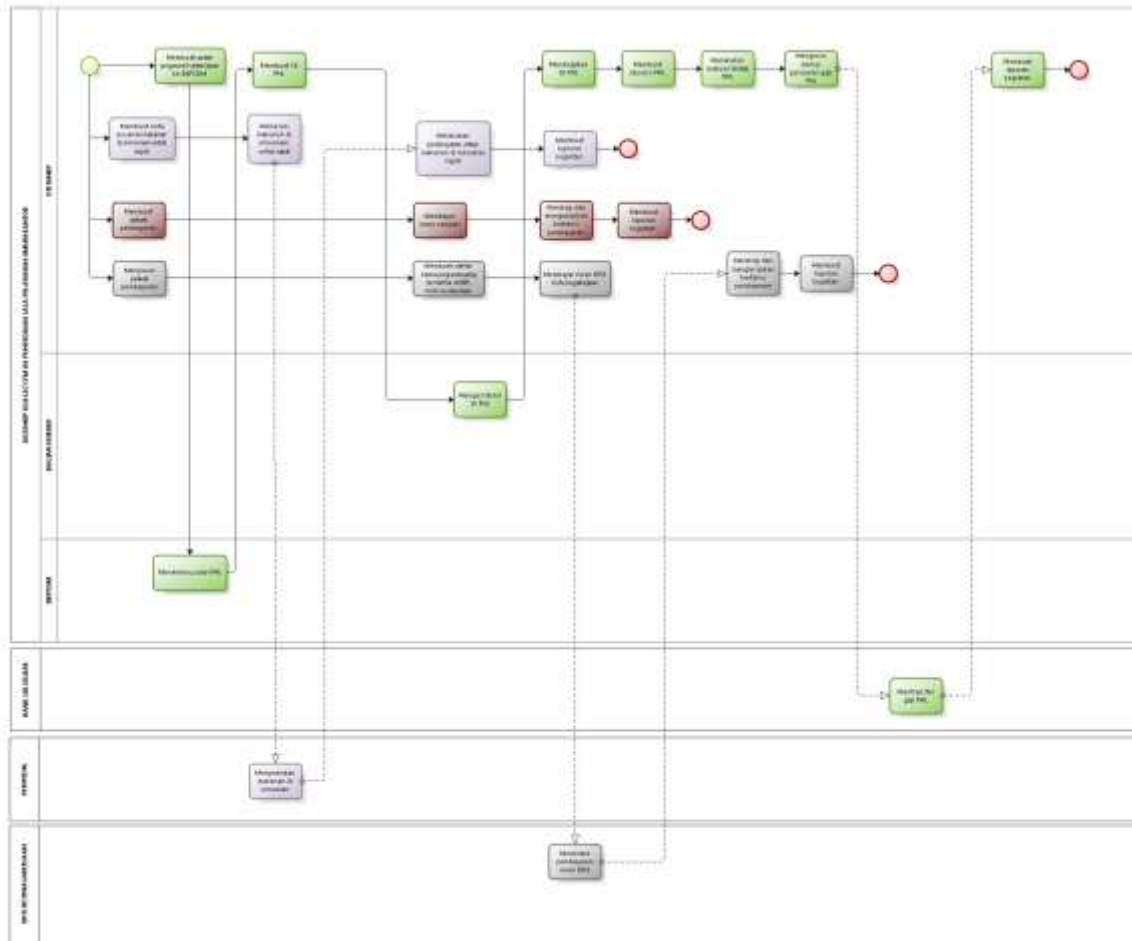
03.01.07.02













03.01.07.03



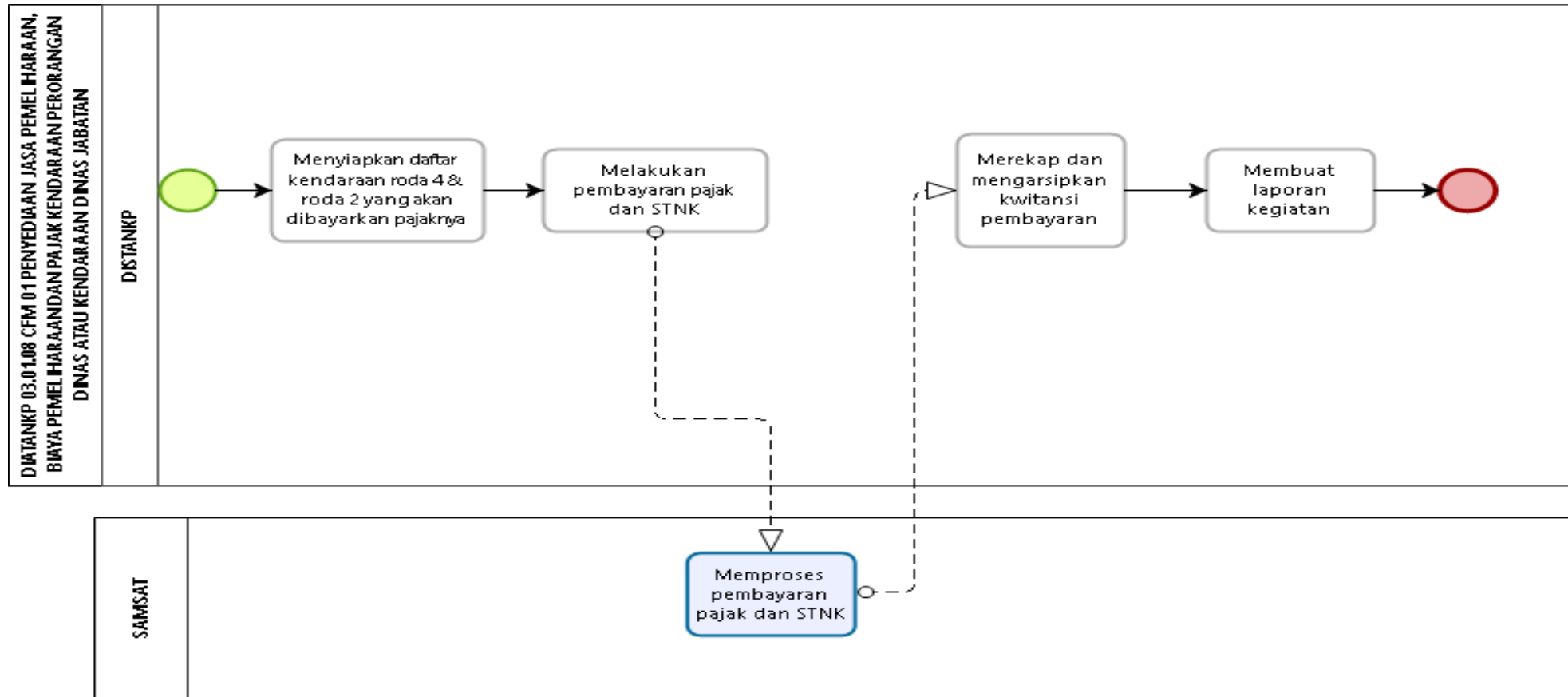
03.01.07.04



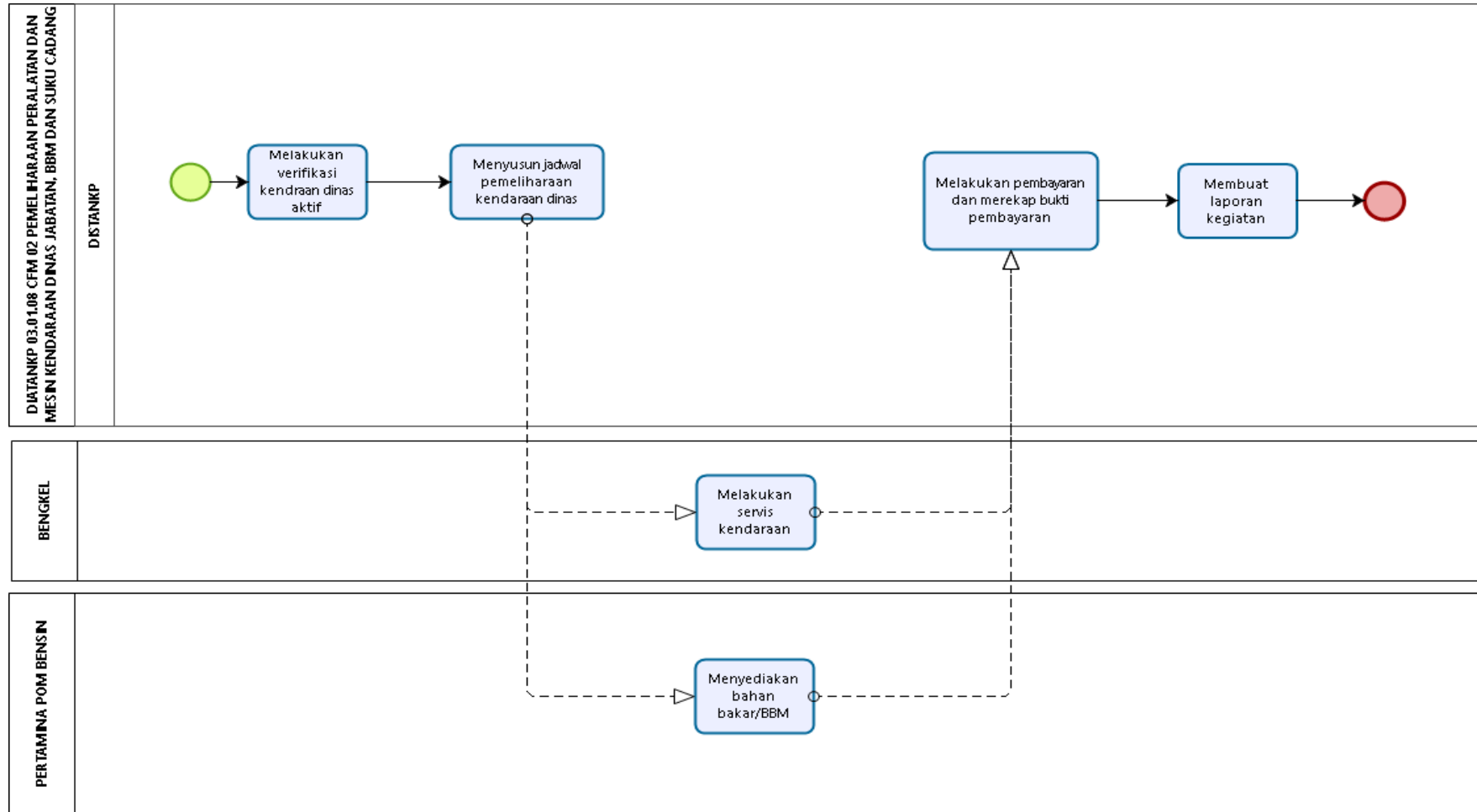
SUBKEG03.01.08

DISTANKP 03.01.08 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	DISTANKP 03.01.08.01 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN & PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS/KENDARAAN DINAS	DISTANKP 03.01.08.02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK & PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	DISTANKP 03.01.08.03 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN & PERIZINAN ALAT BESAR	DISTANKP 03.01.08.04 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN & PERIZINAN ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	DISTANKP 03.01.08.05 PEMELIHARAAN MEBEL
					
	DISTANKP 03.01.08.06 PEMELIHARAAN PERALATAN & MESIN LAINNYA	DISTANKP 03.01.08.07 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR & BANGUNAN LAINNYA	DISTANKP 03.01.08.08 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA & PRASARANA GEDUNG KANTOR/ BANGUNAN LAINNYA	DISTANKP 03.01.08.09 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA & PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR/ BANGUNAN LAINNYA	DISTANKP 03.01.08.10 PEMELIHARAAN/REHABILITASI TANAH

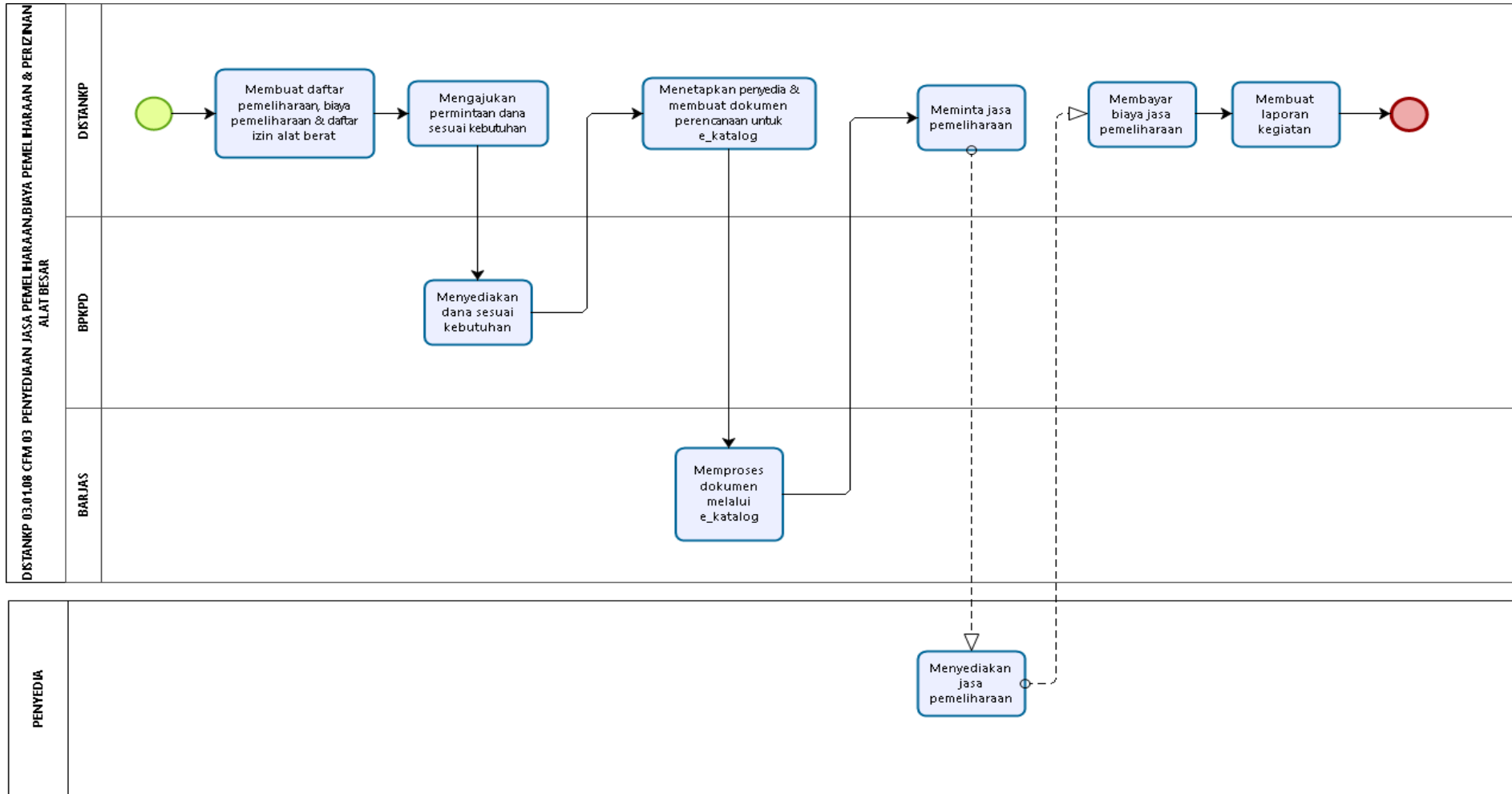
03.01.08.01

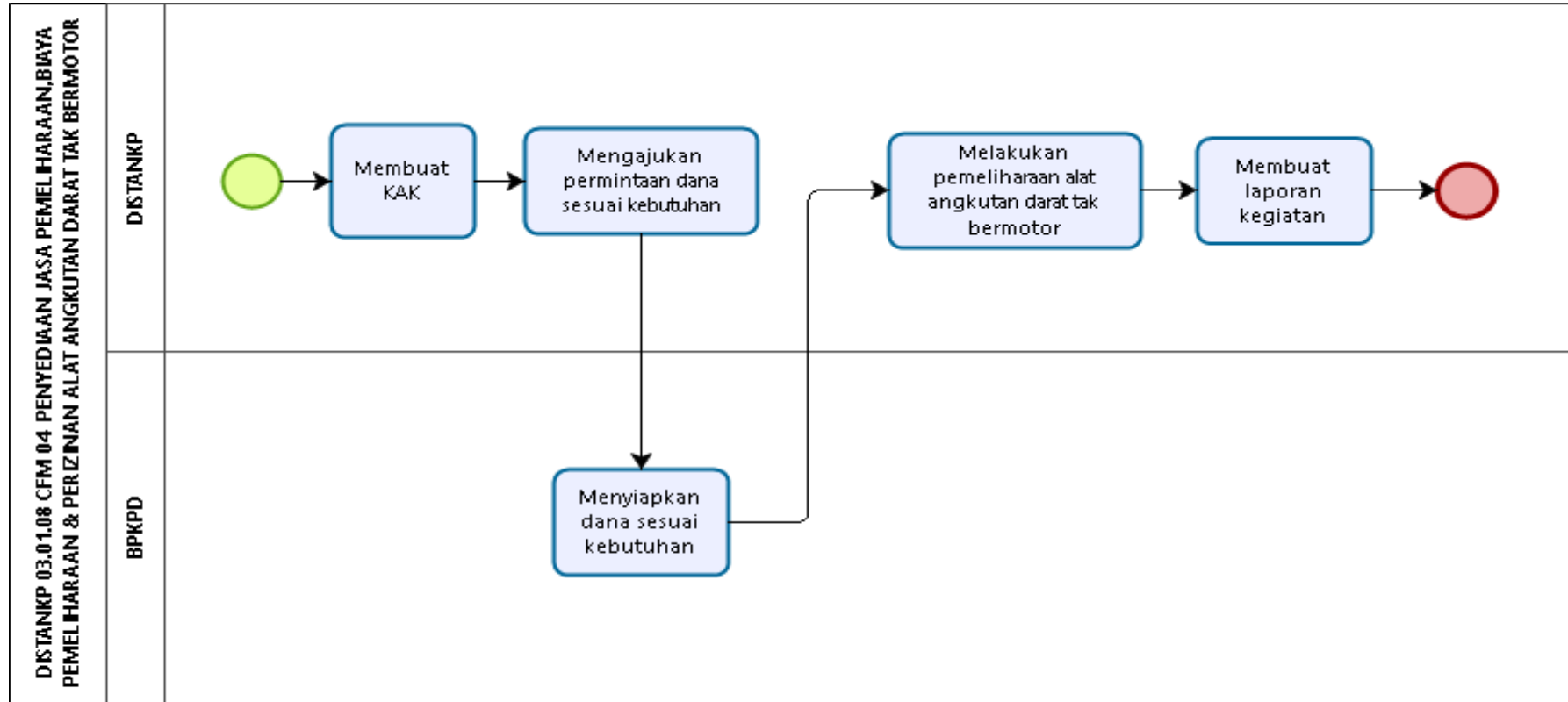


03.01.08.02

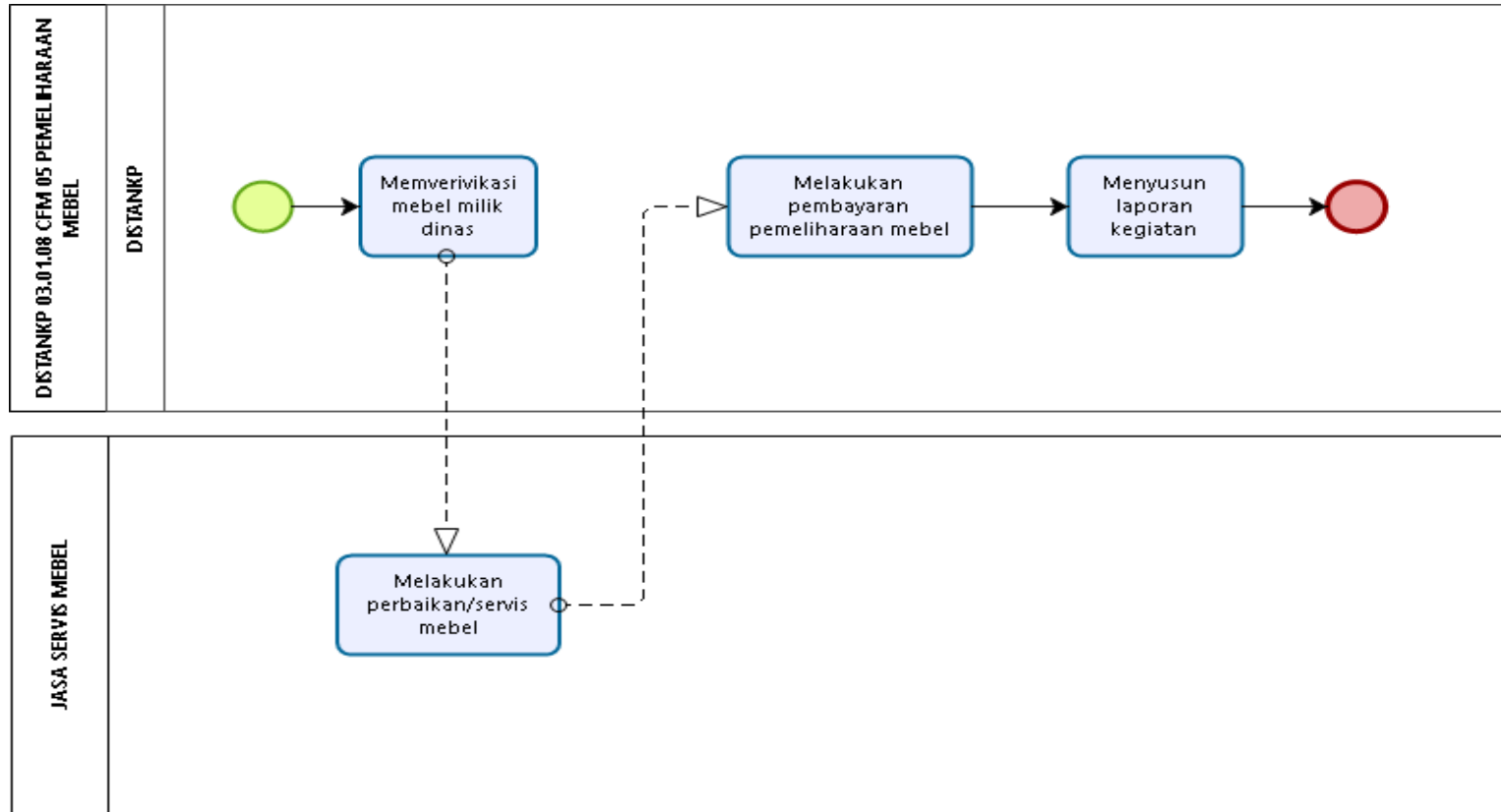


03.01.08.03

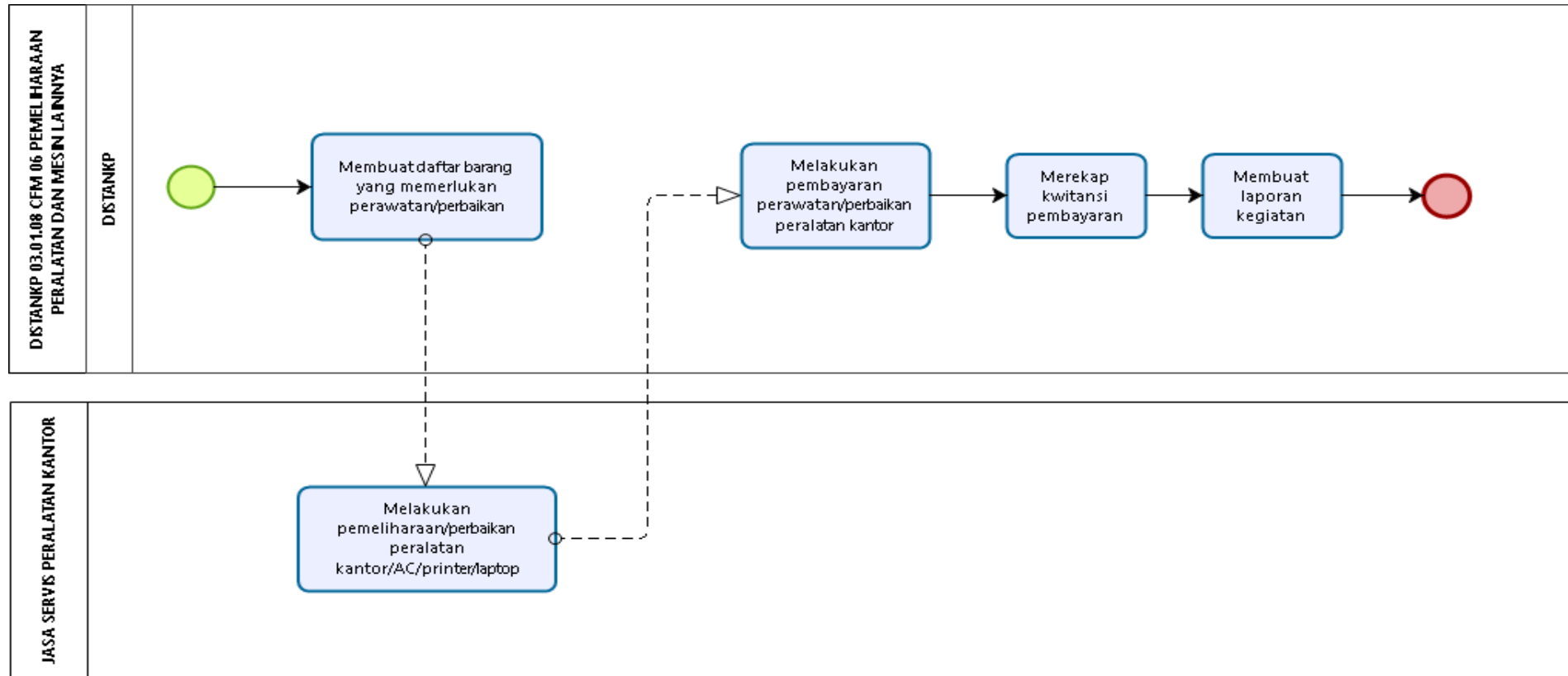




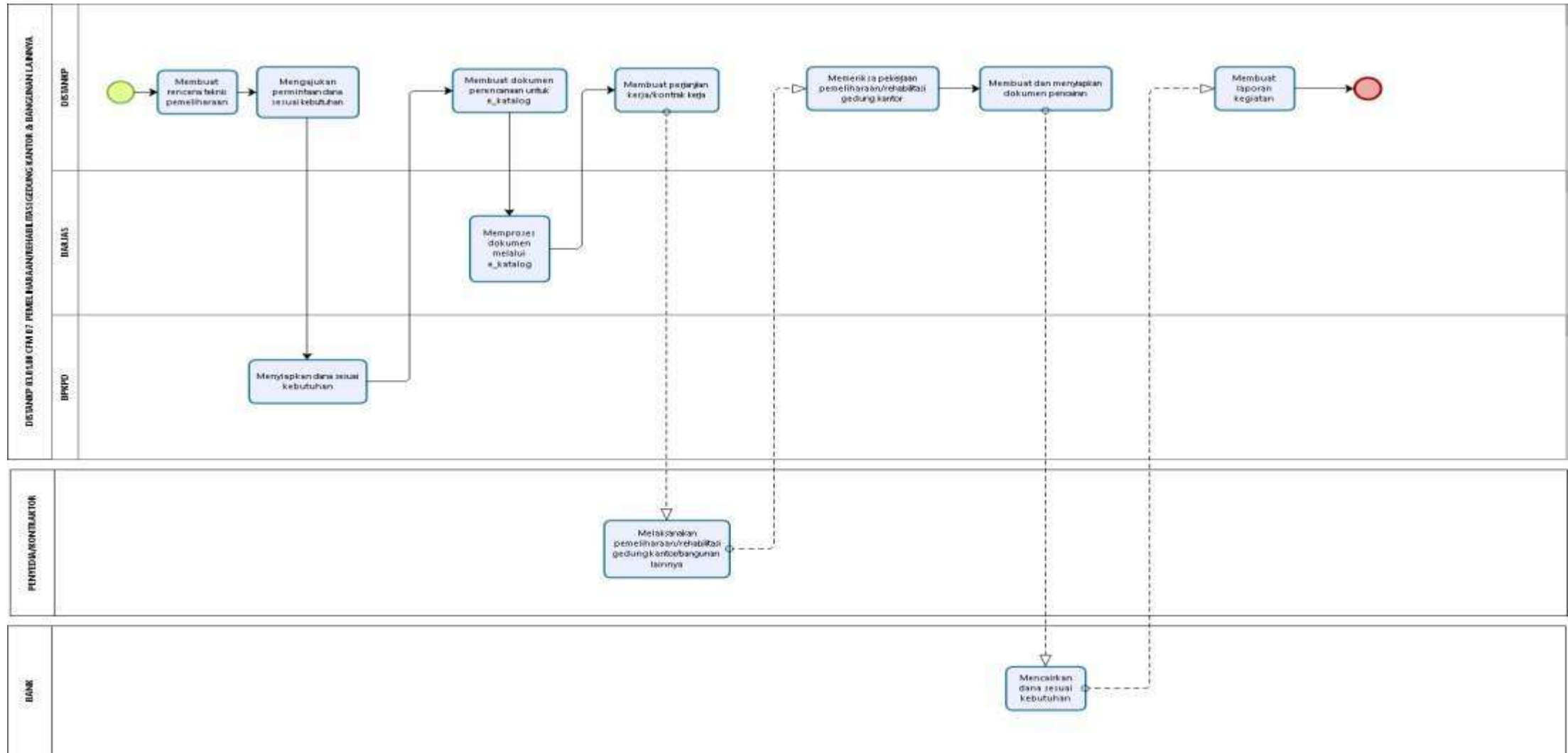
03.01.08.05



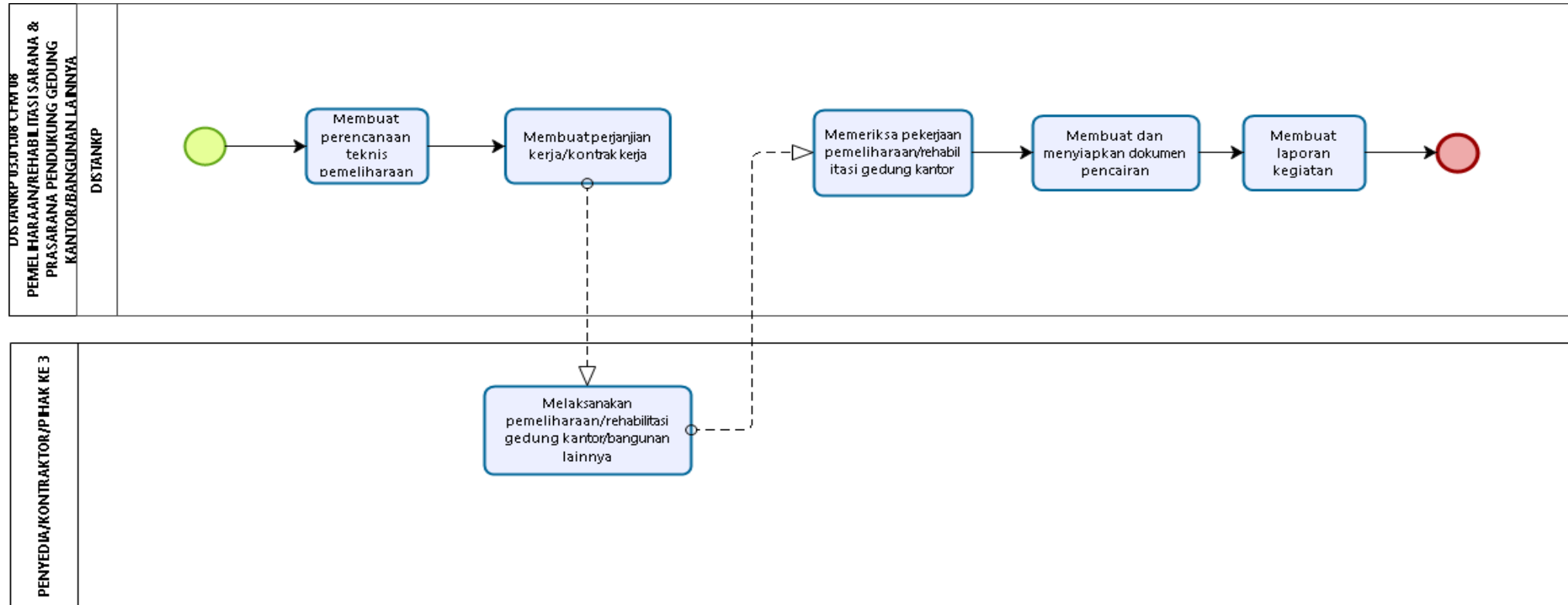
03.01.08.06



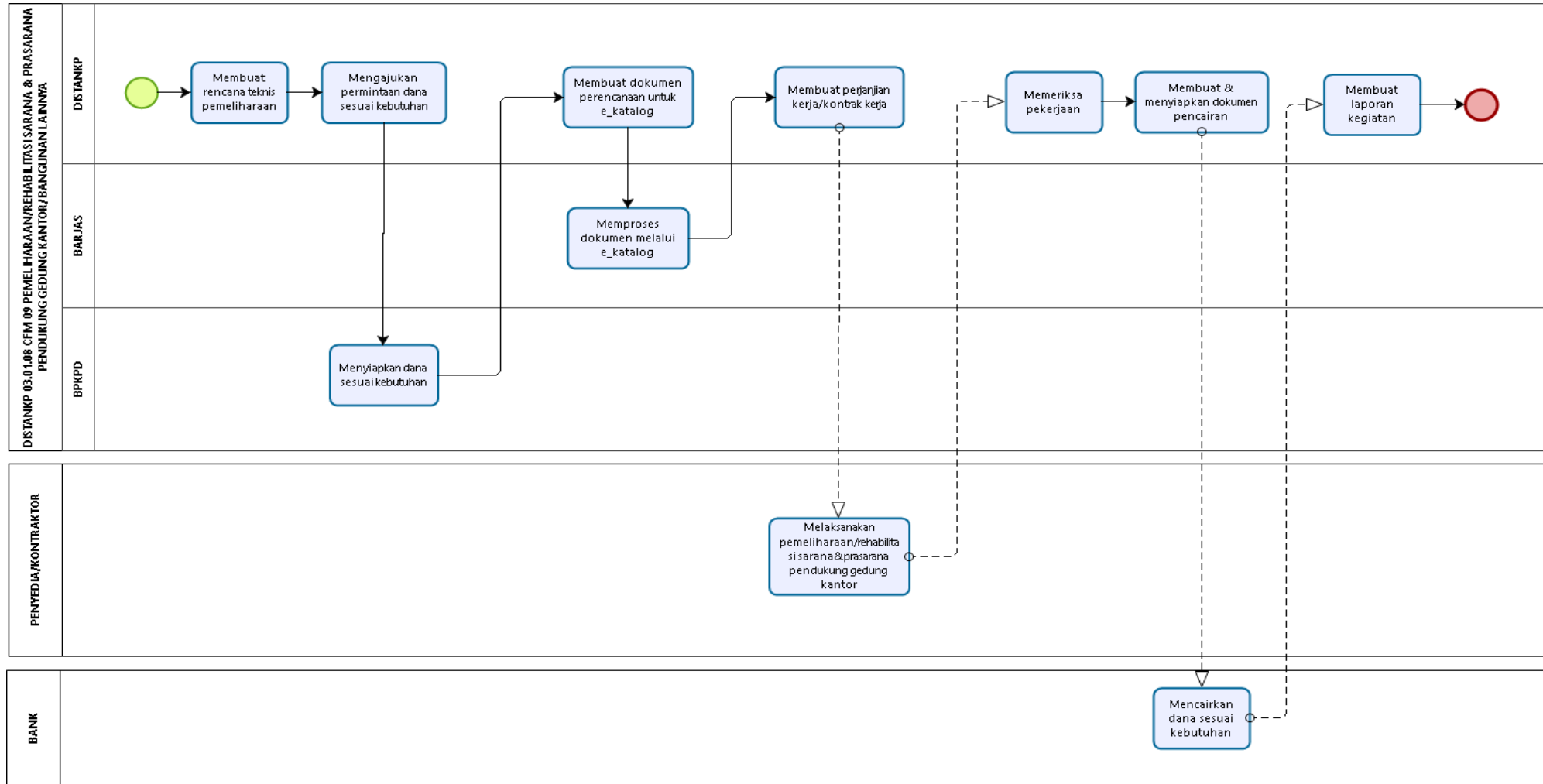
03.01.08.07



03.01.08.08



03.01.08.09



03.01.08.10

